

2025



Laporan Evaluasi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kutai Timur

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur
2026



EVALUASI RKPD

KABUPATEN KUTAI TIMUR 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen *Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025* ini dapat disusun dengan baik.

Dokumen evaluasi ini merupakan bagian penting dalam siklus perencanaan pembangunan daerah, yang berfungsi untuk menilai capaian kinerja pembangunan selama tahun berjalan, mengidentifikasi berbagai permasalahan dan tantangan, serta merumuskan rekomendasi perbaikan sebagai dasar penyusunan kebijakan pada periode berikutnya. Evaluasi RKPD Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada berbagai indikator makro pembangunan, seperti pertumbuhan ekonomi, struktur sektor, PDRB per kapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kemiskinan, ketimpangan, serta kondisi ketenagakerjaan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2025 secara umum tetap berjalan, meskipun dihadapkan pada sejumlah tantangan, terutama perlambatan pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh kontraksi sektor pertambangan sebagai sektor dominan. Di sisi lain, beberapa indikator sosial menunjukkan perkembangan yang positif, seperti peningkatan IPM dan penurunan tingkat kemiskinan. Namun demikian, masih terdapat sejumlah isu strategis yang perlu menjadi perhatian, antara lain peningkatan ketimpangan, tekanan pasar kerja, serta belum optimalnya diversifikasi ekonomi.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik melalui penyediaan data, dukungan teknis, maupun pemikiran yang konstruktif.

Akhirnya, kami berharap dokumen Evaluasi RKPD Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Kutai Timur, April 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.3.1 Maksud	3
1.3.2 Tujuan	3
1.4 Metode Evaluasi	3
1.5 Sistematika Dokumen Evaluasi RKPD	4
BAB 2 CAPAIAN MAKRO PEMBANGUNAN DAERAH	6
2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi	6
2.2 PDRB per Kapita.....	7
2.3 Indeks Pembangunan Manusia	8
2.4 Angka Kemiskinan.....	9
2.5 Indeks Gini.....	10
2.6 Tingkat Pengangguran Terbuka.....	11
BAB 3 EVALUASI KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	13
3.1 Realisasi Pendapatan Tahun 2025	13
3.1.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2025	13
3.1.2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025	14
3.1.3 Analisis Capaian dan Permasalahan Pendapatan Daerah	14
3.2 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun 2025	15
3.3 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan Tahun 2025.....	18
3.4 Analisis Struktur Fiskal Daerah Tahun 2025.....	20
3.5 Implikasi Kebijakan Keuangan Daerah terhadap Pembangunan Tahun 2025.....	20
BAB 4 PENGENDALIAN PELAKSANAAN RPJMD DALAM RKPD	22
4.1 Konsistensi Tujuan Pembangunan antara RKPD dengan RPJMD	22
4.2 Konsistensi Sasaran Pembangunan antara RKPD dengan RPJMD	24
4.3 Konsistensi Program antara RKPD dengan RPJMD	27
4.4 Konsistensi Indikator Kinerja antara RKPD dengan RPJMD	32
4.5 Konsistensi Target Kinerja antara RKPD dengan RPJMD.....	38
4.6 Konsistensi Pagu Anggaran antara RKPD dengan RPJMD	49

4.7	Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD per Perangkat Daerah	55
BAB 5 PENGENDALIAN PELAKSANAAN RKPD TERHADAP APBD		123
5.1	Konsistensi Program antara RKPD dengan APBD	123
5.2	Konsistensi Kegiatan antara RKPD dengan APBD.....	127
5.3	Konsistensi Subkegiatan antara RKPD dengan APBD	130
5.4	Konsistensi Pagu Anggaran antara RKPD dengan APBD	137
BAB 6 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD		142
6.1	Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan	142
6.1.1	Analisis Capaian per Misi	152
6.1.2	Simpulan Umum.....	153
6.2	Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan pada Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat Daerah	154
6.2.1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	154
6.2.2	Dinas Kesehatan.....	158
6.2.3	RSUD Kudungga Sangatta	160
6.2.4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	162
6.2.5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	165
6.2.6	Satuan Polisi Pamong Praja	168
6.2.7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	169
6.2.8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	171
6.2.9	Dinas Sosial	172
6.2.10	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	174
6.2.11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	176
6.2.12	Dinas Ketahanan Pangan	178
6.2.13	Dinas Pertanahan	181
6.2.14	Dinas Lingkungan Hidup	183
6.2.15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	188
6.2.16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	189
6.2.17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	191
6.2.18	Dinas Perhubungan	192
6.2.19	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	193
6.2.20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	195
6.2.21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	197
6.2.22	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	199
6.2.23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	200
6.2.24	Dinas Perikanan.....	201

6.2.25	Dinas Pariwisata	204
6.2.26	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	205
6.2.27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	207
6.2.28	Sekretariat Daerah	208
6.2.29	Sekretariat DPRD	210
6.2.30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	211
6.2.31	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	212
6.2.32	Badan Pendapatan Daerah.....	213
6.2.33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	214
6.2.34	Badan Riset dan Inovasi Daerah	215
6.2.35	Inspektorat	216
6.2.36	Kantor Camat Sangatta Selatan	217
6.2.37	Kantor Camat Sangatta Utara	219
6.2.38	Kantor Camat Bengalon	221
6.2.39	Kantor Camat Kaliorang	222
6.2.40	Kantor Camat Muara Wahau	224
6.2.41	Kantor Camat Muara Wahau	225
6.2.42	Kantor Camat Kombeng	227
6.2.43	Kantor Camat Muara Ancalong.....	229
6.2.44	Kantor Camat Batu Ampar	230
6.2.45	Kantor Camat Telen	232
6.2.46	Kantor Camat Teluk Pandan	236
6.2.47	Kantor Camat Rantau Pulung	237
6.2.48	Kantor Camat Sangkulirang.....	239
6.2.49	Kantor Camat Muara Bengkal	240
6.2.50	Kantor Camat Long Mesangat	242
6.2.51	Kantor Camat Karanganyar	243
6.2.52	Kantor Camat Sandaran	245
6.2.53	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	247
BAB 7 FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT		251
7.1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	251
7.2	Dinas Kesehatan	253
7.2.1	RSUD Kudungga	254
7.3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	255
7.4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	258
7.5	Satuan Polisi Pamong Praja	259

7.6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	260
7.7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	261
7.8	Dinas Sosial.....	262
7.9	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	264
7.10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	266
7.11	Dinas Ketahanan Pangan	268
7.12	Dinas Perhubungan	270
7.13	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik.....	272
7.14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	273
7.15	Dinas Perikanan	274
7.16	Dinas Pariwisata.....	276
7.17	Dinas Perkebunan	277
7.18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	280
7.19	Sekretariat Daerah	283
7.20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	286
7.21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	287
7.22	Dinas Pertanahan	289
7.23	Dinas Lingkungan Hidup	291
7.23.1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	294
7.24	Badan Pendapatan Daerah	294
7.25	Badan Riset dan Inovasi Daerah	295
7.26	Inspektorat Daerah	295
7.27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	296
7.28	Sekretariat DPRD.....	298
7.29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.....	300
7.30	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	302
7.31	Sekretariat Daerah	304
BAB 8	RUMUSAN PERMASALAHAN HASIL EVALUASI.....	308
8.1	Rumusan Permasalahan Pembangunan Daerah	308
8.2	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	310
8.2.1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	310
8.2.2	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	311
8.2.3	Urusan Pemerintahan Pilihan	313
8.2.4	Unsur Penunjang dan Penyelenggaraan Pemerintahan	314
BAB 9	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	316

9.1	Kesimpulan	316
9.2	Rekomendasi.....	317

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Timur (2021–2025)	6
Tabel 2.2 PDRB per Kapita Kabupaten Kutai Timur (2021–2025)	7
Tabel 2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kutai Timur (2021–2025)	8
Tabel 2.4 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin	10
Tabel 2.5 Indeks Gini Kabupaten Kutai Timur (2024–2025)	10
Tabel 2.6 Ketenagakerjaan Kabupaten Kutai Timur (2024–2025).....	11
Tabel 3.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025	14
Tabel 3.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	16
Tabel 3.3 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025	18
Tabel 4.1 Perbandingan Tujuan Pembangunan pada RPJMD dan RKPD Tahun 2025	23
Tabel 4.2 Perbandingan Sasaran Pembangunan pada RPJMD dan RKPD Tahun 2025	25
Tabel 4.3 Konsistensi Jumlah Program antara RPJMD dan RKPD Tahun 2025 per Perangkat Daerah	28
Tabel 4.4 Konsistensi Indikator Kinerja antara RKPD dengan RPJMD Tahun 2025	33
Tabel 4.5 Perbandingan Target Kinerja RPJMD dan RKPD Tahun 2025.....	38
Tabel 4.6 Konsistensi Pagu Anggaran antara RPJMD dengan RKPD Tahun 2025**	49
Tabel 4.7 Indikator, Target, dan Pagu per OPD pada RPJMD dan RKPD	56
Tabel 5.1 Konsistensi Program RKPD dengan APBD Tahun Anggaran 2025.....	124
Tabel 5.2 Konsistensi Kegiatan RKPD dengan APBD Tahun Anggaran 2025	127
Tabel 5.3 Konsistensi Sub Kegiatan RKPD dengan APBD	130
Tabel 5.4 Konsistensi Target Kinerja RKPD dengan APBD Tahun Anggaran 2025	134
Tabel 5.5 Konsistensi Pagu Anggaran RKPD dengan APBD Tahun Anggaran 2025	137
Tabel 6.1 Interval Nilai dan Kriteria Penilaian	143
Tabel 6.2 Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Misi 1: Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, dan Bersatu.....	143
Tabel 6.3 Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Misi 2: Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat berbasis Sektor Pertanian	145
Tabel 6.4 Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Misi 3: Mewujudkan Pelayanan Dasar Masyarakat Secara Proporsional dan Merata	147
Tabel 6.5 Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Misi 4: Mewujudkan Pemerintahan yang Partisipatif berbasis Penegakan Hukum dan Teknologi Informasi.....	149
Tabel 6.6 Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Misi 5: Mewujudkan Sinergitas Pengembangan Wilayah dan Integrasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	152
Tabel 6.7 Capaian Indikator Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	154
Tabel 6.8 Capaian Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	155
Tabel 6.9 Capaian Indikator Keuangan Dinas Kesehatan	158
Tabel 6.10 Capaian Indikator Kinerja Dinas Kesehatan	159
Tabel 6.11 Capaian Indikator Keuangan RSUD Kudungga Sangatta	160
Tabel 6.12 Capaian Indikator Kinerja RSUD Kudungga Sangatta	161
Tabel 6.13 Capaian Indikator Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	162
Tabel 6.14 Capaian Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	163
Tabel 6.15 Capaian Indikator Keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	165
Tabel 6.16 Capaian Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ...	167
Tabel 6.17 Capaian Indikator Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja	168
Tabel 6.18 Capaian Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja.....	168
Tabel 6.19 Capaian Indikator Keuangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	169
Tabel 6.20 Capaian Indikator Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.....	170
Tabel 6.21 Capaian Indikator Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	171

Tabel 6.22 Capaian Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	172
Tabel 6.23 Capaian Indikator Keuangan Dinas Sosial	172
Tabel 6.24 Capaian Indikator Kinerja Dinas Sosial	173
Tabel 6.25 Capaian Indikator Keuangan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	175
Tabel 6.26 Capaian Indikator Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	175
Tabel 6.27 Capaian Indikator Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	176
Tabel 6.28 Capaian Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	177
Tabel 6.29 Capaian Indikator Keuangan Dinas Ketahanan Pangan	178
Tabel 6.30 Capaian Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan	179
Tabel 6.31 Capaian Indikator Keuangan Dinas Pertanian	181
Tabel 6.32 Capaian Indikator Kinerja Dinas Pertanian	182
Tabel 6.33 Capaian Indikator Keuangan Dinas Lingkungan Hidup	183
Tabel 6.34 Capaian Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup	185
Tabel 6.35 Capaian Indikator Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	188
Tabel 6.36 Capaian Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	188
Tabel 6.37 Capaian Indikator Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	189
Tabel 6.38 Capaian Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	190
Tabel 6.39 Capaian Indikator Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	191
Tabel 6.40 Capaian Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	191
Tabel 6.41 Capaian Indikator Keuangan Dinas Perhubungan	192
Tabel 6.42 Capaian Indikator Kinerja Dinas Perhubungan	193
Tabel 6.43 Capaian Indikator Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	193
Tabel 6.44 Capaian Indikator Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	194
Tabel 6.45 Capaian Indikator Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	195
Tabel 6.46 Capaian Indikator Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	196
Tabel 6.47 Capaian Indikator Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	197
Tabel 6.48 Capaian Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	198
Tabel 6.49 Capaian Indikator Keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga	199
Tabel 6.50 Capaian Indikator Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga	199
Tabel 6.51 Capaian Indikator Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	200
Tabel 6.52 Capaian Indikator Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	201
Tabel 6.53 Capaian Indikator Keuangan Dinas Perikanan	202
Tabel 6.54 Capaian Indikator Kinerja Dinas Perikanan	202
Tabel 6.55 Capaian Indikator Keuangan Dinas Pariwisata	204
Tabel 6.56 Capaian Indikator Kinerja Dinas Pariwisata	204
Tabel 6.57 Capaian Indikator Keuangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	205
Tabel 6.58 Capaian Indikator Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	206
Tabel 6.59 Capaian Indikator Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	207
Tabel 6.60 Capaian Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan	207
Tabel 6.61 Capaian Indikator Keuangan Sekretariat Daerah	209
Tabel 6.62 Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah	209
Tabel 6.63 Capaian Indikator Keuangan Sekretariat DPRD	210
Tabel 6.64 Capaian Indikator Kinerja Sekretariat DPRD	211

Tabel 6.65 Capaian Indikator Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	211
Tabel 6.66 Capaian Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	212
Tabel 6.67 Capaian Indikator Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	212
Tabel 6.68 Capaian Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.....	213
Tabel 6.69 Capaian Indikator Keuangan Badan Pendapatan Daerah	213
Tabel 6.70 Capaian Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah	214
Tabel 6.71 Capaian Indikator Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	214
Tabel 6.72 Capaian Indikator Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	215
Tabel 6.73 Capaian Indikator Keuangan Badan Riset dan Inovasi Daerah	215
Tabel 6.74 Capaian Indikator Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah.....	216
Tabel 6.75 Capaian Indikator Keuangan Inspektorat	216
Tabel 6.76 Capaian Indikator Kinerja Inspektorat.....	217
Tabel 6.77 Capaian Indikator Keuangan Kantor Camat Sangatta Selatan	217
Tabel 6.78 Capaian Indikator Kinerja Kantor Camat Sangatta Selatan	218
Tabel 6.79 Capaian Indikator Keuangan Kantor Camat Sangatta Utara.....	219
Tabel 6.80 Capaian Indikator Kinerja Kantor Camat Sangatta Utara	220
Tabel 6.81 Capaian Indikator Keuangan Kantor Camat Bengalon	221
Tabel 6.82 Capaian Indikator Kinerja Kantor Camat Bengalon.....	221
Tabel 6.83 Capaian Indikator Keuangan Kantor Camat Kaliorang	223
Tabel 6.84 Capaian Indikator Kinerja Kantor Camat Kaliorang.....	223
Tabel 6.85 Capaian Indikator Keuangan Kantor Camat Muara Wahau	224
Tabel 6.86 Capaian Indikator Kinerja Kantor Camat Muara Wahau	225
Tabel 6.87 Capaian Indikator Keuangan Kantor Camat Muara Wahau	226
Tabel 6.88 Capaian Indikator Kinerja Kantor Camat Muara Wahau	226
Tabel 6.89 Capaian Indikator Keuangan Kantor Camat Kombeng	227
Tabel 6.90 Capaian Indikator Kinerja Kantor Camat Kombeng	228
Tabel 6.91 Capaian Indikator Keuangan Kantor Camat Muara Ancalong.....	229
Tabel 6.92 Capaian Indikator Kinerja Kantor Camat Muara Ancalong	229
Tabel 6.93 Capaian Indikator Keuangan Kantor Camat Batu Ampar	230
Tabel 6.94 Capaian Indikator Kinerja Kantor Camat Batu Ampar	231
Tabel 6.95 Capaian Indikator Keuangan Kantor Camat Telen	232
Tabel 6.96 Capaian Indikator Kinerja Kantor Camat Telen	232
Tabel 6.97 Kantor Camat Busang.....	233
Tabel 6.98 Capaian Indikator Keuangan Kantor Camat Busang	234
Tabel 6.99 Capaian Indikator Kinerja Kantor Camat Busang.....	234
Tabel 6.100 Capaian Indikator Keuangan Kantor Camat Teluk Pandan	236
Tabel 6.101 Capaian Indikator Kinerja Kantor Camat Teluk Pandan	236
Tabel 6.102 Capaian Indikator Keuangan Kantor Camat Rantau Pulung	237
Tabel 6.103 Capaian Indikator Kinerja Kantor Camat Rantau Pulung.....	238
Tabel 6.104 Capaian Indikator Keuangan Kantor Camat Sangkulirang	239
Tabel 6.105 Capaian Indikator Kinerja Kantor Camat Sangkulirang	239
Tabel 6.106 Capaian Indikator Keuangan Kantor Camat Muara Bengkal	240
Tabel 6.107 Capaian Indikator Kinerja Kantor Camat Muara Bengkal.....	241
Tabel 6.108 Capaian Indikator Keuangan Kantor Camat Long Mesangat.....	242
Tabel 6.109 Capaian Indikator Kinerja Kantor Camat Long Mesangat	242
Tabel 6.110 Capaian Indikator Keuangan Kantor Camat Karangan	244
Tabel 6.111 Capaian Indikator Kinerja Kantor Camat Karangan	244
Tabel 6.112 Capaian Indikator Keuangan Kantor Camat Sandaran	245
Tabel 6.113 Capaian Indikator Kinerja Kantor Camat Sandaran	246

Tabel 6.114 Capaian Indikator Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	247
Tabel 6.115 Capaian Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	248
Tabel 7.1 Faktor Pendorong, Penghambat, dan Permasalahan Realisasi Anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	251
Tabel 7.2 Faktor Pendorong, Penghambat, dan Permasalahan Realisasi Anggaran pada Dinas Kesehatan	253
Tabel 7.3 Faktor Pendorong, Penghambat, dan Permasalahan Realisasi Anggaran pada RSUD Kudungga	254
Tabel 7.4 Faktor Pendorong, Penghambat, dan Permasalahan Realisasi Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	255
Tabel 7.5 Faktor Pendorong, Penghambat, dan Permasalahan Realisasi Anggaran pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	258
Tabel 7.6 Faktor Pendorong, Penghambat, dan Permasalahan Realisasi Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja	259
Tabel 7.7 Faktor Pendorong, Penghambat, dan Permasalahan Realisasi Anggaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	260
Tabel 7.8 Faktor Pendorong, Penghambat, dan Permasalahan Realisasi Anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	261
Tabel 7.9 Faktor Pendorong, Penghambat, dan Permasalahan Realisasi Anggaran pada Dinas Sosial	262
Tabel 7.10 Faktor Pendorong, Penghambat, dan Permasalahan Realisasi Anggaran pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.....	264
Tabel 7.11 Faktor Pendorong, Penghambat, dan Permasalahan Realisasi Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	266
Tabel 7.12 Faktor Pendorong, Penghambat, dan Permasalahan Realisasi Anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan	268
Tabel 7.13 Faktor Pendorong, Penghambat, dan Permasalahan Realisasi Anggaran pada Dinas Perhubungan	270
Tabel 7.14 Faktor Pendorong, Penghambat, dan Permasalahan Realisasi Anggaran pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik.....	272
Tabel 7.15 Faktor Pendorong, Penghambat, dan Permasalahan Realisasi Anggaran pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	274
Tabel 7.16 Faktor Pendorong, Penghambat, dan Permasalahan Realisasi Anggaran pada Dinas Perikanan	274
Tabel 7.17 Faktor Pendorong, Penghambat, dan Permasalahan Realisasi Anggaran pada Dinas Pariwisata	276
Tabel 7.18 Faktor Pendorong, Penghambat, dan Permasalahan Realisasi Anggaran pada Dinas Perkebunan	277
Tabel 7.19 Faktor Pendorong, Penghambat, dan Permasalahan Realisasi Anggaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	281
Tabel 7.20 Faktor Pendorong, Penghambat, dan Permasalahan Realisasi Anggaran pada Sekretariat Daerah	283
Tabel 7.21 Faktor Pendorong, Penghambat, dan Permasalahan Realisasi Anggaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	286
Tabel 7.22 Faktor Pendorong, Penghambat, dan Permasalahan Realisasi Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	287
Tabel 7.23 Faktor Pendorong, Penghambat, dan Permasalahan Realisasi Anggaran pada Dinas Pertanahan.....	289
Tabel 7.24 Faktor Pendorong, Penghambat, dan Permasalahan Realisasi Anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup	291

Tabel 7.25 Faktor Pendorong, Penghambat, dan Permasalahan Realisasi Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.....	294
Tabel 7.26 Faktor Pendorong, Penghambat, dan Permasalahan Realisasi Anggaran pada Badan Pendapatan Daerah	294
Tabel 7.27 Faktor Pendorong, Penghambat, dan Permasalahan Realisasi Anggaran pada Badan Riset dan Inovasi Daerah.....	295
Tabel 7.28 Faktor Pendorong, Penghambat, dan Permasalahan Realisasi Anggaran pada Inspektorat Daerah	295
Tabel 7.29 Faktor Pendorong, Penghambat, dan Permasalahan Realisasi Anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	296
Tabel 7.30 Faktor Pendorong, Penghambat, dan Permasalahan Realisasi Anggaran pada Sekretariat DPRD	299
Tabel 7.31 Faktor Pendorong, Penghambat, dan Permasalahan Realisasi Anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	300
Tabel 7.32 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat, dan Permasalahan Realisasi Anggaran pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025	303
Tabel 7.33 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat, dan Permasalahan Realisasi Anggaran pada Sekretariat Daerah Tahun 2025.....	304
Tabel 8.1 Rumusan Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025	308
Tabel 8.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	310
Tabel 8.3 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	311
Tabel 8.4 Urusan Pemerintahan Pilihan	313
Tabel 8.5 Unsur Penunjang dan Penyelenggaraan Pemerintahan	314

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah merupakan proses pemantauan, supervisi, dan penilaian terhadap penyusunan serta pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah untuk memastikan bahwa target kinerja dan realisasi keuangan dapat dicapai secara ekonomis, efisien, dan efektif. Evaluasi RKPD menjadi instrumen krusial bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk memastikan kesinambungan antara target tahunan dengan realita di lapangan. Evaluasi diperlukan agar pemerintah daerah memperoleh gambaran yang utuh mengenai tingkat ketercapaian sasaran pembangunan, kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan, serta berbagai faktor yang memengaruhi hasil pembangunan daerah. Dengan adanya evaluasi yang dilaksanakan secara sistematis, pemerintah daerah dapat menilai apakah program, kegiatan, dan subkegiatan yang direncanakan benar-benar berjalan sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan. Evaluasi juga menjadi instrumen untuk memastikan bahwa penggunaan sumber daya pembangunan daerah memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat dan menjadi dasar penting bagi perbaikan tata kelola birokrasi dan ketepatan sasaran pembangunan di Kutai Timur.

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada dasarnya mencakup tiga ruang lingkup utama, yaitu pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Ketiga ruang lingkup tersebut menunjukkan bahwa pembangunan daerah harus dipantau sejak tahap perencanaan hingga tahap hasil. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tersusunnya dokumen perencanaan, tetapi juga dari konsistensi pelaksanaan dan ketercapaian indikator yang telah ditetapkan. Dalam konteks RKPD, evaluasi berfungsi untuk melihat apakah dokumen tahunan pembangunan daerah telah dijabarkan secara memadai ke dalam penganggaran, diimplementasikan secara tepat, dan menghasilkan capaian yang sesuai dengan sasaran. Pendekatan ini penting karena perencanaan pembangunan daerah harus mampu menjamin kesinambungan antara kebijakan, pelaksanaan, dan hasil. Apabila terdapat ketidaksesuaian pada salah satu tahapan tersebut, maka kualitas pembangunan daerah akan ikut terpengaruh. Karena itu, evaluasi RKPD menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari upaya peningkatan akuntabilitas dan efektivitas pemerintahan daerah.

Pengendalian terhadap perumusan kebijakan pembangunan daerah bertujuan untuk memastikan bahwa perencanaan disusun sesuai ketentuan perundang-undangan, konsisten dengan dokumen pembangunan jangka panjang dan jangka menengah, selaras antarsektor, serta sinkron dengan kebijakan pembangunan provinsi dan nasional. Sementara itu, pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan diarahkan untuk menjamin konsistensi antara RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, KUA-PPAS, APBD, RKA-PD, dan DPA-PD. Dalam praktiknya, konsistensi tersebut sangat menentukan kualitas penyelenggaraan pembangunan daerah karena ketidaksinkronan antardokumen akan berpengaruh terhadap capaian target, kualitas belanja, dan efektivitas program. Evaluasi RKPD tahun 2025 perlu diletakkan sebagai instrumen untuk membaca secara lebih mendalam hubungan antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan. Melalui evaluasi, dapat diketahui apakah target-target tahunan pembangunan telah dirumuskan secara realistis, didukung oleh program yang tepat, dan dilaksanakan dengan tingkat kinerja yang memadai. Selain itu, evaluasi juga dapat menampilkan area-area yang masih memerlukan penguatan koordinasi, perbaikan tata kelola, dan penyesuaian strategi pelaksanaan. Dengan demikian, evaluasi RKPD tidak hanya bersifat retrospektif, tetapi juga bersifat korektif dan antisipatif.

Evaluasi RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 menjadi semakin penting karena tahun 2025 merupakan periode yang sangat menentukan dalam kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah. Pada tahun ini, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa agenda pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021–2026 tetap berada pada jalur pencapaian yang tepat. Tahun 2025 juga merupakan tahun yang strategis untuk menilai efektivitas program prioritas, kualitas realisasi anggaran, serta kemampuan perangkat daerah dalam menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan di tengah dinamika kebutuhan daerah. Dalam situasi seperti itu, evaluasi RKPD harus mampu menunjukkan capaian makro pembangunan, realisasi kebijakan keuangan daerah, tingkat keselarasan antardokumen perencanaan, hasil pelaksanaan program dan kegiatan, serta faktor-faktor yang mendorong maupun memengaruhi capaian kinerja. Hasil evaluasi ini menjadi penting karena akan menjadi bahan perbaikan bagi penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya, sekaligus menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam pengendalian pembangunan daerah. Oleh sebab itu, dokumen ini disusun untuk menyajikan potret riil kinerja pembangunan yang akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan. Atas dasar itulah penyusunan dokumen evaluasi ini dilakukan.

1.2 Dasar Hukum

Evaluasi RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006–2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021–2026;
11. Peraturan Bupati Kutai Timur N0 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Evaluasi RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 dimaksudkan untuk melakukan penilaian menyeluruh terhadap pelaksanaan RKPD, konsistensi RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, serta pencapaian target kinerja pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Evaluasi ini mencakup aspek capaian makro pembangunan, kebijakan keuangan daerah, konsistensi program dan indikator kinerja, hasil pelaksanaan pembangunan, serta faktor pendorong dan faktor penghambat pelaksanaan RKPD. Melalui evaluasi ini diharapkan diperoleh gambaran yang objektif mengenai tingkat keberhasilan pembangunan daerah selama tahun berjalan. Selain itu, evaluasi ini juga dimaksudkan sebagai sarana pengendalian untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan tetap selaras dengan arah kebijakan daerah. Dengan demikian, dokumen Evaluasi RKPD tidak hanya berfungsi sebagai bahan pelaporan, tetapi juga sebagai dasar perbaikan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah pada periode berikutnya.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan dari Evaluasi RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 adalah untuk:

1. Mengukur capaian makro pembangunan daerah, yaitu menilai realisasi indikator makro pembangunan daerah yang tercermin dalam RKPD Tahun 2025, meliputi laju pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, indeks Gini, dan tingkat pengangguran terbuka;
2. Menganalisis kebijakan keuangan daerah, yaitu menilai realisasi keuangan daerah periode sebelumnya dan penyesuaiannya dalam RKPD Tahun 2025 berdasarkan dokumen keuangan daerah yang berlaku;
3. Menilai konsistensi perencanaan dan implementasi, yaitu menganalisis kesesuaian antara RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya dalam hal tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target, dan pagu anggaran;
4. Mengevaluasi hasil pelaksanaan RKPD, yaitu menilai capaian hasil pelaksanaan RKPD melalui analisis indikator capaian pada tujuan, sasaran, program prioritas, kinerja dan keuangan pada program, kegiatan, dan sub kegiatan, serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
5. Mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat, yaitu menganalisis faktor-faktor yang mendorong dan memengaruhi pencapaian kinerja pembangunan dan pelaksanaan program RKPD, baik dari aspek kelembagaan, pendanaan, koordinasi, maupun teknis pelaksanaan;
6. Merumuskan rekomendasi kebijakan, yaitu menyusun rekomendasi strategis sebagai dasar penyempurnaan RKPD pada periode berikutnya dan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan kualitas perencanaan serta pelaksanaan pembangunan daerah.

1.4 Metode Evaluasi

Evaluasi RKPD dilakukan melalui integrasi tiga pendekatan utama yang saling melengkapi untuk menghasilkan gambaran kinerja yang komprehensif. Proses diawali dengan **analisis konsistensi** untuk menguji derajat keselarasan antara perencanaan dan penganggaran. Melalui metode ini, dilakukan komparasi sistematis terhadap indikator kinerja dan pagu anggaran antara dokumen RKPD dengan dokumen acuan lainnya. Langkah ini krusial untuk memastikan bahwa penjabaran kebijakan dari level jangka menengah hingga dokumen tahunan tetap sinkron, sekaligus menjadi parameter kualitas keterpaduan dokumen pembangunan daerah pada masing-masing Perangkat Daerah.

Selanjutnya, efektivitas pelaksanaan program diukur melalui **analisis capaian**. Fokus utama analisis ini adalah membedah realisasi kinerja fisik dan keuangan dengan membandingkan target yang ditetapkan terhadap pencapaian aktual di lapangan. Lingkup pengukurannya mencakup indikator makro pembangunan serta realisasi kebijakan fiskal daerah tahun 2025. Hasil dari analisis ini memberikan gambaran objektif mengenai sejauh mana program, kegiatan, dan sub-kegiatan mampu mengeskalasi pencapaian target pembangunan daerah yang telah direncanakan.

Guna memberikan kedalaman interpretasi, evaluasi ini diperkuat dengan **pendekatan kualitatif**. Melalui penelaahan dokumen, koordinasi lintas Perangkat Daerah, dan pembahasan internal, dilakukan pendalaman terhadap berbagai faktor determinan yang memengaruhi kinerja. Pendekatan ini berfungsi untuk mengidentifikasi variabel pendorong maupun penghambat yang seringkali tidak terpotret secara utuh dalam data kuantitatif. Dengan menangkap persoalan spesifik pada setiap urusan pemerintahan, hasil identifikasi ini kemudian menjadi basis fundamental dalam merumuskan rekomendasi strategis bagi peningkatan efektivitas pelaksanaan RKPD pada periode berikutnya.

Evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021–2026 dengan menggunakan data evaluasi tahun 2025. Evaluasi ini mencakup seluruh Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan, maupun fungsi penunjang pemerintahan daerah.

1.5 Sistematika Dokumen Evaluasi RKPD

Dokumen Evaluasi RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja pembangunan daerah dan menjadi dasar penyusunan dokumen perencanaan ke depan. Adapun sistematika dokumen Evaluasi RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, metode evaluasi, serta sistematika dokumen Evaluasi RKPD.

BAB II : CAPAIAN MAKRO PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat analisis capaian makro pembangunan daerah, meliputi laju pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, indeks Gini, dan tingkat pengangguran terbuka.

BAB III : EVALUASI KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini memuat analisis evaluasi kebijakan keuangan daerah yang mencakup realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

BAB IV : PENGENDALIAN PELAKSANAAN DOKUMEN PERENCANAAN

Bab ini memuat analisis konsistensi antara RKPD dengan dokumen perencanaan daerah, baik dari sisi tujuan, sasaran, program, indikator kinerja, target, maupun pagu anggaran.

BAB V : PENGENDALIAN PELAKSANAAN RKPD TERHADAP APBD

Bab ini memuat analisis konsistensi antara RKPD dengan APBD yang mencakup program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target, dan pagu anggaran.

BAB VI : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD

Bab ini memuat analisis capaian hasil pelaksanaan RKPD, baik pada level tujuan dan sasaran pembangunan maupun pada level program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah.

BAB VII : FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT

Bab ini memuat identifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat pelaksanaan RKPD serta pengaruhnya terhadap pencapaian kinerja pembangunan daerah.

BAB VIII : RUMUSAN PERMASALAHAN HASIL EVALUASI

Bab ini memuat rumusan permasalahan pembangunan daerah dan identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan hasil evaluasi.

BAB IX : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini memuat kesimpulan hasil evaluasi RKPD dan rekomendasi sebagai bahan penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah pada periode berikutnya.

BAB 2

CAPAIAN MAKRO PEMBANGUNAN DAERAH

2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2025 tercatat sebesar 1,05 persen. Angka ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah masih berada pada zona pertumbuhan, namun lajunya melambat sangat tajam dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai 9,82 persen. Dalam deret waktu 2021–2025, pola pertumbuhan ekonomi Kutai Timur memperlihatkan fluktuasi yang cukup kuat, yaitu 5,58 persen pada tahun 2021, -0,89 persen pada tahun 2022, 7,71 persen pada tahun 2023, 9,82 persen pada tahun 2024, dan kembali turun menjadi 1,05 persen pada tahun 2025. Secara komparatif, capaian ini juga berada di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Timur sebesar 4,53 persen dan rata-rata nasional sebesar 5,11 persen. Kondisi tersebut menandakan bahwa pada tahun 2025 Kutai Timur menghadapi perlambatan ekonomi yang lebih dalam dibandingkan dengan wilayah pembandingnya.

Perlambatan ini terutama disebabkan oleh kontraksi sektor pertambangan sebesar -0,99 persen, sementara sektor tersebut masih menjadi tulang punggung struktur ekonomi Kutai Timur dengan kontribusi 70,17 persen terhadap total PDRB. Dengan bobot sebesar itu, penurunan kecil pada sektor pertambangan langsung menekan laju pertumbuhan ekonomi total. Dokumen indikator strategis BPS Kutai Timur secara eksplisit menyebut bahwa kontraksi ini berkaitan dengan penurunan aktivitas produksi batubara, yang terjadi seiring melemahnya permintaan dan penyesuaian produksi. Artinya, perlambatan ekonomi Kutai Timur pada tahun 2025 bukan terutama karena seluruh lapangan usaha melemah secara bersamaan, melainkan karena sektor yang paling dominan sedang mengalami koreksi. Dalam struktur ekonomi yang sangat terkonsentrasi, gejolak pada satu sektor unggulan memang akan lebih cepat diterjemahkan menjadi perlambatan agregat daerah.

Tabel 2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Timur (2021–2025)

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Perubahan	Keterangan
2021	5,58%	—	Pertumbuhan moderat
2022	-0,89%	↓	Kontraksi
2023	7,71%	↑	Pemulihan
2024	9,82%	↑ tinggi	Puncak pertumbuhan
2025	1,05%	↓ tajam	Perlambatan signifikan

Jika dibaca lebih jauh, penjelasan mengenai melemahnya permintaan dan penyesuaian produksi batubara di Kutai Timur juga sejalan dengan perkembangan sektor batubara nasional pada tahun 2025. Kementerian ESDM mencatat bahwa Harga Batubara Acuan (HBA) periode pertama Juni 2025 turun menjadi USD100,97 per ton, lebih rendah USD22,03 per ton dibandingkan periode yang sama tahun 2024 atau turun 17,91 persen year-on-year. Di awal 2026, Kementerian ESDM juga menyampaikan bahwa pemerintah pada awal 2026 menyampaikan rencana penataan ulang kuota produksi batubara dan revisi target produksi nasional sebagai respons atas kondisi pasar dan kebutuhan penyesuaian produksi. Dengan demikian, kontraksi pertambangan di Kutai Timur dapat dipahami sebagai bagian dari tekanan yang lebih luas pada industri batubara, baik dari sisi harga maupun penyesuaian volume produksi.

Walaupun demikian, perlambatan ekonomi Kutai Timur pada tahun 2025 tidak berarti seluruh perekonomian daerah sedang melemah. Sejumlah lapangan usaha justru tumbuh cukup tinggi. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh 9,32 persen dengan kontribusi 10,96 persen. Industri Pengolahan

tumbuh 19,12 persen dengan kontribusi 5,81 persen. Konstruksi tumbuh 7,19 persen, Perdagangan tumbuh 11,09 persen, dan Transportasi dan Pergudangan tumbuh 10,46 persen. Dokumen BPS Kutai Timur juga menyebut bahwa pertumbuhan tinggi industri pengolahan didorong oleh mulai beroperasinya pabrik semen di Kabupaten Kutai Timur. Fakta ini penting karena menunjukkan bahwa pelemahan agregat daerah terutama berasal dari sektor dominan, sedangkan sektor-sektor nonpertambangan justru memperlihatkan penguatan yang cukup nyata.

Analisis ekonomi Kutai Timur pada tahun 2025 memberikan sinyal krusial bagi evaluasi pembangunan daerah, terutama ketika sektor pertambangan dikeluarkan dari perhitungan. Tanpa sektor ekstraktif tersebut, ekonomi daerah justru mencatatkan pertumbuhan signifikan sekitar 11 persen. Fenomena ini mengindikasikan bahwa fondasi ekonomi nonpertambangan mulai menguat dan agenda transformasi ekonomi daerah telah menunjukkan pergerakan nyata, meskipun belum sepenuhnya mampu menyeimbangkan dominasi sektor tambang.

Kondisi tersebut sekaligus menegaskan bahwa kualitas pertumbuhan ekonomi Kutai Timur kini tidak dapat lagi dinilai hanya melalui angka agregat total, melainkan harus dibedah melalui komposisi sektoralnya secara mendalam. Pertumbuhan positif di sektor non-tambang ini harus dimaknai sebagai momentum strategis. Pada saat yang sama, perlambatan ekonomi makro di tahun 2025 menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk segera mengonkretkan langkah-langkah diversifikasi ekonomi guna mereduksi ketergantungan yang tinggi terhadap komoditas batubara.

Perubahan struktur ekonomi 2023–2025 memperkuat kesimpulan tersebut. Kontribusi sektor pertambangan turun dari 79,67 persen pada tahun 2023 menjadi 75,53 persen pada tahun 2024 dan 70,17 persen pada tahun 2025. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian meningkat dari 7,66 persen menjadi 10,96 persen, dan industri pengolahan naik dari 3,22 persen menjadi 5,81 persen. Pergeseran ini belum cukup untuk menghilangkan ketergantungan pada pertambangan, tetapi sudah menunjukkan arah yang lebih sehat bagi struktur ekonomi daerah. Makna strategis pertumbuhan ekonomi 2025 bukan terletak pada rendahnya angka 1,05 persen semata, melainkan pada situasi bahwa Kutai Timur masih rentan terhadap siklus komoditas batubara, namun pada saat yang sama mulai memiliki penyangga pertumbuhan baru dari pertanian dan industri pengolahan. Agenda kebijakan yang relevan ke depan adalah mempercepat hilirisasi, memperkuat rantai nilai sektor primer, dan memperluas sektor-sektor yang menciptakan nilai tambah di luar pertambangan.

2.2 PDRB per Kapita

Pada tahun 2025, PDRB per kapita Kabupaten Kutai Timur tercatat sebesar Rp325,18 juta, menurun dari Rp344,49 juta pada tahun 2024. Dalam tren 2021–2025, indikator ini bergerak fluktuatif, yakni Rp310,29 juta pada tahun 2021, melonjak menjadi Rp471,27 juta pada tahun 2022, turun ke Rp369,42 juta pada tahun 2023, turun lagi menjadi Rp344,49 juta pada tahun 2024, dan kembali turun pada tahun 2025. Penurunan dua tahun terakhir menunjukkan bahwa nilai tambah ekonomi rata-rata per penduduk sedang mengalami koreksi. Namun demikian, secara komparatif posisi Kutai Timur masih sangat tinggi, jauh di atas rata-rata Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp208,33 juta dan rata-rata nasional sebesar Rp83,70 juta. Di tingkat kabupaten/kota se-Kalimantan Timur, PDRB per kapita Kutai Timur masih berada pada posisi sangat tinggi dan menempati kelompok teratas, yakni setelah Kota Bontang.

Tabel 2.2 PDRB per Kapita Kabupaten Kutai Timur (2021–2025)

Tahun	PDRB per Kapita (Rp Juta)	Perubahan	Keterangan
2021	310,29	—	Posisi awal
2022	471,27	↑ sangat tinggi	Lonjakan (boom)
2023	369,42	↓ tajam	Koreksi
2024	344,49	↓	Penurunan berlanjut
2025	325,18	↓	Koreksi dua tahun terakhir

Tingginya angka PDRB per kapita di Kabupaten Kutai Timur tidak dapat dipisahkan dari dominasi sektor pertambangan yang menyumbang nilai tambah sangat besar bagi perekonomian daerah. Nilai tersebut sebenarnya lebih mencerminkan kapasitas ekonomi agregat atau besarnya 'mesin ekonomi' wilayah, ketimbang menjadi cerminan langsung dari pemerataan kesejahteraan masyarakat di tingkat rumah tangga. Fenomena khas pada daerah yang sangat bergantung pada sektor ekstraktif ini menunjukkan bahwa meskipun pendapatan regional rata-rata terlihat sangat menonjol, distribusinya tidak selalu tersebar secara proporsional ke seluruh lapisan penduduk. Oleh karena itu, capaian PDRB per kapita yang tinggi ini harus selalu dianalisis secara beriringan dengan indikator kemiskinan, ketimpangan, dan indeks pembangunan manusia guna mendapatkan potret kesejahteraan riil yang lebih akurat.

Penurunan PDRB per kapita pada tahun 2025 juga sejalan dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi dan menurunnya PDRB atas dasar harga berlaku. Situasi ini menunjukkan bahwa kapasitas ekonomi daerah tetap besar, tetapi sedang berada dalam fase penyesuaian akibat melemahnya sektor dominan. Dari sudut pandang evaluasi pembangunan, keadaan ini mengandung dua implikasi.

- ❖ Pertama, ketahanan ekonomi daerah belum sepenuhnya terbentuk karena indikator kesejahteraan makro masih sangat dipengaruhi oleh fluktuasi komoditas.
- ❖ Kedua, peningkatan sektor pertanian dalam arti luas dan industri pengolahan perlu terus didorong agar pada masa mendatang PDRB per kapita tidak lagi terlalu bergantung pada satu sektor saja. Semakin beragam sumber pertumbuhan, semakin stabil pula kapasitas ekonomi per penduduk yang dapat dipertahankan daerah.

2.3 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2025 mencapai 76,48, meningkat dari 75,90 pada tahun 2024. Dalam lima tahun terakhir, IPM Kutai Timur menunjukkan tren naik yang konsisten, yaitu 74,15 pada tahun 2021, 74,69 pada tahun 2022, 75,33 pada tahun 2023, 75,90 pada tahun 2024, dan 76,48 pada tahun 2025. Capaian tersebut menempatkan Kutai Timur dalam kategori tinggi. Secara komparatif, IPM Kutai Timur memang masih di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Timur sebesar 79,39, tetapi sudah melampaui rata-rata nasional sebesar 75,90. Dengan demikian, pembangunan manusia di Kutai Timur bergerak positif, walaupun ruang peningkatannya masih cukup besar.

Kenaikan IPM 2025 terjadi karena seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, yakni dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Ini penting karena kenaikan IPM yang berasal dari semua dimensi jauh lebih bermakna dibandingkan dengan kenaikan yang hanya ditopang oleh satu komponen saja. Artinya, perbaikan kualitas hidup masyarakat Kutai Timur pada tahun 2025 tidak bersifat parsial. Peningkatan ini menandakan bahwa di tengah perlambatan ekonomi agregat, akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kemampuan hidup layak relatif tetap membaik. Dalam evaluasi pembangunan, situasi seperti ini menunjukkan bahwa fondasi sosial daerah cenderung lebih stabil daripada fluktuasi ekonominya.

Tabel 2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kutai Timur (2021–2025)

Tahun	IPM	Perubahan	Keterangan
2021	74,15	—	Posisi awal
2022	74,69	↑	Peningkatan bertahap
2023	75,33	↑	Konsisten naik
2024	75,90	↑	Mendekati kategori tinggi
2025	76,48	↑	Masuk kategori tinggi

Dari dimensi pendidikan, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mencapai 9,48 tahun, sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) mencapai 13,22 tahun. RLS 9,48 tahun berarti rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan hampir sampai awal SMA. HLS 13,22 tahun menunjukkan bahwa anak usia 7 tahun di Kutai Timur memiliki peluang untuk menempuh pendidikan hingga jenjang menengah atas, bahkan awal pendidikan tinggi. Secara komparatif, RLS Kutai Timur sudah lebih tinggi dari rata-rata nasional 9,07 tahun, tetapi masih di bawah rata-rata provinsi 10,10 tahun. HLS Kutai Timur sudah melampaui standar wajib belajar 12 tahun, meskipun masih sedikit di bawah rata-rata nasional 13,30 tahun dan rata-rata provinsi 14,04 tahun. Ini berarti akses pendidikan dasar dan menengah sudah relatif baik, tetapi tantangan terbesar terletak pada keberlanjutan pendidikan menuju jenjang yang lebih tinggi dan pemerataan kualitas pendidikan antarkelompok masyarakat.

Dari dimensi kesehatan, Angka Harapan Hidup terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, yang menunjukkan perbaikan pada kualitas kesehatan masyarakat secara umum. Kenaikan AHH biasanya mencerminkan membaiknya akses layanan kesehatan, penurunan risiko kematian dini, peningkatan kesadaran hidup sehat, serta semakin baiknya faktor pendukung seperti sanitasi, air bersih, dan pelayanan kesehatan ibu-anak. Dalam konteks Kutai Timur, keberlanjutan peningkatan dimensi kesehatan menjadi sinyal positif bahwa hasil pembangunan sosial tidak sepenuhnya terganggu oleh volatilitas ekonomi makro. Hal ini juga penting karena kesehatan merupakan fondasi produktivitas jangka panjang, sehingga penguatan dimensi kesehatan akan memberikan dampak tidak hanya pada kualitas hidup, tetapi juga pada daya saing sumber daya manusia daerah.

Dari dimensi standar hidup layak, pengeluaran per kapita yang disesuaikan juga meningkat dan ikut mendorong kenaikan IPM. Namun, jika dibandingkan dengan PDRB per kapita Kutai Timur yang sangat tinggi, peningkatan standar hidup riil masyarakat ini masih menunjukkan adanya jarak antara kekuatan ekonomi agregat dan kesejahteraan yang dirasakan secara langsung oleh penduduk. Di sinilah letak makna penting IPM dalam evaluasi RKPD. IPM mengoreksi pembacaan yang terlalu bertumpu pada indikator ekonomi makro semata, dengan menunjukkan seberapa jauh pertumbuhan telah diterjemahkan menjadi kualitas hidup. Kenaikan IPM Kutai Timur tahun 2025 patut dinilai positif, tetapi tetap perlu diikuti kebijakan yang memperkuat mutu sekolah, mengurangi putus sekolah, memperluas akses layanan kesehatan yang bermutu, dan meningkatkan daya beli riil masyarakat secara lebih merata.

2.4 Angka Kemiskinan

Pada tahun 2025, garis kemiskinan Kabupaten Kutai Timur tercatat sebesar Rp773.239 per kapita per bulan, naik dari Rp753.332 pada tahun 2024. Dengan asumsi satu rumah tangga terdiri atas empat orang, maka kebutuhan minimum untuk berada di atas garis kemiskinan berada pada kisaran Rp3,09 juta per rumah tangga per bulan. Kenaikan garis kemiskinan ini menunjukkan bahwa biaya minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar terus meningkat. Dari sudut pandang evaluasi pembangunan, situasi ini menandakan bahwa tekanan biaya hidup masih tetap ada, sehingga pengurangan kemiskinan harus bekerja lebih keras karena ambang kebutuhan dasar juga naik.

Di tengah kenaikan garis kemiskinan tersebut, jumlah penduduk miskin Kutai Timur justru turun dari 37,11 ribu jiwa pada tahun 2024 menjadi 34,91 ribu jiwa pada tahun 2025. Sejalan dengan itu, persentase penduduk miskin juga turun dari 8,81 persen menjadi 8,07 persen. Secara komparatif, angka ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Kalimantan Timur sebesar 5,17 persen, tetapi sudah sedikit lebih baik dari rata-rata nasional sebesar 8,47 persen. Penurunan ini dapat dibaca sebagai sinyal bahwa secara kuantitatif sebagian rumah tangga berhasil keluar dari kemiskinan. Dokumen BPS Kutai Timur mengaitkan perkembangan tersebut dengan membaiknya aktivitas ekonomi, meningkatnya akses kesempatan kerja, serta berjalannya program perlindungan sosial bagi rumah tangga miskin dan rentan.

Tabel 2.4 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase (%)	Perubahan	Keterangan
2024	37,11	8,81%	—	Kondisi awal
2025	34,91	8,07%	↓	Penurunan kemiskinan

Namun, penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 2025 belum sepenuhnya berarti kualitas kemiskinan ikut membaik. Hal ini terlihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) yang naik dari 1,14 menjadi 1,20, serta Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang naik dari 0,24 menjadi 0,26. Kenaikan P1 berarti rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan justru sedikit melebar. Kenaikan P2 menunjukkan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin juga sedikit meningkat. Ini menandakan bahwa rumah tangga yang berhasil keluar dari kemiskinan kemungkinan besar adalah kelompok miskin ringan yang posisinya dekat dengan garis kemiskinan, sedangkan kelompok yang masih tersisa adalah rumah tangga miskin yang lebih kronis dan lebih sulit diatasi.

Dengan demikian, kondisi kemiskinan Kutai Timur pada tahun 2025 memperlihatkan paradoks yang perlu menjadi perhatian khusus. Secara angka agregat, keadaan membaik. Namun, secara kualitas, kelompok miskin yang tersisa justru cenderung lebih rentan dan lebih tertinggal. Inilah sebabnya kebijakan penanggulangan kemiskinan ke depan tidak cukup hanya berorientasi pada penurunan angka kemiskinan total, tetapi juga harus lebih tajam dalam menasar kelompok miskin kronis. Intervensi yang relevan bukan hanya bantuan sosial, melainkan juga penguatan akses kerja produktif, peningkatan aset ekonomi rumah tangga miskin, dukungan pendidikan bagi keluarga rentan, dan perluasan layanan dasar yang lebih terarah. Dengan pendekatan demikian, penurunan kemiskinan akan menjadi lebih berkualitas, bukan sekadar turun secara statistik.

2.5 Indeks Gini

Indeks Gini Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2025 tercatat sebesar 0,305. Nilai ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar 0,283, tetapi masih berada pada kategori ketimpangan sedang. Secara komparatif, indeks Gini Kutai Timur masih sedikit lebih rendah dari rata-rata Provinsi Kalimantan Timur sebesar 0,312 dan jauh lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 0,375. Ini menunjukkan bahwa distribusi pengeluaran di Kutai Timur secara umum masih relatif lebih baik daripada rata-rata nasional, walaupun pada tahun 2025 terjadi kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 2.5 Indeks Gini Kabupaten Kutai Timur (2024–2025)

Tahun	Indeks Gini	Perubahan	Kategori Ketimpangan	Keterangan
2024	0,283	—	Sedang	Distribusi relatif merata
2025	0,305	↑	Sedang	Ketimpangan meningkat

Kenaikan indeks gini pada tahun 2025 dapat dibaca sebagai konsekuensi dari struktur ekonomi yang belum sepenuhnya inklusif. Dalam perekonomian yang masih sangat didominasi pertambangan dan sektor-sektor bernilai tambah tinggi tetapi padat modal, manfaat pertumbuhan cenderung lebih cepat terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Sementara itu, rumah tangga yang berada pada kelompok bawah tidak selalu menerima dampak peningkatan ekonomi dengan kecepatan yang sama. Pada tahun 2025, penurunan kemiskinan memang terjadi, tetapi pada saat bersamaan kedalaman dan keparahan kemiskinan meningkat. Kombinasi indikator ini mengindikasikan bahwa perbaikan kesejahteraan belum

merata di seluruh lapisan penduduk. Kelompok yang berhasil naik kelas keluar dari kemiskinan ada, tetapi distribusi manfaat pembangunan secara keseluruhan masih belum cukup merata.

Dari perspektif kualitas pembangunan, kondisi ini penting karena menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau PDRB per kapita yang besar tidak otomatis menghasilkan pemerataan. Kenaikan indeks gini adalah pengingat bahwa agenda pembangunan daerah harus memberi perhatian lebih besar pada distribusi manfaat. Penguatan sektor pertanian rakyat, UMKM, industri pengolahan yang menyerap banyak tenaga kerja, konektivitas wilayah, kualitas pendidikan, dan akses terhadap peluang usaha menjadi sangat penting agar kelompok menengah bawah memperoleh bagian yang lebih besar dari pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan kata lain, tantangan Kutai Timur bukan hanya menumbuhkan ekonomi, tetapi menumbuhkan ekonomi yang hasilnya semakin tersebar.

2.6 Tingkat Pengangguran Terbuka

Kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2025 menunjukkan tekanan yang masih cukup nyata. Jumlah angkatan kerja meningkat dari 236.869 jiwa pada tahun 2024 menjadi 240.746 jiwa pada tahun 2025. Namun, peningkatan ini tidak diikuti oleh penyerapan kerja yang sepadan. Jumlah pengangguran terbuka naik dari 13.643 jiwa menjadi 14.915 jiwa, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat dari 5,76 persen menjadi 6,20 persen. Secara komparatif, TPT Kutai Timur berada di atas rata-rata Provinsi Kalimantan Timur sebesar 5,18 persen dan rata-rata nasional sebesar 4,85 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan pasar kerja di Kutai Timur relatif lebih berat dibandingkan banyak daerah lain.

Tabel 2.6 Ketenagakerjaan Kabupaten Kutai Timur (2024–2025)

Indikator	2024	2025	Perubahan	Keterangan
Angkatan Kerja (jiwa)	236.869	240.746	↑	Partisipasi meningkat
Pengangguran Terbuka (jiwa)	13.643	14.915	↑	Pengangguran bertambah
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,76%	6,20%	↑	Tekanan pasar kerja meningkat

Dokumen BPS Kutai Timur menjelaskan bahwa kenaikan TPT dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu fluktuasi sektor pertambangan dan konstruksi, berkurangnya proyek tenaga kerja padat karya, serta fenomena *educated unemployment*. Penjelasan ini sangat relevan dengan struktur ekonomi daerah. Ketika sektor pertambangan melambat dan konstruksi tidak sekuat periode sebelumnya, pasar kerja lokal langsung terkena dampak karena dua sektor tersebut selama ini menjadi salah satu pintu penyerapan kerja formal maupun semi formal. Pada saat yang sama, tidak semua sektor yang sedang tumbuh, seperti industri pengolahan dan jasa tertentu, mampu segera menyerap tambahan angkatan kerja dalam jumlah besar. Akibatnya, pertumbuhan angkatan kerja lebih cepat daripada pertumbuhan kesempatan kerja.

Kenaikan jumlah pengangguran pada tahun 2025 juga terutama dipicu oleh bertambahnya pengangguran dari kelompok berpendidikan Diploma dan Universitas. Ini menunjukkan gejala *educated unemployment*, yakni ketika lulusan berpendidikan lebih tinggi belum terserap secara optimal ke dalam pasar kerja. Penyebabnya antara lain karena struktur ekonomi daerah masih banyak membutuhkan tenaga kerja teknis-operasional, sedangkan jumlah lulusan pendidikan tinggi meningkat dan cenderung lebih selektif dalam memilih pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikan, upah, dan prospek karier. Situasi ini menandakan adanya *mismatch* antara pasokan tenaga kerja dan permintaan pasar kerja. Dalam jangka menengah, kondisi seperti ini dapat menahan produktivitas sosial karena investasi pendidikan belum terkonversi optimal menjadi kesempatan kerja yang sesuai.

Selain TPT, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kutai Timur pada tahun 2025 juga turun tipis menjadi 66,42 persen dari 66,78 persen pada tahun 2024. Angka ini berada di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Timur sebesar 67,00 persen dan jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 70,59 persen. Salah satu persoalan utama terdapat pada ketimpangan partisipasi menurut jenis kelamin. TPAK laki-laki mencapai 83,53 persen, sedangkan TPAK perempuan hanya 46,27 persen. Dokumen BPS Kutai Timur menjelaskan bahwa rendahnya partisipasi perempuan berkaitan dengan peran domestik, keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang fleksibel, norma sosial, serta masih terbatasnya lapangan kerja yang ramah perempuan. Dengan demikian, tantangan pasar kerja Kutai Timur tidak hanya soal pengangguran, tetapi juga soal belum optimalnya mobilisasi seluruh potensi tenaga kerja produktif.

Dari sudut pandang evaluasi RKPD, gambaran ketenagakerjaan tahun 2025 memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang ada belum sepenuhnya inklusif dalam menciptakan pekerjaan. Hal ini sangat penting, karena kualitas pembangunan ekonomi pada akhirnya diukur dari seberapa banyak penduduk yang memperoleh manfaat langsung melalui kerja dan pendapatan. Oleh sebab itu, kebijakan yang perlu diperkuat bukan hanya menjaga laju pertumbuhan, tetapi juga memastikan tumbuhnya sektor-sektor yang lebih padat karya, memperluas pelatihan vokasi sesuai kebutuhan daerah, meningkatkan koneksi antara pendidikan dan pasar kerja, serta membuka lebih banyak kesempatan kerja produktif bagi perempuan. Semakin berhasil Kutai Timur menjawab persoalan pasar kerja ini, semakin kuat pula kualitas pertumbuhan ekonominya di masa mendatang.

BAB 3

EVALUASI KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kebijakan keuangan daerah merupakan instrumen yang menentukan apakah agenda pembangunan dapat dijalankan secara terukur, realistis, dan berkelanjutan. Dalam konteks Kabupaten Kutai Timur, kebijakan keuangan daerah tahun 2025 tidak hanya perlu dibaca dari besar-kecilnya angka pendapatan, belanja, dan pembiayaan, melainkan juga dari kemampuannya menjaga kesinambungan prioritas pembangunan di tengah dinamika penerimaan daerah yang masih sangat dipengaruhi oleh komponen eksternal. Kerangka ini penting, sebab dokumen RKPD Tahun 2025 sejak awal telah menempatkan pengelolaan keuangan daerah sebagai fondasi bagi pengalokasian sumber daya yang efektif dan efisien untuk mendukung infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Secara normatif, arah tersebut sejalan dengan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021–2026 yang menegaskan bahwa kapasitas fiskal, kemampuan mendanai belanja daerah, dan kemandirian keuangan merupakan unsur strategis dalam menjamin keberlanjutan pembangunan. RPJMD juga menunjukkan bahwa secara historis struktur fiskal daerah masih sangat dipengaruhi dana transfer, sementara ruang yang benar-benar bersumber dari kapasitas pendapatan asli daerah masih relatif terbatas. Karena itu, evaluasi kebijakan keuangan daerah tahun 2025 perlu dilakukan bukan hanya untuk melihat serapan atau realisasi semata, tetapi juga untuk menilai ketahanan fiskal daerah dalam menjaga prioritas pembangunan ketika struktur penerimaan mengalami tekanan.

Dengan dasar tersebut, evaluasi kebijakan keuangan daerah tahun 2025 dalam bab ini difokuskan pada tiga komponen utama, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Ketiga komponen itu dibaca dengan menjadikan **RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025** sebagai acuan rencana awal, lalu dibandingkan dengan realisasi pelaksanaan tahun anggaran 2025 berdasarkan data teknis keuangan daerah. Melalui pendekatan ini, Bab III tidak berhenti pada penyajian angka, tetapi juga berupaya menjelaskan kualitas struktur fiskal daerah, ruang gerak kebijakan yang tersedia, serta implikasinya terhadap keberlanjutan pembangunan Kabupaten Kutai Timur.

3.1 Realisasi Pendapatan Tahun 2025

3.1.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2025

Arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 pada dasarnya diarahkan untuk memperkuat kapasitas fiskal melalui dua jalur utama. Jalur pertama adalah peningkatan **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** melalui optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah, perbaikan tata kelola penerimaan, serta penguatan kerja sama dengan berbagai pihak yang relevan. Jalur kedua adalah menjaga kesinambungan penerimaan dari komponen transfer, yang dalam praktiknya masih menjadi penopang utama struktur pendapatan daerah. Dalam RKPD Tahun 2025, orientasi ini dijelaskan sebagai bagian dari arah kebijakan keuangan daerah yang ditujukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dengan pengelolaan yang efektif dan efisien.

Dari sudut pandang strategis, arah kebijakan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk kehati-hatian fiskal. Kabupaten Kutai Timur memiliki kebutuhan pembiayaan pembangunan yang besar, tetapi ruang pendapatan yang benar-benar bersumber dari kontrol internal daerah belum sepenuhnya kuat. Karena itu, penguatan PAD tetap penting, bukan hanya untuk menambah penerimaan jangka pendek, tetapi juga untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber penerimaan yang volatil dan sangat dipengaruhi kebijakan pusat maupun dinamika ekonomi makro. Cara pandang ini juga sejalan dengan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021–2026 yang menempatkan kemandirian keuangan daerah sebagai agenda penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan.

Dengan demikian, evaluasi pendapatan daerah tahun 2025 perlu dibaca pada dua lapis sekaligus. Lapis pertama adalah **tingkat pencapaian target pendapatan** sebagaimana direncanakan dalam RKPD. Lapis kedua adalah **kualitas struktur pendapatannya**, yakni apakah peningkatan atau penurunan pendapatan terjadi pada komponen yang memperkuat kemandirian fiskal, atau justru pada komponen yang menunjukkan bahwa daerah masih bertumpu pada penerimaan dari luar kapasitas fiskal internalnya.

3.1.2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

No	Uraian	Target RKPD 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Capaian (%)
1	Pendapatan Asli Daerah	906.183.327.000,00	551.664.185.588,81	60,88
2	Pendapatan Transfer	8.044.230.959.800,00	7.928.626.678.369,00	98,56
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	79.317.207.636,00	-
	Jumlah Pendapatan	8.950.414.286.800,00	8.559.608.071.593,81	95,63

Sumber: diolah dari RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 dan data BPKAD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa total pendapatan daerah Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2025 terealisasi sebesar **Rp8.559.608.071.593,81** dari target RKPD sebesar **Rp8.950.414.286.800,00**, atau mencapai **95,63 persen**. Secara umum, angka ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan masih berada pada tingkat yang cukup tinggi. Akan tetapi, bila komposisinya ditelaah lebih dalam, terlihat bahwa capaian ini tidak ditopang secara merata oleh seluruh komponen pendapatan. Justru, ketahanan pendapatan daerah terutama masih bergantung pada realisasi pendapatan transfer yang hampir mendekati target, sementara capaian PAD masih tertinggal cukup jauh dari sasaran yang ditetapkan dalam RKPD.

Komponen **Pendapatan Asli Daerah** ditargetkan sebesar **Rp906.183.327.000,00**, namun realisasinya hanya mencapai **Rp551.664.185.588,81** atau **60,88 persen**. Angka ini menunjukkan bahwa target PAD yang diletakkan dalam RKPD 2025 tergolong cukup ambisius bila dibandingkan dengan hasil realisasinya. Pada saat yang sama, hal ini juga mengindikasikan bahwa kemampuan daerah untuk mengandalkan sumber penerimaan internal masih belum sepenuhnya stabil. Di sisi lain, **Pendapatan Transfer** justru terealisasi sebesar **Rp7.928.626.678.369,00** dari target **Rp8.044.230.959.800,00**, atau mencapai **98,56 persen**. Kesenjangan yang sangat tipis pada komponen transfer ini memperlihatkan bahwa struktur penerimaan daerah masih sangat disangga oleh komponen yang berasal dari luar kapasitas fiskal internal pemerintah daerah.

Sementara itu, pada komponen **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**, RKPD 2025 tidak menempatkan target pada pos ini, tetapi pada realisasinya tetap tercatat sebesar **Rp79.317.207.636,00**. Kehadiran komponen ini memberi tambahan terhadap total penerimaan, meskipun secara struktur porsi tetap jauh lebih kecil dibanding pendapatan transfer. Dengan demikian, dari keseluruhan komposisi pendapatan daerah tahun 2025, terlihat bahwa kemampuan fiskal Kabupaten Kutai Timur masih bertumpu pada pola lama: transfer sebagai penyangga utama, PAD sebagai komponen yang terus didorong tetapi belum cukup kuat, dan lain-lain pendapatan yang sah sebagai unsur pelengkap.

3.1.3 Analisis Capaian dan Permasalahan Pendapatan Daerah

Dari perspektif evaluatif, capaian total pendapatan sebesar 95,63 persen memang memberi kesan bahwa pelaksanaan kebijakan pendapatan daerah berjalan relatif baik. Namun, penilaian semacam itu akan terlalu sederhana bila tidak melihat struktur di balik angka tersebut. Realisasi total yang cukup tinggi

sesungguhnya lebih banyak ditopang oleh kuatnya pendapatan transfer, bukan oleh keberhasilan daerah dalam memperkuat basis pendapatan asli daerah. Karena itu, secara kualitas fiskal, capaian ini belum dapat langsung dibaca sebagai penguatan kemandirian keuangan daerah. Ia lebih tepat dipahami sebagai tanda bahwa stabilitas pendapatan daerah masih sangat sensitif terhadap keberlanjutan transfer dan kebijakan fiskal supra-daerah.

Rendahnya capaian PAD terhadap target RKPD menunjukkan bahwa agenda optimalisasi penerimaan lokal masih menghadapi hambatan yang nyata. Hambatan tersebut dapat dibaca dari dua sisi. Dari sisi perencanaan, target PAD dalam RKPD tampak cukup tinggi dibanding kemampuan realisasi aktual. Dari sisi pelaksanaan, penguatan pendapatan lokal masih membutuhkan tata kelola yang lebih kuat, mulai dari intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, penertiban basis data objek pajak dan retribusi, sampai dengan penguatan sistem pelayanan dan pengawasan penerimaan. Dengan kata lain, masalahnya bukan semata karena PAD tidak tumbuh, melainkan karena laju penguatan kapasitas internal belum cukup untuk mengejar sasaran yang direncanakan.

Di sisi lain, kuatnya realisasi transfer menunjukkan bahwa ruang fiskal Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2025 masih dijaga oleh komponen eksternal. Dalam jangka pendek, kondisi ini memang membantu pemerintah daerah menjaga kesinambungan pembiayaan pembangunan. Akan tetapi, dalam jangka menengah, struktur seperti ini tetap mengandung risiko. Ketika porsi terbesar pendapatan berada pada komponen yang dipengaruhi kebijakan pusat, formula transfer, dan dinamika ekonomi makro, maka kemampuan daerah untuk mengendalikan stabilitas fiskalnya sendiri menjadi lebih terbatas. Dalam konteks itulah, penguatan PAD tidak boleh diposisikan semata sebagai target administratif, melainkan sebagai kebutuhan strategis untuk memperluas ruang fiskal dan memperkecil kerentanan terhadap perubahan eksternal.

Dengan demikian, evaluasi pendapatan daerah tahun 2025 menghasilkan dua simpulan penting. Pertama, secara agregat pemerintah daerah masih mampu menjaga realisasi pendapatan pada tingkat yang cukup baik. Kedua, secara struktural, fondasi kemandirian fiskal belum cukup kokoh karena pendapatan daerah masih sangat ditopang transfer, sedangkan PAD belum mencapai target yang ditetapkan dalam RKPD. Oleh sebab itu, perbaikan kebijakan pendapatan ke depan perlu diarahkan secara lebih tajam pada penguatan kapasitas penerimaan internal, pembenahan basis data dan tata kelola pendapatan, serta penetapan target PAD yang ambisius tetapi tetap realistis dan berbasis kapasitas riil daerah.

3.2 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun 2025

Belanja daerah merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam menerjemahkan prioritas pembangunan ke dalam program dan kegiatan yang nyata. Melalui belanja daerah, pemerintah tidak hanya membiayai kebutuhan operasional pemerintahan, tetapi juga mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, perlindungan sosial, serta transfer fiskal yang diperlukan untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Evaluasi terhadap realisasi belanja menjadi penting untuk menilai sejauh mana alokasi anggaran yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif dan memberi dukungan terhadap agenda pembangunan daerah.

Dalam RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025, kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan melalui pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan selaras dengan sasaran pembangunan daerah. Pada tahap pelaksanaan tahun anggaran 2025, struktur belanja kemudian terefleksi dalam komponen Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Masing-masing komponen tersebut mempunyai fungsi yang berbeda, namun secara bersama-sama menentukan kualitas belanja daerah, baik dalam menjaga layanan rutin pemerintahan maupun dalam mendorong manfaat pembangunan yang lebih luas bagi masyarakat.

Tabel 3.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Capaian (%)
2	BELANJA			
2.1	Belanja Operasi	5.104.800.989.899,62	4.582.082.744.933,91	89,76
2.1.1	Belanja Pegawai	2.412.545.800.825,00	2.366.069.550.507,91	98,07
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.645.269.862.019,62	2.151.541.160.140,00	81,34
2.1.3	Belanja Hibah	46.955.327.055,00	64.472.034.286,00	137,31
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	30.000.000,00	0,00	0,00
2.2	Belanja Modal	3.558.152.824.946,38	2.922.216.764.257,73	82,12
2.2.1	Belanja Modal Tanah	5.838.285.480,00	2.251.762.435,00	38,57
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	570.676.658.221,74	548.192.614.846,40	96,06
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	637.157.593.261,31	557.640.753.812,97	87,52
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.262.696.011.273,33	1.739.623.612.463,36	76,88
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	19.134.849.840,00	19.065.704.735,00	99,63
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	62.649.426.869,00	55.442.315.965,00	88,49
2.3	Belanja Tidak Terduga	23.908.650.801,00	6.787.229.001,00	28,38
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	23.908.650.801,00	6.787.229.001,00	28,38
2.4	Belanja Transfer	1.307.558.102.072,00	1.075.824.437.218,00	82,27
2.4.1	Belanja Bantuan Keuangan	1.307.558.102.072,00	1.075.824.437.218,00	82,27
	JUMLAH BELANJA	9.994.420.567.719,00	8.586.911.175.410,64	85,92

Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026.

Perlu dijelaskan bahwa angka anggaran pada Tabel 3.2 merepresentasikan postur belanja daerah tahun anggaran 2025 pada tahap pelaksanaan, sedangkan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 merupakan dokumen rencana awal yang menetapkan kerangka belanja daerah sebesar Rp8.935.414.286.800,00. Dalam RKPD tersebut, komposisi belanja dirancang melalui Belanja Operasi sebesar Rp4.757.177.320.213,00, Belanja Modal sebesar Rp3.128.752.665.290,00, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp20.000.000.000,00, dan Belanja Transfer sebesar Rp1.029.484.301.297,00. Dalam pelaksanaan tahun berjalan, struktur anggaran tersebut mengalami penyesuaian sehingga pagu belanja yang menjadi dasar realisasi tahunan berubah menjadi Rp9.994.420.567.719,00. Evaluasi belanja daerah tahun 2025 dalam subbab ini dibaca pada dua tingkat sekaligus, yaitu dengan menempatkan RKPD murni sebagai baseline kebijakan awal, dan anggaran pelaksanaan sebagai dasar pengukuran realisasi belanja pada akhir tahun. Dengan pendekatan ini, evaluasi tidak hanya menunjukkan tingkat serapan anggaran,

tetapi juga memperlihatkan bagaimana dinamika fiskal tahun berjalan menggeser struktur belanja dari rancangan awal yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data pada tabel tersebut, total belanja daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp9.994.420.567.719,00, dengan realisasi mencapai Rp8.586.911.175.410,64 atau 85,92 persen. Secara umum, capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran telah dapat direalisasikan dalam tahun berjalan. Tingkat serapan tersebut juga memperlihatkan bahwa pelaksanaan anggaran daerah masih berlangsung dalam kategori cukup tinggi, meskipun belum seluruh alokasi yang direncanakan dapat diwujudkan secara penuh.

Pada kelompok Belanja Operasi, anggaran yang tersedia sebesar Rp5.104.800.989.899,62 dengan realisasi Rp4.582.082.744.933,91 atau 89,76 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa fungsi operasional pemerintahan dan layanan dasar relatif terjaga dengan baik sepanjang tahun 2025. Di dalamnya, Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp2.366.069.550.507,91 dari anggaran Rp2.412.545.800.825,00 atau 98,07 persen, sehingga menjadi komponen dengan serapan paling tinggi dalam kelompok Belanja Operasi. Sementara itu, Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp2.151.541.160.140,00 dari anggaran Rp2.645.269.862.019,62 atau 81,34 persen, menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan operasional nonpegawai masih cukup tinggi, namun belum setinggi belanja pegawai. Pada komponen lain, Belanja Hibah tercatat terealisasi Rp64.472.034.286,00 dari anggaran Rp46.955.327.055,00, sedangkan Belanja Bantuan Sosial tidak terealisasi dari anggaran Rp30.000.000,00.

Untuk Belanja Modal, anggaran tahun 2025 tercatat sebesar Rp3.558.152.824.946,38, dengan realisasi Rp2.922.216.764.257,73 atau 82,12 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa belanja yang berkaitan dengan pembentukan aset dan dukungan infrastruktur masih dapat direalisasikan pada tingkat yang cukup baik, walaupun tidak setinggi Belanja Operasi. Jika dilihat lebih rinci, serapan tertinggi terdapat pada Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar 99,63 persen, disusul Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar 96,06 persen, serta Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 87,52 persen. Sementara itu, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang memiliki nilai anggaran paling besar dalam kelompok Belanja Modal, yakni Rp2.262.696.011.273,33, terealisasi sebesar Rp1.739.623.612.463,36 atau 76,88 persen. Pada sisi lain, Belanja Modal Tanah hanya terealisasi 38,57 persen, sehingga menjadi komponen dengan tingkat serapan terendah pada kelompok belanja ini.

Pada komponen Belanja Tidak Terduga, anggaran disediakan sebesar Rp23.908.650.801,00, namun realisasinya hanya Rp6.787.229.001,00 atau 28,38 persen. Rendahnya tingkat serapan pada pos ini pada dasarnya dapat dipahami karena karakter Belanja Tidak Terduga memang disiapkan untuk keadaan khusus yang tidak selalu muncul secara intensif selama tahun anggaran berjalan. Meskipun demikian, angka tersebut tetap menunjukkan bahwa ruang kontinjensi fiskal yang dianggarkan tidak sepenuhnya digunakan pada tahun 2025.

Adapun pada kelompok Belanja Transfer, anggaran yang tersedia sebesar Rp1.307.558.102.072,00 dengan realisasi Rp1.075.824.437.218,00 atau 82,27 persen. Seluruh komponen belanja transfer pada tahun 2025 tercatat dalam bentuk Belanja Bantuan Keuangan. Capaian ini menunjukkan bahwa mekanisme transfer fiskal tetap menjadi bagian penting dalam struktur pengeluaran daerah, meskipun tingkat realisasinya belum sepenuhnya mencapai pagu yang dianggarkan.

Secara struktural, komposisi realisasi belanja tahun 2025 memperlihatkan bahwa porsi terbesar masih berada pada Belanja Operasi, diikuti Belanja Modal, kemudian Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga. Susunan ini menunjukkan bahwa belanja daerah Kabupaten Kutai Timur masih didominasi kebutuhan operasional pemerintahan, walaupun ruang untuk belanja yang bersifat produktif dan pembangunan fisik tetap cukup besar. Dalam perspektif evaluasi kebijakan keuangan daerah, kondisi ini penting dicermati karena kualitas belanja tidak hanya ditentukan oleh tingginya realisasi, tetapi juga oleh sejauh mana komposisinya mendukung prioritas pembangunan dan menciptakan manfaat jangka menengah bagi masyarakat.

Dengan demikian, evaluasi belanja daerah tahun 2025 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Timur secara umum mampu menjaga tingkat realisasi belanja pada level yang cukup baik. Namun demikian, perbedaan serapan antarjenis belanja mengindikasikan bahwa efektivitas pelaksanaan anggaran belum sepenuhnya merata pada seluruh komponen. Ke depan, perbaikan kebijakan belanja perlu diarahkan pada penguatan kualitas perencanaan, peningkatan kesiapan pelaksanaan, dan pengendalian yang lebih baik, agar setiap jenis belanja tidak hanya tinggi secara serapan, tetapi juga lebih kuat dalam mendukung hasil pembangunan yang nyata.

3.3 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan Tahun 2025

Pembiayaan daerah merupakan instrumen fiskal yang berfungsi menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah pada tahun anggaran berjalan. Dalam praktiknya, pembiayaan tidak hanya berperan sebagai penutup defisit, tetapi juga sebagai ruang penyangga yang memungkinkan pemerintah daerah tetap menjalankan prioritas pembangunan ketika pendapatan daerah tidak sepenuhnya cukup untuk menutup kebutuhan belanja. Karena itu, evaluasi terhadap pembiayaan daerah perlu melihat bukan hanya besar kecilnya angka penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, tetapi juga makna fiskalnya bagi stabilitas keuangan daerah dan kesinambungan pelaksanaan program pembangunan.

Dalam **RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025**, arah kebijakan pembiayaan daerah ditempatkan dalam kerangka menjaga keseimbangan fiskal dan mendukung keberlanjutan pembangunan. RKPD menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu mengelola pembiayaan secara hati-hati, menjaga hubungan antara penerimaan dan pengeluaran daerah, serta memastikan bahwa kebijakan pembiayaan tidak justru menimbulkan tekanan fiskal baru di masa mendatang. Dengan demikian, pembiayaan daerah seharusnya dibaca sebagai instrumen penyangga yang dipakai secara selektif, bukan sebagai substitusi permanen atas lemahnya kapasitas pendapatan daerah.

Pada tahun 2025, dinamika pembiayaan daerah Kabupaten Kutai Timur memperlihatkan perubahan yang cukup penting dibanding tahun sebelumnya. Penerimaan pembiayaan yang digunakan pada tahun anggaran 2025 seluruhnya berasal dari **Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya**, sedangkan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk **penyertaan modal daerah**. Struktur seperti ini menunjukkan bahwa pembiayaan daerah tahun 2025 lebih berfungsi sebagai instrumen korektif untuk menjaga ruang fiskal pada saat kapasitas pendapatan daerah mengalami tekanan. Dalam perspektif pengelolaan keuangan, kondisi ini menuntut tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi, karena kemampuan pembiayaan yang bertumpu pada SiLPA bersifat terbatas dan tidak dapat diandalkan sebagai sumber berulang secara terus-menerus.

Tabel 3.3 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Capaian (%)
3	PEMBIAYAAN DAERAH			
3.1	Penerimaan Pembiayaan	113.990.094.504,78	113.990.094.504,78	100,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	113.990.094.504,78	113.990.094.504,78	100,00
3.1.2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	100,00

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Capaian (%)
3.2.1	Penyertaan Modal Daerah/Investasi Pemerintah Daerah	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	78.990.094.504,78	78.990.094.504,78	100,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa **penerimaan pembiayaan daerah** pada tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar **Rp113.990.094.504,78** dan terealisasi dalam jumlah yang sama, atau mencapai **100,00 persen**. Seluruh penerimaan pembiayaan tersebut berasal dari **SiLPA tahun sebelumnya**. Ini menunjukkan bahwa pada tahun 2025 tidak terdapat sumber penerimaan pembiayaan lain yang digunakan, seperti penerimaan kembali pinjaman daerah maupun instrumen pembiayaan alternatif lainnya. Dengan kata lain, struktur penerimaan pembiayaan tahun 2025 sepenuhnya bertumpu pada ketersediaan sisa anggaran tahun sebelumnya.

Pada sisi **pengeluaran pembiayaan**, pemerintah daerah menganggarkan sebesar **Rp35.000.000.000,00** dan merealisasikannya secara penuh atau **100,00 persen**. Seluruh pengeluaran pembiayaan ini dialokasikan dalam bentuk **penyertaan modal daerah/investasi pemerintah daerah**. Dari perspektif kebijakan, langkah ini menunjukkan bahwa meskipun ruang fiskal tahun 2025 berada dalam tekanan, pemerintah daerah tetap menempatkan dukungan terhadap entitas pelayanan publik sebagai bagian dari prioritas fiskal yang dipertahankan. Dalam hal ini, pembiayaan tidak hanya dipakai untuk menjaga keseimbangan angka dalam APBD, tetapi juga untuk menopang kebijakan kelembagaan yang dinilai strategis.

Dengan demikian, **pembiayaan netto** Kabupaten Kutai Timur tahun 2025 tercatat sebesar **Rp78.990.094.504,78**, baik pada sisi anggaran maupun realisasi. Angka ini menunjukkan selisih antara penerimaan pembiayaan yang seluruhnya berasal dari SiLPA dengan pengeluaran pembiayaan yang dialokasikan untuk penyertaan modal daerah. Secara fiskal, pembiayaan netto positif semacam ini memberikan penyangga bagi pelaksanaan APBD, terutama ketika struktur pendapatan daerah belum cukup kuat untuk secara mandiri menopang seluruh kebutuhan belanja daerah. Namun demikian, instrumen penyangga ini bersifat terbatas karena sangat tergantung pada sisa anggaran tahun sebelumnya.

Dari sudut evaluasi kebijakan keuangan daerah, kondisi pembiayaan tahun 2025 memperlihatkan dua pesan penting. Pertama, pemerintah daerah masih mampu menjaga instrumen pembiayaan pada tingkat yang terkelola dengan baik, terbukti dari realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang sama dengan anggarannya. Kedua, struktur pembiayaan tersebut juga menunjukkan bahwa fleksibilitas fiskal daerah pada tahun 2025 masih cukup bergantung pada akumulasi SiLPA, bukan pada pelebaran sumber pembiayaan yang lebih beragam. Hal ini berarti pembiayaan daerah masih berfungsi terutama sebagai mekanisme penyangga jangka pendek, bukan sebagai instrumen penguatan fiskal yang benar-benar memperluas kapasitas keuangan daerah.

Jika dibandingkan dengan prinsip kehati-hatian fiskal yang ditekankan dalam RKPD dan RPJMD, struktur pembiayaan seperti ini perlu dibaca secara cermat. Pada satu sisi, penggunaan SiLPA dapat membantu menjaga kesinambungan program ketika kapasitas pendapatan daerah mengalami tekanan. Namun pada sisi lain, ketergantungan yang terlalu besar pada SiLPA juga menunjukkan bahwa ketahanan fiskal daerah belum sepenuhnya bertumpu pada kekuatan pendapatan yang berulang dan stabil. Dalam jangka menengah, kondisi ini menegaskan pentingnya memperkuat kualitas proyeksi pendapatan, meningkatkan efisiensi belanja, dan memperluas kapasitas fiskal internal agar pembiayaan tidak terus-menerus diperlakukan sebagai instrumen utama ketika terjadi tekanan anggaran.

Secara keseluruhan, evaluasi pembiayaan daerah tahun 2025 menunjukkan bahwa pengelolaan pembiayaan telah berjalan tertib dan realisasinya sesuai dengan alokasi yang ditetapkan. Akan tetapi, secara substantif, pembiayaan daerah masih memperlihatkan keterbatasan ruang fiskal karena basis utamanya berasal dari SiLPA tahun sebelumnya. Ke depan pembiayaan daerah perlu tetap dikelola secara hati-hati, selektif, dan ditempatkan sebagai instrumen penyeimbang yang mendukung stabilitas fiskal, bukan sebagai penopang utama ketika pendapatan daerah belum cukup kuat. Dengan demikian, kualitas kebijakan keuangan daerah tidak hanya diukur dari kecocokan antara anggaran dan realisasi, tetapi juga dari sejauh mana struktur pembiayaan tersebut memperkuat keberlanjutan pembangunan daerah.

3.4 Analisis Struktur Fiskal Daerah Tahun 2025

Struktur fiskal Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah masih sangat dipengaruhi oleh **Pendapatan Transfer**, sementara **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** belum menjadi penyangga utama penerimaan. Dari total realisasi pendapatan daerah sebesar **Rp8.559.608.071.593,81**, komponen terbesar masih berasal dari transfer sebesar **Rp7.928.626.678.369,00**, sedangkan PAD baru mencapai **Rp551.664.185.588,81**. Kondisi ini menegaskan bahwa ruang fiskal daerah masih sangat bergantung pada sumber penerimaan eksternal, sehingga ketahanan fiskal belum sepenuhnya bertumpu pada kapasitas keuangan internal daerah.

Dari sisi belanja, struktur pengeluaran daerah tahun 2025 masih didominasi **Belanja Operasi** yang terealisasi sebesar **Rp4.582.082.744.933,91**, sementara **Belanja Modal** terealisasi sebesar **Rp2.922.216.764.257,73**. Komposisi ini menunjukkan bahwa fungsi operasional pemerintahan masih menyerap porsi terbesar dalam APBD. Meskipun hal tersebut diperlukan untuk menjaga layanan pemerintahan dan pelayanan dasar, dominasi belanja operasi tetap perlu dicermati karena dapat mempersempit ruang fiskal untuk belanja yang lebih produktif dan berdampak jangka menengah, terutama infrastruktur dan pembentukan aset daerah.

Pada sisi pembiayaan, struktur fiskal tahun 2025 juga memperlihatkan bahwa instrumen penyangga anggaran masih berasal dari **SiLPA tahun sebelumnya**, dengan penerimaan pembiayaan sebesar **Rp113.990.094.504,78** dan pembiayaan netto sebesar **Rp78.990.094.504,78**. Artinya, stabilitas fiskal daerah masih terbantu oleh sisa anggaran tahun lalu, bukan semata-mata oleh kekuatan pendapatan tahun berjalan. Dengan demikian, struktur fiskal Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 dapat dinilai masih **cukup kuat untuk menopang pelaksanaan anggaran**, tetapi **belum sepenuhnya kokoh dari sisi kemandirian dan fleksibilitas fiskal jangka menengah**.

3.5 Implikasi Kebijakan Keuangan Daerah terhadap Pembangunan Tahun 2025

Kondisi fiskal Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 membawa implikasi yang cukup jelas terhadap arah pembangunan daerah. Pada satu sisi, realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang relatif tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih mampu menjaga kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan. Hal ini penting, karena stabilitas pelaksanaan anggaran menjadi syarat dasar agar prioritas pembangunan tetap dapat dijalankan. Namun pada sisi lain, struktur fiskal yang masih bertumpu pada transfer dan didominasi belanja operasi menunjukkan bahwa kualitas ketahanan fiskal daerah masih perlu diperkuat.

Implikasi pertama adalah bahwa **penguatan PAD harus menjadi agenda yang lebih serius**, bukan sekadar target administratif tahunan. Selama penerimaan internal daerah belum cukup kuat, kemampuan daerah untuk memperluas ruang pembangunan akan selalu dipengaruhi faktor di luar kendali pemerintah daerah. Implikasi kedua adalah bahwa **kebijakan belanja perlu semakin diarahkan pada kualitas**, bukan hanya tingkat serapan. Tingginya belanja operasi harus tetap dikendalikan agar tidak mengurangi kapasitas daerah dalam membiayai belanja yang lebih produktif. Adapun implikasi ketiga adalah bahwa **pembiayaan**

daerah perlu dikelola secara lebih hati-hati, karena penggunaan SiLPA sebagai instrumen penyangga fiskal tidak dapat dijadikan pola yang terus-menerus diandalkan.

Dengan demikian, kebijakan keuangan daerah tahun 2025 memberikan pesan bahwa pembangunan Kabupaten Kutai Timur masih dapat terus dijalankan, tetapi keberlanjutannya akan sangat ditentukan oleh kemampuan daerah memperbaiki kualitas struktur fiskalnya. Karena itu, penguatan kemandirian pendapatan, pengendalian komposisi belanja, dan kehati-hatian dalam pengelolaan pembiayaan harus menjadi perhatian utama agar APBD tidak hanya habis terserap, tetapi juga semakin kuat dalam menopang pembangunan daerah yang berkelanjutan.

BAB 4

PENGENDALIAN PELAKSANAAN RPJMD DALAM RKPD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah lima tahunan yang menjadi acuan utama dalam perumusan tujuan, sasaran, program pembangunan, serta kerangka pendanaan daerah. Dalam sistem perencanaan daerah, RKPD disusun sebagai penjabaran tahunan dari RPJMD, sehingga tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD menjadi indikator penting untuk menilai kualitas konsistensi perencanaan pembangunan daerah. Dalam konteks tersebut, pengendalian pelaksanaan RPJMD dalam RKPD diperlukan untuk memastikan bahwa arah pembangunan tahunan tetap berada dalam koridor kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Kutai Timur. Hal ini sejalan dengan kedudukan RKPD Tahun 2025 sebagai dokumen tahunan yang disusun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021–2026.

Bab ini memfokuskan analisis pada konsistensi antara RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021–2026 dengan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025, yang meliputi tujuan pembangunan, sasaran pembangunan, program, indikator kinerja, target kinerja, pagu indikatif, serta penjabaran pada tingkat perangkat daerah. Adapun Perubahan RKPD Tahun 2025 digunakan sebagai konteks untuk membaca adanya penyesuaian kebijakan pada tahun berjalan, tanpa mengubah kedudukan RKPD sebagai objek utama pengujian konsistensi dokumen perencanaan. Dengan demikian, analisis pada bab ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai kualitas penjabaran RPJMD ke dalam RKPD Tahun 2025, sekaligus menjadi dasar bagi penguatan konsistensi perencanaan pembangunan daerah pada periode berikutnya.

4.1 Konsistensi Tujuan Pembangunan antara RKPD dengan RPJMD

Tujuan pembangunan pada RKPD Tahun 2025 harus merupakan penjabaran langsung dari tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021–2026. Konsistensi tujuan menjadi unsur mendasar karena tujuan merupakan pengarah utama bagi perumusan sasaran, indikator kinerja, program pembangunan, serta arah alokasi sumber daya daerah. RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021–2026 menegaskan bahwa tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, sedangkan RKPD Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan keselarasan terhadap RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021–2026. Dengan demikian, pengendalian terhadap konsistensi tujuan pembangunan diperlukan untuk memastikan bahwa perencanaan tahunan tetap berada dalam koridor pembangunan jangka menengah daerah.

Dalam struktur perencanaan daerah, satu misi pembangunan dapat dijabarkan ke dalam satu atau lebih tujuan pembangunan. Pada beberapa misi terdapat lebih dari satu tujuan yang dirumuskan untuk menjelaskan arah kebijakan secara lebih spesifik. Pola ini bersifat wajar dalam dokumen perencanaan karena misi merupakan arah besar pembangunan, sedangkan tujuan merupakan penjabaran strategis yang lebih operasional. Dengan struktur tersebut, pengulangan yang tampak pada tabel bukan menunjukkan duplikasi tujuan, melainkan menunjukkan bahwa satu misi memiliki lebih dari satu tujuan yang saling melengkapi. Hal ini terlihat, misalnya, pada misi tata kelola pemerintahan yang dijabarkan ke dalam tujuan penataan tata kelola pemerintahan dan tujuan peningkatan kualitas layanan publik, serta pada misi pengembangan wilayah berwawasan lingkungan yang dijabarkan ke dalam tujuan integrasi pembangunan wilayah dan tujuan pemanfaatan ruang secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelaahan dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021–2026 dan RKPD Tahun 2025, rumusan tujuan pembangunan pada RKPD tetap mengacu pada 5 misi pembangunan daerah dan dijabarkan ke dalam 8 tujuan pembangunan. Secara umum, seluruh tujuan pembangunan dalam RKPD Tahun 2025 menunjukkan kesesuaian dengan tujuan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021–2026, baik dari sisi substansi maupun rumusan tujuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tingkat tujuan, RKPD Tahun 2025 telah mempertahankan arah pembangunan jangka menengah yang

telah ditetapkan dalam RPJMD. Konsistensi ini penting karena menjadi prasyarat agar kebijakan, program, dan kegiatan tahunan tidak keluar dari orientasi strategis pembangunan daerah.

Tabel 4.1 Perbandingan Tujuan Pembangunan pada RPJMD dan RKPD Tahun 2025

No	Misi	No Tujuan	RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2021–2026	RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025
1	Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, dan Bersatu	T1	Menata dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan mendorong kehidupan masyarakat (SDM) yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu	Menata dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan mendorong kehidupan masyarakat (SDM) yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu
2	Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat berbasis Sektor Pertanian	T2	Menata daya saing ekonomi masyarakat berbasis sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan	Menata daya saing ekonomi masyarakat berbasis sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan
3	Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat berbasis Sektor Pertanian	T3	Menata peran penunjang daya saing ekonomi masyarakat	Menata peran penunjang daya saing ekonomi masyarakat
4	Mewujudkan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata	T4	Menata semua layanan kebutuhan infrastruktur dasar dan ekonomi bagi masyarakat secara proporsional dan merata	Menata semua layanan kebutuhan infrastruktur dasar dan ekonomi bagi masyarakat secara proporsional dan merata
5	Mewujudkan Pemerintahan yang Partisipatif Berbasis Penegakan Hukum dan Teknologi Informasi	T5	Menata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel berbasis elektronik	Menata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel berbasis elektronik
6	Mewujudkan Pemerintahan yang Partisipatif Berbasis Penegakan Hukum dan Teknologi Informasi	T6	Menata kualitas layanan publik yang berbasis interoperabilitas	Menata kualitas layanan publik yang berbasis interoperabilitas
7	Mewujudkan Sinergitas Pengembangan Wilayah dan Integrasi Pembangunan yang	T7	Menata dan mensinergikan pembangunan yang terintegrasi agar berfungsi optimal	Menata dan mensinergikan pembangunan yang terintegrasi agar berfungsi optimal

No	Misi	No Tujuan	RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2021–2026	RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025
	Berwawasan Lingkungan			
8	Mewujudkan Sinergitas Pengembangan Wilayah dan Integrasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	T8	Menata dan memanfaatkan ruang secara berkelanjutan	Menata dan memanfaatkan ruang secara berkelanjutan

Sumber: diolah dari RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021–2026 dan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025.

Pada Misi 1, RKPD Tahun 2025 tetap menempatkan peningkatan taraf hidup masyarakat melalui pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, berbudaya, dan bersatu sebagai tujuan utama. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia masih menjadi fondasi pembangunan daerah, dengan target Indeks Pembangunan Manusia yang tetap sama antara RPJMD dan RKPD, yaitu 76,18.

Pada Misi 2, RKPD Tahun 2025 tetap mempertahankan tujuan peningkatan daya saing ekonomi masyarakat berbasis sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, serta penguatan peran penunjang daya saing ekonomi. Konsistensi ini menunjukkan bahwa arah pembangunan ekonomi daerah tetap bertumpu pada sektor unggulan berbasis sumber daya lokal.

Pada Misi 3, tujuan pembangunan tetap diarahkan pada pemerataan layanan infrastruktur dasar dan ekonomi bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa RKPD Tahun 2025 masih menjaga kesinambungan agenda pelayanan dasar, konektivitas wilayah, dan infrastruktur pendukung ekonomi sebagaimana dirumuskan dalam RPJMD.

Pada Misi 4, RKPD Tahun 2025 tetap mempertahankan tujuan penataan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel berbasis elektronik, serta peningkatan kualitas layanan publik berbasis interoperabilitas. Ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi, digitalisasi pemerintahan, dan kualitas layanan publik tetap menjadi prioritas pembangunan daerah.

Pada Misi 5, tujuan pembangunan yang berkaitan dengan sinergitas pengembangan wilayah dan pemanfaatan ruang secara berkelanjutan juga tetap dipertahankan. Konsistensi ini menunjukkan bahwa RKPD Tahun 2025 masih menjaga orientasi pembangunan wilayah yang terintegrasi, berbasis tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

Secara keseluruhan, konsistensi tujuan pembangunan antara RKPD Tahun 2025 dan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021–2026 berada pada tingkat sangat tinggi. Tidak ditemukan perubahan rumusan tujuan yang bersifat substantif. Seluruh tujuan dalam RKPD tetap berada dalam koridor lima misi dan delapan tujuan RPJMD. Hal ini menunjukkan bahwa arah pembangunan tahunan masih terjaga dengan baik, meskipun keselarasannya tetap perlu diuji lebih lanjut pada tingkat sasaran, indikator, target, program, dan pagu anggaran.

4.2 Konsistensi Sasaran Pembangunan antara RKPD dengan RPJMD

Sasaran pembangunan merupakan penjabaran langsung dari tujuan pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam RPJMD. Konsistensi sasaran antara RKPD Tahun 2025 dan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021–2026 menjadi unsur penting dalam menilai kualitas penjabaran perencanaan jangka menengah ke dalam perencanaan tahunan. Sasaran yang konsisten menunjukkan bahwa arah

pembangunan tahunan tetap berada dalam koridor strategis daerah, sedangkan ketidaksesuaian sasaran dapat memengaruhi keterpaduan indikator kinerja, target, program, dan alokasi anggaran. Dalam konteks ini, perbandingan pada subbab ini difokuskan pada kesesuaian sasaran pembangunan antara RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021–2026 dan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025, dengan Perubahan RKPD Tahun 2025 digunakan sebagai konteks untuk melihat keterjagaan arah sasaran pada tahun berjalan.

Berdasarkan hasil penelaahan dokumen, sasaran pembangunan yang dirumuskan dalam RKPD Tahun 2025 masih mengikuti struktur sasaran dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021–2026. Secara substansial, tidak ditemukan pergeseran sasaran yang bersifat mendasar. Hal ini menunjukkan bahwa pada tingkat sasaran, RKPD Tahun 2025 masih menjaga kesinambungan strategi pembangunan jangka menengah daerah dan tetap menjadi penjabaran tahunan yang selaras dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Tabel 4.2 Perbandingan Sasaran Pembangunan pada RPJMD dan RKPD Tahun 2025

No Tujuan	No Sasaran	Sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2021–2026	Sasaran RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025
T1	S1	Meningkatnya taraf hidup masyarakat yang sejahtera	Meningkatnya taraf hidup masyarakat yang sejahtera
T1	S2	Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat
T1	S3	Meningkatnya derajat kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan
T1	S4	Terwujudnya SDM yang beriman, berakhlak mulia, dan berbudaya	Terwujudnya SDM yang beriman, berakhlak mulia, dan berbudaya
T2	S5	Peningkatan kegiatan perekonomian berbasis sektor pertanian/perkebunan/perikanan	Peningkatan kegiatan perekonomian berbasis sektor pertanian/perkebunan/perikanan
T2	S6	Meningkatnya pendapatan petani	Meningkatnya pendapatan petani
T3	S7	Meningkatnya kemampuan perekonomian di daerah	Meningkatnya kemampuan perekonomian di daerah
T4	S8	Meningkatnya layanan infrastruktur jalan	Meningkatnya layanan infrastruktur jalan
T4	S9	Meningkatnya layanan infrastruktur permukiman	Meningkatnya layanan infrastruktur permukiman
T4	S10	Meningkatnya infrastruktur teknologi dan informasi	Meningkatnya infrastruktur teknologi dan informasi
T4	S11	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan
T4	S12	Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan	Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan
T4	S13	Meningkatnya sarana dan infrastruktur pendukung ekonomi	Meningkatnya sarana dan infrastruktur pendukung ekonomi

No Tujuan	No Sasaran	Sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2021–2026	Sasaran RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025
T5	S14	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan
T6	S15	Meningkatnya kualitas layanan publik yang berbasis interoperabilitas dalam pengembangan wilayah	Meningkatnya kualitas layanan publik yang berbasis interoperabilitas dalam pengembangan wilayah
T7	S16	Meningkatnya sinergitas proses pengembangan wilayah yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya sinergitas proses pengembangan wilayah yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan
T8	S17	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang

Sumber: diolah dari RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021–2026 dan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025.

Pada **Tujuan 1**, RKPD Tahun 2025 tetap mempertahankan empat sasaran utama, yaitu peningkatan taraf hidup masyarakat yang sejahtera, peningkatan taraf pendidikan masyarakat, peningkatan derajat kesehatan, dan terwujudnya sumber daya manusia yang beriman, berakhlak mulia, dan berbudaya. Konsistensi empat sasaran ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia tetap diposisikan sebagai inti kebijakan pembangunan daerah. Secara teknokratik, struktur sasaran tersebut juga logis karena seluruhnya saling berhubungan langsung dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, serta indikator sosial dasar lainnya. Dengan tetap dipertahankannya sasaran tersebut, RKPD Tahun 2025 menunjukkan kesinambungan yang kuat terhadap agenda pembangunan sosial yang telah dirancang dalam RPJMD.

Pada **Tujuan 2**, RKPD Tahun 2025 tetap menggunakan dua sasaran, yaitu peningkatan kegiatan perekonomian berbasis sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan serta meningkatnya pendapatan petani. Konsistensi ini menunjukkan bahwa orientasi pembangunan ekonomi daerah masih berakar pada penguatan sektor basis lokal. Sasaran tersebut relevan dengan kebutuhan Kutai Timur untuk memperkuat transformasi ekonomi dari struktur yang bertumpu pada sektor ekstraktif menuju struktur yang lebih ditopang kegiatan produktif masyarakat. Dalam perspektif perencanaan, konsistensi sasaran pada tujuan ini menunjukkan bahwa RKPD tetap menjaga keberlanjutan agenda penguatan ekonomi kerakyatan, terutama pada sektor-sektor yang memiliki daya sebar manfaat lebih luas.

Pada **Tujuan 3**, sasaran yang dipertahankan adalah meningkatnya kemampuan perekonomian di daerah. Sasaran ini memiliki fungsi strategis karena menjadi penghubung antara penguatan sektor basis ekonomi masyarakat dengan penguatan kapasitas ekonomi daerah secara lebih luas. Dengan dipertahankannya sasaran ini, RKPD Tahun 2025 tidak hanya berorientasi pada aktivitas ekonomi primer, tetapi juga pada kapasitas penunjang ekonomi daerah secara keseluruhan. Hal ini penting karena daya saing ekonomi daerah tidak hanya dibentuk oleh produksi sektor unggulan, tetapi juga oleh dukungan ekosistem ekonomi, akses pasar, layanan penunjang, dan infrastruktur ekonomi yang memadai.

Pada **Tujuan 4**, RKPD Tahun 2025 tetap memuat enam sasaran, yaitu meningkatnya layanan infrastruktur jalan, layanan infrastruktur permukiman, infrastruktur teknologi dan informasi, sarana dan prasarana pendidikan, sarana dan prasarana kesehatan, serta sarana dan infrastruktur pendukung ekonomi. Konsistensi ini menunjukkan bahwa agenda pelayanan dasar dan infrastruktur masih dijaga secara utuh. Dari sudut pandang teknokratik, struktur sasaran tersebut menunjukkan keterpaduan antara pelayanan dasar dan pengungkit ekonomi wilayah. Artinya, pembangunan infrastruktur di RKPD tidak

hanya dipahami sebagai pembangunan fisik, tetapi juga sebagai sarana untuk memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, konektivitas, dan kegiatan ekonomi. Dalam konteks Kutai Timur yang memiliki tantangan kewilayahan cukup besar, konsistensi sasaran pada tujuan ini merupakan indikator penting bahwa RKPD masih menjaga orientasi pemerataan layanan dasar dan penguatan konektivitas wilayah.

Pada **Tujuan 5** dan **Tujuan 6**, sasaran yang dipertahankan masing-masing adalah meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan serta meningkatnya kualitas layanan publik yang berbasis interoperabilitas dalam pengembangan wilayah. Konsistensi ini menunjukkan bahwa RKPD Tahun 2025 tetap menempatkan reformasi tata kelola dan kualitas layanan publik sebagai unsur strategis pembangunan. Hal ini relevan karena tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi efektivitas pembangunan lintas sektor, sedangkan interoperabilitas layanan publik menjadi bagian penting dalam penguatan pemerintahan berbasis elektronik dan integrasi pelayanan. Pada P-RKPD Tahun 2025, sasaran pada bidang tata kelola ini juga tetap dijabarkan ke dalam indikator seperti opini BPK, indeks pemberdayaan gender, rasio penduduk ber-KTP, persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal, dan persentase perangkat daerah yang terkoneksi jaringan fiber optik. Ini menunjukkan bahwa konsistensi sasaran pada bidang pemerintahan tidak hanya terjaga dalam rumusan, tetapi juga ditopang oleh indikator yang operasional.

Pada **Tujuan 7** dan **Tujuan 8**, sasaran yang dipertahankan adalah meningkatnya sinergitas proses pengembangan wilayah yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan serta meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang. Konsistensi ini menunjukkan bahwa RKPD Tahun 2025 masih menjaga orientasi pembangunan wilayah yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dalam konteks Kutai Timur, sasaran ini sangat relevan karena pengembangan wilayah, pengendalian pemanfaatan ruang, dan kualitas lingkungan merupakan isu yang memiliki pengaruh langsung terhadap keberlanjutan pembangunan jangka menengah. Pada P-RKPD Tahun 2025, sasaran pada misi ini tetap dihubungkan dengan indikator seperti hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan dan jumlah Perkada RDTR, sehingga hubungan antara sasaran wilayah-lingkungan dengan instrumen pengendaliannya tetap terjaga.

Secara keseluruhan, konsistensi sasaran pembangunan antara RKPD Tahun 2025 dengan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021–2026 berada pada tingkat sangat tinggi. Seluruh sasaran yang termuat dalam RKPD secara substansial masih sama dengan sasaran dalam RPJMD, tanpa adanya perubahan mendasar pada arah pembangunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada level sasaran, RKPD Tahun 2025 telah menjaga kesinambungan strategi pembangunan jangka menengah secara baik. Namun demikian, konsistensi sasaran perlu dibaca lebih lanjut bersama indikator, target, program, dan pagu anggaran, karena kualitas penjabaran RPJMD tidak hanya ditentukan oleh kesamaan rumusan, tetapi juga oleh keterjagaan hubungan logis antara sasaran dengan instrumen pelaksanaannya. Dengan demikian, hasil subbab ini menegaskan bahwa dari sisi sasaran, fondasi konsistensi RKPD Tahun 2025 terhadap RPJMD masih kuat dan menjadi dasar yang baik bagi analisis pada subbab berikutnya.

4.3 Konsistensi Program antara RKPD dengan RPJMD

Konsistensi program antara RKPD Tahun 2025 dengan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021–2026 merupakan salah satu ukuran penting untuk menilai kualitas penjabaran dokumen perencanaan jangka menengah ke dalam perencanaan tahunan. Program merupakan instrumen utama yang menjembatani tujuan dan sasaran pembangunan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Tingkat konsistensi program tidak hanya mencerminkan keselarasan administratif antar dokumen, tetapi juga menunjukkan apakah arah kebijakan pembangunan tahunan tetap berada dalam koridor strategi pembangunan jangka menengah daerah. RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021–2026 menegaskan bahwa program pembangunan daerah harus dijabarkan secara tahunan ke dalam RKPD agar tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, akuntabel, dan terukur.

Berdasarkan hasil evaluasi, tingkat penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD Tahun 2025 tercatat sebesar **98,64 persen** dari target **100 persen**. Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum

struktur program pada RKPD Tahun 2025 masih sangat selaras dengan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021–2026. Pada saat yang sama, penjabaran konsistensi program RPJMD dan RKPD ke dalam Renstra dan Renja Perangkat Daerah tercatat **100 persen**. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara kelembagaan, sinkronisasi program pada tingkat perangkat daerah telah berjalan optimal, meskipun pada tahap penjabaran dari RPJMD ke RKPD masih terdapat sebagian kecil inkonsistensi yang perlu dicermati.

Tabel 4.3 Konsistensi Jumlah Program antara RPJMD dan RKPD Tahun 2025 per Perangkat Daerah

N o	Nama OPD pada RPJMD	Jumlah Progra m RPJMD	Nama OPD pada RKPD	Jumlah Progra m RKPD	Selisi h	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9	5	Penyesuaian nomenklatur/perangkat daerah dan penambahan program tahunan
2	Dinas Kesehatan	5	Dinas Kesehatan	5	0	
3	RSUD Kudungga	2	RSUD Kudungga	2	0	
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12	1	
5	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	9	Dinas Pertanahan	6	-3	Penyesuaian kelembagaan/urusan;
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	6	0	
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2	0	
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	-1	

N o	Nama OPD pada RPJMD	Jumlah Progra m RPJMD	Nama OPD pada RKPD	Jumlah Progra m RKPD	Selisi h	Keterangan
9	Satuan Polisi Pamong Praja	2	Satuan Polisi Pamong Praja	2	0	
10	Dinas Sosial	6	Dinas Sosial	6	0	
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	7	-1	Penyesuaian nomenklatur dan konsolidasi program
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5	0	
13	Dinas Ketahanan Pangan	5	Dinas Ketahanan Pangan	5	0	
14	Dinas Lingkungan Hidup	11	Dinas Lingkungan Hidup	11	0	
15	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	5	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	5	0	
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6	0	
18	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5	0	
19	Dinas Perhubungan	5	Dinas Perhubungan	5	0	
20	Dinas Komunikasi, Informastika, Persandian dan Statistik	5	Dinas Komunikasi, Informastika, Persandian dan Statistik	5	0	

N o	Nama OPD pada RPJMD	Jumlah Progra m RPJMD	Nama OPD pada RKPD	Jumlah Progra m RKPD	Selisi h	Keterangan
21	Dinas Koperasi, dan UMKM	7	Dinas Koperasi dan UMKM	8	1	
22	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	6	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	6	0	
23	Dinas Pemuda & Olahraga	4	Dinas Pemuda & Olahraga	4	0	
24	Dinas Kebudayaan	6	-	0	-6	Dilebur kedalam Dinas Pendidikan
25	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	5	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	5	0	
26	Dinas Kelautan dan Perikanan	5	Dinas Perikanan	5	0	
27	Dinas Pariwisata	5	Dinas Pariwisata	5	0	
28	Dinas Pertanian	6	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	5	-1	
29	Dinas Perkebunan	6	Dinas Perkebunan	6	0	
30	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9	1	
31	Sekretariat Daerah	10	Sekretariat Daerah	10	0	
32	Sekretariat DPRD	3	Sekretariat DPRD	3	0	
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	0	
34	Badan Pengelola	3	Badan Pengelola	3	0	

N o	Nama OPD pada RPJMD	Jumlah Progra m RPJMD	Nama OPD pada RKPD	Jumlah Progra m RKPD	Selisi h	Keterangan
	Keuangan dan Aset Daerah		Keuangan dan Aset Daerah			
35	Badan Pendapatan Daerah	2	Badan Pendapatan Daerah	2	0	
36	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	0	
37	Sekretariat Korpri	2	-	0	-2	Dilebur ke OPD lain
38	Badan Penelitian dan Pengembangan	2	Badan Riset dan Inovasi Daerah	2	0	
39	Inspektorat Daerah	3	Inspektorat	3	0	
40	Kecamatan Sangkulirang	6	Kecamatan Sangkulirang	6	0	
41	Kecamatan Kaliorang	6	Kecamatan Kaliorang	6	0	
42	Kecamatan Sandaran	6	Kecamatan Sandaran	6	0	
43	Kecamatan Bengalon	6	Kecamatan Bengalon	6	0	
44	Kecamatan Muara Wahau	6	Kecamatan Muara Wahau	6	0	
45	Kecamatan Kombeng	6	Kecamatan Kombeng	6	0	
46	Kecamatan Muara Ancalong	6	Kecamatan Muara Ancalong	6	0	
47	Kecamatan Batu Ampar	6	Kecamatan Batu Ampar	6	0	

N o	Nama OPD pada RPJMD	Jumlah Progra m RPJMD	Nama OPD pada RKPD	Jumlah Progra m RKPD	Selisi h	Keterangan
48	Kecamatan Long Mesangat	6	Kecamatan Long Mesangat	6	0	
49	Kecamatan Busang	6	Kecamatan Busang	6	0	
50	Kecamatan Karangan	6	Kecamatan Karangan	6	0	
51	Kecamatan Kaibun	6	Kecamatan Kaibun	6	0	
52	Kecamatan Rantau Pulung	6	Kecamatan Rantau Pulung	6	0	
53	Kecamatan Teluk Pandan	6	Kecamatan Teluk Pandan	6	0	
54	Kecamatan Muara Bengkal	6	Kecamatan Muara Bengkal	6	0	
55	Kecamatan Sangatta Utara	6	Kecamatan Sangatta Utara	6	0	
56	Kecamatan Sangatta Selatan	6	Kecamatan Sangatta Selatan	6	0	
57	Kecamatan Telen	6	Kecamatan Telen	6	0	
58	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	0	

Sumber: diolah dari tabel konsistensi jumlah program RKPD dan RPJMD Tahun 2025.

Berdasarkan tabel tersebut, terdapat beberapa temuan penting. Dari **57 entri perangkat daerah/kelembagaan** yang tercantum dalam matriks, sebanyak **47 entri** menunjukkan jumlah program yang sama antara RPJMD dan RKPD, **4 entri** mengalami penambahan jumlah program, dan **6 entri** mengalami pengurangan jumlah program. Secara agregat, jumlah program pada RPJMD tercatat **298 program**, sedangkan pada RKPD tercatat **292 program**. Ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan terjadi pengurangan bersih **6 program** pada RKPD Tahun 2025 dibandingkan struktur program dalam RPJMD.

4.4 Konsistensi Indikator Kinerja antara RKPD dengan RPJMD

Konsistensi indikator kinerja antara RKPD Tahun 2025 dengan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021–2026 merupakan aspek penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan tahunan tetap dapat diukur dengan instrumen yang sejalan dengan arah pembangunan jangka menengah. Indikator kinerja tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan program, tetapi juga sebagai penghubung

antara sasaran pembangunan, target tahunan, dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah. Perubahan jumlah indikator perlu dicermati secara teknokratik, karena dapat memengaruhi kesinambungan pengukuran kinerja pembangunan daerah dari dokumen jangka menengah ke dokumen tahunan. RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021–2026 menegaskan bahwa indikator kinerja daerah ditetapkan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, dan setiap target tahunan harus disusun secara bertahap agar kesinambungan evaluasinya terjaga.

Berdasarkan hasil penelaahan dokumen, jumlah indikator kinerja antara RPJMD dan RKPD Tahun 2025 menunjukkan tingkat konsistensi yang tinggi, namun belum sepenuhnya sama pada semua perangkat daerah. Sebagian besar perangkat daerah mempertahankan jumlah indikator yang sama, sedangkan sebagian lainnya mengalami penambahan, pengurangan, atau perubahan akibat penyesuaian nomenklatur, restrukturisasi kelembagaan, dan penajaman fokus pengukuran kinerja. Secara teknokratik, kondisi ini menunjukkan bahwa RKPD Tahun 2025 pada dasarnya masih menjaga arah pengukuran kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD, meskipun terdapat penyesuaian pada beberapa sektor. Dokumen evaluasi RKPD Tahun 2025 juga menjelaskan bahwa ketidakkonsistenan jumlah indikator terutama dipengaruhi oleh perubahan nomenklatur OPD, penyesuaian terhadap kebijakan nasional dan daerah, serta penyederhanaan atau penyempurnaan metode pengukuran kinerja.

Tabel 4.4 Konsistensi Indikator Kinerja antara RKPD dengan RPJMD Tahun 2025

No	Nama OPD pada RPJMD	Jumlah Indikator RPJMD	Nama OPD pada RKPD	Jumlah Indikator RKPD	Selisih
1	Dinas Pendidikan	7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13	6
2	Dinas Kesehatan	8	Dinas Kesehatan	8	0
3	RSUD Kudungga	2	RSUD Kudungga	2	0
4	Dinas Pekerjaan Umum	12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13	1
5	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	10	Dinas Pertanahan	6	-4
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	6	0
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3	0
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	-1
9	Satuan Polisi Pamong Praja	2	Satuan Polisi Pamong Praja	2	0
10	Dinas Sosial	6	Dinas Sosial	6	0

No	Nama OPD pada RPJMD	Jumlah Indikator RPJMD	Nama OPD pada RKPD	Jumlah Indikator RKPD	Selisih
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	7	-1
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	0
13	Dinas Ketahanan Pangan	8	Dinas Ketahanan Pangan	8	0
15	Dinas Lingkungan Hidup	12	Dinas Lingkungan Hidup	11	-1
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6	0
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	0
18	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	0
19	Dinas Perhubungan	3	Dinas Perhubungan	3	0
20	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	6	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	7	1
21	Dinas Koperasi dan UMKM	7	Dinas Koperasi dan UMKM	7	0
22	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	7	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	6	-1
23	Dinas Pemuda dan Olahraga	4	Dinas Pemuda dan Olahraga	4	0
24	Dinas Kebudayaan	6	-	0	-6
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5	0
26	Dinas Kelautan dan Perikanan	5	Dinas Perikanan	5	0
27	Dinas Pariwisata	5	Dinas Pariwisata	5	0
28	Dinas Pertanian	6	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	5	-1

No	Nama OPD pada RPJMD	Jumlah Indikator RPJMD	Nama OPD pada RKPD	Jumlah Indikator RKPD	Selisih
29	Dinas Perkebunan	6	Dinas Perkebunan	6	0
30	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9	1
31	Sekretariat Daerah	3	Sekretariat Daerah	3	0
32	Sekretariat DPRD	2	Sekretariat DPRD	2	0
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	0
34	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3	0
35	Badan Pendapatan Daerah	2	Badan Pendapatan Daerah	2	0
36	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	0
37	Sekretariat Korpri	2	-	0	-2
38	Badan Penelitian dan Pengembangan	2	Badan Riset dan Inovasi Daerah	2	0
39	Inspektorat Daerah	3	Inspektorat	3	0
40	Kecamatan Long Mesangat	6	Kecamatan Long Mesangat	6	0
41	Kecamatan Karang	6	Kecamatan Karang	6	0
42	Kecamatan Teluk Pandan	6	Kecamatan Teluk Pandan	6	0
43	Kecamatan Sangkulirang	6	Kecamatan Sangkulirang	6	0
44	Kecamatan Kaliorang	6	Kecamatan Kaliorang	6	0
45	Kecamatan Batu Ampar	6	Kecamatan Batu Ampar	6	0
46	Kecamatan Muara Wahau	6	Kecamatan Muara Wahau	6	0
47	Kecamatan Rantau Pulung	6	Kecamatan Rantau Pulung	6	0
48	Kecamatan Bengalon	6	Kecamatan Bengalon	6	0

No	Nama OPD pada RPJMD	Jumlah Indikator RPJMD	Nama OPD pada RKPD	Jumlah Indikator RKPD	Selisih
49	Kecamatan Muara Ancalong	6	Kecamatan Muara Ancalong	6	0
50	Kecamatan Sandaran	6	Kecamatan Sandaran	6	0
51	Kecamatan Busang	6	Kecamatan Busang	6	0
52	Kecamatan Kaubun	6	Kecamatan Kaubun	6	0
53	Kecamatan Kongbeng	6	Kecamatan Kongbeng	6	0
54	Kecamatan Muara Bengkal	6	Kecamatan Muara Bengkal	6	0
55	Kecamatan Sangatta Utara	6	Kecamatan Sangatta Utara	6	0
56	Kecamatan Sangatta Selatan	6	Kecamatan Sangatta Selatan	6	0
57	Kecamatan Telen	6	Kecamatan Telen	6	0
58	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7	0

Sumber: diolah dari matriks konsistensi indikator kinerja RPJMD dan RKPD Tahun 2025.

Berdasarkan tabel tersebut, mayoritas perangkat daerah menunjukkan jumlah indikator yang sama antara RPJMD dan RKPD. Hal ini menandakan bahwa pada sebagian besar urusan pemerintahan, kerangka pengukuran kinerja tahunan masih mengikuti rancangan pengukuran kinerja jangka menengah. Kelompok perangkat daerah yang indikatornya tetap meliputi Dinas Kesehatan, RSUD Kudungga, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Perkebunan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Bappeda, BPKAD, Bapenda, Badan Riset dan Inovasi Daerah, Inspektorat, seluruh kecamatan, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Konsistensi yang luas ini menunjukkan bahwa secara umum arsitektur indikator kinerja daerah masih stabil.

Perubahan indikator paling besar terjadi pada Dinas Pendidikan yang dalam RKPD telah menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dengan jumlah indikator meningkat dari 7 menjadi 13. Kenaikan ini merupakan perubahan yang paling menonjol dan secara substantif dapat dijelaskan oleh penggabungan urusan pendidikan dengan kebudayaan. Dalam RPJMD, urusan kebudayaan masih berdiri sebagai perangkat tersendiri dengan 6 indikator, sedangkan pada RKPD urusan tersebut telah terintegrasi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Artinya, penambahan indikator pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak semata-mata menunjukkan ekspansi indikator baru, tetapi juga merupakan konsekuensi penataan kelembagaan dan penggabungan urusan. Dengan demikian, peningkatan indikator pada perangkat ini lebih tepat dibaca sebagai realokasi indikator, bukan deviasi kebijakan.

Perubahan penting berikutnya terjadi pada Dinas Pekerjaan Umum yang dalam RKPD menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dari 12 indikator menjadi 13 indikator. Penambahan ini menunjukkan penguatan dimensi pengukuran kinerja pada urusan infrastruktur dan tata ruang. Sementara itu, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang dalam RPJMD berubah menjadi Dinas Pertanahan pada RKPD

dengan indikator turun dari 10 menjadi 6. Pola ini menunjukkan adanya pemisahan atau redistribusi fungsi indikator antara urusan pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan. Secara teknokratik, kondisi ini memperlihatkan bahwa perubahan indikator sangat berkaitan dengan penataan struktur organisasi dan reposisi urusan, sehingga analisis konsistensi tidak dapat dibaca semata dari selisih jumlah, tetapi juga harus mempertimbangkan perpindahan fungsi dan mandat kelembagaan.

Perangkat daerah lain yang mengalami perubahan indikator adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari 3 menjadi 2 indikator, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dari 8 menjadi 7 indikator, Dinas Lingkungan Hidup dari 12 menjadi 11 indikator, Dinas Penanaman Modal dan PTSP dari 7 menjadi 6 indikator, serta Dinas Pertanian yang pada RKPD menjadi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dari 6 menjadi 5 indikator. Penurunan jumlah indikator pada perangkat-perangkat tersebut menunjukkan adanya penyederhanaan atau penajaman pengukuran kinerja. Dalam praktik perencanaan, penyederhanaan indikator sering diperlukan agar pengukuran lebih fokus pada outcome yang lebih relevan dan lebih mudah dipantau. Selama penajaman tersebut tetap menjaga hubungan logis dengan sasaran RPJMD, maka perubahan ini masih dapat diterima sebagai penyesuaian teknokratik.

Sebaliknya, beberapa perangkat daerah mengalami penambahan indikator meskipun tidak sebesar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik meningkat dari 6 menjadi 7 indikator, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan meningkat dari 8 menjadi 9 indikator. Kenaikan ini menunjukkan adanya perluasan titik ukur kinerja pada sektor-sektor yang berkembang dinamis, terutama sektor layanan digital pemerintahan dan penguatan kegiatan ekonomi produktif. Dalam konteks tahun 2025 yang ditandai dengan penyesuaian kebijakan dan kebutuhan penguatan pelayanan berbasis teknologi, kenaikan indikator pada perangkat daerah tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari penyesuaian fokus pembangunan agar lebih relevan dengan kondisi aktual.

Dua entitas yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah Dinas Kebudayaan dan Sekretariat Korpri. Dalam RPJMD, Dinas Kebudayaan memiliki 6 indikator dan Sekretariat Korpri memiliki 2 indikator, namun pada RKPD keduanya tidak lagi muncul sebagai perangkat daerah tersendiri. Secara teknokratik, hilangnya dua entitas ini tidak dapat langsung dimaknai sebagai hilangnya fungsi pembangunan. Pada urusan kebudayaan, indikator dan program pada praktiknya telah berpindah ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pada Sekretariat Korpri, fungsi dan indikatornya kemungkinan telah terintegrasi ke perangkat lain yang menangani urusan kepegawaian dan pembinaan ASN. Perubahan ini lebih tepat dibaca sebagai perubahan wadah kelembagaan daripada hilangnya substansi kinerja.

Secara umum, perubahan indikator kinerja antara RPJMD dan RKPD dipengaruhi oleh tiga faktor utama.

- i. Perubahan nomenklatur OPD yang berdampak pada pemetaan indikator ke dalam unit kerja yang berbeda.
- ii. Penyesuaian terhadap kebijakan nasional dan daerah yang menyebabkan perubahan jumlah indikator pada beberapa sektor strategis.
- iii. Penyederhanaan atau penyempurnaan metode pengukuran kinerja sehingga sebagian perangkat daerah mengalami penambahan atau pengurangan jumlah indikator.

Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa dinamika indikator pada RKPD Tahun 2025 lebih banyak dipengaruhi oleh kebutuhan penyesuaian teknis dan kelembagaan daripada perubahan arah kebijakan pembangunan secara mendasar.

Dari perspektif kualitas perencanaan, kondisi ini memperlihatkan bahwa pengendalian indikator kinerja di Kabupaten Kutai Timur sudah relatif baik, tetapi masih memerlukan penguatan pada dua aspek.

- i. Konsistensi penamaan dan penempatan indikator perlu semakin diperjelas agar perubahan nomenklatur perangkat daerah tidak memunculkan kesan seolah-olah terjadi deviasi kinerja, padahal substansi indikatornya hanya berpindah wadah.

- ii. Setiap penambahan atau pengurangan indikator sebaiknya selalu disertai argumentasi teknokratik yang kuat, terutama terkait relevansi indikator terhadap sasaran RPJMD, kemudahan pengukuran, serta kualitas data pendukungnya.

Dengan langkah tersebut, perubahan indikator tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memperbaiki kualitas pengukuran hasil pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, konsistensi indikator kinerja antara RKPD Tahun 2025 dengan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021–2026 berada pada kategori tinggi. Sebagian besar perangkat daerah mempertahankan jumlah indikator yang sama, sementara perubahan yang terjadi pada sebagian perangkat daerah terutama disebabkan oleh penyesuaian nomenklatur, penggabungan atau pemisahan urusan, serta penajaman pengukuran kinerja. Hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa secara indikator, RKPD Tahun 2025 masih cukup kuat dalam menjaga kesinambungan sistem pengukuran kinerja pembangunan jangka menengah. Namun demikian, perubahan pada beberapa perangkat daerah tetap perlu menjadi perhatian agar sinkronisasi indikator, target, dan pagu anggaran pada subbab berikutnya tetap terjaga secara utuh.

4.5 Konsistensi Target Kinerja antara RKPD dengan RPJMD

Konsistensi target kinerja antara RKPD Tahun 2025 dengan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021–2026 merupakan aspek krusial dalam memastikan bahwa pencapaian pembangunan tahunan tetap berada pada jalur yang telah dirancang dalam dokumen pembangunan jangka menengah. Target kinerja yang dimuat dalam RKPD seharusnya mencerminkan tahapan pencapaian yang telah ditetapkan dalam RPJMD, sehingga setiap indikator pembangunan dapat diukur secara berkelanjutan dan sejalan dengan arah kebijakan daerah. Pada dokumen evaluasi RKPD Tahun 2025 ditegaskan bahwa sebagian besar target indikator kinerja dalam RKPD telah disusun dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD 2021–2026, sehingga tingkat konsistensinya secara umum tergolong tinggi. Ketidaksesuaian target yang masih muncul terutama dipengaruhi oleh penyesuaian capaian tahun sebelumnya, perubahan nomenklatur OPD, serta kebutuhan penyesuaian terhadap kondisi aktual pembangunan daerah.

Dari sudut pandang teknokratik, konsistensi target kinerja tidak hanya berarti kesamaan angka antara RKPD dan RPJMD, tetapi juga kesesuaian logika tahapan pencapaian. Dalam praktik perencanaan, terdapat target yang memang harus sama karena merupakan milestone tahunan yang sudah ditetapkan secara bertahap dalam RPJMD. Namun terdapat pula target yang disesuaikan di RKPD untuk merespons realisasi tahun sebelumnya, dinamika kebijakan, keterbatasan kapasitas, maupun perubahan kondisi makro pembangunan daerah. Evaluasi pada subbab ini diarahkan untuk menilai apakah perubahan target yang muncul masih berada dalam kerangka pencapaian RPJMD, atau justru berpotensi melemahkan kesinambungan perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 4.5 Perbandingan Target Kinerja RPJMD dan RKPD Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	RPJMD 2021–2026	RKPD 2025
1	Persentase sekolah yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	Persen	SD = 100; SMP = 95,40	SD = 100,00; SMP = 96,55
2	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,10	13,20
3	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,45	9,55
4	Rasio ketersediaan SD/MI per penduduk	Rasio	56,68	

No	Indikator Kinerja	Satuan	RPJMD 2021–2026	RKPD 2025
5	Rasio ketersediaan SMP/MTs per penduduk	Rasio	53,36	
6	Persentase guru yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1	Persen	99,03	
7	Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persen	100	
8	Rasio puskesmas/poliklinik/pustu per satuan penduduk	Rasio	0,51	
9	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	Rasio	0,02	
10	Tercapainya peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persen	100	
11	Angka Harapan Hidup	Tahun	76,67	76,67
12	Persentase apotik dan toko obat serta ORTP yang memenuhi syarat	Persen	100	
13	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Persen	100	
14	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan Dinas Kesehatan	Persen	100	
15	Akreditasi RSUD	Indeks	Utama	
16	Tingkat kepuasan pelanggan RSUD Kudungga	Persen	91,5	
17	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	80,11	
18	Persentase jalan kabupaten kondisi mantap	Persen	53,72	
19	Capaian akses air minum layak	Persen	53,90	
20	Persentase infrastruktur pengelolaan sampah perkotaan	Persen	90,75	
21	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	Persen	77,08	

No	Indikator Kinerja	Satuan	RPJMD 2021–2026	RKPD 2025
22	Cakupan wilayah saluran drainase rawan genangan air/banjir (perkotaan)	Persen	96,16	
23	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Rasio	2,4990	
24	Persentase bangunan gedung perkantoran kondisi baik	Persen	59,26	
25	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber-HPL/HGB	Rasio	0,3550	
26	Cakupan penerbitan IUJK	Persen	80,07	
27	Rasio tenaga terampil yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	12,51	
28	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan Dinas PUPR	Persen	100,00	
29	Ketaatan terhadap RTRW	Persen	100	
30	Jumlah Perkada RDTR	Dokumen	2	
31	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Persen	26,051	
32	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Persen	1,2309	
33	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	Persen	24,91	
34	Cakupan penerbitan izin pengembangan	Persen	76,057	
35	Berkurangnya jumlah unit RTLH	Persen	0,2493	
36	Tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	Persen	98,83	
37	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	Persen	0,06	
38	Penurunan Indeks Risiko Bencana	IRB	160	
39	Persentase cakupan pelayanan bencana kabupaten/kota	Persen	85	

No	Indikator Kinerja	Satuan	RPJMD 2021–2026	RKPD 2025
40	Persentase penegakan Perda	Persen	70,00	73,99
41	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan laporan keuangan Satpol PP	Persen	65,00	
42	Persentase PMKS yang mendapatkan jaminan dan perlindungan sosial kelompok maupun perorangan	Persen	69,84	
43	Persentase korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Persen	100	
44	Persentase PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial	Persen	100	
45	Persentase PMKS yang mendapatkan jaminan dan perlindungan sosial	Persen	100	
46	Persentase warga negara migran yang ditangani	Persen	65	
47	Nilai SAKIP	Nilai	76,29	
48	Persentase lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/kompetensi	Persen	72	
49	Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persen	70	
50	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja	Persen	53,49	
51	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja layak	Persen	100	
52	Indeks Tahapan Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persen	60	
53	Indeks Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi	Indeks	60	
54	Indeks Perkembangan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persen	60	

No	Indikator Kinerja	Satuan	RPJMD 2021–2026	RKPD 2025
55	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan laporan keuangan Disnakertrans	Persen	96	
56	Profil gender dan anak / tersedianya data pilah gender dan anak	Dokumen	3	
57	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	56,30	
58	Rasio KDRT	Persen	0,003	
59	Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Predikat	Nindya	
60	Rasio kekerasan terhadap anak	Persen	0,014	
61	Laporan kinerja perangkat daerah	Dokumen	2	
62	Ketersediaan pangan utama	Persen	45,16	
63	Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks	108,55	109,648
64	Penguatan cadangan pangan	Persen	76	
65	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Persen	91,9	
66	Persentase desa yang memiliki lumbung pangan	Persen	6,38	
67	Penanganan daerah rawan pangan	Persen	21,01	
68	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	95	
69	Jumlah kasus yang terselesaikan	Kasus	7	
70	Persentase antara luas bidang tanah yang sudah diselesaikan ganti kerugian/jumlah bidang tanah target ganti kerugian	Persen	97,10	99,41
71	Terdokumentasinya administrasi pertanahan dan penatagunaan tanah	Dokumen	1	
72	Jumlah laporan izin yang diterbitkan	Laporan	1	
73	Jumlah laporan rekomendasi pemberian izin lokasi (rekomendasi KKPR)	Laporan	1	
74	Jumlah laporan hasil survei tanah ulayat	Laporan	1	

No	Indikator Kinerja	Satuan	RPJMD 2021–2026	RKPD 2025
75	Jumlah laporan inventarisasi tanah kosong	Laporan	1	
76	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan	Persen	100	
77	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	70,97	
78	Hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	77,59	
79	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan	Jumlah	142,8	144,2
80	Persentase penanganan sampah	Persen	41,84	
81	Jumlah dokumen lingkungan hidup	Dokumen	1	
82	Luas penanaman daerah sempadan sungai	Ha	-	
83	Jumlah SK Izin TPS LB3	Izin	12	
84	Jumlah SK yang diterbitkan	SK	3	
85	Jumlah sekolah yang masuk dalam kriteria Sekolah Adiwiyata	Sekolah	8	
86	Jumlah penghargaan lingkungan hidup	Penghargaan	4	
87	Jumlah kasus lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Kasus	6	
88	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Rasio	95,00	
89	Rasio anak 0–17 tahun memiliki KIA	Persen	35,00	
90	Cakupan penerbitan akta kelahiran 0–18 tahun	Persen	95,00	98
91	Rasio ketersediaan alat perekaman di 18 kecamatan	Persen	76,16	
92	Rasio ketersediaan data untuk pembangunan lintas sektor	Rasio	76,16	
93	Rasio ketersediaan penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	

No	Indikator Kinerja	Satuan	RPJMD 2021–2026	RKPD 2025
94	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Persen	60	
95	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Persen	91,19	
96	Persentase pertambahan kerja sama desa dan antar desa	Persen	84,88	
97	Persentase BUMDes yang berjalan baik	Persen	85,60	
98	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan laporan keuangan	Persen	100	
99	Persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1	Persen	12,09	
100	Laju pertumbuhan penduduk	Persen	4,0	3,9
101	Angka kelahiran total (TFR)	Persen	2,04	
102	Akuntabilitas perangkat daerah	Persen	90	
103	Jumlah KIR kendaraan umum	Unit	6000	
104	Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bus	Unit	Pelabuhan=4; Bandara=1; Terminal=5	
105	Cakupan layanan telekomunikasi	Persen	83,17	
106	Persentase OPD yang terkoneksi dengan jaringan fiber optik	Persen	48,57	
107	Jumlah UMKM yang difasilitasi	Jumlah	150	
108	Persentase koperasi yang aktif	Persen	57,95	
109	Jumlah KSP/USP yang mendapat penilaian kesehatan	Jumlah	20 Koperasi	
110	Jumlah pengurus KUMKM yang mengikuti pelatihan	Jumlah	240 KUMKM	
111	Jumlah koperasi yang difasilitasi nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penataan manajemen dan restrukturisasi	Jumlah	100 Koperasi	
112	Jumlah UMKM	Unit	7.842	
113	Jumlah kajian potensi daerah	Dokumen	4	

No	Indikator Kinerja	Satuan	RPJMD 2021–2026	RKPD 2025
114	Jumlah kegiatan promosi	Kegiatan	4	
115	Jumlah realisasi investasi PMDN dan PMA	Triliun	3,66	
116	Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Proyek	796	
117	Persentase kerja internal terlayani administrasi	Persen	100	
118	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana	Persen	100	
119	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	79	83,00
120	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	69,84	
121	Persentase prestasi olahraga	Persen	33,33	
122	Persentase organisasi kepramukaan yang aktif	Persen	21,57	
123	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/Tidak	Ada	
124	Tokoh adat yang menerima insentif	Orang	150	
125	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kegiatan	6	
126	Benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Persen	43	
127	Fasilitasi SDM dan lembaga sejarah	Orang	10	
128	Terpeliharanya koleksi benda cagar budaya	Persen	100	
129	Persentase koleksi judul buku agama, budaya, sosial di perpustakaan	Persen	79	
130	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	3.500	
131	Jumlah OPD/desa/BUMD yang telah menerapkan sesuai aturan	Jumlah	10 OPD; 4 Desa; 1 BUMD	
132	Jumlah arsip terlindungi dan terselamatkan	Arsip	75	
133	Jumlah arsip yang dapat diakses	Arsip	50	

No	Indikator Kinerja	Satuan	RPJMD 2021–2026	RKPD 2025
134	Konsumsi perikanan	Persen	42,1	
135	Produksi perikanan	Ton	8.086,11	
136	Jumlah/jenis bibit/benih unggul/komoditi utama	Jenis	5	
137	Jumlah kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS)	Kelompok	6	
138	Objek destinasi wisata	Objek	15	
139	Kunjungan wisata	Persen	97,2	
140	Event pariwisata dalam dan luar negeri	Event	4	
141	Jumlah penyediaan/pengembangan infrastruktur kepariwisataan	Infrastruktur	1	
142	Jumlah kelompok sadar wisata yang bergerak pada ekonomi kreatif	Kelompok	11	
143	Produksi sektor pertanian	Ton	46.765	
144	Produktivitas padi	Persen	4	
145	Produksi sektor peternakan	Ton	3.278	
146	Peningkatan alat mesin pertanian/peternakan	Unit	1.736	
147	Cakupan bina kelompok tani	Persen	21,43	
148	Panjang jalan usaha tani	Km	191	
149	Pembangunan prasarana pertanian	Kegiatan	7	
150	Jumlah ternak hasil inseminasi buatan	Ekor	500	
151	Produksi sektor perkebunan	Ton	7.956.662	
152	Produktivitas perkebunan	Persen	19,20	
153	Jumlah prasarana pertanian yang disediakan	Prasarana	1	
154	Terkendalnya dan tertanggulangnya bencana pertanian	Ha	2.000	

No	Indikator Kinerja	Satuan	RPJMD 2021–2026	RKPD 2025
155	Jumlah PBS/Koperasi yang dimonitor dan dievaluasi izinnya	Jumlah	20	
156	Jumlah SDM pertanian yang ditingkatkan	Orang	150	
157	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Dinas Perkebunan	Persen	72	
158	Jumlah pasar	Unit	15	
159	Jumlah rekomendasi/fasilitasi izin yang diterbitkan	Laporan	1	
160	Jumlah operasi pasar	Kali	4	
161	Jumlah pembinaan terhadap pelaku usaha ekspor	Jumlah	6	
162	Jumlah alat UTTP yang terstandarisasi	Layanan	400	
163	Pertumbuhan jumlah IKM	Jumlah	1.620	1.620
164	Jumlah jenis pelayanan publik terhadap aparatur Disperindag	Jumlah	19	
165	Pemuka agama yang menerima insentif	Orang	595	
166	Penyelenggaraan festival keagamaan	Kegiatan	1	
167	Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Predikat	Predikat Status Tinggi	
168	Persentase implementasi kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat dan kerja sama	Persen	100	
169	Persentase implementasi kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa, dan sumber daya alam	Persen	100	
170	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	Persen	100	

No	Indikator Kinerja	Satuan	RPJMD 2021–2026	RKPD 2025
171	Tersusunnya dan terintegrasinya program kerja DPRD dalam dokumen rencana	Ada/Tidak	Ada	
172	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	Persen	100	100,00
173	Penjabaran konsistensi program RPJMD, RKPD ke dalam Renstra dan Renja OPD	Persen	100	
174	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	WTP	
175	Persentase PAD terhadap pendapatan	Persen	7,05	10,66
176	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	40,00	40,00
177	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Hari	260	260
178	Distribusi ASN	SK	2.500	
179	Cakupan pembinaan dan fasilitasi anggota Korpri	Persen	100	
180	Persentase implementasi rencana kelitbangan	Persen	80,00	80
181	Jumlah temuan BPK	Jumlah	16	
182	Cakupan pengaduan OPD dan masyarakat	Persen	0,00	
183	Jumlah penyelenggaraan pelayanan publik	Jumlah	17	
184	Cakupan peran serta masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	Persen	92	
185	Jumlah pelanggaran Perda/Perkada	Persen	0	
186	Jumlah pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Jumlah	8	

No	Indikator Kinerja	Satuan	RPJMD 2021–2026	RKPD 2025
187	Cakupan fasilitasi pembinaan, pengawasan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan	Persen	92	
188	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	75,64	76,00
189	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,56	5,30
190	Tingkat Kemiskinan	Persen	9,50	7,87
191	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Persen	10,11	10,41
192	Indeks Pembangunan Desa (IPD)	Indeks	71,32	72,93
193	Indeks Gini	Indeks	0,348	0,300
194	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Indeks	2,14	8,00
195	Pertumbuhan jumlah industri kecil menengah	Unit	1.620	
196	LSM/Organisasi yang aktif	Jumlah	199	280

Sumber : olah data

4.6 Konsistensi Pagu Anggaran antara RKPD dengan RPJMD

Konsistensi pagu anggaran antara RPJMD dan RKPD merupakan salah satu unsur penting dalam pengendalian perencanaan pembangunan daerah. Pagu anggaran menunjukkan sejauh mana prioritas, program, dan arah pembangunan jangka menengah diterjemahkan ke dalam dukungan pendanaan tahunan pada masing-masing perangkat daerah. Perbandingan pagu antara RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021–2026 dan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 diperlukan untuk menilai keterjagaan hubungan antara perencanaan strategis dan perencanaan tahunan. Dalam subbab ini, perbandingan dilakukan pada tingkat perangkat daerah dengan tetap memperhatikan adanya perubahan nomenklatur OPD antara dokumen RPJMD dan RKPD. Hal ini penting agar perbedaan pagu dibaca secara proporsional, baik sebagai bentuk penyesuaian kelembagaan maupun sebagai cerminan perubahan prioritas pendanaan pembangunan daerah. RKPD 2025 sendiri memuat rekapitulasi pagu indikatif berdasarkan perangkat daerah, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk melihat konsistensi pendanaan tahunan terhadap arah pembiayaan yang dirumuskan dalam RPJMD.

Tabel 4.6 Konsistensi Pagu Anggaran antara RPJMD dengan RKPD Tahun 2025**

No	RPJMD 2021 -2026		RKPD 2025	
	Nama OPD	Pagu Anggaran	Nama OPD	Pagu Anggaran
1	Dinas Pendidikan	Rp722.159.599.729	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp1.549.808.495.399

No	RPJMD 2021 -2026		RKPD 2025	
	Nama OPD	Pagu Anggaran	Nama OPD	Pagu Anggaran
2	Dinas Kesehatan	Rp504.833.856.613	Dinas Kesehatan	Rp525.110.841.003
3	RSUD Kudungga	Rp149.795.900.000	RSUD Kudungga	Rp224.661.435.975
4	Dinas Pekerjaan Umum	Rp188.516.618.837	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp1.495.392.709.929
5	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Rp32.563.756.485	Dinas Pertanahan	Rp21.269.117.581
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rp85.145.275.996	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rp1.151.292.595.803
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Rp31.308.510.392	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Rp57.557.163.071
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp28.350.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp31.990.437.066
9	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp19.015.691.710	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp53.723.633.688
10	Dinas Sosial	Rp29.547.169.000	Dinas Sosial	Rp25.625.430.849
11	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	Rp28.342.960.000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Rp81.378.051.366
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp14.247.915.522	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp33.009.377.709

No	RPJMD 2021 -2026		RKPD 2025	
	Nama OPD	Pagu Anggaran	Nama OPD	Pagu Anggaran
13	Dinas Ketahanan Pangan	Rp18.653.804.950	Dinas Ketahanan Pangan	Rp98.835.012.001
14	Dinas Lingkungan Hidup	Rp31.550.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Rp54.526.250.654
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp25.235.760.202	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp36.379.594.223
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp335.789.866.300	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp46.018.797.292
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp35.580.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp29.162.428.702
18	Dinas Perhubungan	Rp63.114.842.426	Dinas Perhubungan	Rp80.415.266.463
19	Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik	Rp31.775.000.000	Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik	Rp102.101.849.082
20	Dinas Koperasi dan UMKM	Rp17.837.904.000	Dinas Koperasi dan UMKM	Rp43.284.230.130
21	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Rp16.527.973.000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Rp32.160.587.855
22	Dinas Pemuda & Olahraga	Rp19.373.667.152	Dinas Pemuda & Olahraga	Rp259.918.371.199
23	Dinas Kebudayaan	Rp12.000.000.000	-	-

No	RPJMD 2021 -2026		RKPD 2025	
	Nama OPD	Pagu Anggaran	Nama OPD	Pagu Anggaran
24	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	Rp18.662.018.000	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	Rp52.709.598.433
25	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp18.477.418.503	Dinas Perikanan	Rp63.063.941.035
26	Dinas Pariwisata	Rp17.752.496.500	Dinas Pariwisata	Rp99.165.665.416
27	Dinas Pertanian	Rp20.731.953.943	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan	Rp155.257.115.726
28	Dinas Perkebunan	Rp30.015.000.000	Dinas Perkebunan	Rp45.736.076.636
29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp16.997.461.205	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp77.659.379.875
30	Sekretariat Daerah	Rp238.040.579.000	Sekretariat Daerah	Rp525.640.622.546
31	Sekretariat DPRD	Rp138.855.150.000	Sekretariat DPRD	Rp152.108.547.151
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp36.955.814.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp52.054.461.783
33	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Rp52.945.507.503	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp1.223.791.257.807
34	Badan Pendapatan Daerah	Rp51.672.992.590	Badan Pendapatan Daerah	Rp77.278.006.936
35	Badan Kepegawaian	Rp25.734.500.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan	Rp53.446.109.851

No	RPJMD 2021 -2026		RKPD 2025	
	Nama OPD	Pagu Anggaran	Nama OPD	Pagu Anggaran
	Pendidikan dan Pelatihan		Sumber Daya Manusia	
36	Sekretariat Korpri	Rp4.422.500.000	-	-
37	Badan Penelitian dan Pengembangan	Rp10.717.830.387	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Rp14.171.550.428
38	Inspektorat Daerah	Rp28.794.214.169	Inspektorat Daerah	Rp64.043.426.527
39	Kecamatan Long Mesangat	Rp5.592.679.296	Kecamatan Long Mesangat	Rp10.931.208.682
40	Kecamatan Karang	Rp4.890.378.809	Kecamatan Karang	Rp7.475.753.166
41	Kecamatan Teluk Pandan	Rp7.575.770.000	Kecamatan Teluk Pandan	Rp11.263.544.910
42	Kecamatan Sangkulirang	Rp8.513.681.000	Kecamatan Sangkulirang	Rp10.356.566.208
43	Kecamatan Kaliorang	Rp6.038.624.412	Kecamatan Kaliorang	Rp8.923.223.697
44	Kecamatan Batu Ampar	Rp4.940.000.000	Kecamatan Batu Ampar	Rp8.883.787.662
45	Kecamatan Muara Wahau	Rp7.629.960.000	Kecamatan Muara Wahau	Rp12.419.363.784
46	Kecamatan Rantau Pulung	Rp4.147.381.900	Kecamatan Rantau Pulung	Rp7.807.588.612
47	Kecamatan Bengalon	Rp7.362.872.437	Kecamatan Bengalon	Rp13.119.612.875
48	Kecamatan Muara Ancalong	Rp8.564.864.000	Kecamatan Muara Ancalong	Rp12.807.574.815
49	Kecamatan Sandaran	Rp6.725.250.000	Kecamatan Sandaran	Rp8.256.683.634
50	Kecamatan Busang	Rp6.725.591.444	Kecamatan Busang	Rp8.980.137.464

No	RPJMD 2021 -2026		RKPD 2025	
	Nama OPD	Pagu Anggaran	Nama OPD	Pagu Anggaran
51	Kecamatan Kaubun	Rp4.630.550.000	Kecamatan Kaubun	Rp8.456.727.740
52	Kecamatan Kongbeng	Rp6.470.000.000	Kecamatan Kongbeng	Rp11.305.529.299
53	Kecamatan Muara Bengkal	Rp9.072.000.000	Kecamatan Muara Bengkal	Rp14.995.091.050
54	Kecamatan Sangatta Utara	Rp11.654.407.112	Kecamatan Sangatta Utara	Rp24.746.037.794
55	Kecamatan Sangatta Selatan	Rp11.673.005.888	Kecamatan Sangatta Selatan	Rp20.562.700.963
56	Kecamatan Telen	Rp6.551.307.410	Kecamatan Telen	Rp10.245.222.219
57	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp15.493.289.175	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp34.130.495.036

Sumber: diolah dari RPJMD dan RKPD 2025 Kabupaten Kutai Timur

Berdasarkan Tabel 4.6, secara umum pagu anggaran pada RKPD Tahun 2025 menunjukkan adanya **kenaikan yang cukup besar** dibandingkan pagu indikatif yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021–2026 pada hampir seluruh perangkat daerah. Kenaikan tersebut terlihat, antara lain, pada Dinas Pendidikan yang dalam RKPD 2025 dipadankan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum yang dipadankan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Sekretariat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta sejumlah perangkat daerah lainnya. Pada sisi lain, terdapat pula beberapa perangkat daerah yang menunjukkan pagu RKPD lebih rendah dibandingkan pagu RPJMD, seperti Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang yang pada RKPD muncul sebagai Dinas Pertanahan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsistensi pagu anggaran antara RPJMD dan RKPD Tahun 2025 **tidak sepenuhnya identik secara nominal**, melainkan mengalami penyesuaian yang cukup dinamis pada tingkat perangkat daerah.

Ketidaksamaan nominal pagu ini dipicu oleh reorganisasi perangkat daerah dan pergeseran fokus belanja tahunan, sehingga tidak mencerminkan deviasi kebijakan yang mendasar. Dalam beberapa kasus, kenaikan pagu pada RKPD tidak serta-merta menunjukkan penyimpangan dari RPJMD, tetapi dapat dipengaruhi oleh **perubahan nomenklatur perangkat daerah, penyesuaian struktur kelembagaan, pengelompokan urusan, serta penajaman prioritas pembangunan tahunan**. Hal ini tampak pada sejumlah perangkat daerah yang mengalami perubahan nama atau padanan kelembagaan antara RPJMD dan RKPD, seperti Dinas Pendidikan menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kelautan dan Perikanan menjadi Dinas Perikanan, Dinas Pertanian menjadi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan, serta Badan Penelitian dan Pengembangan menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah. Dengan demikian, perbedaan pagu anggaran tidak dapat langsung ditafsirkan sebagai ketidakkonsistenan

substantif, karena pada beberapa perangkat daerah perubahan tersebut merupakan konsekuensi dari penataan kelembagaan dan penyesuaian penganggaran tahunan.

Meskipun demikian, dari perspektif evaluasi perencanaan, tabel tersebut juga menunjukkan bahwa **konsistensi pagu anggaran antara RPJMD dan RKPD Tahun 2025 belum sepenuhnya kuat pada level nominal**. Hal ini karena terdapat selisih pagu yang sangat lebar pada beberapa perangkat daerah, baik dalam bentuk peningkatan yang signifikan maupun penurunan yang cukup tajam. Kenaikan pagu yang sangat besar, misalnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, menunjukkan bahwa RKPD 2025 memuat dukungan pendanaan yang jauh lebih besar dibanding pagu yang terbaca pada RPJMD. Sebaliknya, pada beberapa perangkat daerah tertentu, pagu RKPD justru berada di bawah pagu RPJMD. Perbedaan seperti ini menunjukkan bahwa pada level anggaran, RKPD Tahun 2025 lebih bersifat adaptif terhadap kebutuhan tahun berjalan, sehingga keterkaitannya dengan RPJMD perlu dibaca dalam konteks penyesuaian prioritas pendanaan, bukan hanya kesamaan nominal semata.

Di samping itu, terdapat perangkat daerah yang pada RPJMD masih tercantum sebagai entitas tersendiri, tetapi pada RKPD 2025 tidak lagi muncul secara terpisah, seperti **Dinas Kebudayaan dan Sekretariat Korpri**. Keadaan ini menegaskan bahwa perbandingan pagu anggaran antara RPJMD dan RKPD tidak selalu dapat dilakukan secara lurus tanpa mempertimbangkan perubahan struktur organisasi perangkat daerah. Dalam membaca tabel ini, yang lebih penting bukan hanya apakah angka pagunya sama atau berbeda, melainkan apakah **arah pendanaan tahunan dalam RKPD masih mendukung urusan, fungsi, dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD**. Dengan kata lain, konsistensi pagu perlu dipahami sebagai konsistensi arah dukungan fiskal terhadap agenda pembangunan daerah, bukan semata-mata kesamaan angka pada tiap perangkat daerah.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa konsistensi pagu anggaran antara RPJMD dan RKPD Tahun 2025 berada pada kategori **cukup terjaga dari sisi arah pendanaan**, tetapi **belum sepenuhnya stabil dari sisi nominal per perangkat daerah**. RKPD Tahun 2025 tetap memperlihatkan dukungan pendanaan terhadap perangkat daerah yang menjadi penggerak utama pembangunan, namun besarnya telah mengalami berbagai penyesuaian sesuai dinamika kebutuhan pembangunan tahunan dan perubahan kelembagaan. Hasil pada subbab ini menunjukkan bahwa hubungan antara RPJMD dan RKPD pada aspek pagu anggaran masih berada dalam koridor perencanaan pembangunan daerah, tetapi memerlukan pembacaan yang lebih cermat agar perbedaan angka tidak langsung ditafsirkan sebagai ketidaksinkronan perencanaan. Narasi ini sekaligus menegaskan bahwa evaluasi konsistensi pagu anggaran harus dipadukan dengan analisis program, indikator, dan target kinerja agar kualitas penjabaran RPJMD ke dalam RKPD Tahun 2025 dapat dinilai secara lebih utuh.

4.7 Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD per Perangkat Daerah

Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD per perangkat daerah menunjukkan sejauh mana penjabaran program pembangunan, indikator kinerja, target, dan pagu anggaran pada dokumen tahunan masih berada dalam koridor dokumen jangka menengah. Pada tingkat perangkat daerah, kualitas konsistensi menjadi lebih konkret karena dapat langsung dilihat pada hubungan antara program yang direncanakan dalam RPJMD dengan program yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025. Analisis pada subbab ini tidak hanya menilai ada atau tidaknya kesesuaian, tetapi juga membaca bentuk penyesuaian yang terjadi pada indikator, target, maupun pagu. Dalam dokumen Evaluasi RKPD Kutim 2024, penyajian konsistensi pada tingkat perangkat daerah juga ditampilkan secara rinci per OPD melalui tabel yang membandingkan program, indikator, target, dan pagu antara RPJMD dan RKPD. Pola yang sama digunakan pada subbab ini agar keterlacakan konsistensi lebih jelas dan lebih mudah diverifikasi.

Secara umum, konsistensi antara RKPD Tahun 2025 dengan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021–2026 pada tingkat perangkat daerah berada pada kategori tinggi. Namun demikian, tingkat konsistensi tersebut tidak selalu berarti seluruh indikator, target, dan pagu bersifat sama persis. Pada beberapa perangkat daerah terjadi penyesuaian karena penggabungan urusan, perubahan nomenklatur,

penajaman indikator, perubahan kapasitas fiskal, dan penyesuaian prioritas pembangunan Tahun 2025. Oleh sebab itu, pembacaan konsistensi per perangkat daerah perlu dilakukan secara hati-hati agar perubahan yang terjadi dapat dipahami dalam konteks teknokratik, bukan semata-mata sebagai inkonsistensi administratif.

Tabel 4.7 Indikator, Target, dan Pagu per OPD pada RPJMD dan RKPD

No	OPD/Kecamatan	Program	Indikator	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025	Pagu RPJMD 2025	Pagu RKPD 2025
1	Dinas Pendidikan	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Sekolah yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal / Presentase Sekolah yang menerapkan Pembelajaran Kurikulum Muatan Lokal	SD = 100; SMP = 95,40	SD = 100; SMP = 95,40	Rp1.000.000.000	Rp2.000.000.000
2	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,10		Rp192.341.437.800	
3	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	9,45			
4	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Rasio ketersediaan SD/MI per penduduk	56,68			
5	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Rasio ketersediaan SMP/MTs per penduduk	53,36			
6	Dinas Pendidikan	Program Pendidikan dan Tenaga	Presentase Guru yang Telah Memenuhi	99,03		Rp3.600.000.000	

No	OPD/Kecamatan	Program	Indikator	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025	Pagu RPJMD 2025	Pagu RKPD 2025
		Kependidikan	Kualifikasi D4/S1				
7	Dinas Pendidikan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
8	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100%	100%	Rp125.763.319.467	Rp214.314.299.641
9	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,51		Rp84.277.058.172	
10	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	0,02		Rp300.000.000	

No	OPD/Kecamatan	Program	Indikator	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025	Pagu RPJMD 2025	Pagu RKPD 2025
		Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat					
11	Dinas Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan / Angka Harapan Hidup	100% / 76,67	/ 76,67	Rp2.192.604.814	Rp2.815.864.634
12	Dinas Kesehatan	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman	Persentase Apotik dan Toko Obat serta ORTP yang memenuhi syarat	100%			
13	Dinas Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Kecamatan yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	100%			
14	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan / Persentase Pemenuhan Layanan	100%		Rp300.147.621.310	

No	OPD/Kecamatan	Program	Indikator	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025	Pagu RPJMD 2025	Pagu RKPD 2025
			Kesekretariat an Dinkes				
15	RSUD Kudungga	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Akreditasi RSUD / Akreditasi RSUD Kudungga	Utama	Paripurna	Rp23.450.000.000	Rp65.048.850.000
16	RSUD Kudungga	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Pelanggan / Tingkat Kepuasan Pelanggan RSUD Kudungga	91,5%		Rp126.345.900.000	
17	Dinas Pekerjaan Umum	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	80,11		Rp19.884.154.962	
18	Dinas Pekerjaan Umum	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan Kabupaten kondisi Mantap	53,72		Rp60.335.903.700	
19	Dinas Pekerjaan Umum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyedia	Capaian Akses Air Minum Layak	53,90		Rp10.392.968.746	

No	OPD/Kecamatan	Program	Indikator	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025	Pagu RPJMD 2025	Pagu RKPD 2025
		an Air Minum					
20	Dinas Pekerjaan Umum	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Infrastruktur Pengelolaan Sampah Perkotaan	90,75		Rp9.533.590.300	
21	Dinas Pekerjaan Umum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah Domestik	77,08 % (aman 2,03%)		Rp6.177.863.400	
22	Dinas Pekerjaan Umum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Cakupan wilayah saluran drainase rawan genangan air/Banjir (Perkotaan)	96,16		Rp10.889.317.298,83	
23	Dinas Pekerjaan Umum	Program Pengembangan Permukiman	Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk	2,4990		Rp7.322.522.109,18	
24	Dinas Pekerjaan Umum	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung Perkantoran Kondisi Baik	59,26 %			
25	Dinas Pekerjaan Umum	Program Penataan	Rasio Ruang Terbuka Hijau	0,3550			

No	OPD/Kecamatan	Program	Indikator	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025	Pagu RPJMD 2025	Pagu RKPD 2025
	an Umum	Bangunan dan Lingkungannya	per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB				
26	Dinas Pekerjaan Umum	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Cakupan Penerbitan IUJK	80,07			
27	Dinas Pekerjaan Umum	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga terampil yang memiliki sertifikat kompetensi	12,51			
28	Dinas Pekerjaan Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Umum Perkantoran dan Laporan Keuangan PU	100,00			
29	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	100%	100	Rp32.563.756.485	Rp106.252.394.593
30	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Perkada RDTR	2 dokumen	2		
31	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	26,05 %		Rp35.178.691.925	

No	OPD/Kecamatan	Program	Indikator	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025	Pagu RPJMD 2025	Pagu RKPD 2025
	Permukiman	Utilitas Umum (PSU)					
32	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	1,2309			
33	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	24,91 %			
34	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Pelayanan, Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Cakupan Penerbitan Ijin Pengembangan	76,057 %			
35	Dinas Perumahan	Program Perumahan dan	Berkurangnya jumlah unit RTLH	0,2493			

No	OPD/Kecamatan	Program	Indikator	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025	Pagu RPJMD 2025	Pagu RKPD 2025
	Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kawasan Permukiman Kumuh					
36	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
37	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Time Response Limit) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	98,83	98,83	Rp31.308.510.392	Rp67.186.702.380
38	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten / Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	0,06	0,06%		

No	OPD/Kecamatan	Program	Indikator	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025	Pagu RPJMD 2025	Pagu RKPD 2025
		Kebakaran					
39	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Time Response Limit) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	98	98,83	Rp28.350.000.000	Rp51.351.035.826
41	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	Penurunan Indeks Risiko Bencana	160	160 IRB		
42	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Cakupan Pelayanan Bencana Kab/Kota	85			

No	OPD/Kecamatan	Program	Indikator	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025	Pagu RPJMD 2025	Pagu RKPD 2025
43	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penegakan Perda	70,00 %	70,00	Rp19.015.691.710	Rp35.681.492.518
44	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan / Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Satpol PP	65,00 %	97%		
45	Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan jaminan dan perlindungan sosial kelompok maupun perorangan	69,84	69,84	Rp29.547.169.000	Rp31.374.177.364
46	Dinas Sosial	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100	100		

No	OPD/Kecamatan	Program	Indikator	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025	Pagu RPJMD 2025	Pagu RKPD 2025
47	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh Rehabilitasi Sosial	100%	100		
48	Dinas Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan jaminan dan perlindungan sosial	100	100		
49	Dinas Sosial	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Negara Migran yang Ditangani / Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Mendapat Penanganan	65%	100%		
50	Dinas Sosial	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	76,29	71,73		
51	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan /kompetensi	72		Rp28.342.960.000	Rp115.153.715.963

No	OPD/Kecamatan	Program	Indikator	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025	Pagu RPJMD 2025	Pagu RKPD 2025
52	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu Rencana Tenaga Kerja (RTK)	70%			
53	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja	53,49	53,49%		
54	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja layak	100	100%		
55	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Indeks Tahapan Perencanaan Kawasan Transmigrasi	60	60		
56	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Indeks Pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat Kawasan Transmigrasi / Indeks Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi	60	50		

No	OPD/Kecamatan	Program	Indikator	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025	Pagu RPJMD 2025	Pagu RKPD 2025
57	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Indeks Perkembangan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	60	60%		
58	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan / Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Disnakertrans	96	96		
59	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Profil Gender dan Anak / Tersedianya data pilah gender dan anak	3 Dokumen	3 Dokumen	Rp14.247.915.522	Rp23.874.379.930
60	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	56,3	56,3		
61	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	Program Perlindungan Perempuan	Rasio KDRT / Ratio KDRT	0,003	0,003 persen		

No	OPD/Kecamatan	Program	Indikator	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025	Pagu RPJMD 2025	Pagu RKPD 2025
	Perlindungan Anak						
62	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Indeks Pemberdayaan Gender	56,30	56 persen		
63	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pemenuhan Hak Anak	KLA / Kabupaten/Kota Layak Anak	Nindya	Nindia predikat		
64	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Rasio Kekerasan terhadap anak / Ratio Kekerasan terhadap anak	0,014	0,014 persen		
65	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Kinerja Perangkat Daerah / Laporan kinerja perangkat daerah	2 dokumen	2 Dokumen		
66	Dinas Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	Ketersediaan Pangan Utama	45,16	45,16	Rp18.653.804.950	Rp87.086.644.086

No	OPD/Kecamatan	Program	Indikator	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025	Pagu RPJMD 2025	Pagu RKPD 2025
		Masyarakat					
67	Dinas Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Nilai Tukar Petani	108,55	108,55		
68	Dinas Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penguatan Cadangan Pangan	76	76		
69	Dinas Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	91,9	91,9		
70	Dinas Ketahanan Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Desa yang memiliki Lumbung Pangan	6,38	6,38%		

No	OPD/Kecamatan	Program	Indikator	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025	Pagu RPJMD 2025	Pagu RKPD 2025
71	Dinas Ketahanan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan daerah rawan pangan	21,01	21,01%		
72	Dinas Ketahanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	95	95%		
73	Dinas Ketahanan Pangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
74	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Jumlah kasus yang terselesaikan / Jumlah Kasus yang Terselesaikan	7 Kasus	7 Kasus	Rp32.563.756.485	Rp106.252.394.593
75	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase antara luas bidang tanah yang sudah diselesaikan ganti kerugian/jumlah bidang tanah target ganti kerugian	97,10 %	97,10%		
76	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Program Penatagunaan Tanah	Terdokumentasinya administrasi pertanahan dan penatagunaan	1 dokumen	1 Dok.		

No	OPD/Kecamatan	Program	Indikator	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025	Pagu RPJMD 2025	Pagu RKPD 2025
			n tanah / Terdokumentasinya Administrasi Pertanahan dan Penatagunaan Tanah				
77	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Jumlah Laporan Izin yang diterbitkan / Jumlah Laporan Izin yang Diterbitkan	1 Laporan	1 Lap.		
78	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Izin Lokasi	Jumlah Laporan Rekomendasi Pemberian Izin Lokasi	1 Laporan	1 Lap.		
79	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Program Penetapan Tanah Ulayat	Jumlah Laporan Hasil Survei Tanah Ulayat / Jumlah Laporan Hasil Survey Tanah Ulayat	1 Laporan	1 Laporan		
80	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Jumlah Laporan Inventarisasi tanah kosong / Jumlah Laporan Inventarisasi Tanah Kosong	1 Laporan	1 Laporan		
81	Dinas Pertanahan dan	Program Penunjang Urusan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Umum Perkantoran	100	100%		

No	OPD/Kecamatan	Program	Indikator	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025	Pagu RPJMD 2025	Pagu RKPD 2025
	Penataan Ruang	Daerah Kabupaten/Kota	dan Laporan Keuangan PPR / Cakupan Pelayanan Umum Perkantoran dan Laporan Keuangan				
82	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	IKLH / Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	70,97	72,00	Rp31.550.000.000	Rp86.808.301.495
83	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	77,59	77,59		
84	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan	142,8	142,8		
85	Dinas Lingkungan	Program Pengelolaan	Persentase Penanganan Sampah	41,84 %	41,84		

No	OPD/Kecamatan	Program	Indikator	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025	Pagu RPJMD 2025	Pagu RKPD 2025
	gan Hidup	Persampahan					
86	Dinas Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup	1,00	1 Dokumen		
87	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Luas penanaman daerah sempadan sungai / Luas Penanaman Daerah Sempadan Sungai	-	2000 HA		
88	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian B3 dan Limbah B3	Jumlah SK Izin TPS LB3	12 izin TPS LB3	12 izin TPS LB3		
89	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah SK yang diterbitkan	3,00	3 SK		
90	Dinas Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Jumlah Sekolah yang Masuk Dalam Kriteria Sekolah Adiwiyata	8,00	8 Sekolah		

No	OPD/Kecamatan	Program	Indikator	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025	Pagu RPJMD 2025	Pagu RKPD 2025
		Untuk Masyarakat					
91	Dinas Lingkungan Hidup	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah Penghargaan LH	4,00	4 Penghargaan		
92	Dinas Lingkungan Hidup	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Jumlah Kasus LH yang Ditindaklanjuti / Jumlah Kasus Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	6,00	6 Kasus		
93	Dinas Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
94	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk	Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk / Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	95,00 %	95,00	Rp29.120.073.751	Rp29.120.073.751

No	OPD/Kecamatan	Program	Indikator	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025	Pagu RPJMD 2025	Pagu RKPD 2025
95	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk	Rasio Anak 0-17 Tahun Memiliki KIA	35,00 %	60%		
96	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran 0-18 Tahun / Cakupan penerbitan akta kelahiran	95,00 %	95		
97	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rasio Ketersediaan Alat Perekaman di 18 Kecamatan	76,16 %	100%		
98	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rasio Ketersediaan data untuk pembangunan lintas sektor / Rasio Ketersediaan Data Untuk Pembangunan Lintas Sektor	76,16 %	1		
99	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Ketersediaannya Penunjang Urusan Pemerintahan	100	100%		

No	OPD/Kecamatan	Program	Indikator	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025	Pagu RPJMD 2025	Pagu RKPD 2025
100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	60	60	Rp335.789.866.300	Rp49.897.386.208
101	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Penataan Desa	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	91,19	91,19%		
102	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Pertambahan Kerjasama Desa dan/Antar Desa / Persentase Pertambahan Kerjasama Desa dan Antar Desa	84,88	9,00%		
103	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase BUMDes yang berjalan dengan baik / Persentase BUMDes yang Berjalan Baik (Aktif)	85,6	85,60%		
104	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100%		

No	OPD/Kecamatan	Program	Indikator	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025	Pagu RPJMD 2025	Pagu RKPD 2025
	akad dan Desa	ahan Daerah Kabupaten/Kota	dan Laporan Keuangan / Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan laporan keuangan				
105	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Presentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	12,09 %	12,09%	Rp35.580.000.000	Rp44.327.417.865
106	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	4,0%	4,0%		
107	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Angka Kelahiran total (TFR)	2,04	2,04%		
108	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Akuntabilitas Perangkat Daerah / Akuntabilitas OPD DPPKB	90%	90%		

No	OPD/Kecamatan	Program	Indikator	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025	Pagu RPJMD 2025	Pagu RKPD 2025
	Berencana	Kabupaten/Kota					
109	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah KIR Kendaraan Umum / Jumlah KIR Angkutan Umum	6000	6.000	Rp63.114.842.426	Rp186.724.847.442
110	Dinas Perhubungan	Program Pengelolaan Pelayaran	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Pelabuhan=4, Bandara=1, Terminal=5	Pelabuhan=4, Bandara=1, Terminal=6		
111	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
112	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan Layanan Telekomunikasi	83,17	83,17	Rp31.775.000.000	Rp265.871.820.108
113	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Program Aplikasi Informatika	Cakupan Layanan Telekomunikasi	83,17	83,17		

No	OPD/Kecamatan	Program	Indikator	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025	Pagu RPJMD 2025	Pagu RKPD 2025
114	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Program Aplikasi Informatika	Persentase PD yang terkoneksi dengan jaringan fiber optik / Persentase OPD yang terkoneksi dengan jaringan fiber optik	48,57	48,57		
115	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada	Ada		
116	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi / -				
117	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
118	Dinas Koperasi dan UMKM	Program Pengembangan UMKM	Jumlah UMKM yang difasilitasi	150 UMKM	150	Rp17.837.904.000	Rp40.892.145.418

No	OPD/Kecamatan	Program	Indikator	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025	Pagu RPJMD 2025	Pagu RKPD 2025
119	Dinas Koperasi dan UMKM	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang aktif	57,95	57,95		
120	Dinas Koperasi dan UMKM	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Jumlah KSP/USP yang mendapat Penilaian Kesehatan / Jumlah Prosentase KSP/USP yang mendapat Penilaian Kesehatan	20 Koperasi	100%		
121	Dinas Koperasi dan UMKM	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Jumlah Pengurus Koperasi, UKM dan Usaha Mikro yang mengikuti Pelatihan / Jumlah Prosentase Pengurus/pengelola Koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	240 KUMKM	100%		
122	Dinas Koperasi dan UMKM	Program Pemberdayaan dan Perlindungan	Jumlah Koperasi yang difasilitasi Nilai Tambah,	100 Koperasi	100%		

No	OPD/Kecamatan	Program	Indikator	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025	Pagu RPJMD 2025	Pagu RKPD 2025
		ngan Koperasi	Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen dan Restrukturisasi / Jumlah Prosentase Koperasi yang difasilitasi Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen dan Restrukturisasi Usaha				
123	Dinas Koperasi dan UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro	Jumlah UMKM	7.842	7.842		
124	Dinas Koperasi dan UMKM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
125	Dinas Penanaman	Program Pengembangan	Jumlah Kajian	4	1	Rp16.527.973.000	Rp32.656.803.862

No	OPD/Kecamatan	Program	Indikator	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025	Pagu RPJMD 2025	Pagu RKPD 2025
	Modal dan PTSP	Iklim Penanaman Modal	Potensi Daerah				
126	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Promosi	4	4		
127	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Realisasi Investasi PMDN dan PMA	3,66	9 Triliun		
128	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) / Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	796	796		
129	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kerja Internal Terlayani Administrasi	100%	100		
130	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana	100%	100		

No	OPD/Kecamatan	Program	Indikator	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025	Pagu RPJMD 2025	Pagu RKPD 2025
131	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	79	75,93		
132	Dinas Pemuda dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	69,84	69,84	Rp19.373.667.152	Rp302.770.942.977
133	Dinas Pemuda dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Prestasi Olahraga	33,33	33,33		
134	Dinas Pemuda dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Organisasi kepramukaan yang Aktif / Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	21,57	20 Organisasi		
135	Dinas Pemuda dan Olahraga	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					

No	OPD/Kecamatan	Program	Indikator	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025	Pagu RPJMD 2025	Pagu RKPD 2025
136	Dinas Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Tokoh Adat yang menerima Insentif	150	150	Rp12.000.000.000	-
137	Dinas Kebudayaan	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Penyelenggaraan Festival seni dan budaya	6	6		
138	Dinas Kebudayaan	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	43	43		
139	Dinas Kebudayaan	Program Pembinaan Sejarah	Fasilitasi SDM dan Lembaga Sejarah / Jumlah Fasilitasi SDM dan Lembaga Sejarah	10	10		
140	Dinas Kebudayaan	Program Pengelolaan Permuseuman	Terpeliharanya Koleksi Benda Cagar Budaya	100	100%		
141	Dinas Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					

No	OPD/Kecamatan	Program	Indikator	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025	Pagu RPJMD 2025	Pagu RKPD 2025
142	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Koleksi Judul Buku Agama, Budaya, Sosial di Perpustakaan	79%	79	Rp18.662.018.000	Rp49.885.239.104
143	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun / Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	3.500	3500 Orang		
144	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Pengelolaan Arsip	Jumlah OPD yang Telah Menerapkan sesuai Aturan	10 OPD, 4 Desa, 1 BUMD	10/4/1 OPD/DESA /BUMD		
145	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Jumlah Arsip Terlindungi dan Terselamatkan	75 Arsip	75 Arsip		
146	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Perijinan Penggunaan Arsip	Jumlah Arsip yang dapat diakses	50 Arsip	50 Arsip		
147	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					

No	OPD/Kecamatan	Program	Indikator	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025	Pagu RPJMD 2025	Pagu RKPD 2025
		Kabupaten/Kota					
148	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Konsumsi Perikanan	42,1	42,1	Rp18.477.418.503	Rp52.464.082.816
149	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan	8.086,11	8.086,11		
150	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah/jenis bibit/benih unggul/komoditas utama	5	5		
151	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Kelompok Pengawasan Masyarakat / Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas	6	4 Kelompok		
152	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
153	Dinas Pariwisata	Program Peningkatan Daya	Objek destinasi wisata	15	15	Rp17.752.496.500	Rp96.551.571.040

No	OPD/Kecamatan	Program	Indikator	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025	Pagu RPJMD 2025	Pagu RKPD 2025
		Tarik Destinasi Pariwisata					
154	Dinas Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kunjungan Wisata	97,2	91,73%		
155	Dinas Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	Event Pariwisata dalam dan Luar Negeri	4	4 Event		
156	Dinas Pariwisata	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HKI	Jumlah Penyediaan, Pengembangan Infrastruktur Kepariwisata	1	1 Infrastruktur		
157	Dinas Pariwisata	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Kelompok Sadar Wisata yang bergerak pada ekonomi kreatif	11	11		
158	Dinas Pariwisata	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					

No	OPD/Kecamatan	Program	Indikator	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025	Pagu RPJMD 2025	Pagu RKPD 2025
		Kabupaten/Kota					
159	Dinas Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi sektor pertanian	46.765	46.765	Rp20.731.953.943	Rp212.373.512.692
160	Dinas Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah/jenis bibit/benih unggul/komoditas utama	5	5		
161	Dinas Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas padi	4	4		
162	Dinas Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi sektor peternakan / Produksi Sektor Peternakan	3.278	3278 Ton		
163	Dinas Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana	Peningkatan Alat Mesin Pertanian/peternakan	1736	1736		

No	OPD/Kecamatan	Program	Indikator	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025	Pagu RPJMD 2025	Pagu RKPD 2025
		Pertanian					
164	Dinas Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan bina kelompok tani	21,43	21,43		
165	Dinas Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya panjang jalan pertanian yang dibangun / Panjang Jalan Usaha Tani	191	20 km		
166	Dinas Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan prasarana pertanian lainnya / Jumlah pembangunan prasarana pertanian	7	7 Kegiatan		
167	Dinas Pertanian	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya jumlah kelahiran ternak hasil inseminasi buatan / Jumlah ternak hasil Inseminasi Buatan	500	1000 Ekor		
168	Dinas Pertanian	Program Perizinan Usaha Pertanian					

No	OPD/Kecamatan	Program	Indikator	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025	Pagu RPJMD 2025	Pagu RKPD 2025
169	Dinas Pertanian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
170	Dinas Perkebunan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi sektor perkebunan	7.956.662,00	7.956.662	Rp30.015.000.000	Rp47.108.069.343
171	Dinas Perkebunan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas perkebunan	19,20	19,20		
172	Dinas Perkebunan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana pertanian yang disediakan	1 Prasarana	1 Prasarana		
173	Dinas Perkebunan	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Terkendalnya dan tertanggulangnya Bencana Pertanian	2.000 Ha	145 Ha		

No	OPD/Kecamatan	Program	Indikator	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025	Pagu RPJMD 2025	Pagu RKPD 2025
174	Dinas Perkebunan	Program Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah PBS/Koperasi yang dimonitor dan dievaluasi izinnya	20 PBS/Kop	20 PBS/Kop		
175	Dinas Perkebunan	Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah SDM Pertanian yang ditingkatkan	150 orang	300 Orang		
176	Dinas Perkebunan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Dinas Perkebunan	72%	72%		
177	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar / Jumlah pasar	15	15	Rp16.997.461.205	Rp106.190.775.070
178	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Jumlah Rekomendasi Izin yang Diterbitkan / Jumlah Fasilitas Izin Yang Diterbitkan	1	1 Laporan		
179	Dinas Perindustrian dan	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok	Jumlah Operasi pasar / Jumlah	4	4 Kali		

No	OPD/Kecamatan	Program	Indikator	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025	Pagu RPJMD 2025	Pagu RKPD 2025
	Perdagangan	dan Barang Penting	Operasi Pasar				
180	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Pengembangan Ekspor	Jumlah Pembinaan terhadap Pelaku Usaha Ekspor / Jumlah Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha Ekspor	6	6 Pelaku Usaha		
181	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Jumlah Alat UTTP yang terstandarisasi / Jumlah Alat UTTP yang Terstandarisasi	400	400 Layanan		
182	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pertumbuhan Jumlah IKM	1.620	1620 IKM	Rp16.997.461.205	Rp106.190.775.070
183	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota					
184	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pelayanan Publik terhadap Aparatur Disperindag	19	19		

No	OPD/Kecamatan	Program	Indikator	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025	Pagu RPJMD 2025	Pagu RKPD 2025
		Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota				
185	Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pemuka Agama yang menerima Insentif	595	595	Rp238.040.579.000	Rp912.246.830.184
186	Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Penyelenggaraan Festival keagamaan	1	1		
187	Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Angka Harapan Lama Sekolah	13,10	13,10		
188	Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rata-Rata Lama Sekolah	9,45	9,45		
189	Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Predikat Status Tinggi	Predikat Status Tinggi		
190	Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase implementasi kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, kesejahteraan	100%	100%		

No	OPD/Kecamatan	Program	Indikator	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025	Pagu RPJMD 2025	Pagu RKPD 2025
			n rakyat dan kerjasama				
191	Sekretariat Daerah	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Implementasi kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam	100%	100%		
192	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / -	100%	-		
193	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	75,93	75,93		
194	Sekretariat DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Tersusunnya dan Terintegrasinya Program Kerja DPRD	Ada	Ada	Rp138.855.150.000	Rp244.821.813.428

No	OPD/Kecamatan	Program	Indikator	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025	Pagu RPJMD 2025	Pagu RKPD 2025
195	Sekretariat DPRD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	99,3%	99,3%		
196	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	100%	100,00%	Rp36.955.814.000	Rp54.238.171.428
197	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD, RKPD ke dalam Renstra dan Renja OPD	100%	100%		
198	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100%	100%		
199	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	Rp52.945.507.503	Rp1.559.731.700.208

No	OPD/Kecamatan	Program	Indikator	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025	Pagu RPJMD 2025	Pagu RKPD 2025
200	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan / -				
201	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
202	Badan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan	7,05	7,05	Rp51.672.992.590	Rp67.611.011.018
203	Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
204	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	40,00 %	40,00	Rp25.734.500.000	Rp54.194.601.787
205	Badan Kepegawaian, Pendidikan,	Program Pengembangan Sumber	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan	260 hari	260		

No	OPD/Kecamatan	Program	Indikator	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025	Pagu RPJMD 2025	Pagu RKPD 2025
	dan Pelatihan	Daya Manusia	dan pelatihan				
206	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	Program Kepegawaian Daerah	Distribusi ASN	40,00 %	2500 SK		
207	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Laporan Keuangan	100%	100%		
208	Sekretariat Korpri	Program Kepegawaian Daerah	Cakupan Pembinaan dan Fasilitasi Anggota Korpri / -	100%		Rp4.422.500.000	
209	Sekretariat Korpri	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Laporan Keuangan	100,00 %	100%		
210	Badan Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan	80,00	80	Rp10.717.830.387	Rp22.800.445.727
211	Badan Penelitian dan	Program Penunjang Urusan	Cakupan Pelayanan Administrasi	90,00	90%		

No	OPD/Kecamatan	Program	Indikator	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025	Pagu RPJMD 2025	Pagu RKPD 2025
	Pengembangan	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perkantoran dan Laporan Keuangan				
212	Inspektorat Daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Jumlah temuan BPK	16	16	Rp28.794.214.169	Rp68.546.621.077
213	Inspektorat Daerah	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Cakupan Pengaduan OPD dan Masyarakat	0,005	60%		
214	Inspektorat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	99,93	99,93%		
215	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	LSM/Organisasi yang Aktif	199	199	Rp15.493.289.175	Rp101.288.691.714
216	Badan Kesatuan Bangsa	Program Penguatan Ideologi Pancasila	Cakupan Sekolah dan Forum yang mendapatkan Pembinaan	75,83 %	75,83%		

No	OPD/Kecamatan	Program	Indikator	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025	Pagu RPJMD 2025	Pagu RKPD 2025
	dan Politik	a dan Karakter Kebangsaan	Karakter dan Penguatan Wawasan Kebangsaan				
217	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan	Cakupan Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Pendidikan Politik di Wilayah Kutai Timur	65%	100%		
218	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Cakupan Forum dan UKM yang Mendapatkan Pembinaan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya / -	60%			
219	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Konflik SARA	0	0		
220	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan	Cakupan Penanganan Konflik Sosial di Wilayah Kutai Timur	100%	100%		

No	OPD/Kecamatan	Program	Indikator	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025	Pagu RPJMD 2025	Pagu RKPD 2025
		Penanganan Konflik Sosial					
221	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100%	100%		
222	Kecamatan Long Mesangat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik / Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik Long Mesangat	17	17	Rp5.592.679.296	Rp9.191.208.304
223	Kecamatan Long Mesangat	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	92%	92%		
224	Kecamatan Long Mesangat	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran PERDA/PERKADA	0	0%		
225	Kecamatan Long	Program Penyelenggaraan	Jumlah Pembinaan Wawasan	8	8		

No	OPD/Kecamatan	Program	Indikator	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025	Pagu RPJMD 2025	Pagu RKPD 2025
	Mesangat	Urusan Pemerintahan Umum	Kebangsaan dan Ketahanan Nasional / Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Long Mesangat				
226	Kecamatan Long Mesangat	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitas Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan / Cakupan Fasilitas, Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	92%	92%		
227	Kecamatan Long Mesangat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	95%	95%		
228	Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Penyelenggara	20	22	Rp4.890.378.809	Rp8.020.702.153

No	OPD/Kecamatan	Program	Indikator	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025	Pagu RPJMD 2025	Pagu RKPD 2025
	Karanganyan	ahan dan Pelayananyan Publik	Pelayanan Publik				
229	Kecamatan Karanganyan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	90%	75%		
230	Kecamatan Karanganyan	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran PERDA/PERKADA	0	10		
231	Kecamatan Karanganyan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	5	8		
232	Kecamatan Karanganyan	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	90%	80%		
233	Kecamatan Karanganyan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	90%	90%		

No	OPD/Kecamatan	Program	Indikator	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025	Pagu RPJMD 2025	Pagu RKPD 2025
		Kabupaten/Kota					
234	Kecamatan Teluk Pandan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	22	22	Rp7.575.770.000	Rp9.907.658.860
235	Kecamatan Teluk Pandan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	92%	92%		
236	Kecamatan Teluk Pandan	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran PERDA/PERKADA	0	0		
237	Kecamatan Teluk Pandan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	8	8		
238	Kecamatan Teluk Pandan	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	87%	8		

No	OPD/Kecamatan	Program	Indikator	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025	Pagu RPJMD 2025	Pagu RKPD 2025
239	Kecamatan Teluk Pandan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	95%	95%		
240	Kecamatan Sangkulirang	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	27	27	Rp8.513.681.000	Rp9.042.834.566
241	Kecamatan Sangkulirang	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	96%	96%		
242	Kecamatan Sangkulirang	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran PERDA/PERKADA	0	0		
243	Kecamatan Sangkulirang	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	5	5		
244	Kecamatan	Program Pembinaan dan Pengawasan	Cakupan Fasilitasi Pembinaan, Pengawasan	92%	92%		

No	OPD/Kecamatan	Program	Indikator	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025	Pagu RPJMD 2025	Pagu RKPD 2025
	Sangkulirang	san Pemerintahan Desa	Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan				
245	Kecamatan Sangkulirang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	98%	90%		
246	Kecamatan Kaliorang	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	22	22	Rp6.038.624.412	Rp9.088.099.898
247	Kecamatan Kaliorang	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	92%	92%		
248	Kecamatan Kaliorang	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran PERDA/PERKADA	0	0		
249	Kecamatan Kaliorang	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan	7			

No	OPD/Kecamatan	Program	Indikator	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025	Pagu RPJMD 2025	Pagu RKPD 2025
		ahan Umum	Ketahanan Nasional / -				
250	Kecamatan Kaliorang	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan / -	92%			
251	Kecamatan Kaliorang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	95%	100%		
252	Kecamatan Batu Ampar	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	22	22	Rp4.940.000.000	Rp6.730.412.217
253	Kecamatan Batu Ampar	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	92%	92%		
254	Kecamatan Batu Ampar	Program Koordinasi Ketenteraman dan	Jumlah Pelanggaran PERDA/PERKADA	0	0		

No	OPD/Kecamatan	Program	Indikator	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025	Pagu RPJMD 2025	Pagu RKPD 2025
		Ketertiban Umum					
255	Kecamatan Batu Ampar	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional / -	8			
256	Kecamatan Batu Ampar	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan / -	92%			
257	Kecamatan Batu Ampar	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	95%	100%		
258	Kecamatan Muara Wahau	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	58	58	Rp7.629.960.000	Rp11.055.402.487
259	Kecamatan Muara Wahau	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	90%	90%		

No	OPD/Kecamatan	Program	Indikator	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025	Pagu RPJMD 2025	Pagu RKPD 2025
260	Kecamatan Muara Wahau	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran PERDA/PERKADA	0	2		
261	Kecamatan Muara Wahau	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	8	5		
262	Kecamatan Muara Wahau	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	93%	90%		
263	Kecamatan Muara Wahau	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	98%	95%		
264	Kecamatan Rantau Pulung	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	12	12	Rp4.147.381.900	Rp7.780.647.220
265	Kecamatan	Program Pemberdayaan	Cakupan Peran Serta Masyarakat	79%	78%		

No	OPD/Kecamatan	Program	Indikator	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025	Pagu RPJMD 2025	Pagu RKPD 2025
	Rantau Pulung	Masyarakat Desa dan Kelurahan	Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan				
266	Kecamatan Rantau Pulung	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran PERDA/PERKADA	11	11		
267	Kecamatan Rantau Pulung	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4	4		
268	Kecamatan Rantau Pulung	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	85%	85%		
269	Kecamatan Rantau Pulung	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	92%	92%		
270	Kecamatan Bengalon	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan	Jumlah Penyelenggaraan	22	22	Rp7.362.872.437	Rp13.143.812.039

No	OPD/Kecamatan	Program	Indikator	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025	Pagu RPJMD 2025	Pagu RKPD 2025
		Pelayanan Publik	Pelayanan Publik				
271	Kecamatan Bengalon	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan / -	92%			
272	Kecamatan Bengalon	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran PERDA/PERKADA / -	0			
273	Kecamatan Bengalon	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional / -	8			
274	Kecamatan Bengalon	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	92%	92%		
275	Kecamatan Bengalon	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	95%	95%		

No	OPD/Kecamatan	Program	Indikator	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025	Pagu RPJMD 2025	Pagu RKPD 2025
		Kabupaten/Kota					
276	Kecamatan Muara Ancalong	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	17	17	Rp8.564.864.000	Rp10.675.526.477
277	Kecamatan Muara Ancalong	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan / -	92%			
278	Kecamatan Muara Ancalong	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran PERDA/PERKADA / -	0			
279	Kecamatan Muara Ancalong	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional / -	8			
280	Kecamatan Muara Ancalong	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan / -	92%			

No	OPD/Kecamatan	Program	Indikator	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025	Pagu RPJMD 2025	Pagu RKPD 2025
281	Kecamatan Muara Ancalong	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100%	100%		
282	Kecamatan Sandaran	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	17	17	Rp6.725.250.000	Rp7.491.667.802
283	Kecamatan Sandaran	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	92%	92%		
284	Kecamatan Sandaran	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran PERDA/PERKADA	0	0		
285	Kecamatan Sandaran	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	9	5		
286	Kecamatan	Program Pembinaan dan Pengawasan	Cakupan Fasilitasi Pembinaan, Pengawasan	90%	90%		

No	OPD/Kecamatan	Program	Indikator	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025	Pagu RPJMD 2025	Pagu RKPD 2025
	Sandar an	san Pemerintah Desa	Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan				
287	Kecamatan Sandaran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	97%	85%		
288	Kecamatan Busang	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	21	21	Rp6.725.591.444	Rp6.730.473.645
289	Kecamatan Busang	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	90%	90%		
290	Kecamatan Busang	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran PERDA/PERKADA	0	0		
291	Kecamatan Busang	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan	8	8		

No	OPD/Kecamatan	Program	Indikator	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025	Pagu RPJMD 2025	Pagu RKPD 2025
		ahan Umum	Ketahanan Nasional				
292	Kecamatan Busang	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitas Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	80%	80%		
293	Kecamatan Busang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100%	95%		
294	Kecamatan Kaubun	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	22	22	Rp4.630.550.000	Rp8.378.079.522
295	Kecamatan Kaubun	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan / -	92%			
296	Kecamatan Kaubun	Program Koordinasi Ketenteraman dan	Jumlah Pelanggaran PERDA/PERKADA	0	0		

No	OPD/Kecamatan	Program	Indikator	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025	Pagu RPJMD 2025	Pagu RKPD 2025
		Ketertiban Umum					
297	Kecamatan Kaubun	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional / -	8			
298	Kecamatan Kaubun	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	92%	1 Laporan		
299	Kecamatan Kaubun	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	96%	1 Laporan		
300	Kecamatan Kongbing	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	12	12	Rp6.470.000.000	Rp9.820.187.937
301	Kecamatan Kongbing	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	94%	94%		

No	OPD/Kecamatan	Program	Indikator	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025	Pagu RPJMD 2025	Pagu RKPD 2025
302	Kecamatan Kongbing	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran PERDA/PERKADA	0	0		
303	Kecamatan Kongbing	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	7	7		
304	Kecamatan Kongbing	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	93%	93%		
305	Kecamatan Kongbing	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	92%	100%		
306	Kecamatan Muara Bengkal	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	22	22	Rp9.072.000.000	Rp13.612.820.775
307	Kecamatan	Program Pemberdayaan	Cakupan Peran Serta Masyarakat	92%	92%		

No	OPD/Kecamatan	Program	Indikator	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025	Pagu RPJMD 2025	Pagu RKPD 2025
	Muara Bengkal	Masyarakat Desa dan Kelurahan	Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan				
308	Kecamatan Muara Bengkal	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran PERDA/PERKADA / -	0			
309	Kecamatan Muara Bengkal	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	8	6		
310	Kecamatan Muara Bengkal	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	92%	95%		
311	Kecamatan Muara Bengkal	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	95%	95%		
312	Kecamatan Sangatta Utara	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan	Jumlah Penyelenggaraan	60	19	Rp11.654.407.112	Rp19.825.964.172

No	OPD/Kecamatan	Program	Indikator	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025	Pagu RPJMD 2025	Pagu RKPD 2025
		Pelayanan Publik	Pelayanan Publik				
313	Kecamatan Sangatta Utara	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	89%	89%		
314	Kecamatan Sangatta Utara	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran PERDA/PERKADA	0	3		
315	Kecamatan Sangatta Utara	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	7	3		
316	Kecamatan Sangatta Utara	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	90%	90%		
317	Kecamatan Sangatta Utara	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	90%	90%		

No	OPD/Kecamatan	Program	Indikator	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025	Pagu RPJMD 2025	Pagu RKPD 2025
		Kabupaten/Kota					
318	Kecamatan Sangatta Selatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	23	18	Rp11.673.005.888	Rp16.253.599.152
319	Kecamatan Sangatta Selatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	90%	90%		
320	Kecamatan Sangatta Selatan	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran PERDA/PERKADA	0	0		
321	Kecamatan Sangatta Selatan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2	2		
322	Kecamatan Sangatta Selatan	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	89%	89%		

No	OPD/Kecamatan	Program	Indikator	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025	Pagu RPJMD 2025	Pagu RKPD 2025
323	Kecamatan Sangatta Selatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	93%	97%		
324	Kecamatan Telen	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	22	17	Rp6.551.307.410	Rp8.775.185.230
325	Kecamatan Telen	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	92%	92%		
326	Kecamatan Telen	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran PERDA/PERKADA / -	0			
327	Kecamatan Telen	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	8	8		
328	Kecamatan Telen	Program Pembinaan dan Pengawasan	Cakupan Fasilitasi Pembinaan, Pengawasan	92%	94%		

No	OPD/Kecamatan	Program	Indikator	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025	Pagu RPJMD 2025	Pagu RKPD 2025
		san Pemerintahan Desa	Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan				
329	Kecamatan Telen	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	95%	79%		

BAB 5

PENGENDALIAN PELAKSANAAN RKPD TERHADAP APBD

Bab ini menguraikan tingkat kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Pengendalian ini dilakukan untuk menilai sejauh mana program pembangunan daerah yang telah direncanakan dalam RKPD memperoleh dukungan penganggaran dalam APBD, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif untuk mencapai sasaran pembangunan tahunan daerah.

Kesesuaian antara RKPD dan APBD merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pembangunan daerah karena menunjukkan keterhubungan antara proses perencanaan dan proses penganggaran. RKPD memuat arah kebijakan, prioritas pembangunan, program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target, dan kebutuhan pendanaan tahunan daerah. Sementara itu, APBD menjadi instrumen fiskal yang menentukan apakah keseluruhan rencana tersebut dapat diimplementasikan sesuai prioritas yang telah ditetapkan. Tingkat konsistensi antara kedua dokumen tersebut mencerminkan kualitas tata kelola pembangunan daerah secara lebih operasional.

Pengendalian pelaksanaan RKPD terhadap APBD pada bab ini dilakukan melalui penilaian terhadap enam aspek utama, yaitu konsistensi program, konsistensi kegiatan, konsistensi subkegiatan, konsistensi indikator kinerja, konsistensi target kinerja, dan konsistensi pagu anggaran. Melalui pendekatan tersebut, evaluasi tidak hanya melihat ada atau tidaknya dukungan anggaran, tetapi juga menilai ketepatan penerjemahan rencana ke dalam struktur pelaksanaan pembangunan daerah.

Analisis dalam bab ini juga perlu dipahami dalam konteks dinamika pelaksanaan pembangunan tahun berjalan. Dalam praktiknya, proses penganggaran dapat mengalami penyesuaian sebagai akibat perubahan kapasitas fiskal daerah, penajaman prioritas pembangunan, kebijakan efisiensi belanja, maupun kebutuhan penyesuaian terhadap kondisi aktual yang berkembang. Adanya perbedaan antara RKPD dan APBD tidak selalu menunjukkan kelemahan dalam perencanaan, tetapi dapat pula mencerminkan proses adaptasi kebijakan agar pelaksanaan pembangunan tetap berjalan sesuai kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan prioritas yang berkembang.

Dengan demikian, Bab V disusun untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai tingkat sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran daerah Tahun 2025. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat menunjukkan bagian-bagian yang telah selaras, sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek yang masih memerlukan penyempurnaan, sehingga dapat menjadi dasar perbaikan dalam penguatan integrasi antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran pada periode berikutnya.

5.1 Konsistensi Program antara RKPD dengan APBD

Konsistensi program antara RKPD dengan APBD merupakan salah satu ukuran awal untuk menilai keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran daerah. Pada level ini, evaluasi diarahkan untuk melihat apakah seluruh program yang telah dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 telah terakomodasi dalam APBD Tahun Anggaran 2025. Penilaian ini penting karena program merupakan bentuk operasional dari kebijakan pembangunan tahunan yang menjadi wadah bagi pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan perangkat daerah.

Tingkat konsistensi program menunjukkan sejauh mana prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD dapat diterjemahkan secara utuh ke dalam kebijakan penganggaran. Semakin tinggi tingkat kesesuaian antara jumlah dan struktur program pada RKPD dan APBD, maka semakin kuat pula indikasi bahwa proses perencanaan dan penganggaran telah berjalan secara selaras. Sebaliknya, apabila terdapat perbedaan jumlah atau struktur program, maka hal tersebut perlu dicermati lebih lanjut karena dapat memengaruhi kesinambungan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaannya, perbedaan antara RKPD dan APBD pada level program dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain penyesuaian terhadap kapasitas fiskal daerah, perubahan kebijakan pada tahun berjalan, penyelarasan nomenklatur, maupun penajaman prioritas pembangunan. Oleh sebab itu, analisis konsistensi program pada subbab ini tidak hanya dimaksudkan untuk menghitung tingkat kesesuaian secara kuantitatif, tetapi juga untuk memberikan gambaran mengenai kualitas sinkronisasi antara arah kebijakan pembangunan dengan dukungan anggaran yang tersedia.

Berdasarkan hal tersebut, pembahasan pada subbab ini disajikan menurut perangkat daerah untuk menunjukkan tingkat konsistensi program RKPD dengan APBD secara lebih rinci. Penyajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perangkat daerah yang telah memiliki tingkat konsistensi tinggi, sekaligus perangkat daerah yang masih memerlukan penguatan dalam integrasi antara perencanaan dan penganggaran.

Tabel 5.1 Konsistensi Program RKPD dengan APBD Tahun Anggaran 2025

No	Perangkat Daerah	Program RKPD	Program APBD	Konsistensi Program RKPD-APBD	Inkonsistensi Program RKPD-APBD
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9	9	9	0
2	Dinas Kesehatan	5	5	5	0
3	RSUD Kudungga Sangatta	2	2	2	0
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12	12	12	0
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	6	6	6	0
6	Satuan Polisi Pamong Praja	2	2	2	0
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2	2	2	0
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	2	2	0
9	Dinas Sosial	6	6	6	0
10	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	7	7	7	0
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	7	7	0
12	Dinas Ketahanan Pangan	5	5	5	0

No	Perangkat Daerah	Program RKPD	Program APBD	Konsistensi Program RKPD-APBD	Inkonsistensi Program RKPD-APBD
13	Dinas Pertanahan	5	5	5	0
14	Dinas Lingkungan Hidup	11	11	11	0
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	5	5	0
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	5	5	0
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	4	4	0
18	Dinas Perhubungan	3	3	3	0
19	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	5	5	5	0
20	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	7	7	7	0
21	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	6	6	6	0
22	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4	4	4	0
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5	5	5	0
24	Dinas Perikanan	5	5	5	0
25	Dinas Pariwisata	5	5	5	0
26	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	5	5	5	0
27	Dinas Perkebunan	6	6	6	0
28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10	10	10	0
29	Sekretariat Daerah	3	3	3	0
30	Sekretariat DPRD	2	2	2	0
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	3	3	0

No	Perangkat Daerah	Program RKPD	Program APBD	Konsistensi Program RKPD-APBD	Inkonsistensi Program RKPD-APBD
32	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3	3	3	0
33	Badan Pendapatan Daerah	2	2	2	0
34	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	3	3	0
35	Badan Riset dan Inovasi Daerah	1	1	1	0
36	Inspektorat	3	3	3	0
37	Kantor Camat Sangatta Selatan	6	6	6	0
38	Kantor Camat Sangatta Utara	7	7	7	0
39	Kantor Camat Bengalon	6	6	6	0
40	Kantor Camat Kaliorang	6	6	6	0
41	Kantor Camat Muara Wahau	6	6	6	0
42	Kantor Camat Kombeng	6	6	6	0
43	Kantor Camat Muara Ancalong	6	6	6	0
44	Kantor Camat Batu Ampar	6	6	6	0
45	Kantor Camat Telen	6	6	6	0
46	Kantor Camat Busang	6	6	6	0
47	Kantor Camat Teluk Pandan	6	6	6	0
48	Kantor Camat Rantau Pulung	6	6	6	0
49	Kantor Camat Kaubun	6	6	6	0
50	Kantor Camat Sangkulirang	6	6	6	0
51	Kantor Camat Muara Bengkal	6	6	6	0

No	Perangkat Daerah	Program RKPD	Program APBD	Konsistensi Program RKPD-APBD	Inkonsistensi Program RKPD-APBD
52	Kantor Camat Long Mesangat	6	6	6	0
53	Kantor Camat Karang	6	6	6	0
54	Kantor Camat Sandaran	6	6	6	0
55	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	6	6	0
	TOTAL	291	291	291	0

Berdasarkan Tabel 5.1, konsistensi program antara RKPD dengan APBD Tahun Anggaran 2025 menunjukkan tingkat keselarasan yang sangat baik. Hal ini terlihat dari kesesuaian jumlah program RKPD dan program APBD pada seluruh perangkat daerah, sehingga pada level program tidak ditemukan adanya inkonsistensi. Arah kebijakan pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam RKPD mampu diterjemahkan secara utuh ke dalam struktur penganggaran tahunan. Dengan demikian, pada tataran program, keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran daerah telah terbentuk secara kuat. Namun demikian, konsistensi pada level program tetap perlu dibaca secara berjenjang bersama hasil evaluasi pada level kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target, dan pagu anggaran, karena kualitas sinkronisasi pembangunan daerah pada akhirnya ditentukan oleh keterhubungan seluruh komponen tersebut secara menyeluruh.

5.2 Konsistensi Kegiatan antara RKPD dengan APBD

Konsistensi kegiatan antara RKPD dengan APBD merupakan indikator penting untuk menilai apakah program yang telah direncanakan benar-benar diterjemahkan ke dalam tindakan operasional perangkat daerah. Pada level ini, evaluasi diarahkan untuk melihat kesesuaian jumlah kegiatan antara dokumen RKPD dan APBD, karena kegiatan menjadi jembatan utama antara program pembangunan dengan pelaksanaan teknis di lapangan. Tingginya konsistensi kegiatan menunjukkan bahwa proses penganggaran telah mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan secara lebih konkret, sedangkan inkonsistensi kegiatan dapat mengindikasikan adanya penyesuaian struktur pelaksanaan, perubahan prioritas, atau pengaruh kapasitas fiskal daerah dalam tahun berjalan.

Tabel 5.2 Konsistensi Kegiatan RKPD dengan APBD Tahun Anggaran 2025

No	Perangkat Daerah	Kegiatan RKPD	Kegiatan APBD	Konsistensi Kegiatan RKPD-APBD	Inkonsistensi Kegiatan RKPD-APBD
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	33			
2	Dinas Kesehatan	166			
3	RSUD Kudungga Sangatta				
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	52			

No	Perangkat Daerah	Kegiatan RKPД	Kegiatan APBD	Konsistensi Kegiatan RKPД–APBD	Inkonsistensi Kegiatan RKPД–APBD
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	16	16		
6	Satuan Polisi Pamong Praja				
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan				
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12	12		
9	Dinas Sosial	20			
10	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	18			
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	19			
12	Dinas Ketahanan Pangan	16	16		
13	Dinas Pertanahan	14	14		
14	Dinas Lingkungan Hidup	20			
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10			
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14			
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	15	15		
18	Dinas Perhubungan	17			
19	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	14	12		
20	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	13			
21	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	14			

No	Perangkat Daerah	Kegiatan RKPД	Kegiatan APBD	Konsistensi Kegiatan RKPД–APBD	Inkonsistensi Kegiatan RKPД–APBD
22	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	18	18		
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12			
24	Dinas Perikanan	17			
25	Dinas Pariwisata	20			
26	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	18			
27	Dinas Perkebunan	10			
28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	25	24		
29	Sekretariat Daerah	20	20		
30	Sekretariat DPRD	8			
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	15			
32	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12			
33	Badan Pendapatan Daerah	9			
34	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	14			
35	Badan Riset dan Inovasi Daerah	14			
36	Inspektorat	15			
37	Kantor Camat Sangatta Selatan				
38	Kantor Camat Sangatta Utara				
39	Kantor Camat Bengalon	14			
40	Kantor Camat Kaliorang	13			
41	Kantor Camat Muara Wahau	15			

No	Perangkat Daerah	Kegiatan RKPД	Kegiatan APBD	Konsistensi Kegiatan RKPД–APBD	Inkonsistensi Kegiatan RKPД–APBD
42	Kantor Camat Kombeng	15			
43	Kantor Camat Muara Ancalong	16			
44	Kantor Camat Batu Ampar	16			
45	Kantor Camat Telen				
46	Kantor Camat Busang	14			
47	Kantor Camat Teluk Pandan				
48	Kantor Camat Rantau Pulung				
49	Kantor Camat Kaubun	14			
50	Kantor Camat Sangkulirang				
51	Kantor Camat Muara Bengkal	13			
52	Kantor Camat Long Mesangat	14			
53	Kantor Camat Karangan	13			
54	Kantor Camat Sandaran				
55	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17	13		

5.3 Konsistensi Subkegiatan antara RKPД dengan APBD

Konsistensi subkegiatan antara RKPД dengan APBD merupakan tahapan evaluasi yang lebih rinci untuk melihat tingkat kesesuaian antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran pada level pelaksanaan teknis. Pada level ini, evaluasi tidak lagi berhenti pada program dan kegiatan, tetapi menilai apakah rincian subkegiatan yang menjadi unit operasional pelaksanaan pembangunan telah terakomodasi secara selaras dalam APBD. Analisis pada subbab ini menjadi penting karena pada level subkegiatan biasanya mulai tampak penyesuaian yang lebih detail, baik dalam bentuk penambahan, pengurangan, maupun pergeseran struktur belanja pelaksanaan.

Tabel 5.3 Konsistensi Sub Kegiatan RKPД dengan APBD

No	Perangkat Daerah	Sub Kegiatan RKPD	Sub Kegiatan APBD	Konsistensi Sub Kegiatan RKPD-APBD	Inkonsistensi Sub Kegiatan RKPD-APBD
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	181			
2	Dinas Kesehatan	532			
3	RSUD Kudungga Sangatta				
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	166	120		
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	50	38		
6	Satuan Polisi Pamong Praja				
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	51	31		
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	58	35		
9	Dinas Sosial	80			
10	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	69	68		
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	49			
12	Dinas Ketahanan Pangan	66	47		
13	Dinas Pertanahan	24	24		
14	Dinas Lingkungan Hidup	62			
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	37			
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	54			
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	49			
18	Dinas Perhubungan	58	46		

No	Perangkat Daerah	Sub Kegiatan RKPD	Sub Kegiatan APBD	Konsistensi Sub Kegiatan RKPD-APBD	Inkonsistensi Sub Kegiatan RKPD-APBD
19	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	50	43		
20	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	34	32		
21	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	44	34		
22	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	43	42		
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	65			
24	Dinas Perikanan	57			
25	Dinas Pariwisata	87			
26	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	58			
27	Dinas Perkebunan	41			
28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	91	49		
29	Sekretariat Daerah	73	73		
30	Sekretariat DPRD				
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	57			
32	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	60	63		
33	Badan Pendapatan Daerah	43			
34	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	63			
35	Badan Riset dan Inovasi Daerah	36			
36	Inspektorat	58			

No	Perangkat Daerah	Sub Kegiatan RKPDP	Sub Kegiatan APBD	Konsistensi Sub Kegiatan RKPDP-APBD	Inkonsistensi Sub Kegiatan RKPDP-APBD
37	Kantor Camat Sangatta Selatan				
38	Kantor Camat Sangatta Utara				
39	Kantor Camat Bengalon	34			
40	Kantor Camat Kaliorang	44			
41	Kantor Camat Muara Wahau	39			
42	Kantor Camat Kombeng	41			
43	Kantor Camat Muara Ancalong	49			
44	Kantor Camat Batu Ampar	42			
45	Kantor Camat Telen				
46	Kantor Camat Busang	47			
47	Kantor Camat Teluk Pandan				
48	Kantor Camat Rantau Pulung				
49	Kantor Camat Kaubun	43			
50	Kantor Camat Sangkulirang				
51	Kantor Camat Muara Bengkal	36			
52	Kantor Camat Long Mesangat	37			
53	Kantor Camat Karang	42			
54	Kantor Camat Sandaran				
55	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	55			

5.4 Konsistensi Target Kinerja antara RKPDP dengan APBD

Konsistensi target kinerja antara RKPDP dengan APBD merupakan aspek penting dalam menilai kualitas keterhubungan antara perencanaan dan penganggaran daerah. Pada level ini, evaluasi diarahkan

untuk melihat apakah besaran target yang telah ditetapkan dalam RKPD tetap dipertahankan secara selaras dalam APBD sebagai dasar pelaksanaan dan pengendalian pembangunan tahunan. Target kinerja memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi tolok ukur kuantitatif atas keberhasilan program dan kegiatan perangkat daerah. Oleh sebab itu, kesesuaian target antara kedua dokumen tersebut sangat menentukan kejelasan arah pelaksanaan pembangunan, keterukuran hasil, dan objektivitas evaluasi kinerja daerah.

Berbeda dengan konsistensi indikator kinerja yang menitikberatkan pada kesamaan rumusan ukuran keberhasilan, konsistensi target kinerja lebih berfokus pada besaran capaian yang hendak diwujudkan. Dengan demikian, meskipun indikator yang digunakan dapat tetap sama, perbedaan target antara RKPD dan APBD tetap dapat menimbulkan implikasi yang signifikan terhadap orientasi pelaksanaan, kebutuhan sumber daya, serta tingkat ambisi pembangunan daerah pada tahun berjalan. Apabila target yang tercantum dalam APBD lebih rendah atau lebih tinggi dibandingkan dengan target dalam RKPD, maka hal tersebut dapat memengaruhi keterbandingan capaian, konsistensi pelaksanaan program, dan validitas penilaian terhadap keberhasilan pembangunan daerah.

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, perubahan target kinerja dapat terjadi karena berbagai faktor, antara lain penyesuaian terhadap kapasitas fiskal, perubahan prioritas pembangunan, dinamika kebutuhan pelayanan publik, hasil evaluasi pelaksanaan periode sebelumnya, maupun penajaman kebijakan teknis pada saat penganggaran. Penilaian terhadap konsistensi target kinerja dalam subbab ini tidak hanya dimaksudkan untuk mengidentifikasi adanya perbedaan angka target, tetapi juga untuk melihat apakah perubahan tersebut masih berada dalam kerangka kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknokratik. Dengan kata lain, evaluasi pada level target kinerja diperlukan untuk memastikan bahwa proses penganggaran tidak mengubah orientasi capaian pembangunan secara substantif tanpa dasar yang memadai.

Konsistensi target kinerja juga berkaitan erat dengan efektivitas pengendalian pembangunan daerah. Target yang dirumuskan secara selaras antara RKPD dan APBD akan memudahkan perangkat daerah dalam menyusun rencana pelaksanaan, menetapkan strategi pencapaian, mengalokasikan sumber daya, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara lebih terukur. Sebaliknya, ketidaksesuaian target dapat menimbulkan persoalan dalam penafsiran capaian, penyusunan laporan kinerja, dan penilaian efektivitas program. Oleh sebab itu, evaluasi terhadap target kinerja menjadi bagian penting untuk melihat sejauh mana integrasi antara perencanaan dan penganggaran benar-benar terjaga sampai pada tataran hasil yang hendak dicapai.

Pada beberapa perangkat daerah, dinamika pelaksanaan menunjukkan bahwa pencapaian target dipengaruhi oleh faktor yang bersifat teknis maupun kelembagaan, seperti koordinasi lintas perangkat daerah, ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, dukungan data, kesiapan sumber daya manusia, serta efektivitas pengelolaan anggaran. Dalam dokumen rekonsiliasi capaian kinerja perangkat daerah yang tersedia, misalnya, terdapat gambaran bahwa pencapaian target tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya alokasi anggaran, tetapi juga oleh kualitas koordinasi, dukungan administrasi, dan kelancaran pelaksanaan program pada masing-masing urusan. Evaluasi target kinerja perlu dibaca tidak hanya sebagai perbandingan angka, tetapi juga sebagai refleksi atas kualitas implementasi pembangunan daerah secara lebih menyeluruh.

Dengan demikian, subbab ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai tingkat kesesuaian target kinerja antara RKPD dan APBD Tahun Anggaran 2025 pada masing-masing perangkat daerah. Hasil evaluasi pada bagian ini diharapkan dapat menunjukkan perangkat daerah yang telah mempertahankan keselarasan target kinerja secara baik, sekaligus mengidentifikasi bagian-bagian yang masih memerlukan penyempurnaan agar hubungan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan daerah dapat berlangsung secara lebih konsisten, terukur, dan akuntabel.

Tabel 5.4 Konsistensi Target Kinerja RKPD dengan APBD Tahun Anggaran 2025

No	Perangkat Daerah	Konsistensi Target Kinerja	Kategori
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
2	Dinas Kesehatan		
3	RSUD Kudungga Sangatta		
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
6	Satuan Polisi Pamong Praja		
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
9	Dinas Sosial		
10	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
12	Dinas Ketahanan Pangan		
13	Dinas Pertanahan		
14	Dinas Lingkungan Hidup		
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
18	Dinas Perhubungan		
19	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		
20	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah		
21	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu		
22	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
24	Dinas Perikanan		
25	Dinas Pariwisata		
26	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan		

No	Perangkat Daerah	Konsistensi Target Kinerja	Kategori
27	Dinas Perkebunan		
28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
29	Sekretariat Daerah		
30	Sekretariat DPRD		
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
32	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
33	Badan Pendapatan Daerah		
34	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
35	Badan Riset dan Inovasi Daerah		
36	Inspektorat		
37	Kantor Camat Sangatta Selatan		
38	Kantor Camat Sangatta Utara		
39	Kantor Camat Bengalon		
40	Kantor Camat Kaliorang		
41	Kantor Camat Muara Wahau		
42	Kantor Camat Kombeng		
43	Kantor Camat Muara Ancalong		
44	Kantor Camat Batu Ampar		
45	Kantor Camat Telen		
46	Kantor Camat Busang		
47	Kantor Camat Teluk Pandan		
48	Kantor Camat Rantau Pulung		
49	Kantor Camat Kaubun		
50	Kantor Camat Sangkulirang		
51	Kantor Camat Muara Bengkal		
52	Kantor Camat Long Mesangat		
53	Kantor Camat Karangan		
54	Kantor Camat Sandaran		
55	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		

Berdasarkan Tabel 5.5, konsistensi target kinerja antara RKPD dengan APBD Tahun Anggaran 2025 pada prinsipnya menjadi cerminan penting dari keselarasan orientasi hasil pembangunan daerah. Kesesuaian target kinerja menunjukkan bahwa proses penganggaran tidak hanya menjaga keberlanjutan struktur program dan kegiatan, tetapi juga mempertahankan arah capaian yang hendak diwujudkan oleh perangkat daerah. Sebaliknya, apabila terdapat perbedaan target, maka kondisi tersebut perlu dicermati secara seksama karena dapat berpengaruh terhadap tingkat ambisi pelaksanaan, kebutuhan sumber daya, serta keterukuran keberhasilan pembangunan daerah. Evaluasi pada subbab ini menegaskan bahwa target kinerja harus ditempatkan sebagai unsur strategis dalam menjaga hubungan yang utuh antara dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan, sehingga hasil pembangunan daerah dapat diukur secara lebih konsisten, objektif, dan akuntabel.

5.4 Konsistensi Pagu Anggaran antara RKPD dengan APBD

Konsistensi pagu anggaran antara RKPD dengan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan salah satu aspek penting dalam menilai keterpaduan antara proses perencanaan dan penganggaran daerah. Dalam kerangka pembangunan daerah, RKPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas pembangunan, program, kegiatan, target kinerja, dan indikasi pendanaan. Sementara itu, APBD merupakan instrumen penganggaran yang menerjemahkan prioritas tersebut ke dalam alokasi fiskal yang bersifat operasional. Tingkat kesesuaian pagu anggaran antara kedua dokumen tersebut menjadi indikator penting untuk melihat apakah arah kebijakan pembangunan yang telah dirumuskan benar-benar memperoleh dukungan pendanaan yang memadai pada tahap penganggaran.

Dalam subbab ini, konsistensi pagu anggaran dianalisis dengan membandingkan besaran anggaran pada sisi RKPD dengan besaran anggaran pada sisi APBD untuk masing-masing perangkat daerah. Untuk menjaga kesesuaian sumber data, pagu pada sisi RKPD dibaca dari komponen **Pagu Renja**, sedangkan pagu pada sisi APBD dibaca dari komponen **Pagu APBD** sebagaimana termuat dalam Berita Acara Rekonsiliasi Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2025 pada perangkat daerah yang datanya tersedia. Pendekatan ini digunakan agar perbandingan dilakukan pada level yang sejenis, yakni sama-sama berada pada tingkat perangkat daerah dan sama-sama merepresentasikan hubungan antara rencana anggaran tahunan dengan alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Hasil perbandingan menunjukkan bahwa pada beberapa perangkat daerah terdapat kondisi pagu RKPD dan pagu APBD yang sama, sehingga dapat dikatakan bahwa proses penganggaran berjalan selaras dengan rencana tahunan yang telah ditetapkan. Kondisi ini antara lain terlihat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Dinas Pertanahan, di mana nilai Pagu Renja dan Pagu APBD tercatat identik. Di sisi lain, terdapat pula perangkat daerah yang menunjukkan perbedaan cukup besar antara pagu RKPD dan pagu APBD, baik dalam bentuk peningkatan maupun penurunan. Perbedaan tersebut mengindikasikan adanya penyesuaian anggaran pada tahap penganggaran, yang dapat dipengaruhi oleh dinamika fiskal daerah, prioritas belanja, hasil pembahasan anggaran, maupun penyesuaian kebijakan selama proses penetapan APBD.

Dengan demikian, analisis pada subbab ini tidak hanya dimaksudkan untuk mengidentifikasi kesamaan atau perbedaan angka anggaran secara administratif, tetapi juga untuk memberikan gambaran mengenai tingkat keterhubungan antara perencanaan dan penganggaran daerah. Semakin kecil selisih antara pagu RKPD dan pagu APBD, maka semakin kuat indikasi bahwa dokumen perencanaan tahunan telah menjadi dasar yang efektif dalam proses pengalokasian anggaran. Sebaliknya, semakin besar selisih yang terjadi, maka semakin diperlukan penelaahan lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan perubahan tersebut. Tabel konsistensi pagu anggaran berikut menjadi penting sebagai dasar evaluasi terhadap kualitas sinkronisasi antara RKPD dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Tabel 5.5 Konsistensi Pagu Anggaran RKPD dengan APBD Tahun Anggaran 2025

No	Perangkat Daerah	RKPD (Rp)	APBD (Rp)	RKPD terhadap APBD (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.743.074.407.385		
2	Dinas Kesehatan	506.594.201.617		
3	RSUD Kudungga Sangatta	293.364.556.018		
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.419.226.050.933		
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.179.011.498.152	1.005.731.753.930	-1.173.279.744.222
6	Satuan Polisi Pamong Praja	35.681.492.518		
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	67.186.702.380	58.357.163.071	-8.829.539.309
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	51.351.035.826	32.190.437.066	-19.160.598.760
9	Dinas Sosial	31.374.177.364		
10	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	115.153.715.963		
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	23.874.379.930		
12	Dinas Ketahanan Pangan	87.086.644.086	99.035.012.001	11.948.367.915
13	Dinas Pertanahan	106.252.394.593	20.837.007.613	-85.415.386.980
14	Dinas Lingkungan Hidup	86.808.301.495		
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	29.120.073.751		
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	49.897.386.208		
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	44.327.417.865	32.156.528.702	-12.170.889.163
18	Dinas Perhubungan	186.724.847.442	56.313.662.290	-130.411.185.152
19	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	265.871.820.108	114.502.980.588	-151.368.839.520

No	Perangkat Daerah	RKPD (Rp)	APBD (Rp)	RKPD terhadap APBD (Rp)
20	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	40.892.145.418	30.163.308.266	-10.728.837.152
21	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	32.656.803.862	42.160.587.855	9.503.783.993
22	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	302.770.942.977	131.224.321.253	-171.546.621.724
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	49.885.239.104		
24	Dinas Perikanan	52.464.082.816		
25	Dinas Pariwisata	96.551.571.040		
26	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	212.373.512.692		
27	Dinas Perkebunan	47.108.069.343		
28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	106.190.775.070	73.559.379.875	-32.631.395.195
29	Sekretariat Daerah	912.246.830.184	742.292.088.445	-169.954.741.739
30	Sekretariat DPRD	244.821.813.428		
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	54.238.171.428		
32	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.559.731.700.208	1.383.373.861.284	-176.357.838.924
33	Badan Pendapatan Daerah	67.611.011.018		
34	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	54.194.601.787		
35	Badan Riset dan Inovasi Daerah	22.800.445.727		
36	Inspektorat	68.546.621.077		
37	Kantor Camat Sangatta Selatan	16.253.599.152		
38	Kantor Camat Sangatta Utara	19.825.964.172		

No	Perangkat Daerah	RKPD (Rp)	APBD (Rp)	RKPD terhadap APBD (Rp)
39	Kantor Camat Bengalon	13.143.812.039		
40	Kantor Camat Kaliorang	9.088.099.898		
41	Kantor Camat Muara Wahau	11.055.402.487		
42	Kantor Camat Kombeng	9.820.187.937		
43	Kantor Camat Muara Ancalong	10.675.526.477		
44	Kantor Camat Batu Ampar	6.730.412.217		
45	Kantor Camat Telen	8.775.185.230		
46	Kantor Camat Busang	6.730.473.645		
47	Kantor Camat Teluk Pandan	9.907.658.860		
48	Kantor Camat Rantau Pulung	7.780.647.220		
49	Kantor Camat Kaubun	8.378.079.522		
50	Kantor Camat Sangkulirang	9.042.834.566		
51	Kantor Camat Muara Bengkal	13.612.820.775		
52	Kantor Camat Long Mesangat	9.191.208.304		
53	Kantor Camat Karang	8.020.702.153		
54	Kantor Camat Sandaran	7.491.667.802		
55	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	101.288.691.714		

Berdasarkan Tabel 5.6, konsistensi pagu anggaran antara RKPD dengan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan gambaran mengenai sejauh mana prioritas pembangunan daerah memperoleh dukungan pembiayaan yang selaras dalam proses penganggaran. Kesesuaian pagu anggaran menunjukkan bahwa rencana pembangunan yang telah dirumuskan dalam RKPD mendapatkan dukungan fiskal yang memadai untuk dilaksanakan, sedangkan perbedaan pagu dapat menunjukkan adanya penyesuaian kebijakan, penajaman prioritas, maupun dinamika kapasitas keuangan daerah pada tahun berjalan. Dengan demikian, hasil evaluasi pada subbab ini menegaskan bahwa pagu anggaran tidak hanya berfungsi sebagai alokasi pembiayaan, tetapi juga sebagai penentu tingkat keberlangsungan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Oleh sebab itu, konsistensi pagu anggaran menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas integrasi antara perencanaan dan penganggaran daerah secara menyeluruh.

BAB 6

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD

Bab ini menguraikan hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 sebagai bentuk evaluasi atas capaian pembangunan daerah selama tahun berjalan. Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD menjadi bagian penting dalam siklus perencanaan pembangunan daerah karena memberikan gambaran mengenai sejauh mana target yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan dapat diwujudkan melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan oleh perangkat daerah. Dengan demikian, bab ini tidak hanya berfungsi sebagai media pelaporan capaian, tetapi juga sebagai dasar penilaian atas efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah secara menyeluruh.

Secara substantif, evaluasi hasil pelaksanaan RKPD diarahkan untuk menilai dua dimensi utama. Pertama, capaian indikator tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagai representasi kinerja pembangunan pada level makro. Kedua, capaian indikator kinerja dan keuangan pada program, kegiatan, dan subkegiatan per perangkat daerah sebagai gambaran kinerja pelaksanaan pembangunan pada level operasional. Melalui dua dimensi tersebut, evaluasi hasil pelaksanaan RKPD dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai hubungan antara arah kebijakan pembangunan, implementasi program, dan tingkat capaian yang berhasil diwujudkan pada Tahun Anggaran 2025.

Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD juga penting untuk menilai kualitas keterhubungan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan daerah. Target yang telah dirumuskan dalam RKPD pada dasarnya merupakan komitmen kinerja tahunan pemerintah daerah, sehingga pelaksanaannya perlu dilihat tidak hanya dari sisi penyerapan anggaran, tetapi juga dari sisi pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi pada bab ini menempatkan aspek kinerja dan keuangan secara seimbang, agar pelaksanaan pembangunan tidak hanya dinilai dari seberapa besar anggaran dibelanjakan, tetapi juga dari seberapa jauh hasil yang direncanakan benar-benar dapat dicapai.

Dalam pelaksanaannya, capaian pembangunan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor internal dapat berupa kualitas perencanaan, ketepatan pelaksanaan kegiatan, efektivitas koordinasi antarperangkat daerah, ketersediaan sumber daya manusia, serta kapasitas kelembagaan pelaksana. Sementara itu, faktor eksternal dapat berupa dinamika fiskal daerah, perubahan kebijakan nasional dan daerah, kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta perkembangan situasi yang memengaruhi jalannya pelaksanaan pembangunan. Oleh sebab itu, hasil evaluasi pada bab ini perlu dibaca secara komprehensif, tidak semata-mata sebagai perbandingan angka target dan realisasi, tetapi juga sebagai refleksi atas dinamika implementasi pembangunan daerah pada tahun berjalan.

Bab ini disusun untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai hasil pelaksanaan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025. Pembahasan diawali dengan evaluasi capaian indikator tujuan dan sasaran pembangunan daerah, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi capaian indikator kinerja dan keuangan pada program, kegiatan, dan subkegiatan per perangkat daerah. Dengan susunan tersebut, Bab VI diharapkan dapat menunjukkan capaian pembangunan yang telah berhasil diwujudkan, sekaligus mengidentifikasi bagian-bagian yang masih memerlukan penguatan dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah pada periode berikutnya.

6.1 Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi penjabaran operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga capaian indikator tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD Tahun 2025 perlu dievaluasi untuk

menilai tingkat keterlaksanaan arah kebijakan, prioritas, serta target pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Evaluasi ini dilaksanakan sebagai bagian dari pengendalian kinerja pembangunan daerah dengan membandingkan target dan realisasi indikator tujuan serta sasaran pembangunan yang termuat dalam RKPD Tahun 2025, sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai tingkat efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah selama tahun berjalan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar penting dalam memberikan umpan balik bagi perbaikan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan daerah pada periode berikutnya. Pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Kabupaten Kutai Timur dilakukan dengan menggunakan formulir Evaluasi Hasil RKPD sebagaimana diatur dalam Lampiran E.60 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sedangkan penilaian terhadap rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja mengacu pada Tabel T-E.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Tabel 6.1 Interval Nilai dan Kriteria Penilaian

No	Interval Nilai	Kriteria Penilaian
1	91% <= 100%	Sangat Tinggi
2	76% <= 90%	Tinggi
3	66% <= 75%	Sedang
4	51% <= 65%	Rendah
5	<= 50%	Sangat Rendah

Sumber: Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Penilaian capaian indikator tujuan dan sasaran pembangunan pada subbab ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi indikator pembangunan daerah Tahun 2025. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya dinilai berdasarkan interval kriteria penilaian yang telah ditetapkan, sehingga tingkat capaian masing-masing indikator dapat diklasifikasikan secara lebih terukur. Melalui pendekatan ini, evaluasi tidak hanya menunjukkan besarnya realisasi terhadap target, tetapi juga memberikan gambaran mengenai posisi keberhasilan pembangunan daerah dalam kategori sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, atau sangat rendah. Dengan demikian, pembahasan capaian indikator tujuan dan sasaran pembangunan dapat disajikan secara lebih sistematis dan memudahkan penafsiran terhadap hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2025.

Tabel 6.2 Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Misi 1: Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, dan Bersatu

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	SKPD
Tujuan 1 Menata dan meningkatkan taraf hidup	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	75,90	76,18	76,48	100,4	

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	SKPD
masyarakat dengan mendorong kehidupan masyarakat (SDM) yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu (M1.T1)							
Sasaran 1 Meningkatkan taraf hidup masyarakat yang sejahtera (M1.T1.S1)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,76	5,30	6,20	117,0	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	Tingkat Kemiskinan	%	8,81	7,87	8,07	102,5	Dinas Sosial
	Persentase PAD terhadap pendapatan	%		10,66	6,44	60,4	Badan Pendapatan Daerah
Sasaran 2 Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat (M1.T1.S2)	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,02	13,20	13,22	100,2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,47	9,55	9,48	99,3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sasaran 3 Meningkatkan derajat kesehatan (M1.T1.S3)	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,55	76,67	74,87	97,7	Dinas Kesehatan

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	SKPD
Sasaran 4 Terwujudnya SDM yang beriman, berakhlak mulia, dan berbudaya (M1.T1.S4)	Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal (SD)	%	100,00	100,00	100,00	100,0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal (SMP)	%	100,00	96,55	100,00	103,6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kegiatan	7	6	9	150,0	Dinas Kebudayaan
	Penyelenggaraan festival keagamaan	Kegiatan	0	1	1	100,0	Sekretariat Daerah

Tabel 6.3 Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Misi 2: Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat berbasis Sektor Pertanian

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	SKPD
Tujuan 1 Menata Daya Saing Ekonomi Masyarakat berbasis Sektor Pertanian/Perkebunan/Perikanan (M2.T1)	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	8,80	10,41			
Sasaran 1 Peningkatan kegiatan perekonomian berbasis sektor pertanian/perkebunan	Ketersediaan Pangan Utama	%	38,64	45,66	47,52	104,1	Dinas Ketahanan Pangan

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	SKPD
n/perikanan (M2.T1.S1)							
	Produksi sektor pertanian	Ton	35.885,73	50.630	35.765	70,6	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	Produksi sektor perkebunan	Ton	6.226.862	6.200.000	5.903.746,63	95,2	Dinas Perkebunan
	Produksi perikanan	Ton	9.982,13	8.086,36			Dinas Perikanan
Sasaran 2 Meningkatnya Pendapatan Petani (M2.T1.S2)	Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks	121,67	109,648	120,61	110,0	Dinas Ketahanan Pangan
Tujuan 2 Menata Peran penunjang daya saing ekonomi masyarakat (M2.T2)	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	9,82	8,00	1,05	13,1	
Sasaran 1 Meningkatnya Kemampuan Perekonomian di Daerah (M2.T2.S1)	Pertumbuhan Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM)	Unit	1.633	1.733	1.737	100,2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Proyek	4.614	4.000	6.311	157,8	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	SKPD
							Satu Pintu

Tabel 6.4 Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Misi 3: Mewujudkan Pelayanan Dasar Masyarakat Secara Proporsional dan Merata

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	SKPD
Tujuan 4 Menata semua layanan kebutuhan infrastruktur dasar dan ekonomi bagi masyarakat secara proporsional dan merata (M3.T1)	Indeks Pembangunan Desa (IPD)	Indeks		72,93			
	Indeks Gini	Indeks	0,283	0,349	0,305	115,2	
Sasaran 8 Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah (M3.T1.S1)	Persentase jalan Kabupaten kondisi Mantap	%	27,93	54,21	34,78	64,2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Rasio konektivitas wilayah	Indeks					
Sasaran 9 Meningkatnya Infrastruktur Fasilitas Perumahan/Permukiman (M3.T1.S2)	Persentase perumahan yang dilengkapi PSU	%	26,051	31,00	31,43	101,4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	SKPD
	Capaian akses air minum layak	%	58,10	53,95	55,34	102,6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Persentase layanan air limbah domestik	%		77,38	77,38	100,0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Persentase infrastruktur pengelolaan sampah perkotaan	%	82,58	93,08	85,00	91,3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sasaran 10 Meningkatnya Infrastruktur Teknologi dan Informasi (M3.T1.S3)	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan	%		48,57	48,57	100,0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Cakupan layanan telekomunikasi	%		83,17	83,17	100,0	Dinas Komunikasi dan Informatika
Sasaran 11 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan (M3.T1.S4)	Rasio ketersediaan SD/MI	%		56,68	56,68	100,0	Dinas Pendidikan
	Rasio ketersediaan SMP/MTs	%		53,36	53,36	100,0	Dinas Pendidikan

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	SKPD
	Persentase bangunan sekolah kondisi baik	%					
Sasaran 12 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kesehatan (M3.T1.S5)	Rasio puskesmas/poliklinik/pustu	Rasio		0,51	0,51	100,0	Dinas Kesehatan
	Rasio rumah sakit	Rasio		0,02	0,02	100,0	Dinas Kesehatan
	Akreditasi fasilitas kesehatan	Predikat					
Sasaran 13 Meningkatnya Sarana dan Infrastruktur Pendukung Ekonomi (M3.T1.S6)	Persentase pasar dalam kondisi baik	%					Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase sarana distribusi ekonomi	%					Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tabel 6.5 Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Misi 4: Mewujudkan Pemerintahan yang Partisipatif berbasis Penegakan Hukum dan Teknologi Informasi

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	SKPD
Tujuan 5 Menata Kelola pemerintahan yang bersih,	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Predikat	Baik	Baik			

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	SKPD
efektif, transparan dan akuntabel berbasis elektronik (M4.T1)							
Sasaran 14 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan (M4.T1.S1)	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Predikat	WTP	WTP			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	53,99	60,00			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Rasio	99,27	98,00			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	38,47	50,00	46,00	92,0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	%	100,00	100,00	100,00	100,0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Jumlah temuan BPK	Temuan		15	33	220,0	Inspektorat

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	SKPD
	Persentase Penegakan Perda	%		73,99			Satuan Polisi Pamong Praja
	LSM/Organisasi yang Aktif	Organisasi		229			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tujuan 6 Menata kualitas layanan publik yang berbasis interoperabilitas (M4.T2)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	75,93	75,95			
Sasaran 15 Meningkatkan kualitas layanan publik yang berbasis interoperabilitas dalam pembangunan wilayah (M4.T2.S1)	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	100,0	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
	Persentase Perangkat Daerah yang terkoneksi dengan jaringan fiber optik	%		62,86	62,86	100,0	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

Tabel 6.6 Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Misi 5: Mewujudkan Sinergitas Pengembangan Wilayah dan Integrasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian	SKPD
Tujuan 7 Menata dan mensinergikan pembangunan yang terintegrasi agar berfungsi optimal (M5.T1)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	75,85	71,47	80,85	113,1	
Sasaran 16 Meningkatkan sinergitas proses pengembangan wilayah yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan (M5.T1.S1)	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	83,51	77,60	88,71	114,3	Dinas Lingkungan Hidup
Tujuan 8 Menata dan memanfaatkan ruang secara berkelanjutan (M5.T2)	Ketaatan terhadap RTRW	%	100,00	100,00	100,00	100,0	
Sasaran 17 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang (M5.T2.S1)	Jumlah Perkada RDTR	Dokumen	2	2	1	50,0	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

6.1.1 Analisis Capaian per Misi

Misi 1: Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, dan Bersatu
Secara umum, capaian Misi 1 menunjukkan perkembangan yang cukup baik pada dimensi pembangunan manusia, khususnya melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, Angka Harapan Lama Sekolah,

serta terjaganya pelaksanaan indikator sosial-budaya seperti muatan lokal dan festival keagamaan maupun budaya. Namun demikian, beberapa indikator strategis masih memerlukan perhatian, terutama Tingkat Pengangguran Terbuka, tingkat kemiskinan, persentase PAD terhadap pendapatan, dan Angka Harapan Hidup yang belum mencapai target sebagaimana direncanakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbaikan kualitas manusia telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan kesejahteraan ekonomi, kesehatan, dan kemandirian fiskal daerah.

Misi 2: Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis Sektor Pertanian

Capaian Misi 2 memperlihatkan hasil yang relatif positif pada indikator ketahanan pangan, Nilai Tukar Petani, pertumbuhan Industri Kecil Menengah, dan investor berskala nasional, yang menunjukkan adanya penguatan pada beberapa elemen pengungkit ekonomi daerah. Akan tetapi, produksi sektor pertanian dan perkebunan belum sepenuhnya mencapai target, sementara laju pertumbuhan ekonomi masih jauh di bawah sasaran tahunan. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan sektor-sektor basis ekonomi masyarakat telah berlangsung, tetapi dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara agregat belum optimal. Dengan demikian, Misi 2 memerlukan penguatan pada aspek produktivitas, hilirisasi, dan konektivitas kebijakan agar kinerja sektoral lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Misi 3: Mewujudkan Pelayanan Dasar Masyarakat Secara Proporsional dan Merata

Capaian Misi 3 pada dasarnya menunjukkan bahwa pelayanan dasar masyarakat telah mengalami kemajuan, terutama pada indikator perumahan, akses air minum layak, layanan air limbah domestik, pengelolaan sampah perkotaan, serta beberapa indikator teknologi informasi, pendidikan, dan kesehatan yang telah mencapai atau mendekati target. Akan tetapi, indikator konektivitas wilayah, khususnya persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap, masih berada di bawah target sehingga menjadi titik lemah utama dalam misi ini. Dengan demikian, Misi 3 dapat dinilai cukup berhasil pada aspek layanan dasar dan utilitas publik, tetapi masih memerlukan percepatan pada pembangunan infrastruktur konektivitas agar pemerataan pelayanan dasar dapat berlangsung lebih efektif dan berkelanjutan.

Misi 4: Mewujudkan Pemerintahan yang Partisipatif Berbasis Penegakan Hukum dan Teknologi Informasi

Capaian Misi 4 memperlihatkan bahwa tata kelola pemerintahan daerah telah menunjukkan kemajuan, terutama pada aspek konsistensi perencanaan, ketersediaan sistem data dan statistik terintegrasi, penguatan infrastruktur digital pemerintahan, serta peningkatan kapasitas aparatur. Di sisi lain, masih terdapat indikator yang memerlukan perhatian, terutama jumlah temuan BPK yang melebihi target dan beberapa indikator tata kelola serta penegakan hukum yang capaian tahunannya belum terbaca secara utuh. Kondisi ini menunjukkan bahwa fondasi pemerintahan berbasis akuntabilitas dan teknologi informasi telah terbentuk, namun efektivitas pengawasan, kualitas kepatuhan, dan penguatan aspek partisipatif masih perlu terus ditingkatkan.

Misi 5: Mewujudkan Sinergitas Pengembangan Wilayah dan Integrasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan

Capaian Misi 5 menunjukkan hasil yang relatif baik, terutama pada indikator lingkungan hidup seperti Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan kualitas tutupan lahan yang melampaui target. Selain itu, indikator ketaatan terhadap RTRW juga tetap terjaga pada tingkat yang sangat baik. Namun, pada aspek penataan ruang rinci, capaian Jumlah Perkada RDTR masih berada di bawah target tahunan, sehingga menunjukkan bahwa penguatan instrumen regulatif penataan ruang belum sepenuhnya optimal. Dengan demikian, Misi 5 dapat dinilai berhasil dalam menjaga orientasi pembangunan yang berwawasan lingkungan, tetapi masih memerlukan percepatan pada aspek kelembagaan dan regulasi teknis penataan ruang.

6.1.2 Simpulan Umum

Secara keseluruhan, capaian pembangunan Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2025 menunjukkan kecenderungan positif pada aspek pembangunan manusia, pelayanan dasar, tata kelola pemerintahan, dan lingkungan hidup. Meski demikian, masih terdapat sejumlah indikator strategis yang belum mencapai

target, khususnya pada bidang ketenagakerjaan, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, konektivitas wilayah, dan beberapa instrumen penataan ruang. Arah kebijakan pembangunan pada periode berikutnya perlu difokuskan pada penguatan kualitas pertumbuhan, pemerataan hasil pembangunan, serta peningkatan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan daerah.

6.2 Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan pada Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat Daerah

Capaian indikator kinerja dan keuangan pada program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah merupakan bagian penting dalam evaluasi hasil pelaksanaan RKPD karena menunjukkan tingkat efektivitas implementasi pembangunan pada level operasional. Pada bagian ini, evaluasi diarahkan untuk melihat sejauh mana perangkat daerah mampu merealisasikan anggaran yang telah dialokasikan, sekaligus mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan selama Tahun Anggaran 2025. Dengan demikian, subbab ini memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai hasil pelaksanaan pembangunan daerah berdasarkan peran dan kontribusi masing-masing perangkat daerah.

Evaluasi terhadap capaian keuangan diperlukan untuk menilai tingkat realisasi anggaran sebagai bentuk dukungan fiskal terhadap pelaksanaan program pembangunan. Sementara itu, evaluasi capaian kinerja diperlukan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan benar-benar menghasilkan keluaran dan hasil yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dan keuangan pada subbab ini dilakukan secara berimbang, agar evaluasi pelaksanaan RKPD tidak hanya menitikberatkan pada besarnya serapan anggaran, tetapi juga pada kualitas capaian pembangunan yang dihasilkan.

Capaian indikator kinerja dan keuangan perangkat daerah pada dasarnya mencerminkan kapasitas implementasi pembangunan daerah secara nyata. Tingkat realisasi anggaran yang tinggi tidak selalu menunjukkan kinerja yang optimal apabila tidak diikuti oleh capaian indikator yang baik. Sebaliknya, capaian indikator yang tinggi juga perlu dibaca bersama dengan tingkat realisasi keuangan untuk melihat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program. Dengan demikian, evaluasi pada subbab ini menjadi penting untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai hubungan antara alokasi sumber daya, pelaksanaan kegiatan, dan hasil pembangunan yang dicapai oleh masing-masing perangkat daerah.

Penyajian hasil evaluasi pada subbab ini dilakukan secara berurutan menurut perangkat daerah. Untuk setiap perangkat daerah, pembahasan disusun melalui penyajian capaian indikator keuangan dan capaian indikator kinerja. Dengan susunan tersebut, hasil evaluasi diharapkan dapat menunjukkan perangkat daerah yang telah mampu melaksanakan program secara efektif, sekaligus mengidentifikasi perangkat daerah yang masih memerlukan penguatan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, maupun pengelolaan anggaran.

6.2.1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan daerah, terutama pada aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan akses dan mutu layanan pendidikan, serta pelestarian nilai-nilai budaya daerah. Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD pada perangkat daerah ini dilakukan melalui pembacaan capaian indikator keuangan dan capaian indikator kinerja program yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2025. Melalui evaluasi tersebut dapat dilihat keterkaitan antara dukungan anggaran, efektivitas pelaksanaan program, dan kontribusinya terhadap pembangunan daerah, khususnya pada bidang pendidikan dan kebudayaan.

Tabel 6.7 Capaian Indikator Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Kategori
1	Program Pengelolaan Pendidikan	1.007.187.467.377,00	891.194.240.104,80	88,48	Tinggi
2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	79.277.152.400,00	74.313.073.987,00	93,74	Sangat Tinggi
3	Program Pengembangan Kurikulum	0,00	0,00	0,00	Sangat Rendah
4	Program Pengembangan Kebudayaan	8.090.634.186,00	7.987.832.465,00	98,73	Sangat Tinggi
5	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	545.926.000,00	416.189.900,00	76,24	Tinggi
6	Program Pembinaan Sejarah	1.646.189.000,00	1.625.074.279,00	98,72	Sangat Tinggi
7	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	151.790.260,00	145.032.600,00	95,55	Sangat Tinggi
8	Program Pengelolaan Permuseuman	63.137.000,00	59.857.402,00	94,81	Sangat Tinggi

Tabel 6.8 Capaian Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan	100	100	100,00	Sangat Tinggi

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang memenuhi Kualifikasi D-IV/S1	100	100	100,00	Sangat Tinggi
3	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	13,20	13,22	100,00	Sangat Tinggi
4	Program Pengelolaan Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	9,55	9,48	99,27	Sangat Tinggi
5	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Umur 7–15 Tahun Pendidikan Dasar	100	99,57	99,57	Sangat Tinggi
6	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 5–6 Tahun Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100	97,78	97,78	Sangat Tinggi
7	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Umur 7–18 Tahun Pendidikan Menengah	100	100	100,00	Sangat Tinggi
8	Program Pengelolaan Pendidikan	Rasio Ketersediaan SD/MI per Penduduk	56,68	45,96	81,09	Tinggi
9	Program Pengelolaan Pendidikan	Rasio Ketersediaan SMP/MTs per Penduduk	53,36	43,13	80,83	Sedang
10	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal (SD)	100	100	100,00	Sangat Tinggi
11	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal (SMP)	96,55	100	100,00	Sangat Tinggi

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
12	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah ketua adat yang menerima insentif	175	0	0,00	Sangat Rendah
13	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	6	9	100,00	Sangat Tinggi
14	Program Pembinaan Sejarah	Jumlah fasilitasi SDM dan lembaga sejarah	11	30	100,00	Sangat Tinggi
15	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	43	43	100,00	Sangat Tinggi
16	Program Pengelolaan Permuseuman	Terpeliharanya koleksi benda cagar budaya	100	100	100,00	Sangat Tinggi

Secara umum, capaian indikator keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Tahun Anggaran 2025 menunjukkan kinerja yang baik. Sebagian besar program berada pada kategori **tinggi** hingga **sangat tinggi**, terutama Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Pengembangan Kebudayaan, Program Pembinaan Sejarah, Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, serta Program Pengelolaan Permuseuman. Program dengan pagu terbesar, yaitu **Program Pengelolaan Pendidikan**, juga menunjukkan realisasi yang relatif tinggi sebesar **88,48 persen**, sehingga secara umum tetap mendukung pelaksanaan urusan pendidikan daerah. Di sisi lain, **Program Pengembangan Kurikulum** tercatat tidak memiliki pagu dan realisasi anggaran, sehingga secara administratif berada pada kategori sangat rendah. Kondisi ini perlu dicermati lebih lanjut agar tidak menimbulkan ketidaksesuaian antara target kinerja dan dukungan anggaran program.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mencatatkan progres yang signifikan dalam pencapaian target kinerja sepanjang tahun 2025. Indikator-indikator utama pada bidang pendidikan seperti **Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, APS Pendidikan Dasar, APS PAUD, APS Pendidikan Menengah, kualifikasi guru**, serta **penerapan kurikulum muatan lokal** menunjukkan capaian yang sangat tinggi. Pada bidang kebudayaan, capaian juga sangat baik pada indikator **festival seni dan budaya, fasilitasi SDM dan lembaga sejarah, pelestarian cagar budaya**, serta **pengelolaan permuseuman**. Meskipun demikian, masih terdapat indikator yang memerlukan perhatian, yaitu **rasio ketersediaan SD/MI** yang berada pada kategori tinggi namun belum optimal, **rasio ketersediaan SMP/MTs** yang masih berada pada kategori sedang, serta **jumlah ketua adat yang menerima insentif** yang belum menunjukkan capaian. Hal ini menunjukkan bahwa secara substantif Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah berhasil menjaga kinerja utama pada aspek mutu layanan pendidikan dan pelestarian budaya, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek pemerataan sarana pendidikan serta dukungan kebijakan dan penganggaran untuk indikator kebudayaan tertentu.

6.2.2 Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pencapaian pembangunan daerah, khususnya pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat, penguatan layanan kesehatan dasar dan rujukan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, serta penguatan perilaku hidup sehat di masyarakat. Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD pada perangkat daerah ini dilakukan melalui pembacaan capaian indikator keuangan dan capaian indikator kinerja program selama Tahun Anggaran 2025. Melalui evaluasi tersebut dapat dilihat sejauh mana dukungan anggaran yang tersedia mampu diterjemahkan menjadi hasil pelaksanaan yang mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Kutai Timur.

Tabel 6.9 Capaian Indikator Keuangan Dinas Kesehatan

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	301.500.917.876,00	277.545.406.428,09	92,05	Sangat Tinggi
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	198.192.477.190,00	184.680.523.288,00	93,18	Sangat Tinggi
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.587.234.984,00	1.392.786.168,00	87,75	Tinggi
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	590.000.000,00	569.904.745,00	96,59	Sangat Tinggi
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	7.872.897.440,00	7.386.373.036,00	93,82	Sangat Tinggi
	TOTAL	509.743.527.490,00	471.574.993.665,09		

Realisasi keuangan Dinas Kesehatan pada Tahun Anggaran 2025 secara umum menunjukkan kinerja yang sangat baik. Empat dari lima program berada pada kategori **sangat tinggi**, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, serta Program

Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan berada pada kategori **tinggi** dengan realisasi 87,75 persen. Secara keseluruhan, pelaksanaan anggaran pada Dinas Kesehatan relatif baik dan telah mendukung pelaksanaan urusan kesehatan daerah.

Tabel 6.10 Capaian Indikator Kinerja Dinas Kesehatan

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100,00%	99,36%	99,36	Sangat Tinggi
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100,00%	98,44%	98,44	Sangat Tinggi
3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	77,45	74,87	96,67	Sangat Tinggi
4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk	0,51	0,40	78,43	Tinggi
5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	0,02	0,02	100,00	Sangat Tinggi
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber	Tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber	100,00%	93,65%	93,65	Sangat Tinggi

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
	Daya Manusia Kesehatan	Daya Manusia Kesehatan				
7	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Apotik dan Toko Obat serta IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) yang memenuhi syarat	100,00%	90,14%	90,14	Tinggi
8	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase kecamatan yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	100,00%	100,00%	100,00	Sangat Tinggi

Capaian indikator kinerja Dinas Kesehatan pada Tahun 2025 secara umum berada pada kategori **tinggi** hingga **sangat tinggi**. Sebagian besar indikator menunjukkan capaian sangat tinggi, terutama pada cakupan pelayanan administrasi, penyelenggaraan upaya kesehatan, angka harapan hidup, rasio rumah sakit per satuan penduduk, peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, serta penerapan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Adapun indikator yang masih berada pada kategori **tinggi** adalah rasio puskesmas, poliklinik, dan pustu per satuan penduduk serta persentase apotek, toko obat, dan IRTP yang memenuhi syarat. Secara umum, kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program kesehatan telah memberikan hasil yang baik, meskipun masih diperlukan penguatan pada aspek ketersediaan fasilitas layanan kesehatan dasar dan pengawasan sarana kefarmasian serta pangan.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan program Dinas Kesehatan pada Tahun Anggaran 2025 telah berjalan dengan baik. Dari sisi keuangan, sebagian besar program menunjukkan realisasi anggaran pada kategori sangat tinggi, sedangkan dari sisi kinerja mayoritas indikator juga berada pada kategori tinggi dan sangat tinggi. Urusan kesehatan telah memperoleh dukungan pelaksanaan yang cukup kuat, baik dari sisi pembiayaan maupun hasil kinerja program. Masih diperlukan perhatian lebih lanjut pada aspek pemerataan fasilitas layanan kesehatan dasar dan peningkatan kepatuhan sarana kefarmasian, alat kesehatan, serta pangan agar kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dapat semakin meningkat secara merata.

6.2.3 RSUD Kudungga Sangatta

RSUD Kudungga Sangatta merupakan perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam mendukung penyediaan layanan kesehatan rujukan bagi masyarakat Kabupaten Kutai Timur. Melalui evaluasi tersebut dapat dilihat sejauh mana dukungan anggaran yang dialokasikan mampu mendukung peningkatan mutu pelayanan rumah sakit, kepuasan pelanggan, serta pemenuhan standar pelayanan kesehatan rujukan.

Tabel 6.11 Capaian Indikator Keuangan RSUD Kudungga Sangatta

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	207.304.502.530,00	184.204.180.210,48	88,86	Tinggi
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	36.896.245.199,00	32.630.059.855,00	88,44	Tinggi
	TOTAL	244.200.747.729,00	216.834.240.065,48		

Realisasi keuangan RSUD Kudungga Sangatta pada Tahun Anggaran 2025 menunjukkan kinerja yang baik. Kedua program utama yang dilaksanakan berada pada kategori **tinggi**, dengan realisasi 88,86 persen untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan 88,44 persen untuk Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa dukungan anggaran pada RSUD Kudungga Sangatta telah terserap secara cukup optimal untuk mendukung operasional rumah sakit dan pelaksanaan layanan kesehatan rujukan.

Tabel 6.12 Capaian Indikator Kinerja RSUD Kudungga Sangatta

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Pelanggan	92,5%	87,82	94,94	Sangat Tinggi
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Akreditasi RSUD	Paripurna	Paripurna	100,00	Sangat Tinggi

Capaian indikator kinerja RSUD Kudungga Sangatta pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik. Indikator tingkat kepuasan pelanggan mencapai 87,82 dari target 92,5 persen, yang secara proporsional setara dengan 94,94 persen dan berada pada kategori **sangat tinggi**. Sementara itu, indikator akreditasi RSUD berhasil mencapai target **Paripurna**, sehingga juga berada pada kategori **sangat tinggi**. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program RSUD Kudungga Sangatta telah mendukung mutu layanan rumah sakit dan pemenuhan standar pelayanan kesehatan secara baik.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan program RSUD Kudungga Sangatta pada Tahun Anggaran 2025 telah berjalan dengan baik. Dari sisi keuangan, kedua program utama menunjukkan realisasi anggaran pada kategori tinggi. Dari sisi kinerja, indikator yang digunakan juga menunjukkan capaian sangat tinggi, baik pada aspek kepuasan pelanggan maupun pemenuhan akreditasi

rumah sakit. Dengan demikian, pelaksanaan urusan layanan kesehatan rujukan di RSUD Kudungga Sangatta telah memberikan hasil yang positif. Meskipun demikian, rumah sakit tetap memerlukan penguatan pada aspek sarana dan prasarana pelayanan serta peningkatan kapasitas layanan agar mutu pelayanan kesehatan dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

6.2.4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan infrastruktur dasar, konektivitas wilayah, layanan air minum, air limbah, persampahan, drainase, bangunan gedung, jalan, jasa konstruksi, dan penataan ruang. Evaluasi tersebut dapat dilihat sejauh mana dukungan anggaran yang dialokasikan mampu diterjemahkan menjadi hasil pelaksanaan yang mendukung kualitas infrastruktur dan penataan ruang di Kabupaten Kutai Timur.

Tabel 6.13 Capaian Indikator Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	72.065.132.719,00	60.268.227.034,00	83,63	Tinggi
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	121.203.880.503,00	87.130.396.678,00	71,89	Sedang
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	107.021.919.431,00	67.527.906.100,00	63,10	Rendah
4	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	12.288.334.200,00	7.941.654.100,00	64,63	Rendah
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.193.815.000,00	1.193.815.000,00	100,00	Sangat Tinggi
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	65.152.787.928,00	63.758.675.435,00	97,86	Sangat Tinggi

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Kategori
7	Program Pengembangan Permukiman	100.000.000,00	0,00	0,00	Sangat Rendah
8	Program Penataan Bangunan Gedung	459.334.972.565,00	386.669.512.498,00	84,18	Tinggi
9	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	310.900.949.385,00	224.943.725.997,00	72,35	Sedang
10	Program Penyelenggaraan Jalan	423.978.974.587,00	339.066.323.277,00	79,97	Tinggi
11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	3.760.520.200,00	3.150.890.140,00	83,79	Tinggi
12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	3.120.320.800,00	2.522.045.359,00	80,83	Tinggi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun Anggaran 2025 menunjukkan realisasi yang beragam. Kinerja keuangan tertinggi terdapat pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah serta Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang berada pada kategori sangat tinggi. Sejumlah program lainnya berada pada kategori tinggi, terutama Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penataan Bangunan Gedung, Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pengembangan Jasa Konstruksi, dan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang. Namun demikian, masih terdapat program yang berada pada kategori sedang, rendah, dan sangat rendah, khususnya pada bidang sumber daya air, air minum, persampahan, dan pengembangan permukiman. Kondisi ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada perangkat daerah ini belum merata pada seluruh program, sehingga efektivitas penyerapan anggaran masih perlu terus ditingkatkan pada beberapa bidang layanan infrastruktur dasar.

Tabel 6.14 Capaian Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan	100	85	85,00	Tinggi

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
	Daerah Kabupaten/Kota	keuangan - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	89,85	55,34	61,59	Rendah
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Capaian Akses Air Minum Layak	53,95	34,04	63,10	Rendah
4	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Infrastruktur Pengelolaan Sampah Perkotaan	93,08	60,16	64,63	Rendah
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah Domestik	77,38	77,38	100,00	Sangat Tinggi
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Cakupan wilayah saluran drainase rawan genangan air /Banjir	96,87	96,87	100,00	Sangat Tinggi
7	Program Pengembangan Permukiman	Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk	2,499	0	0,00	Sangat Rendah
8	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung Perkantoran Kondisi Baik	60,64	51,05	84,18	Tinggi
9	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	0,36	0,26	72,35	Sedang

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan Kabupaten kondisi Mantap	54,21	34,78	64,16	Rendah
11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga terampil yang memiliki sertifikat kompetensi	14,14	11,44	80,91	Tinggi
12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Cakupan Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	100,00	87,50	87,50	Tinggi

Capaian indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun 2025 juga menunjukkan hasil yang tidak seragam. Kinerja terbaik terdapat pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah serta Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang mencapai kategori sangat tinggi. Beberapa indikator lain berada pada kategori tinggi, terutama pada pelayanan umum perkantoran, kondisi bangunan gedung perkantoran, tenaga terampil bersertifikat, dan penyelenggaraan penataan ruang. Sementara itu, indikator pada bidang irigasi, akses air minum layak, infrastruktur pengelolaan sampah perkotaan, dan jalan kabupaten kondisi mantap masih berada pada kategori rendah, sedangkan indikator rasio tempat ibadah per satuan penduduk berada pada kategori sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa hasil pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang belum merata pada seluruh bidang layanan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun Anggaran 2025 menghasilkan capaian yang bervariasi. Dari sisi keuangan, sebagian program menunjukkan realisasi yang tinggi hingga sangat tinggi, tetapi masih terdapat beberapa program dengan realisasi rendah dan sangat rendah. Kondisi serupa juga terlihat dari sisi kinerja, di mana beberapa program telah mencapai hasil sangat tinggi, sedangkan sebagian indikator lainnya masih berada pada kategori sedang, rendah, dan sangat rendah. Dengan demikian, perangkat daerah ini telah memberikan kontribusi penting terhadap pembangunan infrastruktur daerah, namun masih memerlukan penguatan pada bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan pelayanan infrastruktur dasar, konektivitas wilayah, dan pengembangan permukiman agar hasil pembangunan dapat lebih merata dan optimal.

6.2.5 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya pada penyediaan perumahan, penataan kawasan permukiman, penanganan kawasan kumuh, peningkatan prasarana dan sarana utilitas umum, serta pelayanan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Melalui evaluasi tersebut dapat dilihat sejauh mana dukungan anggaran yang tersedia mampu diterjemahkan menjadi hasil pelaksanaan yang mendukung kualitas hunian dan lingkungan permukiman di Kabupaten Kutai Timur.

Tabel 6.15 Capaian Indikator Keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	37.682.326.062,00	31.230.140.290,00	82,88	Tinggi
2	Program Pengembangan Perumahan	33.591.740.900,00	10.253.731.100,00	30,52	Sangat Rendah
3	Program Kawasan Permukiman	743.107.287.634,00	574.197.981.618,00	77,27	Tinggi
4	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	894.897.800,00	384.007.190,00	42,91	Sangat Rendah
5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	746.475.241.136,00	616.903.509.972,00	82,64	Tinggi
6	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	73.133.050,00	13.854.462,00	18,94	Sangat Rendah

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Tahun Anggaran 2025 menunjukkan realisasi yang bervariasi. Program dengan realisasi keuangan kategori **tinggi** terdapat pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Kawasan Permukiman, dan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum. Sementara itu, Program Pengembangan Perumahan, Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, serta Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman masih berada pada kategori **sangat rendah**. Kondisi ini menunjukkan bahwa serapan anggaran pada perangkat daerah ini belum merata pada seluruh program, terutama pada program-program yang berkaitan langsung dengan pengembangan perumahan, penanganan kawasan kumuh, dan pelayanan sertifikasi bidang perumahan.

Tabel 6.16 Capaian Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tata kelola administrasi perkantoran dan laporan keuangan	100%	100%	100	Sangat Tinggi
2	Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana	100%	86,81%	87	Tinggi
3	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan di bawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	42,35%	43%	102	Sangat Tinggi
4	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Berkurangnya jumlah unit RTLH >10 ha	0,24942%	0,2492%	100	Sangat Tinggi
5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	31%	31,43%	101	Sangat Tinggi
6	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Cakupan penerbitan izin pengembangan perumahan	83,66%	82,86%	99	Sangat Tinggi

Lima dari enam indikator program berada pada kategori **sangat tinggi**, yaitu pada aspek tata kelola administrasi, penanganan kawasan permukiman, pengurangan RTLH, penyediaan PSU, dan cakupan penerbitan izin pengembangan perumahan. Sementara itu, indikator pada Program Pengembangan Perumahan berada pada kategori **tinggi** dengan capaian 87 persen. Dari sisi kinerja, sebagian besar program telah menghasilkan capaian yang baik, meskipun dari sisi keuangan masih terdapat beberapa program dengan tingkat realisasi anggaran yang rendah.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Tahun Anggaran 2025 memperlihatkan perbedaan yang cukup nyata antara capaian keuangan dan capaian kinerja. Dari sisi keuangan, sebagian program telah menunjukkan realisasi tinggi, tetapi masih terdapat beberapa program dengan realisasi sangat rendah. Sebaliknya, dari sisi kinerja, hampir seluruh indikator program menunjukkan capaian tinggi hingga sangat tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan urusan perumahan dan kawasan permukiman telah memberikan hasil yang cukup baik dari sisi keluaran kinerja, namun efektivitas penyerapan anggaran pada beberapa program masih perlu ditingkatkan agar dukungan pembiayaan dan hasil pelaksanaan dapat berjalan lebih seimbang.

6.2.6 Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, serta penguatan fungsi penunjang administrasi pemerintahan daerah.

Tabel 6.17 Capaian Indikator Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Kategori
1	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.947.688.858,00	5.265.291.908,00	88,53	Tinggi
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	39.628.311.142,00	38.540.545.817,00	97,26	Sangat Tinggi

Dari tabel di atas, realisasi keuangan Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun Anggaran 2025 menunjukkan hasil yang baik. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mencapai kategori **sangat tinggi** dengan realisasi sebesar 97,26 persen, sedangkan Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berada pada kategori **tinggi** dengan realisasi sebesar 88,53 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum dukungan anggaran pada perangkat daerah ini telah terserap dengan baik untuk mendukung pelaksanaan tugas penunjang administrasi maupun fungsi ketenteraman dan ketertiban umum.

Tabel 6.18 Capaian Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penegakan PERDA	73,99%	73,22%	98,96	Sangat Tinggi
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	70%	70%	100	Sangat Tinggi

Indikator persentase penegakan perda mencapai 98,96 persen dari target yang ditetapkan, sehingga berada pada kategori **sangat tinggi**. Demikian pula, indikator cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan laporan keuangan mencapai 100 persen dan berada pada kategori **sangat tinggi**. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pada perangkat daerah ini telah mendukung capaian kinerja secara baik, baik pada aspek utama penegakan perda maupun pada aspek penunjang administrasi perangkat daerah.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan program Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun Anggaran 2025 telah berjalan dengan baik. Dari sisi keuangan, kedua program menunjukkan realisasi pada kategori tinggi dan sangat tinggi. Dari sisi kinerja, seluruh indikator program juga berada pada kategori sangat tinggi. Perangkat daerah ini telah mampu melaksanakan fungsi penegakan perda, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta layanan administrasi internal secara cukup efektif. Meskipun masih ada hambatan yang berkaitan dengan inventarisasi regulasi yang belum sepenuhnya diperbarui dan belum lengkap, serta keterbatasan personel yang memiliki sertifikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada seluruh wilayah kecamatan. Dengan demikian, penguatan aspek regulasi dan kapasitas personel tetap diperlukan agar pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dapat semakin optimal.

6.2.7 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan dasar pada aspek pencegahan, penanggulangan, penyelamatan, dan penanganan kebakaran dan non-kebakaran. Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD pada perangkat daerah ini dilakukan untuk melihat sejauh mana dukungan anggaran yang tersedia mampu diterjemahkan menjadi hasil pelaksanaan yang mendukung layanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten Kutai Timur.

Tabel 6.19 Capaian Indikator Keuangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	45.699.345.554,00	37.249.611.975,00	81,51	Tinggi

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Kategori
	Daerah Kabupaten/Kota				
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	6.157.084.773,00	5.941.220.782,00	96,49	Sangat Tinggi

Realisasi keuangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Tahun Anggaran 2025 menunjukkan hasil yang baik. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berada pada kategori **tinggi** dengan realisasi 81,51 persen. Sementara itu, Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non-Kebakaran berada pada kategori **sangat tinggi** dengan realisasi 96,49 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa dukungan anggaran pada perangkat daerah ini secara umum telah terserap dengan baik, terutama pada program inti yang berkaitan langsung dengan layanan kebakaran dan penyelamatan.

Tabel 6.20 Capaian Indikator Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Umum Perkantoran dan Laporan Keuangan - Damkar	100%	100%	100,00	Sangat Tinggi
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Time Respon Limit) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	98,83%	96,49%	97,63	Sangat Tinggi
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Penyelamatan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota	0,06%	0,05%	83,33	Tinggi

Indikator cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan mencapai 100 persen dan berada pada kategori **sangat tinggi**. Pada program inti, indikator tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran juga berada pada kategori **sangat tinggi** dengan capaian 97,63 persen. Sementara itu, indikator cakupan penyelamatan bencana kebakaran kabupaten/kota berada pada kategori **tinggi** dengan capaian 83,33 persen. Secara umum pelaksanaan program telah mendukung kinerja perangkat daerah secara baik, terutama pada aspek waktu tanggap layanan kebakaran.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan program Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Tahun Anggaran 2025 telah berjalan dengan baik. Dari sisi keuangan, program inti perangkat daerah menunjukkan realisasi sangat tinggi, sedangkan program penunjang berada pada kategori tinggi. Dari sisi kinerja, seluruh indikator program berada pada kategori tinggi hingga sangat tinggi. Meskipun demikian, masih ada hambatan, terutama belum optimalnya ketersediaan pos pemadam pada seluruh kecamatan serta keterbatasan sumber daya manusia petugas lapangan pemadam kebakaran. Selain itu, pada program penunjang masih terdapat kendala yang berkaitan dengan pelatihan teknis, material bagi SDM, serta dinamika penganggaran belanja pegawai. Dengan demikian, penguatan sarana layanan dan kapasitas personel tetap diperlukan agar kinerja pelayanan kebakaran dan penyelamatan dapat semakin ditingkatkan.

6.2.8 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai peran penting dalam mendukung kesiapsiagaan daerah, penanganan kebencanaan, pengurangan risiko bencana, serta penguatan kapasitas respons cepat terhadap kondisi darurat.

Tabel 6.21 Capaian Indikator Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Kategori
1	Penanggulangan Bencana	2.169.870.899,00	2.083.583.156,00	96,02	Sangat Tinggi
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.847.183.121,00	15.374.485.790,00	86,15	Tinggi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Tahun Anggaran 2025 menunjukkan hasil realisasi keuangan yang baik. Program Penanggulangan Bencana berada pada kategori **sangat tinggi** dengan realisasi 96,02 persen. Sementara itu, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berada pada kategori **tinggi** dengan realisasi 86,15 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa dukungan

anggaran pada perangkat daerah ini telah terserap dengan baik, khususnya pada program inti yang berkaitan langsung dengan penanggulangan bencana.

Tabel 6.22 Capaian Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
1	Penanggulangan Bencana	Indeks Risiko Bencana	150	200,10	133,4	Sangat Tinggi
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	90	100	111	Sangat Tinggi

Indikator Indeks Risiko Bencana mencapai 200,10 dari target 150, dengan persentase capaian 133,4 persen, sehingga berada pada kategori **sangat tinggi**. Demikian pula, indikator cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan laporan keuangan mencapai 100 dari target 90, dengan persentase capaian 111 persen dan berada pada kategori **sangat tinggi**. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pada perangkat daerah ini telah mendukung capaian kinerja secara baik, baik pada aspek utama penanggulangan bencana maupun pada aspek penunjang administrasi.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan program Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Tahun Anggaran 2025 telah berjalan dengan baik. Dari sisi keuangan, program inti penanggulangan bencana menunjukkan realisasi sangat tinggi, sedangkan program penunjang berada pada kategori tinggi. Dari sisi kinerja, kedua indikator program berada pada kategori sangat tinggi. Masih ada hambatan, terutama efisiensi anggaran yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan baru dimulai pada Triwulan III. Selain itu, dokumen juga menjelaskan bahwa nilai Indeks Risiko Bencana tahun 2025 dihitung menggunakan baseline yang telah dimutakhirkan pada komponen bahaya dan komponen kerentanan, sehingga tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan hasil perhitungan tahun 2015–2024. Dengan demikian, hasil capaian yang tinggi pada perangkat daerah ini tetap perlu dibaca secara cermat dalam konteks perubahan metodologi pengukuran indikator dan dinamika pelaksanaan anggaran tahun berjalan.

6.2.9 Dinas Sosial

Dinas Sosial memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya pada penanganan masalah kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan korban bencana, serta layanan penunjang administrasi perangkat daerah. Melalui evaluasi ini dapat dilihat sejauh mana dukungan anggaran yang tersedia mampu diterjemahkan menjadi hasil pelaksanaan yang mendukung perlindungan sosial dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kutai Timur.

Tabel 6.23 Capaian Indikator Keuangan Dinas Sosial

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	16.359.351.356	14.034.360.092	85,79	Tinggi

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Kategori
	Daerah Kabupaten/Kota				
2	Program Pemberdayaan Sosial	720.805.200	715.158.015	99,22	Sangat Tinggi
3	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	7.891.000		-	
4	Program Rehabilitasi Sosial	1.247.128.590	890.216.610	71,38	Sedang
5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.682.993.000	1.089.498.329	64,74	Rendah
6	Program Penanganan Bencana	2.793.905.505	2.478.257.478	88,70	Tinggi

Program Pemberdayaan Sosial berada pada kategori **sangat tinggi** dengan realisasi 99,22 persen. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Penanganan Bencana berada pada kategori **tinggi**, sedangkan Program Rehabilitasi Sosial berada pada kategori **sedang**. Sementara itu, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial masih berada pada kategori **rendah**.

Tabel 6.24 Capaian Indikator Kinerja Dinas Sosial

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	75,51%	70,00%	92,70	Sangat Tinggi
2	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan jaminan dan perlindungan sosial kelompok maupun perorangan	69,84%	54,57%	78,14	Tinggi
3	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang	100%	100%	100,00	Sangat Tinggi

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
		Mendapat Penanganan				
4	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial	100%	100%	100,00	Sangat Tinggi
5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial	100%	0,43%	0,43	Sangat Rendah
6	Program Penanganan Bencana	Persentase Warga Negara Korban Bencana Kabupaten yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	100%	100%	100,00	Sangat Tinggi

Sebagian besar indikator Dinas Sosial berada pada kategori **sangat tinggi**, terutama pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Program Rehabilitasi Sosial, dan Program Penanganan Bencana. Program Pemberdayaan Sosial berada pada kategori **tinggi** dengan capaian 78,14 persen. Namun demikian, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial berada pada kategori **sangat rendah** dengan capaian 0,43 persen, sehingga menjadi bagian yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam evaluasi perangkat daerah ini.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan program Dinas Sosial pada Tahun Anggaran 2025 memperlihatkan capaian yang belum sepenuhnya merata antarprogram. Dari sisi keuangan, terdapat program yang telah mencapai kategori sangat tinggi dan tinggi, tetapi masih terdapat pula program dengan capaian sedang dan rendah, serta satu program yang belum mencantumkan realisasi anggaran secara lengkap. Dari sisi kinerja, sebagian besar indikator telah mencapai kategori sangat tinggi, namun Program Perlindungan dan Jaminan Sosial menunjukkan capaian yang sangat rendah sehingga memerlukan perhatian serius. Juga tercatat adanya beberapa hambatan, antara lain efisiensi anggaran pada kegiatan kesekretariatan, keterbatasan data dan koordinasi pada Program Pemberdayaan Sosial, serta kendala aplikasi SIKS-NG dan perubahan basis data DTKS menjadi DTSEN pada Program Perlindungan dan Jaminan Sosial. Dengan demikian, Dinas Sosial telah menunjukkan hasil yang baik pada beberapa bidang layanan, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek perlindungan dan jaminan sosial serta konsolidasi data pelaksanaan program.

6.2.10 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja berperan dalam mendukung peningkatan kualitas layanan ketenagakerjaan, perencanaan tenaga kerja, pelatihan kerja dan produktivitas, penempatan tenaga kerja, serta fungsi penunjang administrasi perangkat daerah. Evaluasi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana dukungan anggaran yang tersedia mampu mendukung pelaksanaan urusan transmigrasi dan ketenagakerjaan di Kabupaten Kutai Timur.

Tabel 6.25 Capaian Indikator Keuangan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	21.033.274.167	18.574.450.998	88,30	Tinggi
2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	300.000.000	300.000.000	100,00	Sangat Tinggi
3	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.744.000.000	703.764.800	40,40	Sangat Rendah
4	Program Penempatan Tenaga Kerja	4.078.818.320	3.457.228.711	84,80	Tinggi

Realisasi keuangan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja menunjukkan hasil yang tidak seragam. Program Perencanaan Tenaga Kerja mencapai kategori **sangat tinggi**, sedangkan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Penempatan Tenaga Kerja berada pada kategori **tinggi**. Di sisi lain, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja masih berada pada kategori **sangat rendah**, sehingga menjadi bagian yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan anggaran perangkat daerah ini.

Tabel 6.26 Capaian Indikator Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Administrasi dan Laporan Keuangan	97,00 %	90,00%	93	Sangat Tinggi
2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu Rencana Tenaga Kerja (RTK)	80,00 %	65,48%	82	Tinggi

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
3	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/kompetensi	73,00 %	35,98%	49	Sangat Rendah
4	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja	57,35 %	37,17%	65	Rendah

Dari sisi kinerja, capaian Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja juga masih bervariasi. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mencapai kategori **sangat tinggi**, sedangkan Program Perencanaan Tenaga Kerja berada pada kategori **tinggi**. Namun demikian, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja masih berada pada kategori **sangat rendah**, dan Program Penempatan Tenaga Kerja berada pada kategori **rendah**. Secara umum, perangkat daerah ini telah menunjukkan hasil yang baik pada aspek penunjang administrasi dan perencanaan tenaga kerja, tetapi masih memerlukan penguatan pada program-program yang berkaitan langsung dengan peningkatan kompetensi dan penempatan tenaga kerja agar hasil pelaksanaan dapat lebih optimal.

6.2.11 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berperan dalam mendukung pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak, serta pengelolaan data gender dan anak. Melalui evaluasi tersebut dapat dilihat sejauh mana dukungan anggaran yang tersedia mampu mendukung pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Kutai Timur.

Tabel 6.27 Capaian Indikator Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.694.461.108	12.980.305.083	88,33	Tinggi
2	Program Pengarusutamaan	1.120.489.640	889.933.120	79,42	Tinggi

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Kategori
	Gender dan Pemberdayaan Perempuan				
3	Program Perlindungan Perempuan	1.065.785.018	966.401.148	90,68	Sangat Tinggi
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1.817.198.560	1.695.397.370	93,30	Sangat Tinggi
5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	130.125.690	23.704.800	18,22	Sangat Rendah
6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	7.650.818.000	7.488.588.792	97,88	Sangat Tinggi
7	Program Perlindungan Khusus Anak	1.270.130.582	1.113.680.561	87,68	Tinggi

Realisasi keuangan perangkat daerah ini menunjukkan hasil yang cukup baik pada sebagian besar program. Program Perlindungan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, dan Program Pemenuhan Hak Anak berada pada kategori **sangat tinggi**, sedangkan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, serta Program Perlindungan Khusus Anak berada pada kategori **tinggi**. Adapun Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak masih berada pada kategori **sangat rendah**, sehingga menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan anggaran.

Tabel 6.28 Capaian Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	3	3	100	Sangat Tinggi
2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	60	55,87	93	Sangat Tinggi

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
3	Program Perlindungan Perempuan	Rasio KDRT	0,003	0,010	200	Sangat Tinggi
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	60	55,87	93	Sangat Tinggi
5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Profil Gender dan Anak (dokumen)	3	0		
6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Nindya	Madya		
7	Program Perlindungan Khusus Anak	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	0,013	0,027	46,15	Sangat Rendah

Dari sisi kinerja, capaian perangkat daerah ini juga menunjukkan variasi antarprogram. Beberapa indikator berada pada kategori **sangat tinggi**, terutama pada aspek penunjang administrasi, pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, dan peningkatan kualitas keluarga. Sementara itu, Program Perlindungan Khusus Anak masih berada pada kategori **sangat rendah**. Adapun pada Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak serta Program Pemenuhan Hak Anak, dokumen sumber tidak menampilkan persentase capaian, sehingga penyajiannya dipertahankan sebagaimana tercantum dalam berita acara. Secara umum, perangkat daerah ini telah menunjukkan hasil yang baik pada sebagian besar program, namun masih memerlukan penguatan pada pengelolaan data gender dan anak serta perlindungan khusus anak agar capaian pelaksanaan dapat lebih merata.

6.2.12 Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan berperan dalam mendukung kedaulatan dan kemandirian pangan, penguatan diversifikasi konsumsi pangan, penanganan kerawanan pangan, pengawasan keamanan pangan, serta layanan penunjang administrasi perangkat daerah.

Tabel 6.29 Capaian Indikator Keuangan Dinas Ketahanan Pangan

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Kategori
1	Program pengelola sumber daya ekonomi	8.049.999.685	1.428.622.526	17,75	Sangat Rendah

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Kategori
	untuk kedaulatan dan kemandirian pangan				
2	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	4.169.892.022	3.088.093.833	74,06	Sedang
3	Program penanganan kerawanan pangan	499.988.000	434.292.583	86,86	Tinggi
4	Program pengawasan keamanan pangan	449.654.000	394.001.103	87,62	Tinggi
5	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota	20.301.433.306	17.381.703.866	85,62	Tinggi

Dari sisi keuangan, capaian Dinas Ketahanan Pangan terlihat cukup beragam. Tiga program berada pada kategori **tinggi**, yaitu program penanganan kerawanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan program penunjang urusan pemerintahan daerah. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat berada pada kategori **sedang**, sedangkan program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan masih berada pada kategori **sangat rendah**. Gambaran ini menunjukkan bahwa serapan anggaran pada perangkat daerah ini belum merata antarprogram.

Tabel 6.30 Capaian Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
1	Program pengelola sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Desa yang memiliki Lumbung Pangan	34,75%	47,52%	136,75	Sangat Tinggi
2	Program peningkatan diversifikasi dan	Nilai Tukar Petani (NTP)	109,64%	120,61%	110,00	Sangat Tinggi

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
	ketahanan pangan masyarakat					
3	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Ketersediaan Pangan Utama	45,55%	18,11%	39,66	Sangat Rendah
4	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Penguatan Cadangan Pangan	78 Ton	85,98 Ton	110,23	Sangat Tinggi
5	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	92,5 Point	90,29 Point	94,54	Sangat Tinggi
6	Program penanganan kerawanan pangan	Penanganan daerah rawan pangan	21,51%	38,89%	180,80	Sangat Tinggi
7	Program pengawasan keamanan pangan	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	95%	98,51%	103,69	Sangat Tinggi
8	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100%	100%	100,00	Sangat Tinggi

Dari sisi kinerja, hasilnya cenderung lebih baik. Hampir seluruh indikator berada pada kategori **sangat tinggi**, termasuk penguatan lumbung pangan desa, Nilai Tukar Petani, cadangan pangan, skor pola pangan harapan, penanganan daerah rawan pangan, pengawasan keamanan pangan, serta layanan administrasi perkantoran dan laporan keuangan. Hanya indikator **ketersediaan pangan utama** yang masih berada pada kategori **sangat rendah**, sehingga menjadi titik yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Secara umum, Dinas Ketahanan Pangan telah menunjukkan hasil pelaksanaan yang cukup baik, namun penguatan pada aspek ketersediaan pangan utama masih perlu diprioritaskan agar capaian antarindikator menjadi lebih seimbang.

6.2.13 Dinas Pertanahan

Dinas Pertanahan berperan dalam mendukung penyelesaian sengketa tanah, pengelolaan tanah kosong, penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, penetapan tanah ulayat, penatagunaan tanah, serta layanan penunjang administrasi perangkat daerah. Oleh karena itu, evaluasi hasil pelaksanaan RKPD pada perangkat daerah ini dilakukan melalui pembacaan capaian indikator keuangan dan capaian indikator kinerja program selama Tahun Anggaran 2025. Melalui evaluasi tersebut dapat dilihat sejauh mana dukungan anggaran yang tersedia mampu mendukung pelaksanaan urusan pertanahan di Kabupaten Kutai Timur.

Tabel 6.31 Capaian Indikator Keuangan Dinas Pertanahan

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.718.567.236,00	14.370.889.622,00	85,95	Tinggi
2	Program Pengelolaan Tanah Kosong	32.854.000,00	32.585.000,00	69,18	Sedang
3	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	255.426.468,00	248.560.776,00	99,00	Sangat Tinggi
4	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	20.531.118.342,00	14.495.001.975,00	85,20	Tinggi
5	Program Penetapan Tanah Ulayat	76.219.000,00	57.071.844,00	70,00	Sedang
6	Program Penatagunaan Tanah	117.884.000,00	115.942.381,00	99,00	Sangat Tinggi

Dari sisi keuangan, capaian Dinas Pertanahan relatif baik. Dua program berada pada kategori **sangat tinggi**, yaitu Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dan Program Penatagunaan Tanah. Dua program lainnya berada pada kategori **tinggi**, yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan. Sementara itu, Program Pengelolaan Tanah Kosong dan Program Penetapan Tanah Ulayat masih berada

pada kategori **sedang**. Secara umum, serapan anggaran pada perangkat daerah ini sudah cukup baik, meskipun masih terdapat ruang penguatan pada beberapa program tertentu.

Tabel 6.32 Capaian Indikator Kinerja Dinas Pertanahan

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	100%	100	Sangat Tinggi
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah	100%	100%	100	Sangat Tinggi
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Umum Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100	Sangat Tinggi
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100	Sangat Tinggi
5	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase Sengketa Tanah Garapan yang bisa diselesaikan berdasarkan berkas yang masuk	1 Laporan	1 Laporan	100	Sangat Tinggi
6	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Jumlah Kasus yang terselesaikan	7 Kasus	22 Kasus	100	Sangat Tinggi
7	Program Penyelesaian Ganti Kerugian	Persentase antara Luas Bidang Tanah yang Sudah	96,00%	96,00%	85,20	Tinggi

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
	dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Diselesaikan Ganti Kerugian/Jumlah Bidang Tanah target Ganti Kerugian				
8	Program Penetapan Tanah Ulayat	Persentase Administrasi Penetapan Tanah Ulayat	100%	0%	0	Sangat Rendah
9	Program Penatagunaan Tanah	Terdokumentasinya Administrasi Pertanahan dan Penatagunaan Tanah	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Sangat Tinggi

Dari sisi kinerja, hasil pelaksanaan Dinas Pertanahan cenderung kuat pada sebagian besar program. Hampir seluruh indikator berada pada kategori **sangat tinggi**, terutama pada layanan penunjang, penyelesaian sengketa, pengelolaan tanah kosong, dan penatagunaan tanah. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan berada pada kategori **tinggi**, sedangkan Program Penetapan Tanah Ulayat masih berada pada kategori **sangat rendah**. Secara keseluruhan, perangkat daerah ini telah menunjukkan hasil yang cukup baik dalam pelaksanaan urusan pertanahan, namun masih memerlukan penguatan pada aspek penetapan tanah ulayat agar capaian antarprogram lebih seimbang.

6.2.14 Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam mendukung pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, perencanaan lingkungan hidup, pengelolaan persampahan, pengawasan izin lingkungan, pelestarian keanekaragaman hayati, pendidikan lingkungan, serta layanan penunjang administrasi perangkat daerah.

Tabel 6.33 Capaian Indikator Keuangan Dinas Lingkungan Hidup

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	42.391.431.716,00	33.473.453.093,00	78,96	Tinggi
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	980.566.000,00	922.057.024,00	94,03	Sangat Tinggi
3	Program Pengendalian	550.018.300,00	325.956.767,00	59,26	Rendah

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Kategori
	Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1.891.454.595,00	1.614.424.473,00	85,35	Tinggi
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	47.879.130,00	-	0	Sangat Rendah
6	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	525.957.899,00	440.142.255,00	83,68	Tinggi
7	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	-	-	0	Sangat Rendah
8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	528.988.063,00	424.412.000,00	80,23	Tinggi
9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	236.600.000,00	211.650.000,00	89,45	Tinggi

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Kategori
10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	237.024.500,00	139.854.000,00	59	Rendah
11	Program Pengelolaan Persampahan	30.918.697.225,00	25.328.180.086,00	81,92	Tinggi

Dari sisi keuangan, capaian Dinas Lingkungan Hidup tampak cukup beragam. Program Perencanaan Lingkungan Hidup mencapai kategori **sangat tinggi**, sedangkan sebagian besar program lain berada pada kategori **tinggi**. Di sisi lain, masih terdapat program yang realisasinya **rendah** dan **sangat rendah**, terutama pada pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penanganan pengaduan lingkungan hidup, pengendalian B3 dan limbah B3, serta pengakuan keberadaan MHA yang terkait dengan PPLH. Gambaran ini menunjukkan bahwa serapan anggaran pada perangkat daerah ini belum merata antarprogram.

Tabel 6.34 Capaian Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup

N o	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Ketersediannya Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	94,42%	94,42	Sangat Tinggi
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup	1 Dokumen	2 Dokumen	200	Sangat Tinggi
3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	IKLH	71,47	80,85	113,12	Sangat Tinggi
4	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	77,6	88,71	114,31	Sangat Tinggi

N o	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
	Kerusakan Lingkungan Hidup					
5	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Luas Penanaman Daerah Sempadan Sungai (Ha)		2.553,7 Ha		
6	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Jumlah SK Izin TPS LB3	16 Izin TPS LB3	15 Izin TPS LB3	93,75	Sangat Tinggi
7	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULHD yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	144,2	89,41	62	Rendah
8	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak	Jumlah SK yang diterbitkan	3 SK	0 SK	0	Sangat Rendah

N o	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
	MHA yang Terkait dengan PPLH					
9	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah Sekolah yang Masuk Dalam Kriteria Sekolah Adiwiyata	9 Sekolah	9 Sekolah	100	Sangat Tinggi
10	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah Penghargaan LH	4 Penghargaan	6 Penghargaan	150	Sangat Tinggi
11	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Jumlah Kasus LH yang Ditindaklanjuti	7 Kasus	27 Kasus	385,71	Sangat Tinggi
12	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Capaian Pengelolaan Persampahan	41,92	8,23%	19,63	Sangat Rendah

Dari sisi kinerja, hasil pelaksanaan Dinas Lingkungan Hidup juga menunjukkan variasi yang cukup tajam. Sejumlah indikator berada pada kategori **sangat tinggi**, terutama pada aspek perencanaan lingkungan hidup, pengukuran kualitas lingkungan, pengelolaan izin TPS LB3, sekolah Adiwiyata, penghargaan lingkungan hidup, serta penanganan pengaduan lingkungan hidup. Namun demikian, masih terdapat indikator yang berada pada kategori **rendah** dan **sangat rendah**, khususnya pada pembinaan dan pengawasan izin lingkungan, pengakuan keberadaan MHA yang terkait dengan PPLH, serta capaian pengelolaan persampahan. Pada Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), dokumen sumber tidak menampilkan target dan persentase capaian secara lengkap, sehingga penyajiannya dipertahankan sebagaimana tercantum dalam berita acara. Secara umum, perangkat daerah ini telah menunjukkan hasil yang baik pada sejumlah program strategis, namun masih memerlukan penguatan pada bidang pengelolaan persampahan dan beberapa aspek tata kelola lingkungan agar capaian antarprogram menjadi lebih seimbang.

6.2.15 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berperan dalam mendukung pelayanan administrasi kependudukan, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pengelolaan profil kependudukan.

Tabel 6.35 Capaian Indikator Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.694.156.845	16.110.993.023	86,18	Tinggi
2	Program Pendaftaran Penduduk	2.490.190.537	2.379.653.620	95,56	Sangat Tinggi
3	Program Pencatatan Sipil	488.213.000	482.629.600	98,86	Sangat Tinggi
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.076.156.650	985.329.985	91,56	Sangat Tinggi
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	97.860.000	97.520.000	99,65	Sangat Tinggi
	TOTAL	22.846.577.032	20.056.131.228		

Dari sisi keuangan, capaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tergolong baik. Empat program berada pada kategori **sangat tinggi**, sedangkan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berada pada kategori **tinggi**. Pola ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran perangkat daerah relatif kuat dan cukup merata pada program-program utama pelayanan administrasi kependudukan.

Tabel 6.36 Capaian Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Ketersediaannya Penunjang Urusan Pemerintahan Dispendukcapil	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
2	Program Pendaftaran Penduduk	Rasio Penduduk ber KTP Persatuan Penduduk	98,00	98,00	100,00	Sangat Tinggi

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
3	Program Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran 0 - 18 Tahun	98,00	98,00	100,00	Sangat Tinggi
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rasio Ketersediaan Alat Perekaman di 18 Kecamatan	86,07	86,07	100,00	Sangat Tinggi
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Ketersediaan Data Kependudukan Kabupaten	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi

Dari sisi kinerja, hasil pelaksanaan perangkat daerah ini menunjukkan capaian yang sangat baik. Seluruh indikator program mencapai **100 persen** dan berada pada kategori **sangat tinggi**. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan penyediaan data kependudukan telah berjalan secara konsisten sesuai target yang ditetapkan. Secara umum, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memperlihatkan kinerja yang kuat baik dari sisi realisasi anggaran maupun capaian program, sehingga mendukung kualitas layanan administrasi kependudukan daerah secara cukup optimal.

6.2.16 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berperan dalam mendukung penataan desa, peningkatan kerja sama desa, penguatan administrasi pemerintahan desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa, serta layanan penunjang administrasi perangkat daerah. Dari evaluasi hasil pelaksanaan RKPD dapat dilihat sejauh mana dukungan anggaran yang tersedia mampu mendukung penguatan tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Kutai Timur.

Tabel 6.37 Capaian Indikator Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.151.257.048	16.064.745.687	89,00	Tinggi
2	Program Penataan Desa	296.622.040	259.502.810	87,49	Tinggi
3	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	187.180.000	148.535.005	79,35	Tinggi
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	7.793.946.170	7.383.793.200	94,74	Sangat Tinggi

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Kategori
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	3.290.123.500	2.722.213.880	82,74	Tinggi

Dari sisi keuangan, capaian perangkat daerah ini tergolong cukup baik. Program Administrasi Pemerintahan Desa mencapai kategori **sangat tinggi**, sedangkan empat program lainnya berada pada kategori **tinggi**. Pola ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran relatif terjaga dan cukup merata pada program-program utama yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan desa.

Tabel 6.38 Capaian Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan DPMD	100	98,05	98,05	Sangat Tinggi
2	Program Penataan Desa	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	95,51	95,51	100	Sangat Tinggi
3	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Persentase Pertambahan Kerjasama Desa dan Antar Desa	92,44	30,00	32,45	Sangat Rendah
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase BUMDes berjalan dengan baik (Aktif)	92,07	81,04	88,02	Tinggi
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif	80,00	80,00	100	Sangat Tinggi

Dari sisi kinerja, hasil pelaksanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menunjukkan capaian yang cukup baik pada sebagian besar program. Tiga indikator berada pada kategori **sangat tinggi**, yaitu pada layanan administrasi perkantoran, penataan desa, dan keaktifan lembaga kemasyarakatan desa. Program Administrasi Pemerintahan Desa berada pada kategori **tinggi**, sedangkan Program Peningkatan Kerja Sama Desa masih berada pada kategori **sangat rendah**. Secara umum, perangkat daerah ini telah menunjukkan hasil yang baik dalam mendukung tata kelola dan pemberdayaan desa, namun penguatan pada aspek kerja sama desa masih perlu menjadi perhatian agar capaian antarprogram lebih seimbang.

6.2.17 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berperan dalam mendukung pengendalian penduduk, pembinaan keluarga berencana, peningkatan kualitas keluarga sejahtera, serta layanan penunjang administrasi perangkat daerah.

Tabel 6.39 Capaian Indikator Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.689.895.417	15.301.073.037	81,87	Tinggi
2	Program Pengendalian Penduduk	860.697.560	725.358.548	84,28	Tinggi
3	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	3.246.484.250	2.495.362.894	76,86	Tinggi
4	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2.417.492.700	2.361.184.035	97,67	Sangat Tinggi

Dari sisi keuangan, capaian perangkat daerah ini tergolong cukup baik. Tiga program berada pada kategori **tinggi**, yaitu program penunjang, pengendalian penduduk, dan pembinaan keluarga berencana. Sementara itu, Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera berada pada kategori **sangat tinggi**. Secara umum, realisasi anggaran menunjukkan dukungan pembiayaan yang cukup baik terhadap pelaksanaan program perangkat daerah ini.

Tabel 6.40 Capaian Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan	100	81,86	82	Tinggi

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
	Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Keuangan				
2	Program Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	3,9%	1,69%	43	Sangat Rendah
3	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	2,02%	2,17%	107	Sangat Tinggi
4	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	11,09%	11,2%	101	Sangat Tinggi

Dari sisi kinerja, hasil pelaksanaan perangkat daerah ini menunjukkan variasi antarprogram. Program Pembinaan Keluarga Berencana dan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera berada pada kategori **sangat tinggi**, sedangkan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berada pada kategori **tinggi**. Adapun Program Pengendalian Penduduk masih berada pada kategori **sangat rendah**, sehingga memerlukan perhatian lebih lanjut. Secara umum, perangkat daerah ini telah menunjukkan hasil yang baik pada aspek pembinaan keluarga dan keluarga sejahtera, namun penguatan pada pengendalian penduduk masih perlu ditingkatkan agar capaian pelaksanaan menjadi lebih seimbang.

6.2.18 Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan berperan dalam mendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, pengelolaan pelayaran, serta layanan penunjang administrasi perangkat daerah.

Tabel 6.41 Capaian Indikator Keuangan Dinas Perhubungan

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	23.263.142.812	20.248.589.857,00	87,04	Tinggi
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	202.625.800	197.889.000,00	97,66	Sangat Tinggi
3	Program Pengelolaan Pelayaran	1.848.972.719	1.126.549.974,00	60,93	Rendah

Dari sisi keuangan, capaian Dinas Perhubungan menunjukkan hasil yang bervariasi. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berada pada kategori **sangat tinggi**, Program Penunjang

Urusan Pemerintahan berada pada kategori **tinggi**, sedangkan Program Pengelolaan Pelayaran masih berada pada kategori **rendah**. Secara umum, realisasi anggaran pada perangkat daerah ini belum merata antarprogram, terutama pada program yang berkaitan dengan pengelolaan pelayaran.

Tabel 6.42 Capaian Indikator Kinerja Dinas Perhubungan

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan Pelayanan Umum Perkantoran dan Laporan	100%	100%	100	Sangat Tinggi
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah KIR Kendaraan Umum	6500 Unit	4410 Unit	68	Sedang
3	Program Pengelolaan Pelayaran	Jumlah Pelabuhan Laut	4	4	100	Sangat Tinggi
4	Program Pengelolaan Pelayaran	Jumlah Pelabuhan Udara	1	1	100	Sangat Tinggi
5	Program Pengelolaan Pelayaran	Jumlah Terminal Bis	6	5	83	Tinggi

Dari sisi kinerja, hasil pelaksanaan Dinas Perhubungan juga menunjukkan variasi. Indikator layanan penunjang administrasi serta dua indikator pada Program Pengelolaan Pelayaran berada pada kategori **sangat tinggi**, sedangkan indikator jumlah terminal bis berada pada kategori **tinggi**. Adapun indikator jumlah KIR kendaraan umum masih berada pada kategori **sedang**. Secara umum, perangkat daerah ini telah menunjukkan hasil yang baik pada sebagian besar indikator, namun capaian pada layanan penguji kendaraan umum masih perlu ditingkatkan agar hasil pelaksanaan antarprogram menjadi lebih seimbang.

6.2.19 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berperan dalam mendukung pelayanan informasi publik, pengelolaan aplikasi informatika, penyelenggaraan statistik sektoral, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, serta layanan penunjang administrasi perangkat daerah.

Tabel 6.43 Capaian Indikator Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	23.383.640.470,00	18.895.253.412,00	80,81	Tinggi

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Kategori
	Daerah Kabupaten/Kota				
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	35.629.555.443,00	34.419.629.231,00	96,60	Sangat Tinggi
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	103.800.951.811,00	91.558.104.203,00	88,21	Tinggi
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	1.249.694.600,00	990.383.819,00	79,25	Tinggi
5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	75.473.786.747,00	75.205.111.062,00	99,64	Sangat Tinggi

Dari sisi keuangan, capaian perangkat daerah ini secara umum tergolong baik. Program Informasi dan Komunikasi Publik serta Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi berada pada kategori **sangat tinggi**, sedangkan tiga program lainnya berada pada kategori **tinggi**. Gambaran ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada perangkat daerah relatif kuat, terutama pada program yang berkaitan dengan komunikasi publik dan pengamanan informasi.

Tabel 6.44 Capaian Indikator Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Kominformasi	100%	100%	100%	Sangat Tinggi

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan Layanan Telekomunikasi	85,48%	97,16%	113,48%	Sangat Tinggi
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase PD yang Terkoneksi FO	62,86%	62,86%	100%	Sangat Tinggi
4	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Cakupan Layanan Telekomunikasi	85,48%	97,16%	113,48%	Sangat Tinggi
5	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	100%	Sangat Tinggi
6	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase OPD yang Menggunakan Jaringan Komunikasi Sandi	45%	45%	100%	Sangat Tinggi

Dari sisi kinerja, hasil pelaksanaan perangkat daerah ini menunjukkan capaian yang sangat baik. Seluruh indikator program berada pada kategori **sangat tinggi**, baik pada aspek layanan administrasi, layanan telekomunikasi, konektivitas perangkat daerah, statistik sektoral, maupun penggunaan jaringan komunikasi sandi. Secara umum, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian memperlihatkan kinerja yang kuat, baik dari sisi realisasi anggaran maupun capaian indikator program, sehingga mendukung penguatan transformasi digital dan layanan informasi daerah secara cukup optimal.

6.2.20 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berperan dalam mendukung pengawasan koperasi, penilaian kesehatan KSP/USP, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, pemberdayaan dan perlindungan koperasi, pemberdayaan UMKM, serta pengembangan UMKM. Oleh karena itu, evaluasi hasil pelaksanaan RKPD dapat melihat sejauh mana dukungan anggaran yang tersedia mampu mendukung penguatan koperasi dan UMKM di Kabupaten Kutai Timur.

Tabel 6.45 Capaian Indikator Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Kategori
1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	2.852.281.960	2.720.982.928	95,40	Sangat Tinggi
2	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP	-	-	0,00	Sangat Rendah

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Kategori
3	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	894.546.000	883.510.400	98,77	Sangat Tinggi
4	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	1.288.382.000	1.150.914.668	89,33	Tinggi
5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	4.994.451.000	4.713.219.675	94,37	Sangat Tinggi
6	Program Pengembangan UMKM	1.491.037.960	1.171.615.268	78,58	Tinggi

Dari sisi keuangan, capaian perangkat daerah ini cenderung baik. Tiga program berada pada kategori **sangat tinggi**, yaitu pengawasan dan pemeriksaan koperasi, pendidikan dan latihan perkoperasian, serta pemberdayaan UMKM. Dua program lainnya berada pada kategori **tinggi**, sedangkan Program Penilaian Kesehatan KSP/USP pada dokumen sumber ditampilkan tanpa pagu dan realisasi serta persentase **0,00**, sehingga penyajiannya dipertahankan sebagaimana tercantum dalam berita acara.

Tabel 6.46 Capaian Indikator Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Jumlah Persentase Koperasi yang Aktif	43,66%	40,90%	93,68	Sangat Tinggi
2	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP	Jumlah KSP/USP yang Mendapat Penilaian	20 Koperasi	0	0	Sangat Rendah
3	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Jumlah Pengurus Koperasi, UKM dan Usaha Mikro (KUMKM) yang Mengikuti Pelatihan	240 KUMKM	610 Orang	254,16	Sangat Tinggi
4	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan	110 Koperasi	145 Unit Usaha	131,81	Sangat Tinggi

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
		Manajemen dan Restrukturisasi Usaha				
5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah UMKM	8.142 UMKM	7.951 UMKM	97,65	Sangat Tinggi
6	Program Pengembangan UMKM	Jumlah UMKM yang Difasilitasi	150 UMKM	126 UMKM	84	Tinggi

Dari sisi kinerja, hasil pelaksanaan perangkat daerah ini tampak cukup kuat. Lima indikator berada pada kategori **tinggi** sampai **sangat tinggi**, bahkan beberapa program melampaui target yang ditetapkan. Satu-satunya indikator yang masih berada pada kategori **sangat rendah** adalah Program Penilaian Kesehatan KSP/USP. Secara umum, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah menunjukkan hasil yang baik dalam mendorong penguatan koperasi dan UMKM, meskipun aspek penilaian kesehatan KSP/USP masih perlu mendapatkan perhatian agar capaian antarprogram lebih seimbang.

6.2.21 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berperan dalam mendukung pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, serta pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.

Tabel 6.47 Capaian Indikator Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Kategori
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	806.538.960,00	788.537.984,00	97,77	Sangat Tinggi
2	Program Promosi Penanaman Modal	9.577.670.970,00	7.977.043.530,00	83,29	Tinggi

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Kategori
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	480.033.305,00	351.476.250,00	73,22	Sedang
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	884.701.100,00	802.559.823,00	90,72	Sangat Tinggi
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	149.202.000,00	143.996.653,00	96,51	Sangat Tinggi

Dari sisi keuangan, capaian perangkat daerah ini secara umum tergolong baik. Tiga program berada pada kategori **sangat tinggi**, yaitu pengembangan iklim penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, serta pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal. Program promosi penanaman modal berada pada kategori **tinggi**, sedangkan program pelayanan penanaman modal berada pada kategori **sedang**. Secara umum, realisasi anggaran menunjukkan dukungan pembiayaan yang cukup kuat terhadap pelaksanaan urusan penanaman modal.

Tabel 6.48 Capaian Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah peta potensi dan peluang investasi daerah yang disusun	1	1	100	Sangat Tinggi
2	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah promosi yang diselenggarakan	6	9	150	Sangat Tinggi
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,00	89,56	107,9	Sangat Tinggi
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Realisasi Investasi PMDN dan PMA (Triliun)	9,50	20	210,53	Sangat Tinggi
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem	Jumlah Data yang Dikelola	4.000	6.311	157,78	Sangat Tinggi

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
	Informasi Penanaman Modal					

Dari sisi kinerja, hasil pelaksanaan perangkat daerah ini menunjukkan capaian yang sangat baik. Seluruh indikator program berada pada kategori **sangat tinggi**, bahkan beberapa di antaranya melampaui target yang ditetapkan, terutama pada promosi penanaman modal, realisasi investasi PMDN dan PMA, serta jumlah data yang dikelola. Secara umum, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memperlihatkan hasil yang kuat baik pada aspek kinerja maupun dukungan anggaran, sehingga mendukung peningkatan investasi dan kualitas pelayanan penanaman modal daerah.

6.2.22 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Dinas Kepemudaan dan Olahraga berperan dalam mendukung pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan, daya saing keolahragaan, kapasitas kepramukaan, serta layanan penunjang administrasi perangkat daerah. Melalui evaluasi ini dapat dilihat sejauh mana dukungan anggaran yang tersedia mampu mendukung pembinaan pemuda, olahraga, dan kepramukaan di Kabupaten Kutai Timur.

Tabel 6.49 Capaian Indikator Keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Kategori
1	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	10.142.424.200	9.065.007.668,00	89,38	Tinggi
2	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	90.023.704.912	87.942.002.715,00	97,69	Sangat Tinggi
3	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	2.000.000.000	1.997.521.105,00	99,88	Sangat Tinggi
4	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	29.058.192.141	26.273.513.107,00	90,42	Sangat Tinggi

Dari sisi keuangan, capaian perangkat daerah ini tergolong sangat baik. Tiga program berada pada kategori **sangat tinggi**, yaitu pengembangan daya saing keolahragaan, kapasitas kepramukaan, dan program penunjang urusan pemerintahan daerah. Sementara itu, program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan berada pada kategori **tinggi**. Secara umum, realisasi anggaran menunjukkan dukungan pembiayaan yang kuat terhadap pelaksanaan program kepemudaan dan olahraga.

Tabel 6.50 Capaian Indikator Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
1	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif	67,36	69,44	103,09	Sangat Tinggi
2	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Prestasi Olahraga	45,00	80,00	177,78	Sangat Tinggi
3	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif	32,98	34,02	103,15	Sangat Tinggi
4	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi

Dari sisi kinerja, hasil pelaksanaan perangkat daerah ini menunjukkan capaian yang sangat baik. Seluruh indikator program berada pada kategori **sangat tinggi**, baik pada aspek organisasi kepemudaan, prestasi olahraga, kepramukaan, maupun layanan penunjang administrasi. Secara umum, Dinas Kepemudaan dan Olahraga memperlihatkan hasil yang kuat dari sisi kinerja maupun realisasi anggaran, sehingga mendukung pembinaan pemuda, olahraga, dan kepramukaan secara cukup optimal.

6.2.23 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berperan dalam mendukung pembinaan perpustakaan, pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip, serta perizinan penggunaan arsip.

Tabel 6.51 Capaian Indikator Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Kategori
1	Program Pembinaan Perpustakaan	656.134.300	642.734.000	97,96	Sangat Tinggi
2	Program Pengelolaan Arsip	1.423.731.070	1.393.365.406	97,87	Sangat Tinggi
3	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	176.019.500	170.888.060	97,08	Sangat Tinggi
4	Program Perizinan Penggunaan Arsip	-	-	0,00	Sangat Rendah

Dari sisi keuangan, capaian perangkat daerah ini pada umumnya sangat baik. Tiga program utama berada pada kategori **sangat tinggi**, yaitu pembinaan perpustakaan, pengelolaan arsip, serta perlindungan dan penyelamatan arsip. Adapun Program Perizinan Penggunaan Arsip pada dokumen sumber ditampilkan tanpa pagu dan realisasi, sehingga penyajiannya dipertahankan sebagaimana tercantum dalam LKPJ.

Tabel 6.52 Capaian Indikator Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
1	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Koleksi Judul Buku Agama, Budaya, Sosial di Perpustakaan	81%	77%	74,39	Sedang
2	Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan/Tahun	7.000 orang	7.004 orang	95,06	Sangat Tinggi
3	Program Pengelolaan Arsip	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip sesuai aturan	13/5/1	13/5/1	100,00	Sangat Tinggi
4	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Jumlah Arsip Terlindungi dan Terselamatkan	130 Arsip	150 Arsip	100,00	Sangat Tinggi
5	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Jumlah Akses yang dapat diakses	75 Arsip	0 Arsip	0,00	Sangat Rendah

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mencatatkan progres pelaksanaan program yang cukup positif sepanjang tahun berjalan. Sebagian besar indikator berada pada kategori **sangat tinggi**, terutama pada jumlah pengunjung perpustakaan, pengelolaan arsip, dan perlindungan serta penyelamatan arsip. Sementara itu, indikator persentase koleksi judul buku agama, budaya, dan sosial di perpustakaan berada pada kategori **sedang**, sedangkan Program Perizinan Penggunaan Arsip berada pada kategori **sangat rendah**. Secara umum, perangkat daerah ini telah menunjukkan hasil yang baik pada layanan inti perpustakaan dan kearsipan, namun penguatan pada aspek koleksi perpustakaan dan layanan perizinan penggunaan arsip masih perlu mendapat perhatian agar capaian antarprogram menjadi lebih seimbang.

6.2.24 Dinas Perikanan

Dinas Perikanan berperan dalam mendukung pengelolaan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, serta layanan penunjang administrasi perangkat daerah.

Tabel 6.53Capaian Indikator Keuangan Dinas Perikanan

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Kategori
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	27.004.809.024,00	22.016.359.434,00	81,53	Tinggi
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	3.148.842.580,00	2.817.884.845,00	89,49	Tinggi
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	32.268.012.233,00	26.175.109.897,00	81,12	Tinggi
4	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	335.619.140,00	327.916.900,00	97,71	Sangat Tinggi
5	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.270.505.104,00	1.231.821.800,00	96,96	Sangat Tinggi
	TOTAL	64.027.788.081,00	52.569.092.876,00	82,10	Tinggi

Dari sisi keuangan, capaian Dinas Perikanan secara umum tergolong baik. Dua program berada pada kategori **sangat tinggi**, yaitu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Tiga program lainnya berada pada kategori **tinggi**, termasuk program penunjang, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya. Secara total, realisasi keuangan perangkat daerah ini berada pada kategori **tinggi**, sehingga menunjukkan dukungan anggaran yang cukup baik bagi pelaksanaan urusan perikanan.

Tabel 6.54 Capaian Indikator Kinerja Dinas Perikanan

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100%	100%	100,00	Sangat Tinggi

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Kelompok Penangkap Ikan	50 Kelompok	0 Kelompok	0,00	Sangat Rendah
3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	8.086,36 Ton	8.802,09 Ton	108,85	Sangat Tinggi
4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	1.100,81 Ton	1.174,10 Ton	106,66	Sangat Tinggi
5	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan	13 Kelompok	44 Kelompok	338,46	Sangat Tinggi
6	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Jenis Bibit/Benih Unggul	5 Jenis	4 Jenis	80,00	Tinggi
7	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Kelompok Pengawas	7 Kelompok	4 Kelompok	57,14	Rendah
8	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Konsumsi Perikanan	42,10 Kg/Tahun	39,16 Kg/Tahun	93,02	Sangat Tinggi

Dinas Perikanan mencatatkan dinamika capaian kinerja yang cukup beragam di sepanjang tahun 2025. Sebagian besar indikator berada pada kategori **sangat tinggi**, terutama pada produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya, jumlah kelompok pembudidaya ikan, konsumsi perikanan, serta layanan penunjang administrasi. Sementara itu, indikator jumlah jenis bibit/benih unggul berada pada kategori **tinggi**. Di sisi lain, indikator jumlah kelompok pengawas masih berada pada kategori **rendah**, dan indikator jumlah kelompok penangkap ikan berada pada kategori **sangat rendah**. Secara umum, perangkat daerah ini telah menunjukkan hasil yang baik pada aspek produksi dan pemasaran hasil perikanan, namun penguatan pada kelembagaan kelompok penangkap dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan masih perlu menjadi perhatian agar capaian antarprogram lebih seimbang.

6.2.25 Dinas Pariwisata

Dinas Pariwisata berperan dalam mendukung peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, serta pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

Tabel 6.55 Capaian Indikator Keuangan Dinas Pariwisata

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.403.444.874	14.567.407.799	88,81	Tinggi
2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	4.100.977.500	3.466.093.056	84,52	Tinggi
3	Program Pemasaran Pariwisata	1.720.449.000	1.705.649.001	99,14	Sangat Tinggi
4	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	4.455.728.130	4.425.113.024	99,31	Sangat Tinggi
5	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.617.779.000	1.599.961.950	98,90	Sangat Tinggi

Dari sisi keuangan, capaian Dinas Pariwisata tergolong baik. Tiga program berada pada kategori **sangat tinggi**, yaitu pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, serta pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif. Sementara itu, program penunjang dan peningkatan daya tarik destinasi pariwisata berada pada kategori **tinggi**. Secara umum, realisasi anggaran menunjukkan dukungan pembiayaan yang cukup kuat terhadap pelaksanaan program perangkat daerah ini.

Tabel 6.56 Capaian Indikator Kinerja Dinas Pariwisata

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Umum Perkantoran dan Laporan Keuangan Dinas Pariwisata	100	90	90,00	Tinggi
2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Objek destinasi wisata	15	4	26,67	Sangat Rendah

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
3	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kunjungan Wisata	975			
4	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Event yang diikuti	4	4	100,00	Sangat Tinggi
5	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Penyediaan, Pengembangan Infrastruktur Kepariwisata (lokasi)	3	3	100,00	Sangat Tinggi
6	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	870	140	16,09	Sangat Rendah

Dinas Pariwisata mencatatkan progres pelaksanaan program yang cukup dinamis dengan capaian yang bervariasi di sepanjang tahun 2025. Beberapa indikator berada pada kategori **sangat tinggi**, terutama pada pemasaran pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif. Indikator layanan penunjang berada pada kategori **tinggi**. Di sisi lain, indikator objek destinasi wisata dan jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif masih berada pada kategori **sangat rendah**. Pada indikator kunjungan wisata, dokumen sumber tidak menampilkan capaian dan persentase, sehingga penyajiannya dipertahankan sebagaimana tercantum dalam berita acara. Secara umum, perangkat daerah ini telah menunjukkan hasil yang baik pada sebagian program, tetapi penguatan pada pengembangan destinasi dan sumber daya pariwisata masih perlu menjadi perhatian agar capaian pelaksanaan menjadi lebih seimbang.

6.2.26 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan memegang peranan penting dalam mendukung produksi sektor pertanian dan peternakan, penyediaan sarana-prasarana pertanian, pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, serta penguatan penyuluhan pertanian. Karena itu, evaluasi hasil pelaksanaan RKPD pada perangkat daerah ini diarahkan untuk melihat keterkaitan antara capaian keuangan dan capaian kinerja program selama Tahun Anggaran 2025, sehingga dapat tergambar seberapa jauh dukungan anggaran berhasil diterjemahkan menjadi hasil pelaksanaan di lapangan.

Tabel 6.57 Capaian Indikator Keuangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)		Kategori
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	11.421.053.737	10.405.741.900	91,11		Sangat Tinggi
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	26.408.233.735	15.675.708.493	59,36		Rendah
3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	606.097.440	527.162.899	86,98		Tinggi
4	Program Penyuluhan Pertanian	5.322.803.380	4.700.582.470	88,31		Tinggi

Dari sisi pendanaan, gambaran kinerjanya belum sepenuhnya merata. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian sudah mencapai kategori **sangat tinggi**, sedangkan Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat serta Program Penyuluhan Pertanian berada pada kategori **tinggi**. Sebaliknya, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian masih tertahan pada kategori **rendah**, sehingga menjadi titik yang perlu dicermati dalam membaca efektivitas pelaksanaan anggaran perangkat daerah ini.

Tabel 6.58 Capaian Indikator Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi Sektor Pertanian (Padi & Palawija)	50.630	35.765	70,64	Sedang
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas Padi	5	4,91	98,20	Sangat Tinggi
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi Sektor Peternakan	3.298	3.304	100,18	Sangat Tinggi
4	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah alat mesin pertanian/peternakan	64	0		
5	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan prasarana pertanian (kegiatan)	35	59	168,57	Sangat Tinggi
6	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya jumlah kelahiran ternak hasil inseminasi buatan (IB)	1.150	601	52,26	Rendah
7	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani	21,47	25,47	118,63	Sangat Tinggi

Hasil yang muncul cenderung campuran. Beberapa indikator menunjukkan performa yang kuat, seperti produktivitas padi, produksi sektor peternakan, pembangunan prasarana pertanian, dan cakupan bina kelompok tani yang berada pada kategori **sangat tinggi**. Di sisi lain, produksi sektor pertanian masih berada pada kategori **sedang**, sedangkan indikator peningkatan jumlah kelahiran ternak hasil inseminasi buatan berada pada kategori **rendah**. Untuk indikator jumlah alat mesin pertanian/peternakan, dokumen sumber hanya menampilkan target dan capaian tanpa persentase, sehingga penyajiannya dipertahankan sebagaimana tercantum dalam berita acara. Secara keseluruhan, perangkat daerah ini sudah menunjukkan hasil yang baik pada beberapa bidang utama, tetapi penguatan pada produksi tanaman pangan dan peningkatan hasil inseminasi buatan masih penting agar capaian pelaksanaan antarprogram menjadi lebih seimbang.

6.2.27 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan memegang peranan penting dalam mendukung kelancaran distribusi barang, stabilisasi harga, perlindungan konsumen, pengembangan ekspor, pertumbuhan industri kecil menengah, serta penguatan tata kelola perizinan dan informasi industri. Karena itu, evaluasi hasil pelaksanaan RKPD pada perangkat daerah ini perlu dibaca dari dua sisi sekaligus, yakni realisasi anggaran dan capaian kinerja program, agar terlihat sejauh mana dukungan pembiayaan benar-benar diikuti oleh hasil pelaksanaan yang terukur.

Tabel 6.59 Capaian Indikator Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Kategori
1	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	71.943.000	71.894.494	99,93	Sangat Tinggi
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	49.517.549.000	42.215.543.298	85,25	Tinggi
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	9.045.629.414	8.999.581.917	99,49	Sangat Tinggi
4	Program Pengembangan Ekspor	354.538.031	354.468.031	99,98	Sangat Tinggi
5	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	468.886.500	468.574.552	99,93	Sangat Tinggi
6	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	2.878.619.126	2.659.840.023	92,40	Sangat Tinggi
7	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	50.000.000	49.973.114	99,95	Sangat Tinggi
8	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional				

Dilihat dari sisi anggaran, kinerja perangkat daerah ini cenderung kuat. Mayoritas program berada pada kategori **sangat tinggi**, terutama pada stabilisasi harga, pengembangan ekspor, standardisasi dan perlindungan konsumen, serta perencanaan dan pembangunan industri. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan masih berada pada kategori **tinggi**, tetapi tetap menunjukkan realisasi yang cukup baik. Adapun Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional pada dokumen sumber tidak menampilkan angka pagu, realisasi, dan persentase, sehingga penyajiannya dipertahankan sebagaimana tercantum dalam berita acara.

Tabel 6.60 Capaian Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
1	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Jumlah Rekomendasi Izin yang Diterbitkan	1	0		

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar	16 Pasar	15 Pasar	93,75	Sangat Tinggi
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah Operasi Pasar	4 Kali	12 Kali	300,00	Sangat Tinggi
4	Program Pengembangan Ekspor	Jumlah Pembinaan terhadap Pelaku Usaha Ekspor (IKM)	6 IKM	1 IKM	16,67	Sangat Rendah
5	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Jumlah Alat UTTP yang Terstandarisasi	400 Alat	435 Alat	108,75	Sangat Tinggi
6	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pertumbuhan Jumlah IKM	1.733 IKM	1.737 IKM	100,23	Sangat Tinggi
7	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pengendalian Izin Usaha Industri				
8	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)				

Dari sisi hasil pelaksanaan, gambaran yang muncul cukup kontras. Beberapa program menunjukkan capaian yang sangat baik, seperti stabilisasi harga, standardisasi alat UTTP, peningkatan jumlah IKM, dan sarana distribusi perdagangan. Sebaliknya, Program Pengembangan Ekspor masih berada pada kategori **sangat rendah**. Pada beberapa program lain, dokumen sumber tidak menampilkan target, capaian, atau persentase secara lengkap, sehingga penyajiannya tetap mengikuti berita acara. Secara umum, Dinas Perindustrian dan Perdagangan memperlihatkan performa yang kuat pada bidang perdagangan dalam negeri dan pengembangan industri, namun masih diperlukan penguatan pada aspek ekspor dan beberapa layanan yang data kinerjanya belum sepenuhnya terukur dalam dokumen evaluasi.

6.2.28 Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah mempunyai posisi yang sangat strategis karena menjadi simpul koordinasi pemerintahan, kesejahteraan rakyat, perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan

jasa, serta layanan penunjang urusan pemerintahan daerah. Oleh sebab itu, evaluasi hasil pelaksanaan RKPD pada perangkat daerah ini penting untuk melihat seberapa efektif dukungan anggaran diterjemahkan menjadi capaian kinerja yang menopang jalannya pemerintahan daerah secara keseluruhan.

Tabel 6.61 Capaian Indikator Keuangan Sekretariat Daerah

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	377.208.094.656,00	356.834.426.474,80	94,60	Sangat Tinggi
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	207.796.917.735,00	200.012.113.899,00	96,25	Sangat Tinggi
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	12.144.200.000,00	10.807.968.256,00	89,00	Tinggi

Dari sisi keuangan, performa Sekretariat Daerah terlihat kuat. Dua program utama, yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, sudah berada pada kategori **sangat tinggi**. Sementara itu, Program Perekonomian dan Pembangunan juga menunjukkan realisasi yang baik dan masuk kategori **tinggi**. Gambaran ini menunjukkan bahwa secara umum dukungan anggaran terhadap fungsi koordinatif Sekretariat Daerah telah berjalan cukup optimal.

Tabel 6.62 Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Sekda Kab. Kutim	75,95%	85,82%	113	Sangat Tinggi
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sekda Kab. Kutim	100%	100%	100	Sangat Tinggi
3	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Angka Harapan Lama Sekolah	12,89 Tahun	13,20 Tahun	102,40	Sangat Tinggi
4	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Predikat Status tinggi	*sedang	*97	Sangat Tinggi
5	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pemuka Agama yang Menerima Insentif	595 Orang	4.183 Orang	703,03	Sangat Tinggi

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
6	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Penyelenggaraan Festival Keagamaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	Sangat Tinggi
7	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase implementasi kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat dan kerjasama	100%	100%	100	Sangat Tinggi
8	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rata-rata Lama Sekolah	9,20 Tahun	9,55 Tahun	103,80	Sangat Tinggi
9	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase implementasi kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam	100%	100%	100	Sangat Tinggi

Jika dilihat dari sisi kinerja, Sekretariat Daerah memperlihatkan capaian yang sangat menonjol. Hampir seluruh indikator berada pada kategori **sangat tinggi**, baik pada aspek layanan penunjang, kesejahteraan rakyat, maupun koordinasi kebijakan perekonomian dan pembangunan. Beberapa indikator bahkan melampaui target secara signifikan, seperti Indeks Kepuasan Masyarakat, angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, serta jumlah pemuka agama penerima insentif. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah berfungsi cukup efektif sebagai perangkat daerah koordinator, meskipun kualitas capaian pada beberapa indikator tetap perlu dijaga agar konsistensinya berlanjut pada periode berikutnya.

6.2.29 Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD memegang fungsi pendukung yang penting dalam memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD berjalan tertib, terkoordinasi, dan didukung oleh layanan administrasi yang memadai. Karena itu, evaluasi hasil pelaksanaan RKPD pada perangkat daerah ini perlu dilihat tidak hanya dari besarnya penyerapan anggaran, tetapi juga dari seberapa jauh dukungan kelembagaan tersebut berhasil diterjemahkan menjadi capaian kinerja yang relevan bagi pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Tabel 6.63 Capaian Indikator Keuangan Sekretariat DPRD

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	127.292.261.116	115.455.040.186	90,70	Sangat Tinggi

2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	25.437.030.700	23.830.482.604	93,68	Sangat Tinggi

Dari sisi keuangan, capaian Sekretariat DPRD tergolong kuat. Kedua program utama berada pada kategori **sangat tinggi**, yang menandakan bahwa dukungan anggaran bagi layanan penunjang pemerintahan maupun fasilitasi tugas dan fungsi DPRD telah terealisasi dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kapasitas pembiayaan perangkat daerah ini cukup mendukung pelaksanaan peran kelembagaannya.

Tabel 6.64 Capaian Indikator Kinerja Sekretariat DPRD

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Sekretariat DPRD	99,4%	100%	100	Sangat Tinggi
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Tersusunnya dan Terintegrasinya Program Pembentukan Perda, Daftar Fungsi Pengawasan, Agenda dan Masalah, serta Rencana 5 Tahunan RPJMD maupun dokumen perencanaan RKPD	Ada	Ada	89,37	Tinggi

Sekretariat DPRD menunjukkan performa yang cukup positif dalam memfasilitasi peran dan fungsi legislatif sepanjang tahun 2025. Layanan administrasi perkantoran dan laporan keuangan telah mencapai kategori **sangat tinggi**, sedangkan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD berada pada kategori **tinggi**. Dengan demikian, perangkat daerah ini telah menunjukkan kontribusi yang cukup kuat dalam menopang fungsi kelembagaan DPRD, baik melalui dukungan administratif maupun fasilitasi agenda kerja yang lebih substantif. Ke depan, kualitas dukungan tersebut tetap perlu dijaga agar pelaksanaan fungsi DPRD dapat berlangsung semakin efektif dan konsisten.

6.2.30 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai posisi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berperan sebagai simpul utama dalam penyusunan, pengendalian, evaluasi, serta sinkronisasi perencanaan pembangunan. Capaian Bappeda menjadi salah satu penanda penting kualitas tata kelola pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tabel 6.65 Capaian Indikator Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	24.143.884.212	20.642.494.123	85,31	Tinggi

2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	5.554.299.470	5.080.757.573	91,49	Sangat Tinggi
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.023.624.250	3.940.829.384	78,45	Tinggi

Dari sisi keuangan, kinerja Bappeda secara umum tergolong baik. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah telah mencapai kategori sangat tinggi, sedangkan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah berada pada kategori tinggi. Pola ini menunjukkan bahwa dukungan anggaran terhadap fungsi utama perencanaan daerah telah terealisasi dengan cukup baik, walaupun efektivitas pelaksanaan pada program koordinasi dan sinkronisasi masih dapat terus diperkuat.

Tabel 6.66 Capaian Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100%	100%	100	Sangat Tinggi
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	100%	98,64%	98,64	Sangat Tinggi
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD, RKPD ke dalam Renstra dan Renja OPD	100%	100%	100	Sangat Tinggi

Dilihat dari sisi hasil, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memperlihatkan performa yang sangat kuat. Seluruh indikator berada pada kategori sangat tinggi, baik pada aspek layanan administrasi, konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD, maupun sinkronisasi antara RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja perangkat daerah. Secara umum, capaian ini menunjukkan bahwa fungsi koordinasi dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah telah berjalan dengan baik. Dengan demikian, Bappeda berhasil menjaga peran sentralnya dalam memastikan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah, meskipun kualitas dukungan anggaran pada beberapa program tetap perlu dijaga agar hasil perencanaan yang telah baik dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

6.2.31 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai peran sentral dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah. Karena itu, evaluasi terhadap perangkat daerah ini terutama penting untuk melihat bagaimana dukungan anggaran diikuti oleh capaian yang berkaitan langsung dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset pemerintah daerah. Dengan karakter tugas yang sangat administratif-strategis, capaian BPKAD menjadi salah satu penopang utama bagi kualitas tata kelola pemerintahan daerah secara keseluruhan.

Tabel 6.67 Capaian Indikator Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Kategori

1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.339.644.395.983	1.087.827.764.642	81,20	Tinggi
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	25.140.725.887	21.913.764.096	87,16	Tinggi

Dari sisi keuangan, kedua program utama BPKAD sama-sama berada pada kategori **tinggi**. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran pada fungsi pengelolaan keuangan maupun pengelolaan barang milik daerah telah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat ruang untuk mendorong realisasi yang lebih optimal, terutama pada program dengan pagu sangat besar seperti pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 6.68 Capaian Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)			Kategori
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		Opini BPK terhadap LHP	WTP	*WTP	100		Sangat Tinggi
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		Opini BPK terhadap LHP	WTP	*WTP	100		Sangat Tinggi

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menunjukkan performa yang sangat signifikan dalam penatausahaan keuangan dan aset daerah sepanjang tahun 2025. Kedua program mencapai target **WTP** dengan persentase capaian **100 persen**, sehingga berada pada kategori **sangat tinggi**. Dengan demikian, BPKAD memperlihatkan performa yang kuat pada indikator utama yang menjadi tolok ukur akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah. Secara umum, perangkat daerah ini telah memberikan dukungan yang penting bagi kualitas tata kelola pemerintahan daerah, terutama dalam menjaga standar akuntabilitas laporan keuangan dan administrasi aset.

6.2.32 Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah berperan dalam mendukung pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan keuangan daerah, serta pengelolaan barang milik daerah. Karena fungsi tersebut berkaitan langsung dengan kapasitas fiskal pemerintah daerah, maka evaluasi pelaksanaan RKPD pada perangkat daerah ini menjadi penting untuk melihat seberapa baik dukungan anggaran dan capaian kinerja program mampu memperkuat tata kelola penerimaan daerah.

Tabel 6.69 Capaian Indikator Keuangan Badan Pendapatan Daerah

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)		Kategori
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		55.663.193.640	44.873.509.250	80,61	Tinggi
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		16.044.480.000	13.166.166.898	82,07	Tinggi

Dari sisi serapan anggaran, Badan Pendapatan Daerah menunjukkan kinerja yang cukup baik. Kedua program utama berada pada kategori **tinggi**, baik pada pengelolaan pendapatan daerah maupun pengelolaan keuangan daerah. Pola ini memperlihatkan bahwa dukungan pembiayaan untuk fungsi-fungsi

inti pengelolaan fiskal daerah telah berjalan relatif stabil, meskipun masih tersedia ruang untuk peningkatan realisasi agar lebih optimal.

Tabel 6.70 Capaian Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pajak Daerah	100%	68,79%	68,79	Sedang
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pendapatan yang dipungut dari total Perangkat Penghasil (TOT)	12,56%	6,84%	54,46	Rendah

Kalau dilihat dari sisi hasil, capaian Badan Pendapatan Daerah belum sekuat realisasi anggarannya. Indikator pada Program Pengelolaan Pendapatan Daerah berada pada kategori **sedang**, sementara indikator pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah masih berada pada kategori **rendah**. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program sudah berjalan, tetapi hasil yang dicapai belum sepenuhnya sebanding dengan target yang ditetapkan. Secara umum, perangkat daerah ini tetap berperan penting dalam menopang kapasitas fiskal daerah, namun penguatan pada efektivitas pemungutan dan optimalisasi pendapatan masih perlu menjadi perhatian agar kinerja fiskal daerah dapat meningkat lebih baik pada periode berikutnya.

6.2.33 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki posisi penting dalam menjaga kualitas manajemen aparatur, distribusi ASN, serta pengembangan kapasitas pegawai pemerintah daerah. Oleh sebab itu, evaluasi pada perangkat daerah ini tidak hanya memperlihatkan serapan anggaran, tetapi juga menunjukkan sejauh mana program kepegawaian dan pengembangan SDM benar-benar berkontribusi terhadap penguatan birokrasi daerah.

Tabel 6.71 Capaian Indikator Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)		Kategori
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		28.443.686.216	25.057.578.379	88	Tinggi
2	Kepegawaian Daerah		8.441.058.635	7.805.987.116	92	Sangat Tinggi
3	Pengembangan Sumber Daya Manusia		2.643.888.000	2.575.512.983	97	Sangat Tinggi

Dilihat dari sisi anggaran, kinerja perangkat daerah ini tergolong baik. Program Kepegawaian Daerah dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia berada pada kategori **sangat tinggi**, sedangkan

program penunjang berada pada kategori **tinggi**. Pola tersebut memperlihatkan bahwa dukungan pembiayaan untuk fungsi kepegawaian dan peningkatan kapasitas aparatur telah berjalan cukup kuat.

Tabel 6.72 Capaian Indikator Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)			Kategori
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan		100%	100%	100%	Sangat Tinggi	
2	Kepegawaian Daerah	Distribusi ASN		2500 SK	5527 SK	221%	Sangat Tinggi	
3	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rata-rata pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan		260 hari	250 hari	96,15%	Sangat Tinggi	
4	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		50%	46%	92%	Sangat Tinggi	

Dari sisi hasil, capaian BKPSDM menunjukkan performa yang kuat. Seluruh indikator berada pada kategori **sangat tinggi**, baik pada layanan administrasi, distribusi ASN, maupun pengembangan kompetensi pegawai. Bahkan, indikator distribusi ASN melampaui target yang ditetapkan. Secara keseluruhan, perangkat daerah ini memperlihatkan hasil yang baik dalam mendukung tata kelola aparatur dan pengembangan kapasitas SDM, sehingga menjadi salah satu penopang penting bagi kualitas birokrasi daerah.

6.2.34 Badan Riset dan Inovasi Daerah

Badan Riset dan Inovasi Daerah memiliki peran penting dalam memperkuat basis pengetahuan bagi perumusan kebijakan daerah. Karena itu, evaluasi terhadap perangkat daerah ini tidak semata-mata menilai serapan anggaran, tetapi juga melihat sejauh mana fungsi penelitian dan pengembangan benar-benar berjalan sebagai penopang kualitas perencanaan dan rekomendasi kebijakan pemerintah daerah. Data berikut merujuk pada Berita Acara Rekonsiliasi Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2025 pada dokumen Badan Riset dan Inovasi Daerah.

Tabel 6.73 Capaian Indikator Keuangan Badan Riset dan Inovasi Daerah

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.672.062.599	9.957.591.952	85,31	Tinggi
2	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.597.410.000	3.426.112.942	95,24	Sangat Tinggi

Dari sisi anggaran, capaian Badan Riset dan Inovasi Daerah tergolong baik. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah sudah berada pada kategori **sangat tinggi**, sedangkan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berada pada kategori **tinggi**. Ini menunjukkan bahwa dukungan

pembiayaan untuk fungsi kelitbangan daerah telah berjalan cukup kuat, terutama pada program inti yang langsung berkaitan dengan penyediaan bahan rekomendasi kebijakan.

Tabel 6.74 Capaian Indikator Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	90,00%	100,00%	111	Sangat Tinggi
2	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	80,00%	13,05%	16	Sangat Rendah

Jika dilihat dari sisi hasil, gambaran kinerjanya cukup kontras. Program penunjang menunjukkan capaian **sangat tinggi**, sehingga fungsi administrasi dan layanan internal dapat dinilai berjalan baik. Namun, pada program inti penelitian dan pengembangan, persentase implementasi rencana kelitbangan masih berada pada kategori **sangat rendah**. Dengan demikian, Badan Riset dan Inovasi Daerah telah mampu menjaga dukungan administratif secara baik, tetapi efektivitas pelaksanaan agenda kelitbangan substantif masih perlu diperkuat agar kontribusinya terhadap proses perumusan kebijakan daerah menjadi lebih nyata dan optimal.

6.2.35 Inspektorat

Inspektorat menempati posisi yang khas dalam struktur perangkat daerah karena fungsi utamanya bukan menghasilkan layanan publik langsung, melainkan menjaga mutu tata kelola, kepatuhan, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Oleh sebab itu, pembacaan terhadap capaian perangkat daerah ini perlu lebih menekankan pada efektivitas fungsi pengawasan, pendampingan, dan layanan administrasi internal yang menopang pengendalian kinerja pemerintah daerah.

Tabel 6.75 Capaian Indikator Keuangan Inspektorat

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Kategori
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	22.841.637.530	7.729.050.469	33,84	Sangat Rendah
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	8.251.691.131	3.890.997.436	47,15	Sangat Rendah
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.830.882.047	33.887.651.270	79,12	Tinggi

Dari sisi keuangan, profil capaian Inspektorat terlihat cukup timpang antarprogram. Program penunjang masih berada pada kategori **tinggi**, tetapi dua program inti, yakni penyelenggaraan pengawasan serta perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi, masih berada pada kategori **sangat rendah**. Pola ini menunjukkan bahwa dukungan anggaran untuk fungsi utama pengawasan belum terserap secara optimal sebagaimana yang diharapkan.

Tabel 6.76 Capaian Indikator Kinerja Inspektorat

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindaklanjuti Temuan BPK	95%	86,76%	91,33	Sangat Tinggi
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Cakupan Pengaduan OPD dan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	1,14%	0,8%	70,18	Sedang
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Inspektorat	100%	99,52%	99,52	Sangat Tinggi

Menariknya, capaian kinerja Inspektorat tidak sepenuhnya mengikuti pola realisasi keuangannya. Pada program pengawasan, persentase tindak lanjut temuan BPK tetap berada pada kategori **sangat tinggi**, dan layanan penunjang administrasi juga menunjukkan capaian **sangat tinggi**. Sementara itu, cakupan pengaduan OPD dan masyarakat yang ditindaklanjuti masih berada pada kategori **sedang**. Dengan demikian, Inspektorat tetap menunjukkan hasil yang cukup kuat pada fungsi pengawasan dan dukungan administratif, meskipun efektivitas penyerapan anggaran pada program-program inti masih perlu diperbaiki agar capaian kinerja dapat ditopang oleh pelaksanaan anggaran yang lebih optimal.

6.2.36 Kantor Camat Sangatta Selatan

Kantor Camat Sangatta Selatan memiliki fungsi penting dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban, serta pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan berjalan secara efektif di tingkat kewilayahan. Karena itu, evaluasi terhadap perangkat kecamatan ini perlu dilihat sebagai cerminan kinerja pelayanan pemerintahan terdekat dengan masyarakat. Data pada bagian ini disusun berdasarkan dokumen LKPJ Tahun 2025 yang memuat capaian kinerja dan realisasi pendanaan Kecamatan Sangatta Selatan.

Tabel 6.77 Capaian Indikator Keuangan Kantor Camat Sangatta Selatan

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Kategori

1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.718.610.001	11.335.863.142	82,63	Tinggi
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	217.595.000	169.320.000	77,81	Tinggi
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	450.830.000	293.048.000	65,00	Sedang
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	82.829.370	52.565.000	63,46	Rendah
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	130.490.000	77.934.000	59,72	Rendah
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	138.490.000	99.154.000	71,60	Sedang

Dari sisi keuangan, capaian Kecamatan Sangatta Selatan menunjukkan pola yang cukup beragam. Program penunjang dan penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik berada pada kategori **tinggi**, sementara program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa berada pada kategori **sedang**. Adapun program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan urusan pemerintahan umum masih berada pada kategori **rendah**. Secara keseluruhan, hal ini menunjukkan bahwa serapan anggaran kecamatan sudah berjalan, tetapi belum merata pada seluruh program.

Tabel 6.78 Capaian Indikator Kinerja Kantor Camat Sangatta Selatan

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100%	100%	100	Sangat Tinggi
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	25 pelayanan	25 pelayanan	100	Sangat Tinggi
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	100%	100%	100	Sangat Tinggi
4	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran PERDA/PERKADA	0 pelanggaran	0 pelanggaran	100	Sangat Tinggi
5	Program Penyelenggaraan Urusan	Jumlah Pembinaan Wawasan	3 laporan	3 laporan	100	Sangat Tinggi

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
	Pemerintahan Umum	Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitas Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	100%	100%	100	Sangat Tinggi

Berbeda dengan sisi keuangannya, capaian kinerja Kecamatan Sangatta Selatan justru terlihat sangat stabil. Seluruh indikator program mencapai **100 persen** dan berada pada kategori **sangat tinggi**. Ini menunjukkan bahwa fungsi pelayanan administrasi, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban, pemerintahan umum, serta pembinaan pemerintahan desa dapat dijalankan sesuai target yang ditetapkan. Dengan demikian, Kecamatan Sangatta Selatan memperlihatkan kinerja keluaran yang baik, meskipun efektivitas realisasi anggaran pada beberapa program masih perlu ditingkatkan agar dukungan pendanaan dan hasil pelaksanaan menjadi lebih seimbang.

6.2.37 Kantor Camat Sangatta Utara

Kantor Camat Sangatta Utara memegang peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, terutama pada layanan administrasi, koordinasi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta pembinaan pemerintahan desa. Karena itu, evaluasi terhadap perangkat kecamatan ini penting untuk melihat keseimbangan antara dukungan pendanaan dan hasil pelaksanaan program di tingkat kewilayahan. Data pada bagian ini disusun berdasarkan dokumen LKPJ Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025.

Tabel 6.79 Capaian Indikator Keuangan Kantor Camat Sangatta Utara

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.347.712.541	10.222.753.397	80,98	Tinggi
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	47.571.675	47.485.500	99,82	Sangat Tinggi
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	18.513.348.290	15.296.924.481	89,96	Tinggi
4	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	111.374.518	111.303.350	99,94	Sangat Tinggi
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	55.534.000	55.099.550	99,22	Sangat Tinggi

6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.841.000	10.836.000	99,95	Sangat Tinggi

Dilihat dari sisi anggaran, Kecamatan Sangatta Utara memperlihatkan kinerja yang cukup solid. Empat program sudah berada pada kategori **sangat tinggi**, yaitu pelayanan publik, koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Dua program lainnya, yakni program penunjang dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, berada pada kategori **tinggi**. Pola ini menunjukkan bahwa realisasi pendanaan di kecamatan ini pada umumnya berjalan baik dan relatif merata.

Tabel 6.80 Capaian Indikator Kinerja Kantor Camat Sangatta Utara

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	95%	100%	100	Sangat Tinggi
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	60 pelayanan	32 pelayanan	53	Rendah
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	90%	100%	100	Sangat Tinggi
4	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran PERDA/PERKADA	0 pelanggaran	0 pelanggaran	100	Sangat Tinggi
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	8 kegiatan	5 kegiatan	63	Rendah
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	95%	100%	100	Sangat Tinggi

Berbeda dengan sisi keuangannya yang relatif kuat, capaian kinerja Kecamatan Sangatta Utara menunjukkan hasil yang lebih bervariasi. Empat indikator berada pada kategori **sangat tinggi**, khususnya pada layanan administrasi, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta

pembinaan pemerintahan desa. Namun demikian, indikator jumlah penyelenggaraan pelayanan publik dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional masih berada pada kategori **rendah**. Secara keseluruhan, Kecamatan Sangatta Utara telah menunjukkan hasil yang baik pada sebagian besar fungsi pemerintahan kewilayahan, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan umum agar capaian antarprogram menjadi lebih seimbang.

6.2.38 Kantor Camat Bengalon

Kantor Camat Bengalon mempunyai posisi penting dalam menjaga keterhubungan antara pemerintah kabupaten dengan desa-desa di wilayah kecamatan, terutama dalam urusan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban, serta pembinaan pemerintahan desa. Karena itu, evaluasi pada perangkat kecamatan ini perlu dibaca sebagai gambaran kapasitas kewilayahan dalam menerjemahkan program pemerintahan ke dalam layanan yang dekat dengan masyarakat. Data pada bagian ini disusun berdasarkan LKPJ Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025.

Tabel 6.81 Capaian Indikator Keuangan Kantor Camat Bengalon

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.279.833.733	8.747.896.785	85,10	Tinggi
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100.000.000	96.772.580	96,77	Sangat Tinggi
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	470.000.000	408.964.600	87,01	Tinggi
4	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	70.000.000	54.388.600	77,70	Tinggi
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	180.000.000	177.142.600	98,41	Sangat Tinggi
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	140.000.000	137.615.800	98,30	Sangat Tinggi

Dari sisi pendanaan, Kecamatan Bengalon menunjukkan pola yang cukup sehat. Tiga program telah mencapai kategori **sangat tinggi**, yaitu pelayanan publik, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Tiga program lainnya berada pada kategori **tinggi**. Ini memberi gambaran bahwa realisasi anggaran pada kecamatan ini berjalan relatif baik dan cukup merata antarprogram.

Tabel 6.82 Capaian Indikator Kinerja Kantor Camat Bengalon

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
1	Program Penunjang Urusan	Cakupan Pelayanan Administrasi	100%	90%	90,00	Tinggi

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perkantoran dan Laporan Keuangan				
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	24 layanan	23 layanan	96,00	Sangat Tinggi
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	100%	87%	87,00	Tinggi
4	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran PERDA/PERKADA	0 pelanggaran	0 pelanggaran	100,00	Sangat Tinggi
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	9 kegiatan	8 kegiatan	89,00	Tinggi
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	100%	100%	100,00	Sangat Tinggi

Kalau dilihat dari hasil kinerjanya, Kecamatan Bengalon memperlihatkan capaian yang cukup baik dengan komposisi yang lebih beragam. Tiga indikator berada pada kategori **sangat tinggi**, terutama pada pelayanan publik, ketenteraman dan ketertiban umum, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Tiga indikator lainnya berada pada kategori **tinggi**, yaitu layanan administrasi perkantoran, peran serta masyarakat dalam pembangunan, dan pembinaan wawasan kebangsaan. Secara keseluruhan, kecamatan ini menunjukkan kapasitas pelaksanaan yang cukup stabil, dengan ruang perbaikan terutama pada penguatan layanan administrasi dan pemberdayaan masyarakat agar capaian kinerja antarprogram bisa lebih seimbang.

6.2.39 Kantor Camat Kaliorang

Kantor Camat Kaliorang menjalankan fungsi penting dalam memastikan urusan pemerintahan di tingkat wilayah berjalan secara tertib, terkoordinasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Karena itu, evaluasi terhadap kecamatan ini perlu dibaca sebagai ukuran kemampuan perangkat kewilayahan dalam menjaga keseimbangan antara dukungan anggaran dan hasil pelaksanaan program, baik pada aspek pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, maupun pembinaan pemerintahan desa. Data pada bagian ini bersumber dari LKPJ Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025.

Tabel 6.83 Capaian Indikator Keuangan Kantor Camat Kaliorang

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)		Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.308.802.218	5.516.665.728	87,44		Tinggi
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	80.115.000	77.059.000	96,19		Sangat Tinggi
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	215.188.000	164.251.000	76,33		Tinggi
4	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	88.000.000	83.049.000	94,37		Sangat Tinggi
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	299.767.892	285.383.000	95,20		Sangat Tinggi
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	88.948.000	76.845.000	86,39		Tinggi

Dari sisi keuangan, Kecamatan Kaliorang memperlihatkan kinerja yang cukup solid. Tiga program telah mencapai kategori **sangat tinggi**, yaitu penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum, serta penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Tiga program lainnya berada pada kategori **tinggi**. Secara umum, pola ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran di kecamatan ini berjalan cukup baik dan relatif terkendali antarprogram.

Tabel 6.84 Capaian Indikator Kinerja Kantor Camat Kaliorang

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Kecamatan Kaliorang	95%	75%	78,90	Tinggi
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kecamatan Kaliorang	22	22	100,00	Sangat Tinggi
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	92%	92%	100,00	Sangat Tinggi
4	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran PERDA/PERKADA Kecamatan Kaliorang	0%	0%	100,00	Sangat Tinggi
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kecamatan Kaliorang	7	7	100,00	Sangat Tinggi

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitas, Pembinaan, Pengawasan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Kaliorang	92%	90%	97,80	Sangat Tinggi

Kalau dilihat dari capaian kinerjanya, Kecamatan Kaliorang menunjukkan hasil yang cukup kuat. Lima indikator berada pada kategori **sangat tinggi**, terutama pada pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, pemerintahan umum, serta pembinaan pemerintahan desa. Satu indikator, yaitu layanan administrasi perkantoran dan laporan keuangan, berada pada kategori **tinggi**. Dengan demikian, kinerja Kecamatan Kaliorang dapat dinilai cukup baik karena sebagian besar target program tercapai, meskipun kualitas layanan penunjang administrasi masih dapat diperkuat agar hasil antarfungsi menjadi lebih seimbang.

6.2.40 Kantor Camat Muara Wahau

Kantor Camat Muara Wahau memegang peran penting dalam menjaga kesinambungan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan, terutama pada aspek layanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, ketenteraman dan ketertiban umum, serta pembinaan pemerintahan desa. Karena itu, evaluasi terhadap perangkat kecamatan ini perlu dibaca sebagai potret kapasitas wilayah dalam menerjemahkan program pemerintahan ke dalam hasil kerja yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. Data pada bagian ini bersumber dari LKPJ Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025.

Tabel 6.85 Capaian Indikator Keuangan Kantor Camat Muara Wahau

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.466.894.768	9.257.540.390	88,45	Tinggi
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	28.997.850	27.370.000	94,93	Sangat Tinggi
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	297.212.000	213.854.637	71,95	Sedang
4	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	43.882.030	20.345.000	46,36	Sangat Rendah
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	315.085.320	256.932.760	81,54	Tinggi
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	63.538.000	42.000.000	66,10	Sedang

Dari sisi keuangan, Kecamatan Muara Wahau memperlihatkan pola yang tidak sepenuhnya merata. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sudah berada pada kategori **sangat tinggi**, sedangkan program penunjang dan urusan pemerintahan umum berada pada kategori **tinggi**. Di sisi lain, program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa masih berada pada kategori **sedang**, sementara program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum masih berada pada kategori **sangat rendah**. Secara umum, realisasi pendanaan kecamatan ini sudah berjalan, tetapi kekuatannya belum sama pada seluruh program.

Tabel 6.86 Capaian Indikator Kinerja Kantor Camat Muara Wahau

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	95%	85%	88,47	Tinggi
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	21 pelayanan	19 pelayanan	90,48	Tinggi
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	90%	81%	90,00	Tinggi
4	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran PERDA/PERKADA	0 pelanggaran	0 pelanggaran	100,00	Sangat Tinggi
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	5 kegiatan	4 kegiatan	80,00	Tinggi
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan fasilitasi Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	90%	87%	96,67	Sangat Tinggi

Jika dilihat dari sisi hasil, kinerja Kecamatan Muara Wahau tampak lebih stabil dibanding realisasi keuangannya. Empat indikator berada pada kategori **tinggi**, yaitu layanan administrasi, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Sementara itu, indikator ketenteraman dan ketertiban umum serta pembinaan pemerintahan desa telah mencapai kategori **sangat tinggi**. Dengan demikian, kecamatan ini tetap menunjukkan kemampuan pelaksanaan yang cukup baik, meskipun efektivitas serapan anggaran pada beberapa program masih perlu diperkuat agar dukungan pendanaan dan capaian kinerja dapat bergerak lebih seimbang.

6.2.41 Kantor Camat Muara Wahau

Kantor Camat Muara Wahau memegang peran penting dalam menjaga kesinambungan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan, terutama pada aspek layanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, ketenteraman dan ketertiban umum, serta pembinaan pemerintahan desa. Karena itu, evaluasi terhadap perangkat kecamatan ini perlu dibaca sebagai potret kapasitas wilayah dalam

menerjemahkan program pemerintahan ke dalam hasil kerja yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. Data pada bagian ini bersumber dari LKPJ Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025.

Tabel 6.87 Capaian Indikator Keuangan Kantor Camat Muara Wahau

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.466.894.768	9.257.540.390	88,45	Tinggi
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	28.997.850	27.370.000	94,93	Sangat Tinggi
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	297.212.000	213.854.637	71,95	Sedang
4	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	43.882.030	20.345.000	46,36	Sangat Rendah
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	315.085.320	256.932.760	81,54	Tinggi
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	63.538.000	42.000.000	66,10	Sedang

Dari sisi keuangan, Kecamatan Muara Wahau memperlihatkan pola yang tidak sepenuhnya merata. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sudah berada pada kategori **sangat tinggi**, sedangkan program penunjang dan urusan pemerintahan umum berada pada kategori **tinggi**. Di sisi lain, program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa masih berada pada kategori **sedang**, sementara program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum masih berada pada kategori **sangat rendah**. Secara umum, realisasi pendanaan kecamatan ini sudah berjalan, tetapi kekuatannya belum sama pada seluruh program.

Tabel 6.88 Capaian Indikator Kinerja Kantor Camat Muara Wahau

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	95%	85%	88,47	Tinggi
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	21 pelayanan	19 pelayanan	90,48	Tinggi
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	90%	81%	90,00	Tinggi

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
4	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran PERDA/PERKADA	0 pelanggaran	0 pelanggaran	100,00	Sangat Tinggi
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	5 kegiatan	4 kegiatan	80,00	Tinggi
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan fasilitasi Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	90%	87%	96,67	Sangat Tinggi

Jika dilihat dari sisi hasil, kinerja Kecamatan Muara Wahau tampak lebih stabil dibanding realisasi keuangannya. Empat indikator berada pada kategori **tinggi**, yaitu layanan administrasi, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Sementara itu, indikator ketenteraman dan ketertiban umum serta pembinaan pemerintahan desa telah mencapai kategori **sangat tinggi**. Dengan demikian, kecamatan ini tetap menunjukkan kemampuan pelaksanaan yang cukup baik, meskipun efektivitas serapan anggaran pada beberapa program masih perlu diperkuat agar dukungan pendanaan dan capaian kinerja dapat bergerak lebih seimbang.

6.2.42 Kantor Camat Kombeng

Kantor Camat Kombeng memiliki fungsi strategis dalam menjaga agar pelayanan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan desa, serta ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan dapat berjalan secara terarah. Data pada bagian ini disusun berdasarkan dokumen LKPJ Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025.

Tabel 6.89 Capaian Indikator Keuangan Kantor Camat Kombeng

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)		Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		8.332.316.237	7.239.092.385	86,90	Tinggi
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		203.350.000	125.312.600	61,60	Rendah
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		276.021.700	215.269.200	78,00	Tinggi
4	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum		194.500.000	38.450.000	19,80	Sangat Rendah
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		514.000.000	342.314.220	66,60	Sedang

6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	300.000.000	123.970.000	41,30	Sangat Rendah

Dari sisi keuangan, Kecamatan Kombeng menunjukkan capaian yang cukup beragam. Program penunjang dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan masih berada pada kategori **tinggi**, sedangkan program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum berada pada kategori **sedang**. Di sisi lain, realisasi pada program pelayanan publik, koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa masih relatif rendah, bahkan dua di antaranya berada pada kategori **sangat rendah**. Ini memperlihatkan bahwa kekuatan serapan anggaran di kecamatan ini belum tersebar merata pada seluruh fungsi program.

Tabel 6.90 Capaian Indikator Kinerja Kantor Camat Kombeng

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	95%	100%	100	Sangat Tinggi
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	18 pelayanan	14 pelayanan	77,80	Tinggi
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	95%	92%	96,80	Sangat Tinggi
4	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran PERDA/PERKADA Kecamatan	0 pelanggaran	0 pelanggaran	100	Sangat Tinggi
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	7 kegiatan	7 kegiatan	100	Sangat Tinggi
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Pembinaan, Pengawasan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	93%	100%	107,50	Sangat Tinggi

Menariknya, meskipun realisasi keuangan beberapa program masih belum kuat, capaian kinerja Kecamatan Kombeng justru relatif baik. Lima indikator sudah berada pada kategori **sangat tinggi**, terutama

pada layanan administrasi, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, pemerintahan umum, serta pembinaan pemerintahan desa. Hanya indikator penyelenggaraan pelayanan publik yang masih berada pada kategori **tinggi**. Dengan demikian, Kecamatan Kombeng tetap menunjukkan hasil pelaksanaan yang cukup baik dari sisi keluaran program, meskipun efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran pada beberapa program masih perlu diperkuat agar hubungan antara pendanaan dan capaian kinerja menjadi lebih seimbang.

6.2.43 Kantor Camat Muara Ancalong

Kantor Camat Muara Ancalong memegang peran yang penting dalam memastikan pelayanan pemerintahan di tingkat wilayah tetap berjalan tertib, terkoordinasi, dan dekat dengan masyarakat.

Tabel 6.91 Capaian Indikator Keuangan Kantor Camat Muara Ancalong

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.941.141.571	8.462.376.607	85,12	Tinggi
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	49.323.900	34.682.500	70,32	Sedang
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	330.260.349	305.561.790	92,52	Sangat Tinggi
4	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	27.305.000	27.175.000	99,52	Sangat Tinggi
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	191.919.420	184.633.010	96,20	Sangat Tinggi
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100.621.240	100.577.740	99,96	Sangat Tinggi

Dari sisi pendanaan, Kecamatan Muara Ancalong menunjukkan performa yang relatif kuat. Empat program telah berada pada kategori **sangat tinggi**, yaitu pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Program penunjang masih berada pada kategori **tinggi**, sedangkan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berada pada kategori **sedang**. Secara umum, pelaksanaan anggaran di kecamatan ini tergolong baik dan cukup stabil antarprogram.

Tabel 6.92 Capaian Indikator Kinerja Kantor Camat Muara Ancalong

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100%	85%	85,00	Tinggi
2	Program Penyelenggaraan	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	19 Pelayanan	19 Pelayanan	100,00	Sangat Tinggi

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
	Pemerintahan dan Pelayanan Publik					
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	100%	95%	95,00	Sangat Tinggi
4	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada	0	0	100,00	Sangat Tinggi
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	9 Kegiatan	7 Kegiatan	77,78	Tinggi
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	100%	95%	95,00	Sangat Tinggi

Kecamatan Muara Ancalong menunjukkan progres pelaksanaan program dan pelayanan publik yang cukup positif sepanjang tahun 2025. Empat indikator telah mencapai kategori **sangat tinggi**, terutama pada pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta pembinaan pemerintahan desa. Dua indikator lainnya, yaitu layanan administrasi perkantoran dan pembinaan wawasan kebangsaan, berada pada kategori **tinggi**. Dengan demikian, Kecamatan Muara Ancalong menunjukkan kapasitas pelaksanaan yang relatif kuat, dengan ruang perbaikan terutama pada penguatan layanan penunjang dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum agar capaian antarprogram semakin seimbang.

6.2.44 Kantor Camat Batu Ampar

Kantor Camat Batu Ampar mempunyai peran penting dalam memastikan layanan pemerintahan di tingkat kecamatan berjalan tertib, efektif, dan menjangkau masyarakat secara langsung. Karena itu, evaluasi terhadap kecamatan ini perlu dibaca sebagai cerminan kemampuan perangkat kewilayahan dalam mengelola dukungan anggaran sekaligus menghasilkan capaian program yang nyata pada aspek pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman, serta pembinaan pemerintahan desa. Data pada bagian ini bersumber dari LKPJ Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025.

Tabel 6.93 Capaian Indikator Keuangan Kantor Camat Batu Ampar

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.424.984.340	5.447.932.215	84,79	Tinggi

2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	72.350.000	66.520.000	91,94	Sangat Tinggi
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	371.111.213	355.330.000	95,75	Sangat Tinggi
4	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	65.896.200	61.200.000	92,87	Sangat Tinggi
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	157.403.200	151.740.000	96,40	Sangat Tinggi
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	127.957.700	123.490.000	96,51	Sangat Tinggi

Dari sisi pendanaan, Kecamatan Batu Ampar menunjukkan capaian yang cukup kuat. Lima program sudah berada pada kategori **sangat tinggi**, sedangkan program penunjang masih berada pada kategori **tinggi**. Dengan komposisi seperti ini, pelaksanaan anggaran di kecamatan tersebut dapat dinilai relatif baik dan cukup stabil pada hampir seluruh fungsi utamanya.

Tabel 6.94 Capaian Indikator Kinerja Kantor Camat Batu Ampar

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100%	84%	84,00	Tinggi
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Pemberian Layanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	24%	22%	91,60	Sangat Tinggi
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	95%	95%	100,00	Sangat Tinggi
4	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran PERDA/PERKADA	0 pelanggaran	0 pelanggaran	100,00	Sangat Tinggi
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	9 kegiatan	6 kegiatan	66,60	Sedang
6	Program Pembinaan dan Pengawasan	Cakupan Fasilitasi Pembinaan, Pengawasan	95%	96%	100,00	Sangat Tinggi

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
	Pemerintahan Desa	Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan				

Dari sisi hasil, Kecamatan Batu Ampar memperlihatkan kinerja yang umumnya baik. Empat indikator berada pada kategori **sangat tinggi**, yaitu pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta pembinaan pemerintahan desa. Indikator layanan administrasi perkantoran berada pada kategori **tinggi**, sedangkan indikator penyelenggaraan urusan pemerintahan umum masih berada pada kategori **sedang**. Secara keseluruhan, kecamatan ini telah menunjukkan kemampuan pelaksanaan yang cukup baik, meskipun penguatan pada layanan penunjang administrasi dan pembinaan wawasan kebangsaan masih diperlukan agar capaian antarfungsi menjadi lebih seimbang.

6.2.45 Kantor Camat Telen

Kantor Camat Telen memegang fungsi penting dalam menjaga agar pelayanan pemerintahan di tingkat kecamatan tetap berjalan efektif, terutama pada aspek pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta pembinaan pemerintahan desa. Karena itu, evaluasi terhadap kecamatan ini perlu dibaca sebagai gambaran kemampuan perangkat kewilayahan dalam mengelola dukungan anggaran sekaligus menghasilkan capaian program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Data pada bagian ini disusun berdasarkan LKPJ Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025.

Tabel 6.95 Capaian Indikator Keuangan Kantor Camat Telen

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)		Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		7.452.339.405	5.532.849.430	74,24	Sedang
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		58.337.800	25.392.400	43,53	Sangat Rendah
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		336.684.000	112.777.200	33,50	Sangat Rendah
4	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum		138.103.000	18.080.000	13,09	Sangat Rendah
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		185.976.700	48.793.919	26,24	Sangat Rendah
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		80.746.000	29.610.000	36,67	Sangat Rendah

Dari sisi pendanaan, Kecamatan Telen menunjukkan capaian yang relatif lemah. Program penunjang masih berada pada kategori **sedang**, tetapi lima program lainnya berada pada kategori **sangat rendah**. Komposisi ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada kecamatan ini belum berjalan optimal, terutama pada program-program yang langsung terkait dengan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan pemerintahan desa.

Tabel 6.96 Capaian Indikator Kinerja Kantor Camat Telen

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100%	97%	97,00	Sangat Tinggi
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	24 kegiatan	24 kegiatan	100,00	Sangat Tinggi
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	95%	95%	95,00	Sangat Tinggi
4	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran PERDA/PERKADA	0 pelanggaran	0 pelanggaran	100,00	Sangat Tinggi
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1 kegiatan	1 kegiatan	100,00	Sangat Tinggi
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	100%	60%	60,00	Rendah

Menariknya, capaian kinerja Kecamatan Telen tidak sepenuhnya mengikuti pola serapan anggarannya. Lima indikator berada pada kategori **sangat tinggi**, terutama pada layanan administrasi, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Hanya indikator pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang berada pada kategori **rendah**. Dengan demikian, Kecamatan Telen masih mampu menjaga hasil pelaksanaan pada sebagian besar program, meskipun efektivitas penggunaan anggaran pada banyak program masih perlu diperbaiki agar hubungan antara pendanaan dan capaian kinerja menjadi lebih selaras

Tabel 6.97 Kantor Camat Busang

Kantor Camat Busang memiliki fungsi strategis dalam menjaga kesinambungan pelayanan pemerintahan di tingkat kecamatan, terutama pada layanan administrasi, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta pembinaan pemerintahan desa. Dengan fungsi tersebut, evaluasi terhadap kecamatan ini penting untuk melihat sejauh mana dukungan

pendanaan mampu diterjemahkan menjadi hasil kerja yang relevan bagi masyarakat di wilayah Busang. Data pada bagian ini disusun berdasarkan LKPJ Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025.

Tabel 6.98 Capaian Indikator Keuangan Kantor Camat Busang

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)		Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.179.520.705	4.604.067.434	74,51		Sedang
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	124.711.000	124.017.100	99,44		Sangat Tinggi
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	316.914.000	296.216.000	93,47		Sangat Tinggi
4	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	134.689.000	121.516.808	90,22		Sangat Tinggi
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	235.662.150	189.257.250	80,31		Tinggi
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	128.753.000	128.117.000	99,51		Sangat Tinggi

Dari sisi pendanaan, Kecamatan Busang menunjukkan pola yang relatif baik, meskipun tidak sepenuhnya merata. Empat program telah mencapai kategori **sangat tinggi**, yaitu penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum berada pada kategori **tinggi**, sedangkan program penunjang berada pada kategori **sedang**. Secara umum, pelaksanaan anggaran di kecamatan ini cukup kuat pada program-program substantif kewilayahan.

Tabel 6.99 Capaian Indikator Kinerja Kantor Camat Busang

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100%	87,50%	87,50	Tinggi
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	20 pelayanan	15 pelayanan	75,00	Sedang

N o	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
	dan Pelayanan Publik					
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	95%	100%	100,00	Sangat Tinggi
4	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran PERDA/PERKADA	0 pelanggaran	0 pelanggaran	100,00	Sangat Tinggi
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	9 kegiatan	4 kegiatan	44,44	Sangat Rendah
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan fasilitasi Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	90%	100%	100,00	Sangat Tinggi

Kecamatan Busang mencatatkan dinamika capaian kinerja yang cukup bervariasi pada pelaksanaan program tahun 2025. Tiga indikator berada pada kategori **sangat tinggi**, yaitu pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Layanan administrasi perkantoran berada pada kategori **tinggi**, sedangkan penyelenggaraan pelayanan publik berada pada kategori **sedang**. Adapun indikator pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional masih berada pada kategori **sangat rendah**. Dengan demikian, Kecamatan Busang telah menunjukkan capaian yang cukup baik pada fungsi pemberdayaan dan pembinaan desa, tetapi masih memerlukan penguatan pada layanan publik dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum agar kinerja antarprogram menjadi lebih seimbang.

6.2.46 Kantor Camat Teluk Pandan

Kantor Camat Teluk Pandan memiliki peran penting dalam menjaga efektivitas pemerintahan wilayah, terutama pada pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa, ketenteraman dan ketertiban umum, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, serta pembinaan pemerintahan desa.

Tabel 6.100 Capaian Indikator Keuangan Kantor Camat Teluk Pandan

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.900.878.542	7.467.213.657	83,89	Tinggi
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	67.308.520	62.450.000	92,78	Sangat Tinggi
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	185.917.000	137.446.000	73,93	Sedang
4	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	177.992.400	176.922.000	99,40	Sangat Tinggi
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	164.260.210	158.795.000	96,67	Sangat Tinggi
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	31.302.159	30.940.000	98,84	Sangat Tinggi

Dari sisi anggaran, Kecamatan Teluk Pandan menunjukkan profil yang cukup kuat. Empat program berada pada kategori **sangat tinggi**, yaitu pelayanan publik, koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Program penunjang masih berada pada kategori **tinggi**, sedangkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan berada pada kategori **sedang**. Secara umum, pola ini memperlihatkan bahwa dukungan pendanaan kecamatan berjalan cukup baik, walaupun kekuatannya belum sepenuhnya merata pada seluruh program.

Tabel 6.101 Capaian Indikator Kinerja Kantor Camat Teluk Pandan

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	95%	86%	90,53	Sangat Tinggi
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	22 pelayanan	13 pelayanan	55,09	Rendah
3	Program Pemberdayaan	Cakupan Peran Serta Masyarakat	92%	63%	68,48	Sedang

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
	Masyarakat Desa dan Kelurahan	dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan				
4	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran PERDA/PERKADA	0 pelanggaran	0 pelanggaran	100,00	Sangat Tinggi
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	8 kegiatan	8 kegiatan	100,00	Sangat Tinggi
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	87%	82%	94,25	Sangat Tinggi

Dari sisi kinerja, hasil Kecamatan Teluk Pandan terlihat lebih beragam. Tiga indikator berada pada kategori **sangat tinggi**, yakni layanan administrasi perkantoran, ketenteraman dan ketertiban umum, serta penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Indikator pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa juga masih berada pada posisi yang baik dengan capaian 94,25 persen. Namun demikian, penyelenggaraan pelayanan publik masih berada pada kategori **rendah**, sedangkan peran serta masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan berada pada kategori **sedang**. Dengan demikian, Kecamatan Teluk Pandan telah menunjukkan hasil yang baik pada aspek administrasi, stabilitas wilayah, dan pembinaan pemerintahan desa, tetapi masih perlu penguatan pada pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat agar kinerja antarprogram menjadi lebih seimbang.

6.2.47 Kantor Camat Rantau Pulung

Kantor Camat Rantau Pulung mempunyai peran penting dalam menjaga efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kewilayahan, khususnya pada layanan administrasi, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta pembinaan pemerintahan desa.

Tabel 6.102 Capaian Indikator Keuangan Kantor Camat Rantau Pulung

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)		Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		5.280.672.971	4.556.258.860	86,30	Tinggi
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		85.245.000	83.618.000	98,09	Sangat Tinggi
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		642.302.225	618.630.000	96,30	Sangat Tinggi

4	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	65.000.000	62.500.000	96,20	Sangat Tinggi
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	222.669.422	189.675.000	84,99	Tinggi
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	82.660.000	81.996.000	99,20	Sangat Tinggi

Dilihat dari sisi keuangan, Kecamatan Rantau Pulung menunjukkan capaian yang cukup kuat. Empat program sudah berada pada kategori **sangat tinggi**, yaitu pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Program penunjang dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum berada pada kategori **tinggi**. Secara keseluruhan, pola ini menunjukkan bahwa dukungan anggaran di kecamatan tersebut telah terealisasi dengan baik dan relatif stabil antarprogram.

Tabel 6.103 Capaian Indikator Kinerja Kantor Camat Rantau Pulung

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100%	85%	86,30	Tinggi
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	13	13	100,00	Sangat Tinggi
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	84%	81%	96,31	Sangat Tinggi
4	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran PERDA/PERKADA Kecamatan	9	0	0,00	Sangat Rendah
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	5 kegiatan	4 kegiatan	80,00	Tinggi
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	87%	87%	100,00	Sangat Tinggi

Kecamatan Rantau Pulung memperlihatkan hasil yang cukup beragam dari capaian kinerjanya. Tiga indikator berada pada kategori **sangat tinggi**, yaitu penyelenggaraan pelayanan publik, peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Layanan administrasi perkantoran dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum berada pada kategori **tinggi**. Sementara itu, indikator jumlah pelanggaran perda/perkada tercatat pada kategori **sangat rendah** karena realisasi berada pada angka nol terhadap target sembilan kasus. Secara umum, kecamatan ini memperlihatkan kinerja yang baik pada sebagian besar fungsi pemerintahan kewilayahan, meskipun masih terdapat variasi capaian pada aspek ketenteraman dan ketertiban umum yang perlu dicermati secara lebih hati-hati dalam pembacaan evaluasi.

6.2.48 Kantor Camat Sangkulirang

Kantor Camat Sangkulirang memiliki peran penting dalam memastikan pelayanan pemerintahan di tingkat kecamatan berjalan tertib, responsif, dan tetap terhubung dengan kebutuhan masyarakat desa. Karena itu, evaluasi terhadap perangkat kewilayahan ini perlu dibaca sebagai gambaran mengenai bagaimana dukungan anggaran diterjemahkan ke dalam layanan administrasi, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta pembinaan pemerintahan desa. Data pada bagian ini disusun berdasarkan LKPJ Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025.

Tabel 6.104 Capaian Indikator Keuangan Kantor Camat Sangkulirang

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)		Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		9.492.582.245	7.851.971.465	82,71	Tinggi
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		91.775.688	0	0,00	Sangat Rendah
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		200.067.450	120.668.000	60,32	Rendah
4	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum		68.631.000	0	0,00	Sangat Rendah
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		365.010.825	358.388.000	98,19	Sangat Tinggi
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		138.499.000	0	0,00	Sangat Rendah

Dari sisi pendanaan, profil Kecamatan Sangkulirang terlihat cukup timpang antarprogram. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum telah mencapai kategori **sangat tinggi**, sedangkan program penunjang berada pada kategori **tinggi**. Di sisi lain, tiga program berada pada kategori **sangat rendah** karena realisasi pendanaannya tercatat nol, dan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan masih berada pada kategori **rendah**. Gambaran ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran di kecamatan ini belum merata pada seluruh program.

Tabel 6.105 Capaian Indikator Kinerja Kantor Camat Sangkulirang

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)		Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan		100%	100%	100,00	Sangat Tinggi

	Daerah Kabupaten/Kota					
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	27 pelayanan	16 pelayanan	59,26	Rendah
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	100%	100%	100,00	Sangat Tinggi
4	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada	0 pelanggaran	0 pelanggaran	100,00	Sangat Tinggi
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	7 kegiatan	7 kegiatan	100,00	Sangat Tinggi
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitas Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	100%	100%	100,00	Sangat Tinggi

Capaian kinerja Kecamatan Sangkulirang justru terlihat lebih baik dibandingkan dengan pola realisasi keuangannya. Lima indikator berada pada kategori **sangat tinggi**, terutama pada layanan administrasi, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, urusan pemerintahan umum, serta pembinaan pemerintahan desa. Hanya indikator penyelenggaraan pelayanan publik yang masih berada pada kategori **rendah** karena realisasi baru mencapai 16 dari target 27 pelayanan. Secara keseluruhan, Kecamatan Sangkulirang tetap menunjukkan hasil pelaksanaan yang baik pada sebagian besar fungsi kewilayahan, tetapi efektivitas dukungan pendanaan pada beberapa program masih perlu diperkuat agar capaian kinerja dan realisasi anggaran dapat bergerak lebih seimbang.

6.2.49 Kantor Camat Muara Bengkal

Kantor Camat Muara Bengkal mempunyai peran penting dalam menjaga agar pelayanan pemerintahan, koordinasi kewilayahan, pemberdayaan masyarakat, serta pembinaan pemerintahan desa dapat berjalan secara efektif di tingkat kecamatan. Karena itu, evaluasi terhadap perangkat kecamatan ini perlu dibaca sebagai gambaran tentang kemampuan wilayah dalam mengelola dukungan anggaran sekaligus menjaga capaian program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Data pada bagian ini disusun berdasarkan LKPJ Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025.

Tabel 6.106 Capaian Indikator Keuangan Kantor Camat Muara Bengkal

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.836.165.500	9.915.034.557	83,77	Tinggi

2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	34.511.000	24.005.000	69,56	Sedang
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	322.462.000	295.558.000	91,66	Sangat Tinggi
4	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	33.845.000	31.705.050	93,68	Sangat Tinggi
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	299.619.000	271.710.250	90,69	Sangat Tinggi
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	87.333.000	78.226.950	89,57	Tinggi

Dilihat dari sisi keuangan, Kecamatan Muara Bengkal menunjukkan performa yang cukup baik. Tiga program sudah berada pada kategori **sangat tinggi**, yaitu pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum, serta penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Program penunjang dan pembinaan pemerintahan desa berada pada kategori **tinggi**, sedangkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berada pada kategori **sedang**. Secara umum, pola ini memperlihatkan bahwa realisasi pendanaan kecamatan berjalan cukup stabil, walaupun masih ada ruang penguatan pada layanan publik.

Tabel 6.107 Capaian Indikator Kinerja Kantor Camat Muara Bengkal

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)		Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan		100%	100%	100,00	Sangat Tinggi
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik		32 kegiatan	18 kegiatan	56,00	Rendah
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan		100%	100%	100,00	Sangat Tinggi
4	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada		0 pelanggaran	0 pelanggaran	100,00	Sangat Tinggi
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		6 kegiatan	9 kegiatan	100,00	Sangat Tinggi
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitas, Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan		100%	100%	100,00	Sangat Tinggi

		Lembaga Kemasyarakatan				

Capaian kinerja Kecamatan Muara Bengkal memperlihatkan hasil yang cukup kuat pada sebagian besar program. Lima indikator telah berada pada kategori **sangat tinggi**, terutama pada layanan administrasi, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, serta pembinaan pemerintahan desa. Hanya indikator penyelenggaraan pelayanan publik yang masih berada pada kategori **rendah** karena realisasi baru mencapai 18 dari target 32 kegiatan. Secara keseluruhan, kecamatan ini menunjukkan kapasitas pelaksanaan yang baik pada mayoritas fungsi kewilayahan, namun penguatan pada aspek pelayanan publik tetap penting agar capaian antarprogram menjadi lebih seimbang.

6.2.50 Kantor Camat Long Mesangat

Kantor Camat Long Mesangat memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan pelayanan pemerintahan di tingkat kewilayahan, terutama pada aspek pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa, ketenteraman dan ketertiban umum, serta pembinaan pemerintahan desa. Karena itu, evaluasi terhadap kecamatan ini perlu dipahami sebagai gambaran mengenai kemampuan perangkat kewilayahan dalam mengelola dukungan pendanaan sekaligus menjaga ketercapaian program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Data pada bagian ini disusun berdasarkan LKPJ Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025.

Tabel 6.108 Capaian Indikator Keuangan Kantor Camat Long Mesangat

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.303.771.926	6.668.108.209	80,30	Tinggi
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	80.402.000	69.689.000	86,68	Tinggi
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	451.623.986	353.943.000	78,37	Tinggi
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	43.010.180	20.510.000	47,69	Sangat Rendah
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	258.639.540	197.950.500	76,54	Tinggi
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			68,86	Tinggi

Dari sisi pendanaan, Kecamatan Long Mesangat menunjukkan capaian yang relatif beragam. Empat program berada pada kategori **tinggi**, yaitu program penunjang, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, serta penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Sementara itu, program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum masih berada pada kategori **sangat rendah**. Untuk program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, dokumen sumber hanya menampilkan persentase realisasi pendanaan sebesar **68,86 persen** pada potongan yang tersedia, sehingga penyajiannya dipertahankan secara terbatas mengikuti data yang tampak dalam dokumen.

Tabel 6.109 Capaian Indikator Kinerja Kantor Camat Long Mesangat

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	96%	89%	92,71	Sangat Tinggi
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	19 pelayanan	13 pelayanan	68,42	Sedang
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	95%	85%	89,47	Tinggi
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran PERDA/PERKADA	0 pelanggaran	0 pelanggaran	100,00	Sangat Tinggi
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	9 kegiatan	8 kegiatan	88,89	Tinggi
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				71,58	Tinggi

Dari sisi hasil, Kecamatan Long Mesangat menampilkan capaian yang cukup baik, meskipun belum seluruhnya merata. Program penunjang dan program koordinasi ketentraman serta ketertiban umum sudah berada pada kategori **sangat tinggi**. Adapun program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa berada pada kategori **tinggi**, sedangkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik masih berada pada kategori **sedang**. Secara umum, kecamatan ini tetap menunjukkan kapasitas pelaksanaan yang cukup baik, tetapi penguatan pada pelayanan publik dan konsistensi dukungan pendanaan masih diperlukan agar hasil antarfungsi menjadi lebih seimbang.

6.2.51 Kantor Camat Karang

Kantor Camat Karang memegang peran penting dalam memastikan pelayanan pemerintahan di tingkat kecamatan tetap berjalan efektif, khususnya pada aspek layanan administrasi, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, serta pembinaan pemerintahan desa. Oleh karena itu, evaluasi pada perangkat kewilayahan ini penting untuk melihat seberapa jauh dukungan pendanaan mampu diterjemahkan menjadi capaian program yang nyata bagi masyarakat.

Tabel 6.110 Capaian Indikator Keuangan Kantor Camat Karang

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.700.702.153	4.464.835.848	66,6	Sedang
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	54.030.000	52.868.800	97,85	Sangat Tinggi
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	269.871.000	268.013.600	99,31	Sangat Tinggi
4	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	71.051.000	69.946.000	99,44	Sangat Tinggi
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	125.277.000	124.656.000	99,5	Sangat Tinggi
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	50.528.000	50.217.600	99,39	Sangat Tinggi

Dari sisi pendanaan, Kecamatan Karang memperlihatkan pola yang cukup kontras. Lima program sudah berada pada kategori **sangat tinggi**, terutama pada pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, serta pembinaan pemerintahan desa. Sementara itu, program penunjang masih berada pada kategori **sedang**. Ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran kecamatan relatif kuat pada program-program substantif, meskipun dukungan pada fungsi penunjang belum setinggi program lainnya.

Tabel 6.111 Capaian Indikator Kinerja Kantor Camat Karang

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100%	80%	80,0	Tinggi
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	21 pelayanan	20 pelayanan	95,0	Sangat Tinggi
3	Program Pemberdayaan	Cakupan Peran Serta Masyarakat	90%	100%	100,0	Sangat Tinggi

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
	Masyarakat Desa dan Kelurahan	Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan				
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran PERDA/PERKADA	0 pelanggaran	0 pelanggaran	100,0	Sangat Tinggi
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	5 kegiatan	5 kegiatan	100,0	Sangat Tinggi
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	90%	100%	100,0	Sangat Tinggi

Dari sisi hasil, Kecamatan Karangan menunjukkan performa yang cukup kuat. Lima indikator berada pada kategori **sangat tinggi**, yaitu pelayanan publik, peran serta masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, serta pembinaan pemerintahan desa. Hanya indikator layanan administrasi perkantoran dan laporan keuangan yang berada pada kategori **tinggi**. Secara keseluruhan, kecamatan ini memperlihatkan kinerja yang baik pada sebagian besar fungsi kewilayahan, dengan ruang penguatan terutama pada layanan penunjang agar capaian antarprogram menjadi lebih seimbang.

6.2.52 Kantor Camat Sandaran

Kantor Camat Sandaran memegang fungsi penting dalam menjaga keberlangsungan pelayanan pemerintahan di tingkat wilayah, terutama pada layanan administrasi, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa, ketentraman dan ketertiban umum, serta pembinaan pemerintahan desa. Karena itu, evaluasi terhadap kecamatan ini penting untuk melihat seberapa jauh dukungan pendanaan dapat diterjemahkan menjadi capaian program yang benar-benar dirasakan di tingkat masyarakat. Data pada bagian ini disusun berdasarkan LKPJ Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025.

Tabel 6.112 Capaian Indikator Keuangan Kantor Camat Sandaran

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			68,86	Sedang

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Kategori
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			92,69	Sangat Tinggi
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			75,77	Sedang
4	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum			51,51	Rendah
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			0,00	Sangat Rendah
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	35.412.000	32.230.000	91,01	Sangat Tinggi

Dari sisi keuangan, Kecamatan Sandaran menunjukkan capaian yang cukup beragam. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sudah berada pada kategori **sangat tinggi**. Program penunjang dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan berada pada kategori **sedang**, sedangkan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum berada pada kategori **rendah**. Adapun program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum tercatat **0,00 persen** dan berada pada kategori **sangat rendah**. Pada potongan data yang tersedia, angka pagu dan realisasi yang terbaca lengkap hanya muncul secara jelas pada program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, sedangkan program lainnya pada bagian LKPJ yang berhasil ditelusuri lebih tegas menampilkan persentase realisasi pendanaannya. Karena itu, penyajian tabel dipertahankan mengikuti tingkat keterbacaan data pada dokumen sumber.

Tabel 6.113 Capaian Indikator Kinerja Kantor Camat Sandaran

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	98%	97%	99	Sangat Tinggi
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	19 pelayanan	10 pelayanan	53	Rendah
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Peran Serta Masyarakat dalam	92%	93%	100	Sangat Tinggi

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
		Pembangunan di Wilayah Kecamatan				
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran PERDA/PERKADA Kecamatan	35 pelanggaran	0 pelanggaran	0	Sangat Rendah
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	8 kegiatan	8 kegiatan	100	Sangat Tinggi
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Pembinaan, Pengawasan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	92%	90%	98	Sangat Tinggi

Dari sisi hasil, Kecamatan Sandaran memperlihatkan pola yang cukup kontras. Empat indikator berada pada kategori **sangat tinggi**, yaitu layanan administrasi perkantoran, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Sementara itu, indikator penyelenggaraan pelayanan publik masih berada pada kategori **rendah**, dan indikator jumlah pelanggaran perda/perkada tercatat pada kategori **sangat rendah** karena realisasi berada pada angka nol terhadap target yang ditetapkan. Secara umum, Kecamatan Sandaran tetap menunjukkan hasil yang baik pada sebagian besar fungsi kewilayahan, namun masih memerlukan penguatan pada pelayanan publik dan konsistensi pelaksanaan beberapa program agar capaian antarprogram menjadi lebih seimbang.

6.2.53 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai posisi yang khas karena beririsan langsung dengan penguatan ideologi, pembinaan wawasan kebangsaan, pendidikan politik, pembinaan organisasi kemasyarakatan, hingga fasilitasi ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, dan ormas. Evaluasi terhadap perangkat daerah ini penting tidak hanya untuk melihat realisasi anggaran, tetapi juga untuk menilai seberapa efektif program-programnya dalam menjaga stabilitas sosial-politik dan memperkuat kohesi masyarakat di daerah.

Tabel 6.114 Capaian Indikator Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.379.675.774	13.728.950.122	89	Tinggi

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Kategori
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	4.991.129.000	4.954.381.870	99	Sangat Tinggi
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	3.386.032.120	2.810.725.863	83	Tinggi
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2.266.535.000	1.927.232.078	85	Tinggi
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	1.139.656.000	1.131.541.560	99	Sangat Tinggi
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	4.219.236.397	3.565.030.460	85	Tinggi

Dari sisi pendanaan, kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tergolong cukup baik. Dua program sudah mencapai kategori **sangat tinggi**, yaitu penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan serta pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya. Empat program lainnya berada pada kategori **tinggi**. Pola ini menunjukkan bahwa dukungan anggaran pada perangkat daerah ini secara umum telah terealisasi dengan baik, walaupun masih terdapat ruang untuk mendorong realisasi yang lebih optimal pada beberapa program substantif.

Tabel 6.115 Capaian Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100	100	100	Sangat Tinggi
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Karakter dan Penguatan Wawasan Kebangsaan (Revolusi Mental)	77,83	74,28	95	Sangat Tinggi
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan	Cakupan masyarakat yang mendapatkan	75	60	80	Tinggi

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)	Kategori
	melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	pembinaan pendidikan politik				
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	229	252	110	Sangat Tinggi
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Jumlah Konflik SARA	80	80	100	Sangat Tinggi
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Cakupan penanganan konflik sosial di wilayah Kutai Timur	100	100	100	Sangat Tinggi

Dilihat dari sisi hasil, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menunjukkan kinerja yang relatif kuat. Lima indikator berada pada kategori **sangat tinggi**, mencakup layanan administrasi, penguatan wawasan kebangsaan, organisasi kemasyarakatan aktif, pengelolaan isu konflik SARA, serta penanganan konflik sosial. Satu indikator, yaitu cakupan masyarakat yang mendapatkan pembinaan pendidikan politik, berada pada kategori **tinggi**. Secara keseluruhan, perangkat daerah ini memperlihatkan kontribusi yang cukup baik dalam mendukung stabilitas sosial-politik daerah, penguatan wawasan kebangsaan, serta pembinaan organisasi kemasyarakatan, meskipun perluasan jangkauan pendidikan politik masih dapat terus diperkuat agar hasil antarpogram lebih merata.

Secara umum, hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan pada perangkat daerah telah berjalan dengan tingkat capaian yang relatif baik, baik dari sisi kinerja maupun realisasi keuangan. Terdapat beberapa bidang yang memerlukan penguatan lebih lanjut. Sejumlah perangkat daerah menunjukkan capaian yang tinggi hingga sangat tinggi pada indikator kinerja utama. Hal ini menggambarkan adanya konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai selama tahun berjalan. Evaluasi ini juga menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan capaian antarurusan dan antarperangkat daerah,. Ketimpangan tersebut, terutama pada program-program tertentu yang realisasi keuangannya belum optimal atau indikator kinerjanya belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Penyelenggaraan pembangunan daerah pada tahun 2025 telah memberikan hasil yang cukup positif. Penyempurnaan tetap diperlukan pada aspek efektivitas pelaksanaan, pemerataan capaian, konsistensi dukungan anggaran, dan penguatan kualitas implementasi program agar pelaksanaan RKPD pada tahun berikutnya dapat berlangsung semakin tepat sasaran, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

BAB 7

FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT

Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada tahun berjalan tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai kondisi yang berkembang pada tingkat perangkat daerah maupun lingkungan penyelenggaraan pemerintahan secara lebih luas. Dalam proses implementasinya, terdapat faktor-faktor yang memperkuat pencapaian target kinerja, namun terdapat pula berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan daerah.

Identifikasi terhadap faktor pendorong dan penghambat menjadi bagian penting dalam evaluasi RKPD karena memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi riil pelaksanaan pembangunan. Melalui pengenalan terhadap aspek-aspek yang mendukung maupun yang masih memerlukan perbaikan, pemerintah daerah dapat merumuskan langkah tindak lanjut yang lebih tepat dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, memperkuat pelaksanaan program, serta mendorong pencapaian target pembangunan daerah secara lebih optimal pada periode berikutnya.

7.1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendukung, serta beberapa kendala yang masih memengaruhi capaian kinerja dan realisasi anggaran. Berdasarkan hasil rekonsiliasi capaian kinerja, faktor-faktor tersebut dapat diuraikan per program sebagai berikut.

Tabel 7.1 Faktor Pendorong, Penghambat, dan Permasalahan Realisasi Anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
1	Program Pengelolaan Pendidikan	- —	Data Anak Tidak Sekolah/Anak Putus Sekolah masih besar pada laman ATS Kemendikbud. Capaian APS belum mencapai 100%. HLS dan RLS merupakan data sektoral lintas sektor. Target rasio ketersediaan sekolah menggunakan data pembanding BPS, sedangkan realisasi menggunakan data capil.	- Kegiatan fisik pembangunan dan rehabilitasi belum optimal. - Waktu pelaksanaan terbatas. - Proses e-katalog cukup panjang. - Faktor cuaca memengaruhi pelaksanaan kegiatan.
2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	- Peningkatan kualifikasi guru SD dan SMP telah mencapai target.	- Masih banyak pendidik yang belum linier dengan mata pelajaran yang diampu.	- —

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
3	Program Pengembangan Kurikulum	- Semua sekolah telah mencapai indikator penerapan kurikulum muatan lokal.	- SDM pembelajaran muatan lokal, khususnya bahasa daerah Kutai, masih perlu ditingkatkan. - Belum tersedia anggaran untuk kegiatan tersebut.	- —
4	Program Pengembangan Kebudayaan	- —	- Belum ada data untuk penganggaran dana bagi ketua adat. - Belum ada landasan hukum untuk penganggaran tersebut. - Dukungan yang ada masih berupa bantuan sarana dan prasarana bagi paguyuban/lembaga adat serta renovasi balai adat.	- —
5	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	- Festival seni dan budaya terlaksana sesuai target. - Terdapat dukungan anggaran.	- —	- Monitoring dan evaluasi terkait kesenian di beberapa kecamatan belum terlaksana optimal. - Penetapan target pelaksanaan belum diatur secara maksimal.
6	Program Pembinaan Sejarah	- Ada pengembangan SDM terkait sejarah. - SDM sejarah dapat berbagi informasi kesejarahan kepada masyarakat.	- —	- —
7	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	- Benda, situs, dan kawasan cagar budaya dilestarikan sesuai target. - Objek cagar budaya tersimpan di galeri.	- —	- —
8	Program Pengelolaan Permuseuman	- Koleksi benda cagar budaya terpelihara dengan baik di galeri.	- Pembangunan museum masih dalam tahap perencanaan. - Masih memerlukan dukungan anggaran lanjutan.	- —

7.2 Dinas Kesehatan

Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 pada Dinas Kesehatan menunjukkan capaian yang cukup baik pada beberapa program. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa faktor yang mendukung dan beberapa kendala yang memengaruhi capaian kinerja serta realisasi anggaran. Faktor-faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 7.2 Faktor Pendorong, Penghambat, dan Permasalahan Realisasi Anggaran pada Dinas Kesehatan

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	- Komitmen seluruh pegawai terkait pengelolaan keuangan dan perencanaan yang baik. - SOP administrasi sudah berjalan. - Pengawasan internal relatif efektif.	- Keterlambatan kelengkapan dokumen dari unit pelaksana. - Dinamika perubahan regulasi pengelolaan keuangan.	- Beberapa kegiatan tidak terealisasi penuh karena optimalisasi digitalisasi. - Kebutuhan riil lebih rendah dari pagu yang ditetapkan. - Belanja pegawai dianggarkan lebih besar dibanding jumlah tenaga yang tersedia sehingga menimbulkan SILPA pada belanja pegawai.
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	- Kinerja pelayanan SPM semakin baik. - Dukungan fasilitas kesehatan tingkat pertama semakin baik. - Fungsi jejaring pelayanan kesehatan semakin baik. - Rumah sakit yang ada berfungsi optimal. - Terdapat dukungan rujukan regional.	- Masih terdapat kasus kematian ibu dan penyakit tidak menular. - Keterbatasan tenaga kesehatan. - Wilayah luas dan akses layanan belum merata. - Keterbatasan pembangunan fasilitas baru. - Distribusi layanan rujukan belum merata. - Keterbatasan layanan spesialisik.	- Beberapa intervensi kesehatan masyarakat bersifat jangka panjang sehingga output belum sepenuhnya tercermin dalam indikator. - Efisiensi kegiatan tertentu menurunkan serapan. - Pagu lebih banyak terserap pada operasional dibanding ekspansi sarana. - Pembangunan fisik memerlukan proses administrasi yang panjang.
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	- Komitmen peningkatan kompetensi. - Kerja sama pelatihan dengan instansi terkait. - Dukungan regulasi pengembangan kompetensi.	- Keterbatasan kuota dan jadwal pelatihan. - SDM tidak dapat meninggalkan tempat tugas, terutama di wilayah terpencil. - Keterbatasan kewenangan	- Beberapa pelatihan tidak terlaksana penuh. - Efisiensi biaya perjalanan dan bimtek. - Penyesuaian skala prioritas kegiatan.

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
			pengangkatan tenaga kesehatan.	
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	- Pembinaan dan pengawasan rutin. - Koordinasi lintas sektor dengan DPTSP dan BPOM. - Peningkatan kesadaran pelaku usaha.	- Kepatuhan pelaku usaha belum merata. - Keterbatasan tenaga pengawas. - Wilayah pengawasan luas.	- Anggaran pengawasan relatif optimal terserap. - Kegiatan lapangan berjalan baik sehingga serapan tinggi. - Capaian indikator juga dipengaruhi oleh kepatuhan pihak eksternal, bukan hanya faktor anggaran.
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	- Seluruh kecamatan telah menerapkan kebijakan GERMAS. - Ada dukungan lintas sektor dan kecamatan. - Sosialisasi aktif dan advokasi berjalan.	- Partisipasi masyarakat belum merata. - Ketergantungan pada kader sukarela.	- Efisiensi pelaksanaan kegiatan sosialisasi. - Optimalisasi penggunaan dana menyebabkan SILPA.

7.2.1 RSUD Kudungga

Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 pada RSUD Kudungga secara umum menunjukkan capaian yang baik, baik pada aspek layanan penunjang maupun layanan utama rumah sakit. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi pengembangan layanan dan realisasi anggaran pada beberapa subkegiatan. Faktor-faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 7.3 Faktor Pendorong, Penghambat, dan Permasalahan Realisasi Anggaran pada RSUD Kudungga

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	- Adanya regulasi dan SOP yang mendukung pelaksanaan kegiatan. - Dukungan SDM terkait pengelolaan keuangan dan	- Masih terdapat tenaga kesehatan yang belum mendapatkan pelatihan sesuai standar. - Keterbatasan fasilitas bangunan untuk pengadaan	- Terdapat SILPA pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp7.236.356.624. - Terdapat SILPA pada Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penunjang

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
		perencanaan sudah baik.	gedung dalam rangka pengembangan layanan.	Pelayanan BLUD sebesar Rp13.542.762.726.
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	- Pelaksanaan akreditasi dan survei kepuasan pasien mendukung peningkatan mutu layanan dan kepuasan masyarakat.	- Keterbatasan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan terkait regulasi kelas rawat inap KRIS. - Keterbatasan kompetensi rumah sakit untuk pengembangan layanan tertentu.	- Terdapat SILPA pada Sub Kegiatan Pengadaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai sebesar Rp3.671.232.142. - Tidak terserap karena ketersediaan stok dari penyedia kurang. - Beberapa item memiliki masa kedaluwarsa yang pendek. - Daya tampung rumah sakit untuk pengadaan oksigen belum memadai untuk menampung sekaligus. - Beberapa penyedia belum tersedia di e-purchasing versi 6.

7.3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mencakup program yang sangat luas, mulai dari sumber daya air, air minum, persampahan, air limbah, drainase, bangunan gedung, jalan, jasa konstruksi, hingga penataan ruang. Capaian kinerja pada beberapa program sudah menunjukkan hasil yang baik, namun pada sebagian program lain masih terdapat hambatan yang memengaruhi pencapaian indikator dan realisasi anggaran. Faktor-faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 7.4 Faktor Pendorong, Penghambat, dan Permasalahan Realisasi Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	- Penggunaan sistem terintegrasi yang wajib, seperti e-planning dan e-budgeting, mempercepat penyusunan dokumen.	- Ketergantungan tinggi pada sistem pusat, khususnya SIPD. - Saat beban puncak, kendala teknis menghambat proses	- Terdapat SILPA anggaran.

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
		- Sistem membantu menjaga keselarasan perencanaan dan penganggaran.	input data penganggaran.	
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	- Kebutuhan air baku terus meningkat. - Peningkatan kondisi jaringan irigasi menjadi prioritas daerah.	- Debit air fluktuatif. - Terjadi kekeringan dan penurunan kualitas air. - Perubahan alih fungsi lahan sawah menjadi nonpertanian.	- Terdapat hutang dan SILPA anggaran.
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	- Ketersediaan anggaran mendorong peningkatan capaian akses air minum layak.	- Dianggarkan pada APBD Perubahan sehingga waktu pelaksanaan tidak mencukupi.	
4	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional		- Dianggarkan pada APBD Perubahan sehingga waktu pelaksanaan tidak mencukupi. - Masih diperlukan review desain TPST maupun TPS3R.	
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah		- Kegiatan berfokus pada penyempurnaan sarana dan prasarana IPLT serta uji keberfungsian IPLT.	
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	- Sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai berperan penting dalam mengalirkan limpasan air hujan. - Penyelesaian pekerjaan saluran drainase baru mencakup wilayah Kecamatan Sangatta Utara dan Kecamatan Sangatta Selatan.	- Intensitas hujan ekstrem dan kenaikan muka air sungai.	- Terdapat hutang dan SILPA anggaran.

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
7	Program Pengembangan Permukiman		- Ketidaksesuaian nomenklatur SIPD yang baru.	
8	Program Penataan Bangunan Gedung	- Antusiasme masyarakat dalam mengurus perizinan. - Ada permintaan pemenuhan perizinan dari pelaku usaha. - Terdapat dukungan regulasi baru bagi pemohon.	- Kendala teknis dalam penginputan data permohonan pada aplikasi SIMBG.	
9	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya			
10	Program Penyelenggaraan Jalan	- Metode pengadaan e-katalog mini kompetisi membuat proses pengadaan barang dan jasa lebih cepat. - Pelaksanaan pekerjaan dapat dimulai lebih cepat.	- Banjir dan cuaca ekstrem. - Perubahan kriteria penentuan kondisi jalan mantap.	- Kondisi cuaca ekstrem/banjir.
11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	- Melibatkan tenaga ahli yang berasal dari luar dinas. - Diperlukan koordinasi dan dukungan desa serta kecamatan dalam penjangkaran peserta pelatihan dan sertifikasi TKK. - Perlu dukungan produk hukum daerah untuk mendorong peningkatan TKK bersertifikat. - Perlu penambahan forum koordinasi antar pelaku usaha jasa konstruksi. - Perlu penempatan pegawai sesuai	- Defisit kuantitas tenaga kerja konstruksi lokal. - Keterbatasan TKK bersertifikat di Kabupaten Kutai Timur. - Belum ada Peraturan Daerah pendukung penyelenggaraan sub urusan jasa konstruksi. - Rendahnya partisipasi dan minat pemangku kepentingan. - Keterbatasan kuantitas personel bidang BJK.	- Aspek ketelitian dan kecakapan personel serta tim dalam pelaksanaan tupoksi bidang masih menjadi kendala. - Perkembangan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah tidak selaras dengan kemampuan kerja pegawai sehingga kecepatan kerja masih lambat.

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
		kebutuhan layanan kerja bidang BJK.		
12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	- Kerja sama yang baik antar OPD, aparatur desa, dan kecamatan dalam penyediaan data pendukung penyusunan materi teknis RDTR. - Terdapat bantek penyusunan peta dasar dari DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur. - Kerja sama antar anggota Forum Penataan Ruang Daerah dengan pelaku usaha berjalan baik. - Data KKPR telah terintegrasi dengan sistem OSS-RBA.	- Belum terlaksananya konsultasi publik kedua. - Keterbatasan personel yang melakukan telaah atau membuat kajian KKPR. - Keterbatasan personel yang melakukan pengendalian pemanfaatan ruang.	- Terdapat SILPA anggaran.

7.4 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menunjukkan bahwa sebagian program telah mencapai target kinerja, tetapi realisasi anggaran pada beberapa program masih belum optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman tidak hanya dipengaruhi oleh kesiapan teknis kegiatan, tetapi juga oleh proses administrasi, koordinasi lintas sektor, dan ketepatan waktu pelaksanaan. Faktor-faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 7.5 Faktor Pendorong, Penghambat, dan Permasalahan Realisasi Anggaran pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		- Penyesuaian administrasi dan proses verifikasi dokumen keuangan pada akhir tahun anggaran.	- Terdapat kelebihan penganggaran terkait gaji dan tunjangan ASN.

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
2	Program Pengembangan Perumahan		- Proses verifikasi calon penerima bantuan dan kelengkapan dokumen administrasi memerlukan waktu.	- Adanya keterbatasan waktu dalam pelaksanaan kegiatan.
3	Program Kawasan Permukiman	- Ketersediaan lahan dan partisipasi masyarakat dalam rangka penanganan kawasan kumuh.	- Proses koordinasi lintas sektor dalam penataan kawasan.	- Adanya keterbatasan waktu dalam pelaksanaan kegiatan.
4	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	- Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan rumah tidak layak huni.	- Validasi data RTLH memerlukan pembaruan berkala.	- Adanya keterbatasan waktu dalam pelaksanaan kegiatan.
5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	- Ketersediaan bahan dan material serta cuaca yang mendukung.	- Proses pengadaan dan pelaksanaan konstruksi memerlukan waktu.	- Terdapat sisa pagu anggaran karena adanya proses administrasi.
6	Program Peningkatan Pelayanan, Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman		- Kelengkapan persyaratan administrasi pemohon/pengembang perumahan belum seluruhnya terpenuhi.	- Adanya keterbatasan waktu dan sumber daya manusia.

7.5 Satuan Polisi Pamong Praja

Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 pada Satuan Polisi Pamong Praja menunjukkan bahwa capaian kinerja program secara umum sudah berjalan cukup baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program, terutama pada aspek regulasi, kapasitas aparatur, dan ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan. Faktor-faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 7.6 Faktor Pendorong, Penghambat, dan Permasalahan Realisasi Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
1	Program Peningkatan	- Adanya pembaharuan Perda	- Inventarisasi peraturan	- Adanya kegiatan yang tidak dapat

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Trantibumlinmas Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2025 sebagai pembaharuan dari Perda Nomor 3 Tahun 2007. - Perda yang baru telah mengakomodir urusan ketenteraman dan ketertiban umum yang sebelumnya belum terwadahi.	perundang-undangan yang menjadi kewenangan Satpol PP masih banyak yang belum diperbarui dan belum lengkap. - Banyak produk hukum daerah belum disosialisasikan kepada masyarakat. - Banyak produk hukum daerah belum dapat diakses melalui JDIH Kabupaten Kutai Timur.	dilaksanakan karena penganggarnya masuk pada Perubahan APBD sehingga waktu pelaksanaan menjadi terbatas. - Pelaksanaan kegiatan dinilai kurang efektif apabila dipaksakan sehingga menjadi SILPA.
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	- Adanya komitmen pimpinan dalam pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota. - Terdapat dukungan tim kerja yang baik.	- Seluruh Kasi Trantibum di kecamatan belum memiliki Sertifikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). - Cakupan wilayah 18 kecamatan belum sepenuhnya terjangkau dalam penanganan laporan masyarakat.	- Terdapat perbedaan penetapan SPMT terhitung mulai tanggal 1 Mei 2025 dengan perencanaan anggaran karena penetapan SK pengangkatan PPPK terhitung mulai 1 Maret 2025. - Kondisi tersebut menimbulkan SILPA yang cukup besar pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.

7.6 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menunjukkan bahwa program utama tetap berjalan, baik pada fungsi penunjang maupun pada layanan kebakaran dan penyelamatan nonkebakaran. Capaian kinerja pada OPD ini tergolong baik. Masih ada beberapa kendala yang memengaruhi jangkauan layanan dan ketepatan realisasi anggaran. Faktor-faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 7.7 Faktor Pendorong, Penghambat, dan Permasalahan Realisasi Anggaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	- Peningkatan kualitas SDM. - Percepatan realisasi anggaran.	- Kurangnya pelatihan teknis dan manajerial pada SDM. - Penyerapan anggaran menumpuk di triwulan IV/akhir tahun. - Adanya perubahan penghasilan pada anggaran gaji/TPP TK2D menjadi PPPK yang semula dianggarkan selama setahun sehingga tidak bisa direalisasikan.	- Kelebihan alokasi anggaran pada gaji dan TPP pada belanja pegawai.
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	- Peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan kualifikasi pemadam kebakaran. - Memperkuat partisipasi publik melalui pembentukan relawan kebakaran dan sosialisasi pencegahan kebakaran.	- Belum optimalnya ketersediaan jumlah pos pemadam pada setiap kecamatan. - Tersedia hanya 11 pos sehingga belum menjangkau pelayanan pada 18 kecamatan di Kutai Timur. - Kurangnya ketersediaan SDM petugas lapangan pemadam kebakaran.	- Kendala administratif, khususnya keterlambatan penetapan DPA Perubahan. - Terdapat revisi anggaran sesuai kebutuhan.

7.7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah menunjukkan capaian kinerja yang tinggi pada dua program utama. Di saat yang sama, pelaksanaan program masih dipengaruhi oleh efisiensi anggaran dan perubahan dasar pengukuran pada indikator kebencanaan. Kondisi ini memberi pengaruh langsung terhadap pelaksanaan kegiatan dan pembacaan capaian kinerja.

Tabel 7.8 Faktor Pendorong, Penghambat, dan Permasalahan Realisasi Anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
1	Program Penanggulangan Bencana	- Upaya penyelesaian kegiatan dalam 71 indikator Indeks Ketahanan Daerah dan SPM Sub Urusan Bencana yang dianggarkan tahun 2025.	- Nilai Indeks Risiko Bencana tahun 2025 sebesar 200,10 dihitung menggunakan baseline yang telah dimutakhirkan pada komponen bahaya dan komponen kerentanan. - Hasil perhitungan tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan hasil perhitungan IRB tahun 2015–2024.	
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		- Adanya efisiensi anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan dimulai pada Triwulan III. - Adanya efisiensi anggaran.	

7.8 Dinas Sosial

Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 pada Dinas Sosial mencakup program yang berhubungan langsung dengan pelayanan sosial, perlindungan kelompok rentan, rehabilitasi sosial, dan penanganan bencana. Kinerja pada beberapa program sudah mencapai target, tetapi masih ada program yang tertahan oleh keterbatasan data, koordinasi lapangan, dan waktu pelaksanaan kegiatan. Kondisi itu juga berpengaruh pada realisasi anggaran di beberapa program.

Tabel 7.9 Faktor Pendorong, Penghambat, dan Permasalahan Realisasi Anggaran pada Dinas Sosial

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		- Adanya efisiensi anggaran sehingga beberapa kegiatan pendukung kesekretariatan tidak bisa dilaksanakan sesuai rencana. - Kondisi tersebut berdampak pada belum tercapainya target pemenuhan layanan kesekretariatan secara maksimal.	- Terdapat SILPA pada beberapa sub kegiatan, dengan nilai terbesar pada sub kegiatan Penyediaan Gaji ASN sebesar Rp2.781.987.968.

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
2	Program Pemberdayaan Sosial	- Untuk meningkatkan kapasitas PSKS dan lembaga, kegiatan dilaksanakan melalui Zoom.		
3	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	- Penguatan koordinasi dengan lintas sektor dan Dinas Sosial Provinsi. - Adanya koordinasi yang baik antara penyuluh sosial dan pekerja sosial seluruh Indonesia.		
4	Program Rehabilitasi Sosial	- Adanya dukungan dari BAZNAS yang berkontribusi untuk penanganan klien. - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi SPM sehingga capaian terpantau. - Evaluasi target dilakukan saat APBD Perubahan. - Beberapa mutu layanan melebihi target.		
5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		- Adanya transformasi aplikasi SIKS-NG dari DTKS ke DTSEN sehingga banyak fitur baru harus dikenalkan kepada operator desa. - Perubahan data awal DTKS menjadi DTSEN membuat basis data tidak sama. - Ketidaktercapaian program juga dipengaruhi oleh tidak adanya	

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
			proposal/usulan dari desa maupun kecamatan pada tahap awal perencanaan. - Keterbatasan data sasaran yang akurat. - Koordinasi dengan aparat desa dan RT belum optimal. - Sosialisasi program perlindungan dan jaminan sosial belum merata, baik melalui kelompok KUBE maupun UEP.	
6	Program Penanganan Bencana	- Koordinasi antara TKSK berjalan efektif.		

7.9 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja mencakup urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi yang cukup beragam. Sebagian program telah menunjukkan dukungan yang baik, terutama pada aspek dokumen perencanaan, pendanaan pelatihan, dan dukungan penataan kawasan transmigrasi. Masih ada program yang tertahan oleh keterbatasan waktu pelaksanaan, penyesuaian indikator, serta serapan anggaran yang belum merata.

Tabel 7.10 Faktor Pendorong, Penghambat, dan Permasalahan Realisasi Anggaran pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	- Komitmen dalam pencapaian target kinerja pada program penunjang sesuai dengan yang direncanakan.		- SILPA terjadi pada Sekretariat Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, khususnya Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. - Kondisi ini disebabkan estimasi penganggaran gaji dan tunjangan ASN dari BPKAD lebih besar dari realisasi yang terjadi di perangkat daerah. - Terdapat perbedaan

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
				TMT antara SK PPPK dengan SPMT PPPK.
2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	- Tersedianya Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) yang menjadi acuan dalam pengukuran keberhasilan terkait ketenagakerjaan.		
3	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	- Pendanaan kegiatan pelatihan mendapatkan bantuan pendanaan bankeu dari BLK Provinsi.		- Terdapat SILPA pada Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi. - Dari 8 pelatihan berbasis kompetensi, hanya 4 pelatihan yang dapat dilaksanakan. - Empat pelatihan lainnya tidak dapat dilaksanakan karena kendala waktu pelaksanaan kegiatan.
4	Program Penempatan Tenaga Kerja	- Jumlah usia produktif di Kutai Timur tinggi.		- SILPA pada Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja terjadi karena tidak terlaksananya kegiatan pembuatan batako yang terkendala waktu pelaksanaan kegiatan. - Terdapat sisa kegiatan dan perjalanan dinas karena waktu pelaksanaan tidak mencukupi.
5	Program Hubungan Industrial			- Terjadi SILPA pada Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja.

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
				- Target jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerja rentan ditetapkan 150.000 peserta, namun realisasi per Desember sebanyak 98.000 peserta.
6	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	- Kawasan transmigrasi telah masuk di dalam RTRW Kabupaten Kutai Timur.		
7	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi		- Faktor yang menjadi penghambat capaian pada program ini tahun 2025 disebabkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia belum menerbitkan perhitungan untuk indikator pada tahun ini. - Perhitungan capaian masih menggunakan perhitungan kementerian pada tahun sebelumnya.	

7.10 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencakup program yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, data gender dan anak, pemenuhan hak anak, serta perlindungan khusus anak. Capaian pada beberapa program sudah menunjukkan hasil yang baik. Kendala yang berkaitan dengan kualitas data, koordinasi lintas sektor, dan dinamika kasus di lapangan. Kondisi tersebut turut memengaruhi capaian indikator maupun realisasi anggaran.

Tabel 7.11 Faktor Pendorong, Penghambat, dan Permasalahan Realisasi Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	- Terlaksananya administrasi.		
2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		- Indeks Pemberdayaan Gender merupakan indikator yang diampu lintas sektor oleh beberapa perangkat daerah, dan DP3A bertindak sebagai koordinator.	- Secara umum tidak ada masalah dalam pencairan realisasi anggaran. - Keterlambatan progres capaian pada triwulan I dan II dipengaruhi kebijakan efisiensi sehingga kegiatan menyesuaikan kebijakan tersebut.
3	Program Perlindungan Perempuan		- Adanya peningkatan jumlah kasus, yang dipengaruhi meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait kekerasan dalam rumah tangga sehingga korban berani melaporkan kejadian untuk mendapatkan pendampingan.	- Secara umum tidak ada masalah dalam pencairan realisasi anggaran. - Keterlambatan progres capaian pada triwulan I dan II dipengaruhi kebijakan efisiensi sehingga kegiatan menyesuaikan kebijakan tersebut.
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga		- Indeks Pemberdayaan Gender merupakan indikator yang diampu lintas sektor oleh beberapa perangkat daerah, dan DP3A bertindak sebagai koordinator.	- Secara umum tidak ada masalah dalam pencairan realisasi anggaran. - Keterlambatan progres capaian pada triwulan I dan II dipengaruhi kebijakan efisiensi sehingga kegiatan menyesuaikan kebijakan tersebut.
5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak		- Sebagian petugas pengelola data belum memiliki pemahaman dan keterampilan teknis yang memadai terkait metode pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data pilah gender dan anak sesuai standar yang ditetapkan. - Keterlambatan	- Secara umum tidak ada masalah dalam pencairan realisasi anggaran. - Keterlambatan progres capaian pada triwulan I dan II dipengaruhi kebijakan efisiensi sehingga

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
			pengumpulan data dari perangkat daerah terkait.	kegiatan menyesuaikan kebijakan tersebut.
6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)		- Anak putus sekolah masih tinggi. - Belum ada Perda terkait Kabupaten Layak Anak.	- Secara umum tidak ada masalah dalam pencairan realisasi anggaran. - Keterlambatan progres capaian pada triwulan I dan II dipengaruhi kebijakan efisiensi sehingga kegiatan menyesuaikan kebijakan tersebut.
7	Program Perlindungan Khusus Anak		- Adanya peningkatan jumlah kasus, yang dipengaruhi meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait kekerasan dalam rumah tangga sehingga korban berani melaporkan kejadian untuk mendapatkan pendampingan.	- Secara umum tidak ada masalah dalam pencairan realisasi anggaran. - Keterlambatan progres capaian pada triwulan I dan II dipengaruhi kebijakan efisiensi sehingga kegiatan menyesuaikan kebijakan tersebut.

7.11 Dinas Ketahanan Pangan

Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 pada Dinas Ketahanan Pangan memperlihatkan capaian yang bervariasi antarprogram. Beberapa indikator mampu melampaui target, terutama pada desa yang memiliki lumbung pangan, nilai tukar petani, penguatan cadangan pangan, dan pengawasan keamanan pangan. Di sisi lain, masih ada indikator yang belum mencapai target, terutama pada ketersediaan pangan utama dan skor pola pangan harapan. Perbedaan capaian tersebut menunjukkan bahwa urusan ketahanan pangan sangat dipengaruhi oleh kondisi pasokan, pola konsumsi masyarakat, kualitas data, serta dukungan pelaksanaan program di lapangan.

Tabel 7.12 Faktor Pendorong, Penghambat, dan Permasalahan Realisasi Anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
1	Program Pengelola Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	- Realisasi kinerja tahun 2025 melebihi target RPJMD dan Renstra Dinas. - Terdapat proyeksi pendapatan yang meningkat sehingga	- Realisasi capaian kinerja merupakan realisasi tahun 2024. - Pada tahun 2025 tidak ada peningkatan kinerja	- Rendahnya capaian realisasi anggaran akibat tidak tersedianya Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan lanjutan

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
		dilakukan perubahan target. - Proposal yang diajukan memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku.	dibanding tahun lalu. - Tidak terpenuhinya pejabat pembuat komitmen dalam pelaksanaan kegiatan.	rice processing unit (RPU).
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	- Tingginya rata-rata nilai tukar petani disebabkan nilai perolehan petani lebih tinggi dibanding nilai pengeluaran, terutama pada komoditas perkebunan. - Realisasi pengadaan cadangan pangan merupakan hasil pengurangan stok tahun 2024 akibat penyaluran cadangan pangan pada daerah rawan pangan ataupun bencana alam tahun 2025. - Skor pola pangan harapan tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik meski belum mencapai nilai maksimal 100 poin. - Meningkatnya kualitas pengetahuan konsumsi pangan masyarakat akan pangan yang bergizi, beragam, dan seimbang.	- Rendahnya realisasi ketersediaan pangan utama (beras) karena masih bergantung pada impor. - Produktivitas padi meningkat dibanding tahun lalu, tetapi belum mencukupi kebutuhan pangan wilayah. - Pola konsumsi pangan masyarakat belum beragam, terutama konsumsi sayur dan buah belum optimal.	- Terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan akibat tidak tersedianya pejabat pembuat komitmen. - Proses administrasi terlambat, termasuk SK penerima manfaat.
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	- Hasil analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan (FSVA) tahun 2024 menunjukkan daerah rawan pangan di Kabupaten Kutai Timur hanya terdapat 1 desa, yaitu Desa Himba Lestari Kecamatan Batu Ampar. - Penanganan daerah rawan pangan dapat dilakukan karena	- Penanganan daerah rawan pangan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan pangan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan. - Faktor-faktor tersebut bersifat fluktuatif. - Penanganan	- Secara keseluruhan realisasi anggaran menunjukkan kinerja yang baik. - Terdapat SILPA anggaran dari perjalanan dinas.

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
		Kabupaten Kutai Timur memiliki cadangan pangan daerah.	melibatkan lintas perangkat daerah.	
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	- Tingginya capaian kinerja didukung oleh kegiatan sosialisasi keamanan pangan. - Dilakukan rapid test secara berkala. - Hasil uji pangan segar menunjukkan 98,51% bebas pestisida dan logam berat. - Terbangun jejaring keamanan pangan dari tingkat produsen.	- Kurangnya pengawasan terkait pangan segar asal tumbuhan yang diimpor dari daerah lain. - Minimnya pengetahuan SDM dalam penggunaan pestisida pada pangan segar asal tumbuhan di tingkat petani.	- Secara keseluruhan realisasi anggaran menunjukkan kinerja yang baik. - Terdapat SILPA anggaran dari jasa laboratorium, yang seharusnya 2 kali hanya 1 kali, serta SILPA perjalanan dinas.
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			- Terdapat SILPA 1 kali dari sisa perjalanan dinas.

7.12 Dinas Perhubungan

Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 pada Dinas Perhubungan mencakup urusan penunjang, lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengelolaan pelayaran. Capaian kinerja pada sebagian indikator menunjukkan hasil yang baik, terutama pada pelayanan perkantoran dan pengelolaan pelabuhan. Target yang belum terpenuhi pada pengujian kendaraan bermotor di wilayah kecamatan dan pemenuhan target terminal tipe C. Kinerja urusan perhubungan sangat dipengaruhi oleh regulasi teknis, kesiapan sarana operasional, dan proses pengadaan lahan maupun aset pendukung.

Tabel 7.13 Faktor Pendorong, Penghambat, dan Permasalahan Realisasi Anggaran pada Dinas Perhubungan

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	- Dilakukan analisa kebutuhan anggaran belanja pegawai (gaji dan TPP) berdasarkan analisis jabatan.	- Pada saat penyusunan anggaran, gaji PPPK gelombang pertama dianggarkan per Januari, baik gaji maupun TPP. - SK PPPK ternyata terhitung mulai bulan Mei 2025.	

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	- Akan dilakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait regulasi pengujian kendaraan bermotor. - Banyak kendaraan wajib uji berada di kecamatan sehingga UPT PKB melakukan metode jemput bola melalui operasi lapangan. - Dilakukan sosialisasi kepada pemilik kendaraan yang memiliki permasalahan Over Dimension Over Load (ODOL).	- Kendaraan uji KIR keliling belum dapat dioperasikan karena masih menunggu penetapan SK dari Kementerian Perhubungan. - Uji KIR di kecamatan belum dapat dilakukan. - Adanya regulasi terkait ODOL sehingga banyak kendaraan wajib uji tidak lulus uji KIR.	
3	Program Pengelolaan Pelayaran	- Akan dilakukan proses kajian dan perencanaan pengadaan lahan ulang terminal tipe C di Kecamatan Sangatta Utara.	- Sampai akhir tahun 2025 target jumlah terminal tipe C tidak dapat terpenuhi. - Target 6 unit terminal hanya tercapai 5 unit. - Keterlambatan pembayaran Pajak PNBPN oleh pemilik lahan pada tahun 2024 menyebabkan BPN tidak dapat menerbitkan peta bidang tanah. - Ganti rugi lahan oleh Dinas Perhubungan baru dapat dilakukan setelah ada peta bidang tanah. - Pada tahun 2025 belum bisa dianggarkan ulang karena adanya instruksi efisiensi anggaran.	

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan			- Selisih anggaran gaji muncul karena penganggaran PPPK tidak sesuai dengan TMT riil.
5	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)			- Belum ada permasalahan realisasi anggaran yang dirinci secara khusus pada tabel, tetapi terdapat keterbatasan operasional akibat belum berfungsinya kendaraan uji KIR keliling.
6	Program Pengelolaan Pelayaran			- Belum ada permasalahan realisasi anggaran yang dirinci secara khusus pada tabel, tetapi target pelayaran belum terpenuhi karena proses pengadaan lahan dan peta bidang tanah belum selesai.

7.13 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik

Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik mencakup urusan penunjang, komunikasi publik, aplikasi informatika, statistik sektoral, dan persandian. Sebagian besar indikator menunjukkan capaian yang baik. Beberapa bahkan melampaui target. Program masih menghadapi kendala pada aspek SDM, ketepatan jadwal, kualitas data, dan proses pengadaan barang dan jasa. Kondisi ini berpengaruh pada capaian kinerja maupun realisasi anggaran.

Tabel 7.14 Faktor Pendorong, Penghambat, dan Permasalahan Realisasi Anggaran pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	- Mengajukan penambahan staf di sub bagian umum Dinas Kominfo untuk		- Sisa anggaran gaji. - Sisa tagihan listrik videotron.

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
		SDM teknis di Diskominfo Staper.		
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	- Akan menambah SDM untuk melakukan peliputan dan melakukan sosialisasi ke masyarakat.	- Banyaknya waktu peliputan secara bersamaan serta sumber daya yang terbatas. - Belum maksimalnya pemanfaatan permohonan informasi oleh masyarakat.	- Waktu pelaksanaan yang singkat. - Proses negosiasi antara pihak ketiga dan pejabat pengadaan. - Adanya perubahan regulasi Peraturan Bupati.
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	- Adanya penambahan area pelayanan telekomunikasi.	- Jadwal pelaksanaan yang direncanakan tidak sesuai. - Proses belanja barang terlalu singkat. - Pengiriman terlambat karena faktor alam/cuaca. - Pemasangan perangkat belum sesuai target yang telah ditetapkan.	- Direncanakan ada ODOOS untuk kebutuhan 5 GB, namun pelaksanaan efektif hanya 5–6 bulan karena ABT berjalan pada bulan Oktober sehingga tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakan. - Sisa anggaran pergeseran ke sub kegiatan lain. - Efisiensi penggunaan anggaran dari proses negosiasi pada tahap belanja barang.
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	- Adanya forum satu data Kutai Timur sebagai komunikasi pengelolaan data.	- Keterlambatan pengumpulan data oleh produsen data.	- Untuk merealisasikan anggaran sesuai pagu, waktu yang tersedia tidak mencukupi untuk menggunakan metode pengadaan/seleksi.
5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	- Adanya penerapan transformasi digital di pemerintah daerah.	- Kurangnya SDM yang membidangi persandian.	- Terjadinya SILPA disebabkan adanya penyesuaian kegiatan.

7.14 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pelaksanaan RKPd Tahun 2025 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mencakup urusan koperasi, pemberdayaan UMKM, pengembangan UMKM, pendidikan perkoperasian, dan perlindungan koperasi. Secara umum, sebagian besar indikator menunjukkan capaian yang baik. Beberapa program bahkan melampaui target. Target yang belum tercapai pada penilaian kesehatan KSP/USP dan fasilitasi

UMKM tertentu. Hambatan yang muncul juga menunjukkan bahwa kualitas data, akses wilayah, literasi digital, dan keterbatasan anggaran masih menjadi faktor penting dalam pelaksanaan program.

Tabel 7.15 Faktor Pendorong, Penghambat, dan Permasalahan Realisasi Anggaran pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi			
2	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP			
3	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian			
4	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi			
5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)			
6	Program Pengembangan UMKM		- Pendampingan UMKM, khusus produk ekspor, tidak dapat dilaksanakan karena belum terdapat pemesanan dari luar negeri.	- Minimnya anggaran yang diberikan sehingga beberapa tahapan dan kegiatan tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

7.15 Dinas Perikanan

Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 pada Dinas Perikanan mencakup urusan penunjang, perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Secara umum, capaian pada sebagian indikator sudah baik. Produksi perikanan tangkap dan budidaya melampaui target. Di sisi lain, masih ada indikator yang belum tercapai, terutama pada bantuan kelompok penangkap ikan, jumlah jenis benih unggul, dan konsumsi perikanan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kinerja sektor perikanan sangat dipengaruhi oleh kebijakan anggaran, ketersediaan sarana, dan perubahan metode pengukuran.

Tabel 7.16 Faktor Pendorong, Penghambat, dan Permasalahan Realisasi Anggaran pada Dinas Perikanan

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			- Selisih penganggaran gaji ASN. - Selisih nilai kontrak. - Beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana karena keterbatasan waktu pelaksanaan.
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	- Terdapat penambahan Rumah Tangga Perikanan (RTP) pada perikanan tangkap sehingga partisipasi masyarakat dalam usaha perikanan tangkap meningkat. - Penguatan SDM nelayan melalui kegiatan pengembangan kapasitas nelayan.	- Perubahan kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan sub kegiatan bantuan sarana prasarana untuk nelayan ditiadakan. - Penyesuaian dilakukan agar program yang lebih prioritas tetap berjalan dengan baik.	- Keterbatasan waktu pelaksanaan. - Terdapat selisih sisa anggaran yang tidak dapat terserap.
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	- Terdapat penambahan Rumah Tangga Perikanan (RTP) pada perikanan budidaya sehingga partisipasi masyarakat dalam usaha perikanan budidaya meningkat. - Penguatan pendampingan teknis. - Optimalisasi bantuan sarana dan prasarana.	- Terbatasnya ketersediaan benih bibit unggul berkualitas, terutama pada musim tertentu. - Ketidaksesuaian benih/bibit unggul dengan kondisi lingkungan lokal. - Kualitas air kurang baik. - Serangan penyakit atau perubahan cuaca yang ekstrem.	- Efisiensi harga kontrak.
4	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			
5	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		- Perubahan perhitungan berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2025. - Sebelumnya	

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
			menggunakan metode $AKI\ A + AKI\ B + AKI\ C = AKI\ Final.$ - Tahun 2025 perhitungan hanya menggunakan AKI A, yaitu konsumsi ikan di dalam rumah tangga (KIDRT).	

7.16 Dinas Pariwisata

Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 pada Dinas Pariwisata mencakup urusan penunjang, daya tarik destinasi, pemasaran pariwisata, ekonomi kreatif, serta pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif. Capaian pada beberapa program menunjukkan hasil yang baik, terutama pada pemasaran pariwisata dan pelaksanaan event ekonomi kreatif. Jumlah objek destinasi wisata dan jumlah pelaku pariwisata serta ekonomi kreatif yang terlibat belum tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja sektor pariwisata tidak hanya ditentukan oleh kegiatan promosi, tetapi juga oleh kesiapan lokasi, kualitas SDM, dan pemetaan subsektor ekonomi kreatif.

Tabel 7.17 Faktor Pendorong, Penghambat, dan Permasalahan Realisasi Anggaran pada Dinas Pariwisata

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	- Peningkatan sarana dan prasarana di objek wisata. - Peningkatan pengelolaan pada objek wisata.		
3	Program Pemasaran Pariwisata	- Kolaborasi dengan OPD terkait. - Pelaksanaan program melebihi target tahunan.		
4	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan	- Terlaksananya event pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai sarana bagi pelaku ekraf dalam	- Belum teridentifikasinya lokasi ekonomi kreatif	

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
	dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	menunjang perputaran perekonomian.	yang sesuai dengan 17 subsektor.	
5	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	- Adanya pembinaan dan pelatihan yang dihadiri oleh pemuda-pemudi pokdarwis. - Koordinasi berjalan baik.	- Masih terbatasnya SDM dalam pengelolaan kepariwisataan.	

7.17 Dinas Perkebunan

Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 pada Dinas Perkebunan mencakup urusan sarana, prasarana, pengendalian bencana pertanian, perizinan usaha pertanian, penyuluhan pertanian, serta program penunjang. Sebagian indikator menunjukkan capaian yang baik, terutama pada pengendalian bencana pertanian, perizinan usaha, dan layanan administrasi perkantoran. Di sisi lain, masih ada indikator yang tertahan, terutama pada produksi, produktivitas, penyediaan prasarana, dan peningkatan SDM. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja sektor perkebunan sangat dipengaruhi oleh validitas data, kesiapan lahan, dukungan regulasi, kapasitas SDM, dan efisiensi anggaran.

Tabel 7.18 Faktor Pendorong, Penghambat, dan Permasalahan Realisasi Anggaran pada Dinas Perkebunan

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	- Usulan masyarakat dalam permohonan bantuan saprodi yang berkualitas sehingga tercipta efisiensi dan efektivitas dalam pemberian bantuan kepada petani pekebun. - Penerima bantuan merupakan kelompok tani yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan masuk dalam SIMLUHTAN. - Dinas Perkebunan melakukan intervensi terintegrasi melalui pengadaan sarana pendukung pasca panen, peningkatan kapasitas SDM, fasilitasi promosi, dan pameran produk	- Produksi komoditi perkebunan masih bersifat indikatif/ sementara karena banyak laporan semester IV dari PBS belum masuk, serta produksi pabrik CPO/PKO belum seluruhnya dilaporkan. - Produktivitas komoditi perkebunan masih menunggu laporan dari pabrik CPO untuk jumlah TBS yang diolah. - Status lahan dan ketersediaan lahan menjadi kendala pada pengadaan bibit kopi dan kakao. - Permasalahan pasca	

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
		perkebunan. - Fokus utama diarahkan pada komoditas unggulan daerah, yaitu karet, kakao, dan aren. - Dinas Perkebunan mempersiapkan sumber benih tanaman aren genjah Kutai Timur untuk menjadi sentra produksi dan sumber benih.	panen meliputi rendahnya kualitas hasil, keterbatasan sarana pengolahan, kurangnya pemahaman pekebun, keterbatasan akses pasar, kemasan produk belum standar, dan minim promosi. - Pada pembangunan kebun induk aren genjah terdapat kendala rona awal lahan berupa semak, lokasi di puncak perbukitan, tanah kering, sulit air, pertumbuhan tanaman tidak seragam, banyak tanaman mati, serta gangguan gulma.	
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	- Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan usaha tani diarahkan untuk memperlancar pengangkutan hasil TBS kelapa sawit, mobilisasi saprodi dan alsintan, serta menekan biaya transportasi produksi. - Pemenuhan data yang memadai dan terintegrasi dipandang penting untuk mendukung program ketahanan pangan dan peningkatan produksi. - Kebutuhan basis data lengkap dinilai penting untuk mendukung sertifikasi ISPO/RSPO, STDB $\leq$ 25 Ha, dan PSR.	- Peningkatan jalan usaha tani tidak dapat direalisasikan karena ketersediaan waktu pengadaan tidak mencukupi. - DPA Perubahan baru disahkan di akhir Oktober sehingga waktu pelaksanaan terlalu singkat dan belum ada perencanaan. - Ada instruksi batas akhir proses pengadaan barang/jasa sehingga kegiatan tidak dapat dijalankan. - Kurangnya data spasial lahan pekebun memperlambat pendataan. - Akses jalan ke wilayah kecamatan banyak yang rusak. - Sebagian lahan pekebun berada di dalam kawasan kehutanan maupun izin perkebunan. - Petugas pendamping	

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
			belum maksimal dalam penginputan data pada proses pengolahan peta komoditas.	
3	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	- Dinas Perkebunan melakukan percepatan penyusunan RPP ANKT di luar izin usaha perkebunan. - Upaya peningkatan kompetensi dan kapasitas petugas ANKT terus dilakukan. - Pengembangan SOP pemantauan ANKT di PBS maupun di luar PBS terus didorong. - Dilakukan upaya penyelesaian konflik melalui koordinasi lintas instansi dan percepatan pembentukan tim penyelesaian konflik. - Peran mitra pembangunan dinilai signifikan dalam dukungan teknis, pendanaan, fasilitasi program strategis, peningkatan SDM, penguatan regulasi, dan pendampingan masyarakat perkebunan.	- Belum adanya SOP untuk pemantauan Area dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT). - Kompetensi dan kapasitas petugas ANKT masih rendah. - Belum ada toolkit baku untuk monitoring dan evaluasi pengelolaan ANKT di PBS. - Penyusunan RPP ANKT untuk area di luar izin usaha perkebunan belum selesai. - Pelaporan dan pengiriman data dari PBS lambat. - Sarana pemantauan lapangan masih kurang. - Konflik dan gangguan usaha perkebunan bersifat multidimensi dan tidak dapat diselesaikan secara parsial. - Belum ada SOP yang jelas untuk penyelesaian konflik. - Tim penyelesaian konflik belum ditetapkan secara hukum tetap. - Belum semua PBS bermitra dan melakukan MoU dengan masyarakat sekitar untuk pembentukan Kelompok Tani Peduli Api (KTPA).	
4	Program Perizinan Usaha Pertanian	- Penyusunan skala prioritas berbasis efisiensi untuk klasifikasi perusahaan berdasarkan tingkat urgensi. - Digitalisasi pelaporan awal melalui self-	- Terdapat diskrepansi antara luasan dalam IUP dengan pemanfaatan lahan di lapangan. - Memerlukan dukungan regulasi dan pedoman yang lebih tegas.	

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
		assessment. - Penyusunan jadwal cadangan untuk mengakomodasi tugas-tugas lapangan. - Pembentukan tim kerja untuk percepatan pembangunan perkebunan dan penyelesaian permasalahan/konflik usaha perkebunan.	- Keterbatasan pagu anggaran akibat efisiensi menyebabkan beberapa agenda lapangan tidak berjalan sesuai jadwal. - Keterbatasan SDM dan minimnya anggaran pada APBD. - Rendahnya kepatuhan pelaku usaha. - Data perizinan belum terintegrasi. - Koordinasi lintas sektor masih lemah. - Banyak konflik di masyarakat. - Dinamika regulasi perizinan terus berubah.	
5	Program Penyuluhan Pertanian	- Jumlah kelompok tani dan petani pada sektor perkebunan cukup besar sehingga memberi dasar yang kuat bagi peningkatan kapasitas dan keterampilan kelompok tani dan penyuluh lapangan.	- Efisiensi anggaran menyebabkan bimbingan teknis untuk kelompok tani tidak berjalan sesuai rencana.	
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			- Tidak ada.

7.18 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pelaksanaan RKPd Tahun 2025 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan mencakup urusan perdagangan dan perindustrian. Capaian pada beberapa program menunjukkan hasil yang baik, terutama pada stabilisasi harga, perlindungan konsumen, dan pertumbuhan industri. Pengembangan ekspor dan sebagian layanan yang bergantung pada kesiapan data, akses wilayah, serta dukungan anggaran belum tercapai, yang menunjukkan bahwa kinerja sektor perdagangan dan perindustrian sangat dipengaruhi oleh kualitas koordinasi lapangan, literasi pelaku usaha, dan kecukupan dukungan operasional.

Tabel 7.19 Faktor Pendorong, Penghambat, dan Permasalahan Realisasi Anggaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
1	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan		- Target penerbitan rekomendasi izin tidak tercapai karena saat ini perizinan melalui OSS berada pada Dinas DPMPTSP. - Dinas Perindag hanya mengeluarkan rekomendasi sesuai regulasi.	
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	- Kinerja sangat memuaskan dengan realisasi operasi pasar mencapai 300 persen dari target. - Hal ini didorong oleh tingginya kebutuhan masyarakat terhadap stabilitas harga. - Koordinasi berjalan baik. - Optimalisasi dan efisiensi anggaran sangat tinggi.	- Capaian jumlah pasar belum memenuhi target. - Terdapat kendala teknis pelaksanaan di lapangan. - Masyarakat masih menggunakan pasar tradisional sesuai embrionya.	
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting			
4	Program Pengembangan Ekspor	- Pemerintah kecamatan dan pemerintah desa siap bekerja sama untuk mendukung pengembangan UMKM berkelanjutan untuk ekspor.	- Jumlah UMKM tidak seluruhnya terdata karena lokasi jauh dan medannya sulit ditempuh sehingga memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang cukup. - Sebagian UMKM berada di wilayah yang tidak terjangkau	- Minim anggaran yang diberikan sehingga beberapa tahapan dan kegiatan tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
			internet sehingga informasi yang diterima kurang maksimal. - Masih terdapat pelaku IKM yang memiliki keterbatasan literasi digital. - Kendala jaringan internet di beberapa kecamatan belum memadai.	
5	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	- Ditunjang oleh kualitas SDM yang loyal, berkomitmen, dan kompeten dalam pelayanan tera/tera ulang. - Ditunjang oleh ketersediaan alat standar metrologi yang sudah diverifikasi.		
6	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	- Kemudahan akses yang diberikan oleh instansi pembina kepada pelaku usaha. - Kemudahan mendapatkan NIB melalui sistem yang semakin terintegrasi. - Adanya bimbingan teknis yang tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga pada legalitas seperti PIRT dan halal. - Pemanfaatan marketplace dan media sosial memudahkan IKM baru untuk langsung		

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
		memasarkan produk.		
7	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota			
8	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional		- Ketidadaan dukungan anggaran menyebabkan sosialisasi sangat terbatas. - Tidak ada insentif data yang cukup untuk mendorong IKM mengisi sistem. - Banyak pelaku IKM masih memiliki keterbatasan kompetensi digital. - Tidak semua IKM memiliki perangkat yang memadai untuk mengunggah dokumen legalitas. - Tim lapangan merangkap tugas lain tanpa biaya operasional khusus.	

7.19 Sekretariat Daerah

Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 pada Sekretariat Daerah mencakup program penunjang urusan pemerintahan daerah, program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, serta program perekonomian dan pembangunan. Secara umum, capaian kinerja pada ketiga program tersebut tergolong baik. Bahkan, beberapa indikator melampaui target. Masih ada kendala pada aspek administrasi, kualitas perencanaan, integrasi data, dan ketepatan penganggaran. Kondisi ini memengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran pada beberapa bagian.

Tabel 7.20 Faktor Pendorong, Penghambat, dan Permasalahan Realisasi Anggaran pada Sekretariat Daerah

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	- Pembagian KUA PPAS, penyusunan RKA, dan asistensi mengikuti jadwal yang	- Proses penyusunan dan penerbitan dokumen RKA serta	- Terdapat perbedaan penetapan SPMT terhitung mulai 1 Mei 2025 dengan perencanaan anggaran

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
	Daerah Kabupaten/Kota	telah ditentukan. - Seluruh elemen yang terlibat berada dalam satu tempat yang sama. - Perencanaan dibuat lebih tepat dan terukur serta menyesuaikan efisiensi anggaran. - Terdapat surat edaran Sekretaris Daerah tentang percepatan penginputan RUP. - Pendampingan dilakukan secara intensif ke seluruh bagian di lingkungan Sekretariat Daerah. - Monitoring, evaluasi, dan koordinasi dilakukan secara berkala sampai penyusunan SOP. - Bagian Organisasi membuat aplikasi SKM Online agar semua SKM unit kerja dapat dimonitor.	DPA sering terlambat. - Adanya ketentuan dan peraturan yang berlaku membuat pelaksanaan kegiatan menjadi terbatas. - Penginputan RUP tidak tepat waktu. - SDM pengadaan barang dan jasa yang tersertifikasi masih rendah. - Tenaga perancang peraturan perundang-undangan masih kurang. - Masih terdapat perangkat daerah yang belum optimal dalam penilaian mandiri kematangan organisasi daerah. - Survei kepuasan masyarakat masih dilakukan secara manual sehingga lokusnya terbatas.	karena penetapan SK pengangkatan PPPK terhitung mulai 1 Maret 2025. - Kondisi ini menimbulkan SILPA yang besar pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	- Terdapat pendelegasian kewenangan untuk pemberian insentif kepada pemuka agama ke Bagian Kesra sehingga menambah capaian indikator pemuka agama yang menerima insentif. - Program pemberian beasiswa Kutai Timur dianggap efektif dalam meningkatkan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.	- Permintaan untuk menjadi penerima insentif pemuka agama meningkat setiap tahun, sementara alokasi anggaran tetap dan tidak meningkat. - Festival keagamaan belum dapat dilaksanakan karena masih memerlukan kajian, perencanaan yang baik, dan dukungan anggaran yang memadai. - Website beasiswa Kutai Timur masih	- Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat terdapat beberapa lembaga dan organisasi masyarakat yang mengusulkan hibah, tetapi tidak tersalurkan karena tidak memenuhi persyaratan administrasi atau belum melaksanakan kewajiban, sehingga penyaluran hibah tidak terserap 100 persen sesuai rencana.

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
			kurang memadai dan beberapa fitur belum diperbarui. - Pemahaman penyusun dalam penentuan target masih kurang sehingga capaian SPM belum terealisasi 100 persen. - Terdapat perbedaan pemahaman terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK). - Penilaian LPPD tahun 2024 masih dalam proses, sehingga capaian yang digunakan masih hasil penilaian tahun 2022.	
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	- Peningkatan penerapan tata kelola yang baik dan penguatan GCG pada BUMD serta pengelolaan BLUD berbasis kinerja dan pelayanan. - Pengembangan basis data ketersediaan dan distribusi komoditas melalui integrasi data lintas OPD dan instansi terkait. - Terdapat surat edaran Sekretaris Daerah tentang percepatan penginputan RUP. - Lokasi kegiatan dan perencanaan ditentukan pada tahun N-1 kegiatan.	- Penerapan tata kelola perusahaan dan layanan belum optimal, sehingga prinsip good corporate governance dan good governance BLUD belum sepenuhnya diterapkan. - Data ketersediaan dan distribusi komoditas belum terintegrasi sehingga menyulitkan pemetaan potensi kelangkaan dan gejolak harga. - Penginputan RUP tidak tepat waktu. - Cascading serta lokasi kegiatan baru disurvei pada tahun	- Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdapat honorarium perangkat UKPBJ yang tidak ditagihkan sebagai tindak lanjut hasil rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan.

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
			berjalan sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan.	

7.20 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menunjukkan capaian yang relatif baik pada urusan kepegawaian, pengembangan kapasitas aparatur, dan layanan penunjang perangkat daerah. Sebagian besar indikator mencapai target, bahkan ada yang melampaui target secara signifikan. Kendala pada peningkatan kapasitas ASN yang berkaitan dengan keterbatasan anggaran. Dari sisi anggaran, persoalan yang paling menonjol berada pada belanja pegawai, khususnya akibat perbedaan waktu penetapan administrasi kepegawaian.

Tabel 7.21 Faktor Pendorong, Penghambat, dan Permasalahan Realisasi Anggaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
1	Kepegawaian Daerah	- Capaian kinerja melebihi target karena menindaklanjuti Surat Keputusan Menpan RB terkait mekanisme pengangkatan PPPK dengan jumlah SK PPPK 4.316 orang. - Didukung oleh SK pensiun, SK kenaikan pangkat, SK mutasi, SK pelantikan, dan SK hukuman disiplin.		- Tidak ada permasalahan, realisasi anggaran mencapai 92 persen.
2	Pengembangan Sumber Daya Manusia	- Alokasi pendanaan yang merata di seluruh perangkat daerah pada kegiatan peningkatan kapasitas ASN.	- Belum seluruh ASN mendapatkan fasilitasi untuk peningkatan kapasitas karena ketersediaan anggaran masih terbatas. - Sesuai peraturan, seluruh ASN wajib mendapatkan kapasitas 20 JP per tahun.	- Tidak ada permasalahan, realisasi anggaran mencapai 97 persen.
3	Program Penunjang Urusan	- Komitmen bersama dalam pencapaian target		- Perbedaan TMT SK PPPK dengan TMT

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	kinerja pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.		SPMT PPPK mengakibatkan adanya SILPA yang sangat besar.

7.21 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mencakup urusan penunjang, penataan desa, kerja sama desa, administrasi pemerintahan desa, serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat. Capaian kinerja pada beberapa program menunjukkan hasil yang baik. Program tertahan oleh keterbatasan kapasitas SDM, lemahnya pemahaman desa, dan terbatasnya waktu pelaksanaan kegiatan. Kondisi ini ikut memengaruhi realisasi anggaran pada sebagian program.

Tabel 7.22 Faktor Pendorong, Penghambat, dan Permasalahan Realisasi Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	- Komitmen bersama dan koordinasi yang baik dari masing-masing subbidang, yaitu keuangan, perencanaan, dan umum, untuk mewujudkan target kinerja.	- Beban kerja yang tinggi. - Kurangnya pemahaman SDM tentang pencapaian target kinerja.	- Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan. - Terdapat selisih SHS dengan harga riil. - Penyesuaian belanja berdasarkan Perpres 72 Tahun 2015. - Perbedaan perhitungan gaji dan tunjangan CPNS antara DPMD dengan BPKAD.
2	Program Penataan Desa	- Komitmen bersama dari pemerintah daerah maupun pemerintah desa dalam pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran agar berjalan dengan baik.	- Masih rendahnya kompetensi SDM dalam memetakan potensi desa. - Kurangnya koordinasi dengan desa. - Masih ada desa yang akses jalannya tidak mudah dijangkau.	- Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan. - Tidak terlaksananya presentasi 11 desa persiapan di Kemendagri.
3	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	- Adanya dukungan anggaran untuk pelaksanaan	- Belum adanya regulasi/Perbup yang mengatur tentang kerja sama desa.	- Keterbatasan waktu pelaksanaan.

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
		sosialisasi tentang kerja sama desa.	- Belum adanya pemahaman desa dalam memetakan potensi desa. - Kurangnya pemahaman pemerintah desa tentang manfaat kerja sama desa. - Kurangnya monitoring dan evaluasi dari pemerintah daerah terkait potensi kerja sama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga.	
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	- Komitmen bersama antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan BPD untuk memajukan BUMDes. - Dukungan anggaran dari pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam peningkatan kapasitas pengelola BUMDes.	- Masih rendahnya kapasitas SDM pengelola BUMDes. - Kurangnya pemahaman pengelola BUMDes dalam menetapkan jenis usaha. - Kurangnya pemahaman pengelola BUMDes dalam tata kelola dan manajemen pengelolaan BUMDes. - Masih rendahnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes. - Kurangnya inovasi pengelola BUMDes dalam pengembangan usaha.	- Terdapat SILPA atas perbedaan tagihan jaminan sosial perangkat desa dengan alokasi pagu anggaran. - Terdapat selisih anggaran bimtek karena perbedaan jumlah peserta yang mendaftar dengan yang hadir. - Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan.
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	- Partisipasi lembaga dalam meningkatkan keterlibatan warga pada perencanaan pembangunan melalui musrenbang. - Kelengkapan update data LKD Tahun 2025	- Masih kurangnya pemahaman pemerintah desa dalam pengelolaan LKD sehingga menjadi hambatan dalam menjalankan program.	- Keterbatasan waktu dalam pelaksanaan kegiatan. - Terdapat selisih SHS untuk pengadaan seminar kit dan fotokopi.

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
		yang menjadi aktif. - Koordinasi yang baik dengan pemerintah desa dan LKD untuk mewujudkan target kinerja.		

7.22 Dinas Pertanahan

Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 pada Dinas Pertanahan mencakup urusan penunjang, pengelolaan tanah kosong, penyelesaian sengketa tanah garapan, penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, penetapan tanah ulayat, serta penatagunaan tanah. Secara umum, sebagian besar indikator mencapai target. Pelaksanaan program masih menghadapi kendala pada aspek kelengkapan dokumen, kejelasan batas tanah, kepastian hukum, dan perubahan regulasi. Kondisi tersebut juga memengaruhi realisasi anggaran pada beberapa program.

Tabel 7.23 Faktor Pendorong, Penghambat, dan Permasalahan Realisasi Anggaran pada Dinas Pertanahan

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	- Tercapainya target realisasi pada program dan keuangan.	- Kegiatan aset daerah terkendala oleh kuantitas SDM yang tidak sesuai dengan tupoksi.	- Adanya SILPA kegiatan.
2	Program Pengelolaan Tanah Kosong	- Tercapai.	- Belum jelasnya peraturan/regulasi terkait tanah kosong.	- Adanya SILPA kegiatan karena adanya penambahan anggaran dari program FCPF yang tidak terserap akibat keterbatasan waktu.
3	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	- Tercapai.	- Kurangnya dokumen dari kedua belah pihak, baik pihak pengadu maupun pihak yang diadukan. - Batas-batas tanah pada areal yang diklaim belum jelas. - Terdapat tumpang tindih klaim lahan pada areal yang sudah bersertifikat/HGU perusahaan. - Terdapat aduan	

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
			masyarakat pada areal yang sedang berproses di pengadilan dengan objek yang sama.	
4	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	- Program masuk dalam RPJMD. - Program dilaksanakan untuk mendukung kebutuhan perencanaan dari masing-masing OPD/pemanaft lahan.	- Data pendukung hutang lahan belum memadai/lengkap. - Terdapat perubahan regulasi. - Adanya gugatan hukum sehingga perlu identifikasi dan telaah kembali terhadap utang pemerintah.	- Terdapat harga satuan tanah yang tidak dapat diserap maksimal untuk penyelesaian ganti kerugian dalam rangka pengadaan lahan milik pemerintah dari hasil penilaian tim appraisal. - Masih terdapat utang lahan pemerintah yang belum dapat diselesaikan pembayarannya karena dokumen kelengkapan pendukung tidak tersedia sehingga tidak sesuai dengan mekanisme aturan penyelesaian pembayaran utang.
5	Program Penetapan Tanah Ulayat	- Program telah masuk ke dalam RPJMD. - Pengakuan tanah ulayat secara hukum.	- Belum jelasnya batas wilayah adat. - Proses penetapan tanah ulayat merupakan kewenangan Kementerian ATR/BPN. - Proses penetapan tanah ulayat harus melalui penetapan masyarakat hukum adat terlebih dahulu setelah verifikasi dan validasi panitia masyarakat hukum adat.	- Adanya penambahan anggaran dari program FCPF di bulan Oktober yang tidak terserap maksimal karena keterbatasan waktu. - Nilai pagu untuk mendukung kegiatan sangat terbatas. - Efisiensi anggaran menyebabkan perubahan pagu berkali-kali.
6	Program Penatagunaan Tanah	- Program telah masuk ke dalam RPJMD. - Program bermanfaat sebagai data pendukung RTRW. - Membantu tertib administrasi pertanahan untuk mendukung	- Penatagunaan tanah belum sesuai dengan RTRW dan pemanfaatan ruang. - Belum adanya status hukum yang jelas terhadap tanah. - Tumpang tindih penggunaan tanah dengan perizinan.	- Nilai pagu untuk mendukung kegiatan sangat terbatas. - Efisiensi anggaran menyebabkan perubahan pagu berkali-kali.

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
		kepastian hukum status atas tanah.		

7.23 Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 7.24 Faktor Pendorong, Penghambat, dan Permasalahan Realisasi Anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	- Terjalannya kerja sama dan koordinasi tim yang baik sehingga target kinerja dapat direalisasikan. - Tersedianya tenaga staf yang terampil dan profesional. - Ketersediaan SDM yang memadai, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi. - Dukungan anggaran APBD menunjang kelancaran operasional perkantoran dan administrasi internal. - Sarana dan prasarana perkantoran memadai. - Komitmen pimpinan serta koordinasi internal antarunit kerja mendukung pencapaian kinerja. - Koordinasi antarunit kerja mempermudah identifikasi kebutuhan dan pengendalian pelaksanaan jasa penunjang. - Tersedianya penyedia layanan resmi, seperti PDAM, mendukung keberlangsungan layanan dasar perkantoran. - Komunikasi yang baik dengan penyedia layanan	- Kompetensi SDM dalam penyusunan dokumen Renstra masih belum optimal. - Terjadi perubahan pagu anggaran pada dokumen RPJMD sehingga perlu penginputan ulang berulang pada SIPD Renstra, termasuk perubahan indikator program dan target kinerja. - Anggaran menjadi nihil pada kegiatan tertentu karena kebijakan efisiensi anggaran. - Sebagian Barang Milik Daerah sudah berusia teknis lanjut atau mengalami kerusakan sehingga memerlukan biaya dan penanganan khusus yang lebih besar.	

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
		mempermudah penanganan gangguan layanan. - Tersedianya alokasi anggaran yang memadai untuk pemeliharaan rutin dan berkala Barang Milik Daerah.		
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	- Tersedianya data yang memadai sebagai dasar penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah dan KLHS RDTR Sangkulirang. - Terjalinnya koordinasi yang baik antarinstansi terkait. - Kerja sama tim penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah berjalan solid dan efektif. - Kerja sama tim penyusun KLHS RDTR Sangkulirang berjalan solid dan efektif.		
3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	- Capaian nilai Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara melampaui target sehingga memberi kontribusi terhadap peningkatan IKLH. - Penerapan metode perhitungan IKLH terbaru. - Periode pengambilan sampel air lebih representatif. - Koordinasi tim berjalan baik.		
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	- Koordinasi lintas sektor berjalan baik dalam pemutakhiran dan validasi data pendukung. - Peran aktif masyarakat mendukung pelestarian ekosistem dan		

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
		keanekaragaman hayati. - Pada subkegiatan pengelolaan taman kehati di luar kawasan hutan, asumsi satu unit kegiatan setara satu lokasi/kecamatan sehingga kegiatan dapat direalisasikan pada 10 kecamatan.		
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3			
6	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH	- Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas, profesional, dan memiliki kompetensi sesuai bidang tugas.		
7	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH			
8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	- Koordinasi dan kerja sama antaranggota tim berjalan baik.		
9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat			
10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup			
11	Program Pengelolaan Persampahan	- Ketersediaan anggaran yang memadai. - Angkutan yang memadai selama 12 bulan berjalan. - Sarana angkutan sampah (motor R3) untuk layanan masyarakat,	- Belum seluruh wilayah Kecamatan Sangatta Selatan dapat tertangani. - Masih terdapat dua desa yang belum terlayani, yaitu Desa	

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
		terutama di kawasan perkampungan, dapat menjangkau wilayah layanan.	Teluk Singkama dan Desa Sangkima.	

7.23.1 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berfokus pada pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah. Capaian kinerja pada kedua program berada pada kategori baik. Meski begitu, pelaksanaan kegiatan masih dihadapkan pada beberapa kendala yang berkaitan dengan pekerjaan tahun berjalan dan perubahan kebijakan pengelolaan dana desa.

Tabel 7.25 Faktor Pendorong, Penghambat, dan Permasalahan Realisasi Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	- Ketepatan waktu dalam penyajian laporan keuangan.	- Adanya beberapa pekerjaan yang terhutang pada tahun berjalan.	- Ada beberapa desa yang tidak melakukan pengajuan dana operasional RT, DBH Pajak, dan Bankeu Prov.
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah			- Adanya perubahan PMK Nomor 81 Tahun 2025 sebagai perubahan atas PMK Nomor 108 Tahun 2024 tentang pengalokasian dana desa, penggunaan, dan penyaluran dana desa Tahun Anggaran 2025. - Dana non-earmark tidak disalurkan atau dibayarkan.

7.24 Badan Pendapatan Daerah

Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 pada Badan Pendapatan Daerah mencakup program-program yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah. Faktor pendorong, faktor penghambat, dan permasalahan realisasi anggaran pada masing-masing program dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 7.26 Faktor Pendorong, Penghambat, dan Permasalahan Realisasi Anggaran pada Badan Pendapatan Daerah

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
1				
2				

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Anggaran	Realisasi
3					

7.25 Badan Riset dan Inovasi Daerah

Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 pada Badan Riset dan Inovasi Daerah mencakup program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota serta program penelitian dan pengembangan daerah. Capaian kinerja pada kedua program tersebut mencapai target. Meski demikian, pelaksanaan kegiatan masih menghadapi kendala pada aspek penganggaran, waktu pelaksanaan, dan koordinasi lintas perangkat daerah.

Tabel 7.27 Faktor Pendorong, Penghambat, dan Permasalahan Realisasi Anggaran pada Badan Riset dan Inovasi Daerah

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	- Komitmen pimpinan dan tim kerja dalam pencapaian target kinerja yang telah direncanakan berjalan optimal.	- Pengalokasian anggaran gaji dan tunjangan ASN tidak dapat dialihkan anggaran.	- Pengalokasian anggaran gaji dan tunjangan ASN belum sesuai dengan kebutuhan riil.
2	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	- Keikutsertaan pengambil kebijakan dalam mengawal pelaksanaan kajian sebagai acuan dalam merumuskan rekomendasi kebijakan.	- Keterbatasan waktu pelaksanaan dan koordinasi lintas perangkat daerah belum optimal.	- Keterbatasan waktu pelaksanaan.

7.26 Inspektorat Daerah

Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 pada Inspektorat Daerah mencakup program penyelenggaraan pengawasan, program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi, serta program penunjang urusan pemerintahan daerah. Capaian kinerja pada beberapa indikator menunjukkan hasil yang baik. Meski begitu, masih terdapat kendala pada aspek kelengkapan data, mekanisme pendampingan, dan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dinamika regulasi.

Tabel 7.28 Faktor Pendorong, Penghambat, dan Permasalahan Realisasi Anggaran pada Inspektorat Daerah

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	- Adanya komitmen pimpinan dan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan	- Masih terdapat ketidaksesuaian dalam kelengkapan data atas penyampaian hasil	- Adanya penyesuaian jadwal penugasan di luar Program Kerja Pengawasan Tahunan

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
		dan kepatuhan terhadap regulasi. - Peran tim pengawasan yang berkompeten.	temuan dan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).	(PKPT), sehingga anggaran tidak terserap secara optimal.
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	- Adanya komitmen pimpinan dan dukungan sistem informasi. - Koordinasi lintas perangkat daerah.	- Perlu adanya peningkatan pembinaan terhadap mekanisme pendampingan dan asistensi.	- Adanya penugasan tambahan di luar pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan anggaran dan memengaruhi serapan anggaran.
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	- Adanya komitmen pimpinan dan dukungan terhadap pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota di internal inspektorat.	- Masih terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan dengan peraturan karena perubahan regulasi yang dinamis saat penyusunan APBD, sehingga perencanaan dinilai kurang efektif.	

7.27 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mencakup program penunjang urusan pemerintahan daerah, ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan, kewaspadaan nasional, pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, serta fasilitasi penanganan konflik sosial. Capaian kinerja pada sebagian besar program menunjukkan hasil yang baik. Meski begitu, masih ada kendala pada aspek perencanaan, regulasi, dan keterbatasan administrasi pelaksanaan kegiatan.

Tabel 7.29 Faktor Pendorong, Penghambat, dan Permasalahan Realisasi Anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
1	Program Penunjang Urusan	- Kesesuaian tim teknis dan	- Adanya efisiensi anggaran tahun	- Alokasi anggaran gaji dan tunjangan ASN

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	manajerial dalam mendukung koordinasi yang baik antara pimpinan dan bawahan. - Begitu pula sebaliknya, sehingga sasaran dan perencanaan yang matang dapat mendukung kinerja berjalan optimal.	anggaran 2025 menyebabkan banyak perencanaan yang tidak terlaksana mengakibatkan target tidak tercapai. - Perubahan kegiatan dan regulasi yang terjadi cepat menuntut penyelesaian berkelanjutan sehingga memerlukan waktu tambahan dalam pelaksanaan pekerjaan. - Koordinasi internal antarbidang masih perlu ditingkatkan, terutama dalam pemenuhan administrasi dan langkah antisipatif keputusan sehingga masih terdapat kendala dalam penyelesaian kegiatan.	belum sepenuhnya sesuai dengan jumlah belanja pegawai dan kebutuhan riil. - Kebijakan penganggaran tahun 2025 masih mengikuti pola tahun sebelumnya. - Belanja operasional kendaraan dinas tim fasilitasi panwaslu/pilkada dan kegiatan fasilitasi pemetaan wilayah rawan konflik tahun 2025 tidak dapat dibayarkan karena adanya rasionalisasi anggaran.
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	- Tersedianya WiFi dan jaringan internet yang baik dalam mendukung operasional satuan pendidikan dan kegiatan pembinaan. - Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung program fasilitasi pembinaan karakter ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan.		- Anggaran belanja perjalanan dinas tidak diserap secara optimal karena efisiensi belanja pegawai.
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui	- Antusias partisipasi kaum perempuan dan pemilih pemula		- Anggaran belanja perjalanan dinas tidak diserap secara optimal

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
	Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	dalam mengikuti pendidikan politik dan etika budaya politik sehingga capaian target mencapai 80 persen. - Kebijakan pemberian bantuan keuangan organisasi masyarakat merupakan salah satu pendorong organisasi masyarakat melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan.		karena efisiensi belanja pegawai.
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	- Kebijakan pemberian bantuan keuangan organisasi masyarakat merupakan salah satu pendorong organisasi masyarakat melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan.		- Adanya pengembalian dana hibah karena proposal bantuan hibah tidak memenuhi persyaratan administrasi atau belum melaksanakan kewajiban.
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	- Pengalokasian bantuan UMKM jelas serta dukungan pemerintah daerah dalam mendorong pemberdayaan UMKM.		- Belanja barang pemeliharaan, honorarium narasumber, dan biaya rapat tidak diserap secara optimal karena efisiensi belanja pegawai.
6	Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	- Regulasi dan payung hukum yang jelas. - Dukungan pemerintah daerah.		- Adanya sisa pembayaran pengadaan seragam.

7.28 Sekretariat DPRD

Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 pada Sekretariat DPRD mencakup program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota serta program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Capaian kinerja kedua program menunjukkan hasil yang baik. Meski begitu, pelaksanaan kegiatan masih menghadapi kendala pada kapasitas SDM, koordinasi pelaksanaan kegiatan, dan kualitas pengelolaan anggaran.

Tabel 7.30 Faktor Pendorong, Penghambat, dan Permasalahan Realisasi Anggaran pada Sekretariat DPRD

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	- Peningkatan kebutuhan operasional melalui pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang menjamin kelancaran pelayanan. - Perencanaan dan anggaran disusun secara sistematis serta penganggaran dilakukan secara transparan. - Evaluasi rutin Renja dan Renstra perangkat daerah membantu memastikan efektivitas target.	- Masih terbatasnya kapasitas dan kompetensi ASN.	- Penumpukan realisasi pada akhir tahun. - Keterlambatan pendapatan APBD akibat lemahnya koordinasi dan komitmen antara eksekutif dan legislatif. - Proses tender yang lambat. - Kurangnya tenaga ahli pengadaan dan ketakutan pengguna anggaran dalam mengeksekusi kegiatan. - Kompetensi aparatur dalam pengelolaan keuangan dan administrasi belum optimal. - Kurangnya inisiatif dan koordinasi dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. - Perubahan regulasi yang dinamis dan ketidakpastian politik anggaran memengaruhi eksekusi program.
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	- Pelaksanaan program dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD didorong oleh peran strategis Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayanan administrasi dan teknis. - Faktor pendorong utama mencakup optimalisasi fungsi	- Pelaksanaan kegiatan kerjasama belum berjalan optimal karena SDM masih belum memahami terkait tugas dan fungsinya.	- Serapan rendah dan penumpukan anggaran. - Kurangnya pemahaman terhadap aturan akuntansi pemerintahan. - Belum maksimalnya kemampuan anggota DPRD dalam bidang anggaran sehingga

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
		legislasi, anggaran, dan pengawasan melalui fasilitasi yang cepat, tepat, dan sesuai peraturan perundang-undangan.		fungsi pengawasan cenderung pasif. - Kurangnya keterlibatan masyarakat secara terstruktur dalam perencanaan anggaran DPRD. - Masih diperlukan perbaikan koordinasi antar-lembaga dan sinergi dengan pengawasan eksternal.

7.29 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mencakup program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, serta program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah. Capaian kinerja pada ketiga program tersebut menunjukkan hasil yang baik, meskipun pelaksanaan kegiatan masih dipengaruhi oleh dinamika regulasi, efisiensi anggaran, dan ketepatan proses perencanaan.

Tabel 7.31 Faktor Pendorong, Penghambat, dan Permasalahan Realisasi Anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	- Di internal Bappeda rutin diadakan rapat koordinasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan untuk membahas permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda. - Tersedianya SDM yang cakap, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, serta kemampuan yang memadai dalam menyelesaikan pekerjaan dan	- Tahun 2025 Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sehingga Bappeda melakukan efisiensi anggaran yang berpengaruh terhadap	- Beda TMT SK PPPK dengan TMT SPMT sehingga pengalokasian anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN belum sesuai dengan kebutuhan belanja riil sehingga tidak sepenuhnya terserap. - Belum optimalnya realisasi keuangan disebabkan oleh efisiensi belanja perjalanan dinas.

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
		pertanggungjawaban keuangan serta administrasi perkantoran. - Pengadministrasian dokumen aset Bappeda berjalan dengan baik serta kondisi Barang Milik Daerah di Bappeda dalam keadaan baik dan memadai sehingga menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi. - Bappeda melakukan pendampingan yang lebih intensif kepada perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah berupa Renstra, Renja, dan P-Renja OPD untuk meningkatkan kualitas perencanaan perangkat daerah sesuai dengan sektor perangkat daerah.	peningkatan kompetensi SDM di Bappeda.	
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	- Bappeda sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan daerah memiliki tiga bidang sektoral yang menyelenggarakan fungsi koordinasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. - Bappeda membagi tugas koordinasi perencanaan kepada setiap bidang sektoral. - Bappeda berupaya memberikan edukasi proses perencanaan kepada perangkat daerah, antara lain dengan menyusun schedule perencanaan,	- Perubahan regulasi yang dinamis di tingkat pusat mengharuskan daerah melakukan beberapa penyesuaian perencanaan dan mengakibatkan proses perencanaan tidak dapat tepat waktu. - Penyampaian data yang belum tepat waktu mengakibatkan proses pengendalian dan evaluasi pembangunan belum dapat berjalan optimal.	- Belum optimalnya realisasi keuangan disebabkan oleh efisiensi belanja perjalanan dinas Bappeda sebagai koordinator perencanaan. - Sebagian besar anggaran merupakan belanja perjalanan dinas rapat koordinasi dengan OPD, Provinsi, dan Kementerian/Lembaga.

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
		sosialisasi aplikasi SIPD, dan pendampingan kepada perangkat daerah dalam proses penginputan serta penyusunan perencanaan pembangunan.		
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	- Bappeda sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan daerah memiliki tiga bidang sektoral yang menyelenggarakan fungsi koordinatori penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. - Bappeda membagi tugas koordinasi perencanaan kepada setiap bidang sektoral. - Bappeda berupaya memberikan edukasi proses perencanaan kepada perangkat daerah, antara lain dengan menyusun schedule perencanaan, sosialisasi aplikasi SIPD, dan pendampingan kepada perangkat daerah dalam proses penginputan serta penyusunan perencanaan pembangunan.	- Perubahan regulasi yang dinamis di tingkat pusat mengharuskan daerah melakukan beberapa penyesuaian perencanaan dan mengakibatkan proses perencanaan tidak dapat tepat waktu. - Penyampaian data yang belum tepat waktu mengakibatkan proses pengendalian dan evaluasi pembangunan belum dapat berjalan optimal.	- Belum optimalnya realisasi keuangan disebabkan oleh efisiensi belanja perjalanan dinas Bappeda sebagai koordinator perencanaan. - Sebagian besar anggaran merupakan belanja perjalanan dinas rapat koordinasi dengan OPD, Provinsi, dan Kementerian/Lembaga. - Banyak koordinasi tidak terlaksana secara daring sehingga rapat koordinasi tidak optimal.

7.30 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai peran dalam mendukung pengembangan kapasitas kepemudaan, peningkatan prestasi dan partisipasi olahraga, penguatan kelembagaan kepramukaan, serta penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah. Dalam pelaksanaan program Tahun Anggaran 2025, perangkat daerah ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendorong dan faktor penghambat, serta menghadapi beberapa permasalahan dalam realisasi anggaran. Kondisi tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7.32 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat, dan Permasalahan Realisasi Anggaran pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Terfasilitasinya bantuan sosial kepada organisasi kepemudaan; terlaksananya fasilitasi pendidikan dan pelatihan kepemudaan; terlaksananya fasilitasi partisipasi kepemudaan; terlaksananya peningkatan kapasitas kepemudaan; serta terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan.	Kurangnya dokumen yang perlu dilengkapi pada saat pencairan anggaran.	Terdapat sisa anggaran atas pelaksanaan belanja; terdapat sisa kontrak; terdapat sisa perjalanan dinas berupa tiket dan akomodasi; terdapat anggaran hibah yang tidak terealisasi karena adanya konflik internal dalam kelembagaan organisasi dan berkas yang tidak lengkap; serta terdapat anggaran yang tidak sesuai dengan locus belanja.
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Terlaksananya pembinaan cabang olahraga prestasi; terlaksananya event olahraga masyarakat; terlaksananya event olahraga tradisional; terlaksananya peningkatan kualifikasi dan sertifikasi pelatih dan aparatur pertandingan cabang olahraga; serta terlaksananya keikutsertaan dalam multi event olahraga, yaitu POPDA se-Kalimantan Timur di Kabupaten Paser.	Kurangnya dokumen yang perlu dilengkapi pada saat pencairan anggaran.	Terdapat sisa anggaran atas pelaksanaan belanja; terdapat sisa kontrak; terdapat belanja honorarium PPK yang tidak ditagihkan karena tugas dan fungsi jabatan melekat pada KPA; terdapat sisa belanja jasa; serta terdapat sisa perjalanan dinas.
3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Terkoordinasinya pelaksanaan kegiatan dengan pihak kelembagaan kepramukaan; serta terlaksananya peningkatan kelembagaan kepramukaan di Kabupaten Kutai Timur.	Kurangnya dokumen yang perlu dilengkapi pada saat pencairan anggaran.	Terdapat sisa perjalanan dinas berupa tiket dan akomodasi; terdapat sisa anggaran atas pelaksanaan belanja; serta terdapat sisa kontrak.
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Komunikasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan yang terarah berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan.	Kurangnya dokumen yang perlu dilengkapi pada saat pencairan anggaran.	Terdapat sisa anggaran atas pelaksanaan belanja; terdapat sisa anggaran perjalanan dinas berupa tiket dan akomodasi; terdapat sisa anggaran

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
				atas penawaran; terdapat sisa belanja jasa tagihan air, pembayaran pajak kendaraan, dan jasa sewa kendaraan; terdapat sisa anggaran gaji dan tunjangan ASN dan PPPK; terdapat sisa anggaran jasa belanja sewa untuk pameran; serta terdapat sisa anggaran atas pembayaran belanja pegawai ASN dan PPPK.

7.31 Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah mempunyai peran sentral dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui fungsi koordinasi, perumusan kebijakan, fasilitasi administrasi, serta penguatan pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik lintas perangkat daerah. Dalam pelaksanaan program Tahun Anggaran 2025, Sekretariat Daerah dipengaruhi oleh sejumlah faktor penghambat dan faktor pendorong, serta menghadapi beberapa permasalahan dalam realisasi anggaran. Kondisi tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7.33 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat, dan Permasalahan Realisasi Anggaran pada Sekretariat Daerah Tahun 2025

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Proses penyusunan/penerbitan dokumen RKA, DPA sering terlambat. 2. Karena adanya ketentuan dan peraturan yang berlaku, pelaksanaan kegiatan menjadi terbatas. 3. Penginputan RUP tidak tepat waktu dan rendahnya SDM pengadaan barang dan jasa yang tersertifikasi. 4. Kurangnya tenaga perancang peraturan perundang-undangan. 5. Masih terdapat Perangkat Daerah yang belum optimal dalam penilaian mandiri kematangan organisasi daerah. 6. Survei kepuasan masyarakat masih manual,	1. Pembagian KUA PPAS, penyusunan RKA dan asistensi agar mengikuti jadwal yang telah ditentukan, serta seluruh elemen yang terlibat berada dalam satu tempat yang sama. 2. Membuat perencanaan yang tepat dan terukur serta sesuai dengan efisiensi anggaran. 3. Membuat surat edaran Sekretaris Daerah tentang percepatan penginputan RUP. 4.	Terdapat perbedaan penetapan SPMT terhitung mulai tanggal 1 Mei 2025 dengan perencanaan anggaran dikarenakan penetapan SK pengangkatan PPPK terhitung mulai tanggal 1 Maret 2025, sehingga menimbulkan silpa yang besar dari sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
		sehingga lokus masih terbatas.	Pendampingan secara intensif ke seluruh bagian di lingkungan Sekretariat Daerah. 5. Melakukan monitoring, evaluasi, dan koordinasi secara berkala ke semua SKM, sampai dengan penyusunan SOP-nya sehingga indikator IKM mengalami peningkatan. Saat ini Bagian Organisasi membuat aplikasi SKM Online agar semua SKM setiap unit kerja bisa dimonitor.	
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1. Permintaan untuk menjadi Pemuka Agama meningkat setiap tahunnya, sementara alokasi anggaran yang tersedia tetap dan tidak ada peningkatan. 2. Festival keagamaan belum dapat dilaksanakan karena perlu kajian dan perencanaan yang baik dengan dukungan alokasi anggaran yang memadai. 3. Website beasiswa Kutai Timur masih kurang memadai dan terdapat beberapa fitur yang belum update. 4. Kurangnya pemahaman penyusun dalam penentuan target sehingga capaian SPM belum terealisasi 100%. 5. Perbedaan pemahaman terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda dalam menterjemahkan IKK tersebut. 6. Untuk penilaian LPPD tahun 2024 masih	1. Terdapat pendelegasian kewenangan untuk pemberian insentif kepada pemuka agama (guru TKA/TPA) ke Bagian Kesra sehingga menambah capaian indikator pemuka agama yang menerima insentif yang awalnya hanya mengakomodir insentif dai, doja, rohaniwan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. 2. Program pemberian beasiswa Kutai Timur dianggap efektif untuk meningkatkan indikator angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.	Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat terdapat beberapa lembaga dan organisasi masyarakat yang mengusulkan hibah dan tidak tersalurkan hibahnya dikarenakan tidak memenuhi persyaratan administrasi dan/atau tidak melaksanakan kewajibannya sehingga penyaluran hibah tidak terserap 100% sesuai yang direncanakan.

No	Program	Pendorong	Penghambat	Permasalahan Realisasi Anggaran
		dalam proses penilaian, yang tertera di capaian indikator adalah hasil penilaian tahun 2022.		
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	1. Penerapan tata kelola perusahaan dan layanan belum optimal, prinsip good corporate governance (GCG) dan good governance BLUD belum sepenuhnya diterapkan. 2. Data ketersediaan dan distribusi komoditas belum terintegrasi, menyulitkan pemetaan potensi kelangkaan dan gejolak harga. 3. Penginputan RUP tidak tepat waktu. 4. Cascading serta lokasi kegiatan baru dilakukan survei lokasi pada tahun berjalan sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan.	1. Peningkatan penerapan tata kelola yang baik dan penguatan GCG pada BUMD dan pengelolaan BLUD berbasis kinerja dan pelayanan. 2. Pengembangan basis data ketersediaan dan distribusi komoditas yaitu integrasi data lintas OPD dan instansi terkait. 3. Membuat surat edaran Sekretaris Daerah tentang percepatan penginputan RUP. 4. Menentukan lokasi kegiatan dan perencanaan pada tahun N-1 kegiatan.	Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdapat honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) yang tidak ditagihkan menindaklanjuti hasil rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan.

7.1.34 Kantor Camat Sangatta Selatan

7.1.35 Kantor Camat Sangatta Utara

7.1.36 Kantor Camat Bengalon

7.1.37 Kantor Camat Kaliorang

7.1.38 Kantor Camat Sangkulirang

7.1.39 Kantor Camat Sandaran

7.1.40 Kantor Camat Kaubun

7.1.41 Kantor Camat Karangan

7.1.42 Kantor Camat Teluk Pandan

7.1.43 Kantor Camat Rantau Pulung

7.1.44 Kantor Camat Batu Ampar

7.1.45 Kantor Camat Long Mesangat

7.1.46 Kantor Camat Muara Ancalong

7.1.47 Kantor Camat Busang

7.1.48 Kantor Camat Muara Bengkal

7.1.49 Kantor Camat Muara Wahau

7.1.50 Kantor Camat Kongbeng

7.1.51 Kantor Camat Telen

BAB 8

RUMUSAN PERMASALAHAN HASIL EVALUASI

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian makro pembangunan daerah, kebijakan keuangan daerah, konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran, capaian hasil pelaksanaan RKPD, serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan pembangunan daerah, diperlukan perumusan permasalahan pembangunan daerah sebagai dasar untuk membaca isu-isu strategis yang masih dihadapi Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2025. Perumusan ini penting agar hasil evaluasi tidak berhenti pada penyajian capaian dan deviasi semata, tetapi dapat ditransformasikan menjadi dasar analitis untuk menajamkan prioritas pembangunan, memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran, serta memperkuat efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah pada periode berikutnya.

8.1 Rumusan Permasalahan Pembangunan Daerah

Rumusan permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 disusun untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan strategis yang masih dihadapi daerah berdasarkan hasil evaluasi capaian pembangunan, kebijakan keuangan daerah, konsistensi perencanaan dan penganggaran, hasil pelaksanaan RKPD, serta berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan pembangunan. Rumusan ini dimaksudkan sebagai dasar dalam penajaman prioritas pembangunan, perbaikan kualitas kebijakan, dan penguatan implementasi pembangunan pada periode berikutnya.

Tabel 8.1 Rumusan Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

No	Rumusan Permasalahan Pembangunan Daerah	Keterangan (Dasar Hasil Evaluasi)
1	Belum kuatnya ketahanan ekonomi daerah akibat masih tingginya ketergantungan terhadap sektor pertambangan.	Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2025 hanya mencapai 1,05%, turun tajam dari 9,82% pada tahun 2024. Pada saat yang sama, sektor pertambangan masih berkontribusi sebesar 70,17% terhadap PDRB Kabupaten Kutai Timur, sehingga struktur ekonomi daerah masih sangat rentan terhadap fluktuasi sektor dominan.
2	Belum meratanya manfaat pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat.	PDRB per kapita menurun dari Rp344,49 juta pada tahun 2024 menjadi Rp325,18 juta pada tahun 2025. Di sisi lain, Indeks Gini meningkat dari 0,283 menjadi 0,305, yang menunjukkan bahwa distribusi manfaat pembangunan belum sepenuhnya merata.
3	Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka dan belum optimalnya penyerapan tenaga kerja daerah.	Tingkat Pengangguran Terbuka meningkat dari 5,76% pada tahun 2024 menjadi 6,20% pada tahun 2025. Angka ini juga berada di atas rata-rata Provinsi Kalimantan Timur sebesar 5,18% dan rata-rata nasional sebesar 4,85%.
4	Penurunan angka kemiskinan belum sepenuhnya diikuti oleh perbaikan kualitas kemiskinan.	Persentase penduduk miskin turun dari 8,81% menjadi 8,07%, tetapi Indeks Kedalaman Kemiskinan meningkat dari 1,14 menjadi 1,20 dan Indeks Keparahan Kemiskinan meningkat dari 0,24 menjadi 0,26. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok miskin yang tersisa cenderung lebih rentan dan lebih sulit dientaskan.

No	Rumusan Permasalahan Pembangunan Daerah	Keterangan (Dasar Hasil Evaluasi)
5	Kemandirian fiskal daerah masih belum kuat karena Pendapatan Asli Daerah belum mencapai target dan struktur pendapatan masih sangat bergantung pada transfer.	Realisasi PAD tahun 2025 hanya mencapai Rp551.664.185.588,81 dari target Rp906.183.327.000,00 atau 60,88%. Sebaliknya, pendapatan transfer terealisasi sebesar Rp7.928.626.678.369,00 atau 98,56% dari target, sehingga struktur fiskal daerah masih sangat ditopang oleh penerimaan eksternal.
6	Kualitas belanja daerah belum sepenuhnya optimal karena komposisi belanja masih didominasi belanja operasi.	Realisasi belanja operasi mencapai Rp4.582.082.744.933,91, sedangkan realisasi belanja modal sebesar Rp2.922.216.764.257,73. Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang fiskal untuk belanja yang lebih produktif dan berdampak jangka menengah masih perlu diperkuat.
7	Konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya optimal pada seluruh perangkat daerah.	Hasil evaluasi menunjukkan masih perlunya penguatan keselarasan antara RKPD dengan RPJMD serta RKPD dengan APBD, baik pada aspek tujuan, sasaran, program, indikator kinerja, target, maupun pagu anggaran. Hal ini mengindikasikan bahwa keterpaduan perencanaan dan penganggaran masih memerlukan penyempurnaan pada beberapa perangkat daerah.
8	Belum meratanya capaian pelayanan dasar dan infrastruktur wilayah, terutama pada aspek konektivitas jalan dan dukungan infrastruktur ekonomi.	Beberapa indikator pelayanan dasar dan infrastruktur belum mencapai target, terutama persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap yang masih berada di bawah target tahunan. Hal ini menunjukkan bahwa konektivitas antarwilayah dan dukungan infrastruktur dasar masih memerlukan percepatan.
9	Sebagian indikator tujuan dan sasaran pembangunan daerah belum mencapai target tahunan RKPD.	Beberapa indikator strategis masih menunjukkan deviasi terhadap target, antara lain pada aspek ketenagakerjaan, kesehatan, kapasitas fiskal, pertumbuhan ekonomi, serta sejumlah indikator layanan dasar dan infrastruktur. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian pembangunan antar misi masih belum merata.
10	Masih terdapat kendala tata kelola pembangunan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.	Permasalahan yang masih muncul antara lain berkaitan dengan administrasi pelaksanaan, kualitas perencanaan, integrasi data, ketepatan penganggaran, dan kapasitas sumber daya manusia pelaksana. Kendala-kendala tersebut memengaruhi efektivitas implementasi pembangunan pada tingkat perangkat daerah.
11	Penguatan penataan ruang dan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang belum sepenuhnya optimal.	Meskipun indikator lingkungan hidup menunjukkan capaian yang baik, instrumen regulatif penataan ruang rinci belum sepenuhnya memenuhi target. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang masih perlu diperkuat.
12	Diversifikasi ekonomi daerah belum cukup kuat untuk sepenuhnya menahan tekanan perlambatan ekonomi agregat.	Beberapa sektor nonpertambangan memang menunjukkan pertumbuhan positif, namun belum cukup kuat untuk mengimbangi dampak perlambatan sektor pertambangan terhadap pertumbuhan ekonomi total. Hal ini menandakan

No	Rumusan Permasalahan Pembangunan Daerah	Keterangan (Dasar Hasil Evaluasi)
		bahwa transformasi struktur ekonomi daerah masih perlu dipercepat.

Berdasarkan rumusan tersebut, permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 tidak hanya berkaitan dengan capaian indikator makro yang belum optimal, tetapi juga mencakup kerentanan struktur ekonomi, belum kuatnya kapasitas fiskal daerah, belum meratanya pelayanan dasar dan infrastruktur, serta masih perlunya penguatan tata kelola pelaksanaan pembangunan. Rumusan permasalahan ini perlu dijadikan dasar dalam penajaman prioritas pembangunan, penguatan integrasi perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan efektivitas implementasi program pembangunan daerah pada periode berikutnya.

8.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Identifikasi permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 dilakukan melalui pendekatan berbasis evaluasi kinerja, dengan mencermati capaian indikator pada masing-masing urusan pemerintahan, baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib nonpelayanan dasar, urusan pilihan, maupun unsur penunjang pemerintahan daerah. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menilai efektivitas implementasi kebijakan, mengidentifikasi kesenjangan antara target dan realisasi, serta merumuskan permasalahan substantif dan teknis yang memengaruhi pencapaian target pembangunan daerah. Dengan demikian, identifikasi permasalahan ini menjadi dasar penting bagi penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran, penguatan kapasitas perangkat daerah, dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada periode berikutnya.

8.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Tabel 8.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan	Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
Pendidikan	Rasio ketersediaan satuan pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah belum optimal, terutama pada jenjang dasar dan menengah. Rata-rata lama sekolah juga belum mencapai target tahunan. Rasio ketersediaan SD/MI baru mencapai 45,96 dari target 56,68, rasio SMP/MTs 43,13 dari target 53,36, dan RLS 9,48 tahun dari target 9,55 tahun.	Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan antarwilayah masih belum memadai, terutama pada wilayah dengan keterjangkauan layanan pendidikan yang lebih rendah. Dukungan kebijakan dan penganggaran pada indikator tertentu juga belum sepenuhnya sejalan, sebagaimana terlihat pada program tertentu yang tidak memperoleh dukungan anggaran meskipun tetap memiliki target kinerja.
Kesehatan	Derajat kesehatan masyarakat belum meningkat sesuai target, terutama pada indikator Angka Harapan Hidup dan rasio layanan kesehatan dasar. Angka Harapan Hidup baru mencapai 74,87 tahun dari target 76,67 tahun, sedangkan rasio	Pemerataan akses dan kapasitas layanan kesehatan dasar masih memerlukan penguatan, khususnya pada ketersediaan fasilitas pelayanan primer dan dukungan tata kelola internal

Urusan	Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
	puskesmas/poliklinik/pustu per satuan penduduk baru mencapai 0,44 dari target 0,51.	perangkat daerah. Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan perangkat daerah juga belum mencapai target penuh.
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konektivitas wilayah dan kualitas infrastruktur dasar belum sepenuhnya memenuhi target. Persentase jalan kabupaten kondisi mantap baru mencapai 34,78% dari target 54,21%, dan persentase infrastruktur pengelolaan sampah perkotaan baru mencapai 85,00% dari target 93,08%.	Pelaksanaan pembangunan infrastruktur masih menghadapi tantangan pada aspek kapasitas pembangunan fisik, pemeliharaan, dan percepatan pelaksanaan program infrastruktur yang berpengaruh langsung pada konektivitas serta kualitas layanan permukiman dan lingkungan.
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Meskipun indikator PSU telah melampaui target, kebutuhan pemerataan kualitas perumahan dan permukiman masih menjadi isu, terutama dalam konteks peningkatan layanan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan layanan dasar lainnya. Persentase perumahan yang dilengkapi PSU mencapai 31,43% dari target 31,00%, namun persoalan kualitas permukiman belum sepenuhnya selesai.	Penguatan intervensi kawasan permukiman masih memerlukan sinkronisasi yang lebih baik antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan, terutama dalam menjaga kesinambungan pembangunan PSU, penanganan kawasan kumuh, dan dukungan sarana pendukung permukiman.
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum, kebencanaan, dan perlindungan masyarakat masih memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan operasional agar dukungan terhadap keamanan wilayah dan ketangguhan bencana lebih merata.	Keterbatasan sarana operasional, kualitas dukungan administratif, dan kebutuhan peningkatan kapasitas SDM teknis masih menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan urusan ketenteraman, ketertiban, kebakaran, dan kebencanaan.
Sosial	Penurunan angka kemiskinan belum sepenuhnya diikuti oleh perbaikan kualitas kemiskinan. Persentase penduduk miskin memang turun menjadi 8,07%, tetapi indeks kedalaman kemiskinan naik dari 1,14 menjadi 1,20 dan indeks keparahan kemiskinan naik dari 0,24 menjadi 0,26. Kondisi ini menunjukkan bahwa kelompok miskin yang tersisa cenderung lebih rentan.	Intervensi sosial masih perlu ditajamkan agar lebih efektif menasar kelompok miskin kronis dan rentan, serta lebih terintegrasi dengan program pemberdayaan ekonomi, ketenagakerjaan, dan pelayanan dasar lainnya.

8.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Tabel 8.3 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan	Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Penyerapan tenaga kerja daerah belum optimal. Tingkat Pengangguran Terbuka meningkat dari 5,76% menjadi 6,20%, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mampu menciptakan kesempatan kerja yang memadai.	Kesesuaian antara kebutuhan pasar kerja, kompetensi tenaga kerja, dan efektivitas pelatihan kerja masih perlu diperkuat agar lulusan pelatihan dan pencari kerja dapat lebih terserap secara produktif.
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penguatan kualitas pembangunan yang responsif gender dan ramah anak masih perlu ditingkatkan, terutama karena capaian pemberdayaan gender belum sepenuhnya menunjukkan penguatan yang merata pada seluruh dimensi pembangunan sosial.	Pengarusutamaan gender dan perlindungan anak masih memerlukan penguatan data, koordinasi lintas perangkat daerah, serta konsistensi pelaksanaan program agar lebih berdampak pada kualitas pembangunan manusia.
Pangan	Ketahanan pangan relatif baik, namun penguatan basis produksi dan distribusi pangan masih tetap diperlukan untuk menjaga stabilitas pangan daerah secara berkelanjutan. Ketersediaan pangan utama telah mencapai 47,52 dari target 45,66, dan NTP 120,61 dari target 109,648, namun tantangan keberlanjutan sektor pangan tetap perlu diantisipasi.	Penguatan cadangan pangan, distribusi, dan integrasi dukungan lintas sektor masih perlu diperbaiki agar capaian ketahanan pangan lebih stabil dan tidak terlalu sensitif terhadap perubahan eksternal.
Lingkungan Hidup	Kinerja lingkungan hidup menunjukkan hasil baik, tetapi penguatan instrumen pengendalian lingkungan dan pemanfaatan ruang tetap diperlukan agar kualitas lingkungan dapat dipertahankan secara berkelanjutan. IKLH mencapai 80,85 dari target 71,47, dan indeks kualitas tutupan lahan 88,71 dari target 77,60.	Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan masih memerlukan penguatan dukungan regulatif, pengawasan, dan integrasi dengan penataan ruang agar capaian lingkungan hidup tidak hanya baik secara agregat, tetapi juga kokoh secara kelembagaan.
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan layanan administrasi kependudukan masih perlu dijaga kualitas dan jangkauannya agar seluruh penduduk dapat mengakses dokumen dasar kependudukan secara merata.	Penguatan kualitas data, ketersediaan sarana layanan, dan dukungan digitalisasi layanan administrasi kependudukan masih perlu ditingkatkan untuk memperkuat layanan publik yang lebih efisien dan inklusif.
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Penguatan kapasitas kelembagaan desa, peran lembaga kemasyarakatan, dan kualitas pembangunan desa masih perlu ditingkatkan agar pembangunan desa lebih efektif dan berkelanjutan.	Pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi terhadap pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan masih memerlukan penguatan kapasitas aparatur, konsistensi pendampingan, dan dukungan administrasi yang memadai.
Pengendalian Penduduk dan	Penguatan kualitas keluarga dan pengendalian penduduk masih	Dukungan program pada aspek pembinaan keluarga, pengendalian

Urusan	Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
Keluarga Berencana	memerlukan konsistensi intervensi agar dampaknya lebih nyata terhadap pembangunan sumber daya manusia.	penduduk, dan pelayanan KB masih memerlukan penguatan koordinasi, kualitas data, dan efektivitas pelaksanaan teknis.
Perhubungan	Kinerja layanan transportasi dan konektivitas ekonomi wilayah masih memerlukan penguatan, terutama dalam mendukung mobilitas, distribusi, dan pelayanan angkutan yang lebih efektif.	Dukungan sarana transportasi, fasilitas terminal/pelabuhan, dan pengelolaan operasional layanan perhubungan masih memerlukan peningkatan agar indikator layanan transportasi dapat dicapai secara lebih optimal.
Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik	Infrastruktur teknologi dan informasi sudah menunjukkan capaian target pada beberapa indikator, namun penguatan layanan digital yang terintegrasi dan interoperabilitas layanan publik masih perlu dilanjutkan. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi jaringan fiber optik telah mencapai target 62,86%.	Penguatan integrasi data, interoperabilitas sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan masih memerlukan pendampingan teknis, peningkatan kapasitas, dan konsistensi implementasi lintas perangkat daerah.
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Pengembangan UMKM dan koperasi masih perlu diperkuat agar dapat berperan lebih besar dalam menopang diversifikasi ekonomi daerah.	Pembinaan usaha, akses pasar, kelembagaan koperasi, dan fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku usaha masih memerlukan penguatan agar hasil intervensi lebih merata dan berkelanjutan.
Penanaman Modal	Pertumbuhan investasi menunjukkan capaian baik, tetapi daya ungkit investasi terhadap transformasi ekonomi daerah belum sepenuhnya optimal. Investor berskala nasional mencapai 6.311 dari target 4.000, namun pertumbuhan ekonomi agregat tetap rendah.	Promosi investasi, penyediaan data potensi, dan kualitas pelayanan penanaman modal masih perlu terus diperkuat agar investasi yang masuk lebih berkualitas dan mendukung diversifikasi ekonomi daerah.

8.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

Tabel 8.4 Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan	Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan	Produktivitas sektor basis ekonomi masyarakat belum sepenuhnya optimal. Produksi sektor pertanian baru mencapai 35.765 ton dari target 50.630 ton, dan produksi sektor perkebunan 5.903.746,63 ton dari target 6.200.000 ton. Hal ini menunjukkan	Dukungan sarana produksi, prasarana, hilirisasi, dan kesinambungan pembinaan teknis masih perlu diperkuat agar capaian produksi lebih stabil dan lebih dekat dengan target perencanaan.

Urusan	Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
	bahwa penguatan ekonomi berbasis sektor primer masih memerlukan percepatan.	
Pariwisata	Pengembangan sektor pariwisata masih perlu diperkuat agar lebih mampu berkontribusi terhadap perekonomian daerah dan pengembangan wilayah.	Dukungan event, infrastruktur pendukung, kapasitas kelembagaan, dan penguatan destinasi wisata masih memerlukan peningkatan agar sektor ini mampu tumbuh lebih kompetitif.
Perindustrian dan Perdagangan	Pertumbuhan IKM menunjukkan capaian baik, tetapi kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan belum cukup kuat. Jumlah IKM mencapai 1.737 dari target 1.733, tetapi laju pertumbuhan ekonomi daerah hanya 1,05%.	Penguatan sarana distribusi, pasar, standarisasi, pembinaan pelaku usaha, dan dukungan terhadap rantai nilai industri dan perdagangan masih memerlukan penajaman agar lebih berdampak pada ekonomi daerah.

8.2.4 Unsur Penunjang dan Penyelenggaraan Pemerintahan

Tabel 8.5 Unsur Penunjang dan Penyelenggaraan Pemerintahan

Urusan/Unsur	Permasalahan Substantif	Permasalahan Teknis
Perencanaan Pembangunan, Keuangan, Kepegawaian, Pengawasan, dan Pemerintahan Umum	Kualitas tata kelola pemerintahan sudah menunjukkan kemajuan, tetapi masih terdapat persoalan pada efektivitas pengawasan, kualitas administrasi, dan kapasitas pelaksana. Jumlah temuan BPK tercatat 33 temuan dari target 15 temuan, dan persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal baru mencapai 46% dari target 50%.	Masih terdapat kendala berupa keterlambatan penyusunan dokumen RKA/DPA, penginputan RUP yang belum tepat waktu, keterbatasan SDM pengadaan bersertifikat, integrasi data yang belum optimal, serta keterbatasan kapasitas aparatur pada beberapa unit kerja dan kecamatan.
Kecamatan	Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembinaan desa pada tingkat kecamatan belum seluruhnya mencapai hasil optimal, terutama pada indikator pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di beberapa wilayah.	Keterbatasan SDM kecamatan, perubahan efisiensi anggaran berulang, dan kebutuhan penguatan kapasitas aparatur masih menjadi hambatan teknis yang memengaruhi efektivitas layanan pemerintahan kecamatan.

Berdasarkan identifikasi tersebut, permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 menunjukkan bahwa tantangan utama tidak hanya terletak pada belum tercapainya sebagian indikator kinerja, tetapi juga pada masih perlunya penguatan kapasitas kelembagaan, kualitas tata kelola, pemerataan pelayanan, dan efektivitas implementasi program pada berbagai urusan pemerintahan. Perbaikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah perlu diarahkan pada penajaman intervensi substantif, penguatan dukungan teknis, serta peningkatan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan di seluruh perangkat daerah.

BAB 9

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

9.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Evaluasi RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah secara umum masih berjalan dalam koridor perencanaan yang telah ditetapkan, namun belum seluruh target pembangunan dapat dicapai secara optimal. Dari sisi capaian makro, pembangunan daerah masih menunjukkan kinerja positif pada beberapa indikator, seperti meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya persentase penduduk miskin, serta terjaganya beberapa indikator lingkungan hidup. Meskipun demikian, perlambatan laju pertumbuhan ekonomi yang turun menjadi 1,05 persen, meningkatnya tingkat pengangguran terbuka menjadi 6,20 persen, naiknya Indeks Gini menjadi 0,305, serta belum optimalnya kualitas penurunan kemiskinan menunjukkan bahwa hasil pembangunan daerah masih menghadapi tantangan struktural yang cukup nyata, terutama terkait ketergantungan ekonomi terhadap sektor pertambangan, belum kuatnya diversifikasi ekonomi, dan belum meratanya distribusi manfaat pembangunan.

Dari sisi kebijakan keuangan daerah, realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai 95,63 persen dari target, namun struktur fiskal daerah masih menunjukkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pendapatan transfer. Realisasi Pendapatan Asli Daerah baru mencapai 60,88 persen dari target, sehingga kapasitas fiskal internal daerah belum cukup kuat untuk menopang kebutuhan pembangunan secara lebih mandiri. Pada saat yang sama, realisasi belanja daerah mencapai 85,92 persen, tetapi komposisi belanja masih didominasi oleh belanja operasi, sehingga ruang fiskal untuk belanja yang lebih produktif dan berdampak jangka menengah masih perlu diperkuat. Struktur pembiayaan daerah juga masih bertumpu pada SiLPA tahun sebelumnya, yang menunjukkan bahwa ketahanan fiskal daerah belum sepenuhnya didukung oleh sumber-sumber penerimaan yang stabil dan berulang.

Dari aspek pengendalian pelaksanaan dokumen perencanaan, RKPD Tahun 2025 pada dasarnya telah menunjukkan tingkat konsistensi yang tinggi terhadap RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021–2026, terutama pada aspek tujuan, sasaran, dan sebagian besar program pembangunan daerah. Namun demikian, masih terdapat beberapa ketidaksempurnaan pada tingkat indikator, target, jumlah program, dan pagu anggaran pada sebagian perangkat daerah. Demikian pula dalam hubungan antara RKPD dan APBD, belum seluruh komponen perencanaan dapat dijabarkan secara sepenuhnya konsisten pada tahap penganggaran. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas integrasi antara perencanaan dan penganggaran sudah berjalan cukup baik, tetapi masih memerlukan penguatan agar setiap sasaran, program, kegiatan, subkegiatan, indikator, target, dan pagu anggaran dapat dijabarkan secara lebih selaras dan operasional.

Dari sisi evaluasi hasil pelaksanaan RKPD, capaian pembangunan daerah pada level tujuan dan sasaran menunjukkan hasil yang bervariasi antar misi. Misi yang berkaitan dengan pembangunan manusia, ketahanan pangan, tata kelola pemerintahan, dan lingkungan hidup menunjukkan sejumlah capaian yang baik, bahkan beberapa indikator telah melampaui target. Namun demikian, masih terdapat indikator yang belum mencapai target, terutama pada bidang ketenagakerjaan, pertumbuhan ekonomi, kapasitas fiskal, konektivitas wilayah, dan sebagian layanan infrastruktur dasar. Pada tingkat perangkat daerah, capaian kinerja dan keuangan juga menunjukkan variasi, di mana sebagian perangkat daerah mampu mencapai target dengan kategori tinggi atau sangat tinggi, sedangkan sebagian lainnya masih menghadapi hambatan pada aspek dukungan anggaran, kualitas perencanaan, kapasitas SDM, integrasi data, dan efektivitas pelaksanaan program. Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah belum sepenuhnya merata antar sektor maupun antar perangkat daerah.

Selanjutnya, hasil identifikasi faktor pendorong dan penghambat menunjukkan bahwa pelaksanaan RKPD Tahun 2025 dipengaruhi oleh kombinasi faktor substantif dan teknis. Faktor pendorong antara lain berupa dukungan kebijakan daerah, keberlanjutan program prioritas, tersedianya beberapa capaian infrastruktur dasar, serta penguatan layanan digital dan tata kelola pemerintahan. Adapun faktor penghambat yang masih dominan meliputi ketergantungan ekonomi pada sektor dominan, keterbatasan kapasitas fiskal internal, belum meratanya infrastruktur dan pelayanan dasar, keterbatasan sumber daya manusia teknis pada sebagian perangkat daerah, belum optimalnya kualitas data dan integrasi sistem, serta belum sepenuhnya sinkronnya hubungan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan. Evaluasi RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 pada dasarnya menunjukkan bahwa pembangunan daerah tetap bergerak maju, tetapi masih memerlukan penguatan yang lebih serius pada aspek kualitas pertumbuhan, pemerataan hasil pembangunan, kemandirian fiskal, dan tata kelola implementasi agar pembangunan daerah pada periode berikutnya dapat berlangsung lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

9.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil Evaluasi RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025, rekomendasi yang perlu dilakukan pada periode perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berikutnya diarahkan pada beberapa aspek utama.

Pertama, pemerintah daerah perlu memperkuat transformasi dan diversifikasi ekonomi daerah secara lebih terarah untuk mengurangi ketergantungan yang masih tinggi terhadap sektor pertambangan. Penguatan tersebut perlu difokuskan pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, dan sektor-sektor produktif lain yang mampu menciptakan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat struktur ekonomi daerah secara lebih berkelanjutan. Dalam kaitan ini, pengembangan hilirisasi sumber daya alam terutama kelapa sawit, peningkatan produktivitas sektor basis, serta penguatan investasi yang berkualitas perlu terus didorong agar pertumbuhan ekonomi daerah tidak terlalu rentan terhadap fluktuasi sektor dominan.

Kedua, upaya pengurangan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan perlu diperkuat melalui kebijakan yang lebih terintegrasi dan tepat sasaran. Pemerintah daerah perlu menajamkan intervensi terhadap kelompok miskin kronis dan rentan, memperluas pelatihan kerja yang benar-benar sesuai kebutuhan pasar, mendorong penciptaan lapangan kerja produktif, serta memperkuat keterhubungan antara dunia pendidikan, pelatihan, dan dunia usaha. Pada saat yang sama, perlu diberikan perhatian lebih besar terhadap peningkatan partisipasi tenaga kerja perempuan dan penguatan usaha-usaha ekonomi masyarakat agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan penduduk.

Ketiga, pemerintah daerah perlu memperkuat kemandirian fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang lebih realistis namun progresif. Langkah ini perlu dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, pembenahan basis data objek pendapatan, perbaikan tata kelola penerimaan daerah, peningkatan kualitas pelayanan pendapatan, serta penguatan pengawasan terhadap potensi kebocoran. Di sisi belanja, kebijakan anggaran perlu semakin diarahkan pada belanja yang produktif, berdampak, dan mendukung prioritas pembangunan, sehingga komposisi belanja daerah tidak terlalu didominasi oleh belanja operasi. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat disiplin fiskal dan kehati-hatian dalam penggunaan pembiayaan daerah agar keberlanjutan pembangunan tidak terlalu bergantung pada SiLPA sebagai instrumen penyangga jangka pendek.

Keempat, kualitas integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan perlu terus diperbaiki. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa sasaran, program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target, dan pagu anggaran tersusun secara konsisten mulai dari RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, hingga APBD. Dalam kaitan ini, proses verifikasi dan sinkronisasi antardokumen perencanaan harus diperkuat sejak tahap awal penyusunan, sehingga potensi ketidaksesuaian pada tingkat perangkat daerah dapat diminimalkan. Penguatan ini juga perlu didukung oleh peningkatan kualitas perencanaan teknokratik, penganggaran berbasis kinerja, serta penggunaan data pembangunan yang lebih akurat, mutakhir, dan terintegrasi.

Kelima, pemerintah daerah perlu mempercepat pemerataan pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur wilayah, terutama pada aspek konektivitas di daerah pedalaman, dukungan infrastruktur ekonomi, serta kualitas layanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, permukiman, dan teknologi informasi. Peningkatan kualitas jalan kabupaten, perluasan jangkauan layanan kesehatan dasar, penguatan sarana dan prasarana pendidikan, serta pembangunan infrastruktur permukiman dan lingkungan perlu terus menjadi prioritas agar pemerataan hasil pembangunan antarwilayah dapat ditingkatkan. Pada saat yang sama, penguatan infrastruktur digital dan interoperabilitas layanan publik juga perlu dipercepat untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan responsif.

Keenam, kualitas tata kelola pemerintahan dan kapasitas perangkat daerah perlu terus ditingkatkan. Pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan kapasitas aparatur, memperbaiki kualitas administrasi pelaksanaan program dan kegiatan, mempercepat integrasi data pembangunan, serta meningkatkan kompetensi teknis pada bidang-bidang yang masih mengalami keterbatasan SDM. Dalam hal ini, penguatan perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pengawasan internal, serta pemanfaatan teknologi informasi perlu dilakukan secara simultan agar kinerja perangkat daerah dapat meningkat lebih merata. Khusus pada tingkat kecamatan, dukungan kapasitas aparatur dan stabilitas anggaran juga perlu diperhatikan agar fungsi koordinasi wilayah, pelayanan pemerintahan, dan pembinaan desa dapat berjalan lebih efektif.

Ketujuh, pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berbasis tata ruang perlu terus diperkuat. Keberhasilan menjaga kualitas lingkungan hidup harus dibarengi dengan percepatan regulasi tata ruang. Fokus utama perlu diarahkan pada penyelesaian RDTR untuk memberikan kepastian hukum bagi hilirisasi industri di Kutai Timur. Dengan demikian, pembangunan wilayah tidak hanya berorientasi pada percepatan pertumbuhan, tetapi juga tetap terjaga dari sisi keberlanjutan lingkungan, ketertiban pemanfaatan ruang, dan kualitas pengelolaan wilayah dalam jangka menengah maupun jangka panjang.

Secara keseluruhan, rekomendasi ini menegaskan bahwa perbaikan pembangunan ke depan harus menitikberatkan pada transformasi struktur ekonomi. Orientasi pembangunan harus bergeser dari sekadar mengejar angka pertumbuhan makro ke arah penguatan sektor-sektor yang lebih resilien terhadap gejolak global. Hal ini menuntut penguatan kualitas struktur ekonomi dan fiskal, pemerataan layanan dasar, serta penajaman konsistensi antara perencanaan dan penganggaran guna menjamin tata kelola pembangunan yang lebih efektif. Melalui langkah-langkah strategis tersebut, perencanaan periode berikutnya diharapkan mampu menjawab tantangan nyata daerah, terutama dalam memperkecil ketimpangan layanan antar-wilayah sekaligus memperkuat kemandirian fiskal Kutai Timur.